



LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2025



Pemerintah Kabupaten
Purbalingga

5202 LKPJ



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2025

  [pemkab_purbalingga](#)  [purbalinggakab.go.id](#)

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2025**



BUPATI PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrohmanirrohim, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purbalingga Tahun 2025 dapat disusun tepat waktu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purbalingga Tahun 2025 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara teknis mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah dari Kepala Daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang menjabat tahun 2021-2025 dan Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2024 yang menjabat tahun 2025-2030. Konsekuensinya adalah bahwa LKPJ Tahun 2025 disusun guna memberikan gambaran atas kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Ruang lingkup substansi LKPJ Tahun 2025 meliputi :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Kebijakan strategis yang ditetapkan ;
4. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Purbalingga Tahun 2024; dan



5. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menyajikan tingkat kesesuaian antara capaian kinerja program dengan sub kegiatan. Untuk mengukur capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi program dan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan capaian kinerja program dan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purbalingga Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi yang komprehensif untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun mendatang.

Kami menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan dan tugas pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat Purbalingga dalam mewujudkan Visi RPJMD 2025-2029.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Purbalingga, 13 Maret 2026

BUPATI PURBALINGGA,



H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	Vi
DAFTAR GAMBAR.....	Viii
DAFTAR DIAGRAM.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Dasar Hukum.....	I.1
1.2 Visi Misi Kepala Daerah.....	I.2
1.3 Data Umum Daerah.....	I.8
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.....	II.1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II.2
2.2 Perubahan Terhadap Kegiatan.....	II.14
2.3 Pengelolaan Belanja Daerah.....	II.15
2.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	II.21
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN.....	
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III.1
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III.49
3.1.2 Pelayanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III.49
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	III.50
3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang.....	III.51
3.1.5 Pengukuran Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	III.52
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	III.52
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III.101
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV.1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuankan.....	IV.1
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya.....	IV.1
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang	IV.3

Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya.....	
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	IV.4
BAB V PENUTUP.....	V.1

LAMPIRAN

Lampiran 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	1
1. Pendidikan Dindikbud.....	1
2. Kesehatan Dinkes.....	11
3. Pekerjaan Umum dan DPUPR.....	35
Penataan Ruang Dinrumkim.....	44
4. Perumahan Rakyat dan Dinrumkim.....	46
Kawasan Permukiman	
5. Tratibunlinmas Satpol PP.....	53
BPBD.....	59
6. Sosial DinsosdaldukKBP3A.....	64
Lampiran 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	75
1. Tenaga Kerja Dinnaker.....	75
2. Pemberdayaan DinsosdaldukKBP3A.....	81
Perempuan dan Perlindungan Anak	
3. Pangan DKPP.....	89
4. Pertanahan Dinrumkim.....	95
5. Lingkungan Hidup DLH.....	97
6. Administrasi Dindukcapil.....	107
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7. Pemberdayaan Dinpermasdes.....	111
Masyarakat Desa	
8. Pengendalian Penduduk DinsosdaldukKBP3A.....	120
dan Keluarga Berencana	
9. Pehubungan Dinhub.....	129

	10.	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo.....	135
	11.	Statistik	Dinkominfo.....	140
	12.	Persandian	Dinkominfo.....	140
	13.	Usaha Kecil dan Mikro	DinkopUKM.....	141
	14.	Penanaman Modal	DPMPSTSP.....	149
	15.	Perpustakaan	Dinarpus.....	156
	16.	Kearsipan	Dinarpus.....	161
	17.	Kepemudaaan dan Olahraga	Dinporapar.....	163
	18.	Kebudayaan	Dindikbud.....	171
Lampiran	3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....		171
	1.	Pertanian	Dinpertan.....	174
	2.	Perdagangan	Dinperindag.....	181
	3.	Pariwisata	Dinporapar.....	184
	4.	Perindustrian	Dinperindag.....	186
	5.	Kelautan dan Perikanan	DKPP.....	191
	6.	Transimgrasi	Dinnaker.....	195
Lampiran	3.1.4	Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang.....		195
	1.	Unsur Pendukung	Sekretariat Darah.....	195
			Sekretariat DPRD.....	206
	2.	Unsur Penunjang	BKPSDM.....	214
			Bappelitbangda.....	220
			Bakeuda.....	228
	3.	Unsur Pengawas	Inspektorat.....	235
	4.	Unsur Kewilayahan	18 Kecamatan.....	243
	5.	Unsur Pemerintahan Umum	Bakesbangpol.....	336
Lampiran	3.1.5	Pengukuran Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025.....		350

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.....	I.5
Tabel 1.2	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.....	I.8
Tabel 1.3	Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga.....	I.11
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	I.12
Tabel 1.5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	I.13
Tabel 1.6	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2025.....	I.14
Tabel 1.7	Anggan dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025.....	I.16
Tabel 1.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	I.16
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025.....	I.18
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.3
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.4
Tabel 2.3	Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.6
Tabel 2.4	Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.8
Tabel 2.5	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.10
Tabel 2.6	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.11
Tabel 2.7	Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.12
Tabel 2.8	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.16
Tabel 2.9	Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.17
Tabel 2.10	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.18
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 (Unaudited).....	II.20



Tabel 2.12	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (<i>Unaudited</i>)	II.22
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	III.4
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Iku (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	III.33
Tabel 3.3	Daftar Kebijakan Strategis yang Ditetapkan Tahun 2025.....	III.53
Tabel 3.4	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III.102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administratif Kabupaten Purbalingga.....	I.9
------------	---	-----



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025.....	I.14
Diagram 1.2	Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	I.15

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2025 disusun berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 63).
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 70);

1.2 Visi Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu (5) lima tahun ke depan merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode tahun 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga adalah

“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”.

Visi tersebut dirumuskan guna menjawab permasalahan pembangunan daerah di Purbalingga dengan memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian



tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketentraman; ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. **Purbalingga Kolaboratif** adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan *collaborative government hexahelix* antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akintabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasi diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

2. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksud agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga di dukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

3. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola

pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

4. Misi 4 : Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Strategi akan diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

Misi	Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan
	Tujuan: Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	
Misi 1:	Sasaran 1:	1. Pengembangan sektor industri dan

Misi	Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan
Bangkitkan Ekonomi Rakyat	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	perdagangan sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah
		2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berorientasi global
		3. Peningkatan investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
		4. Pengembangan sektor pertanian modern sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan
		5. Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat
		6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah
		7. Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan
		8. Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan
		9. Perwujudan kondisi sosial yang tenteram dan tertib sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
		10. Pengurangan risiko bencana sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan
		11. Pengembangan kualitas lingkungan hidup sebagai pilar utama terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan
Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	1. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan daerah
		2. Peningkatan kawasan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing

Misi	Tujuan / Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	1. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya
		2. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM	Sasaran 4: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	1. Peningkatan pendidikan yang inklusif dan bermutu sebagai pilar utama terwujudnya manusia unggul, produktif, dan berkarakter
		2. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan olahraga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global
		3. Peningkatan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan terjangkau sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia unggul
		4. Peningkatan SDM berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi daya saing daerah yang berkelanjutan
		5. Perwujudan jati diri dan daya saing SDM unggul yang berakar pada Pancasila, demokrasi, dan penghormatan HAM sebagai pilar pembangunan berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

Selanjutnya agar arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan pentahapan pembangunan. Pentahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan dan fokus tema pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025-2029**

Tema Pembangunan				
2026	2027	2028	2029	2030
Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Pemantapan Infrastruktur Dasar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Sosial Berkelanjutan	Menumbuhkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial Menuju Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera	Perwujudan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera

Sumber : RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

1.3 Data Umum Daerah

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.554 Rukun Warga (RW), dan 5.125 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga berada di wilayah Kecamatan Purbalingga. Jarak dari Kabupaten Purbalingga ke beberapa kota di sekitarnya adalah sebagai berikut :

Purbalingga – Semarang	:	191 Km
Purbalingga – Purwokerto	:	20 Km
Purbalingga – Cilacap	:	60 Km
Purbalingga – Banjarnegara	:	45 Km
Purbalingga – Wonosobo	:	75 Km
Purbalingga – Pemalang	:	55 Km

1. Data Geografis Wilayah

a. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 80.575,65 Ha, secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada posisi 101°11' BT – 109°35' BT dan 7°10' LS – 7°29'



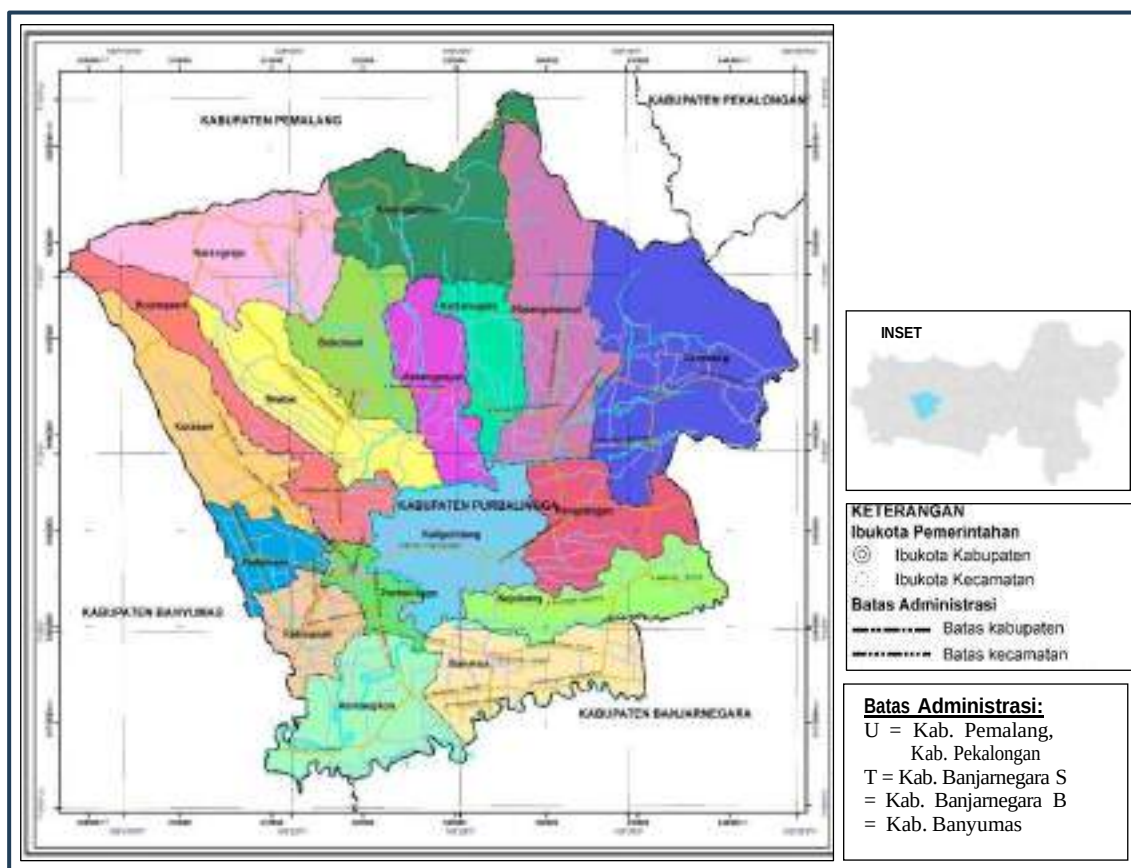
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

Gambar 1.1
Peta Administratif Kabupaten Purbalingga



b. Kondisi Topografis

Secara fisiografis, Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter

dari permukaan laut, dan menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- b. Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- c. Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- d. Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- e. Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai kondisi topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Adapun pembagian bentang alamnya yaitu :

- a. Bagian utara, merupakan wilayah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan/kemiringan lebih dari 40%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet;
- b. Bagian tengah, merupakan wilayah dengan kelerengan 25%-40%, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari;
- c. Bagian selatan, merupakan wilayah yang relatif rendah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0-25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kaligondang, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

c. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi batuan yang terdiri dari *alluvium* endapan rawa dan



danau yang tersusun oleh lempung, endapan *alluvium* gunung api, lava andesit, endapan vulkanik, batu pasir, napal, napal lempungan dan napal *globigerina*. Struktur tanah bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan, yang terdiri dari tanah alluvial, latosol, andosol, gromosol, dan regosol. Jenis dan penyebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 3 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

No.	Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
1.	I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
2.	II	Latosol	Sedang/Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karangmoncol, Rembang
3.	III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non caltic brown, mediteran.	Tinggi/Kurang Peka	-
4.	IV	Andosol, laterit, grumosol, podosol, podsolic.	Sangat Tinggi/Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
5.	V	Regosol, litosol, organosol, renzina	Amat Sangat Tinggi/Sangat Peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

d. Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti setiap setengah tahun. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 yang lima hingga sepuluh bulan secara berurutan ialah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Tanaman yang sebaiknya banyak dikembangkan dan dibudidayakan adalah tanaman palawija. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet



dengan rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C – 33°C.

e. Kondisi Hidrologi

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 (dua) macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1) Sungai Ponggawa | 8) Sungai Tungtunggunung |
| 2) Sungai Gemuruh | 9) Sungai Laban |
| 3) Sungai Kajar | 10) Sungai Kuning |
| 4) Sungai Lembereng | 11) Sungai Wotan |
| 5) Sungai Tlahab | 12) Sungai Gintung |
| 6) Sungai Soso | 13) Sungai Tambra |
| 7) Sungai Lebak | 14) Sungai Muli |

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin berdasarkan data kependudukan periode semester II Tahun 2025 hasil validasi dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA					
No	Kecamatan		Pria	Wanita	Jumlah Penduduk Per Kecamatan
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	33.03.01	KEMANGKON	34.046	33.613	67.659
2	33.03.02	BUKATEJA	42.121	41.266	83.387
3	33.03.03	KEJOBONG	27.793	27.357	55.150
4	33.03.04	KALIGONDANG	35.599	34.989	70.588
5	33.03.05	PURBALINGGA	29.923	30.061	59.984
6	33.03.06	KALIMANAH	30.082	29.649	59.731
7	33.03.07	KUTASARI	36.263	34.781	71.044
8	33.03.08	MREBET	43.085	41.421	84.506
9	33.03.09	BOBOTSARI	28.642	27.785	56.427
10	33.03.10	KARANGREJA	25.563	24.429	49.992
11	33.03.11	KARANGANYAR	22.552	21.345	43.897
12	33.03.12	KARANGMONCOL	32.131	30.405	62.536
13	33.03.13	REMBANG	37.524	35.612	73.136
14	33.03.14	BOJONGSARI	34.520	33.132	67.652



Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA					
No	Kecamatan		Pria	Wanita	Jumlah Penduduk Per Kecamatan
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah
15	33.03.15	PADAMARA	24.221	24.026	48.247
16	33.03.16	PENGADEGAN	22.333	22.038	44.371
17	33.03.17	KARANGJAMBU	15.658	14.560	30.218
18	33.03.18	KERTANEGARA	20.428	19.454	39.882
JUMLAH			542.484	525.923	1.068.407

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk (%)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1	KEMANGKON	66.878	67.659	1,17
2	BUKATEJA	82.466	83.387	1,12
3	KEJOBONG	54.257	55.150	1,65
4	KALIGONDANG	69.518	70.588	1,54
5	PURBALINGGA	59.418	59.984	0,95
6	KALIMANAH	58.866	59.731	1,47
7	KUTASARI	69.996	71.044	1,50
8	MREBET	83.132	84.506	1,65
9	BOBOTSARI	56.011	56.427	0,74
10	KARANGREJA	49.069	49.992	1,88
11	KARANGANYAR	43.383	43.897	1,18
12	KARANGMONCOL	61.749	62.536	1,27
13	REMBANG	72.235	73.136	1,25
14	BOJONGSARI	66.486	67.652	1,75
15	PADAMARA	47.460	48.247	1,66
16	PENGADEGAN	43.565	44.371	1,85
17	KARANGJAMBU	29.674	30.218	1,83
18	KERTANEGARA	38.685	39.882	3,09
JUMLAH		1.053.565	1.068.407	1,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025



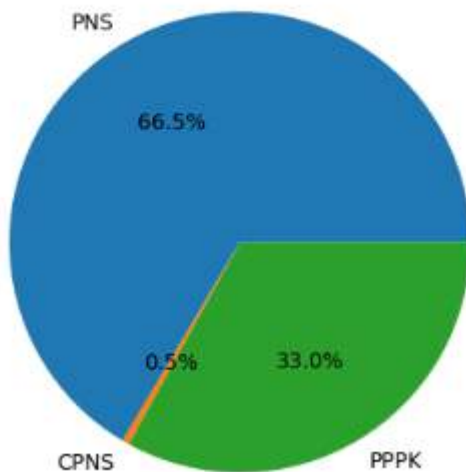
4. Kepegawaian

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimana dinyatakan secara jelas bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Berikut gambaran ASN Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 dilihat dari status kepegawaian ASN :

Diagram 1. 1 Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

Diagram Lingkaran Jumlah ASN



PNS	5.621	66,5%
CPNS	41	0,5%
PPPK	2.789	33,3%
Jumlah ASN	8.451	100%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

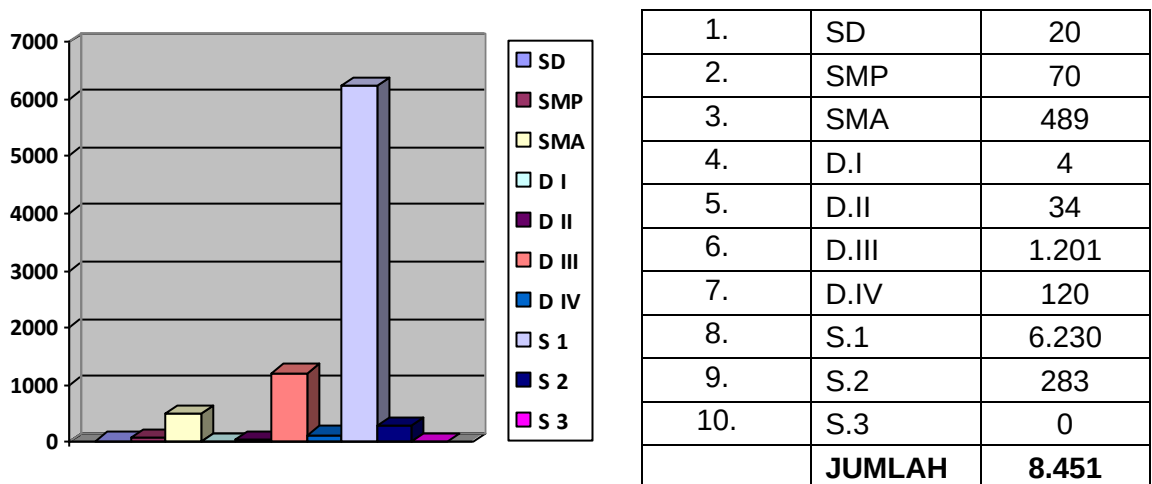
Tabel 1. 2 Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	JUMLAH ASN			JUMLAH
		PNS	CPNS	PPPK	
1.	GOLONGAN I	14	0	2	16
2.	GOLONGAN II	505	5	0	510
3.	GOLONGAN III	4.036	36	1	4.073
4.	GOLONGAN IV	1.066	0	0	1.066
5.	GOLONGAN V	0	0	36	36
6.	GOLONGAN VI	0	0	0	0
7.	GOLONGAN VII	0	0	461	461
8.	GOLONGAN VIII	0	0	0	0

NO.	GOLONGAN	JUMLAH ASN			JUMLAH
		PNS	CPNS	PPPK	
9.	GOLONGAN IX	0	0	2.230	2.230
10.	GOLONGAN X	0	0	57	57
11.	GOLONGAN XI	0	0	2	2
12.	GOLONGAN XII	0	0	0	0
13.	GOLONGAN XIII	0	0	0	0
14.	GOLONGAN XIV	0	0	0	0
15.	GOLONGAN XV	0	0	0	0
16.	GOLONGAN XVI	0	0	0	0
TOTAL					8.451

PSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Diagram 1. 2 Jumlah ASN Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah ditarget sebesar Rp.2.096.179.854.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.131.230.727.315,43 atau 101,677%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.096.179.854.000,00	2.131.156.997.315,43	101,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	436.414.333.000,00	441.527.991.649,43	101,17
4.1.01	Pajak Daerah	158.103.000.000,00	154.684.942.472,00	97,84
4.1.02	Retribusi Daerah	195.727.056.000,00	202.866.721.694,46	103,65
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.225.012.000,00	60.874.626.635,97	101,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,81
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.544.544.170.000,00	1.570.885.087.381,00	101,70
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.766.851.000,00	105.386.903.439,00	103,55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,27
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,27
	JUMLAH PENDAPATAN	2.096.179.854.000,00	2.131.230.727.315,43	101,67

Sumber : Bakeuda Kab. Purbalingga Tahun 2025

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.150.822.651.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.082.109.182.519,01 atau 96,80%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
5	BELANJA DAERAH	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83
5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.600.996.000,00	1.007.046.260.576,00	97,62
5.1.02	Belanja Barang dan	514.023.896.000,00	489.294.410.685,01	95,19



Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
	Jasa			
5.1.04	Belanja Subsidi	31.875.000,00	2.656.250,00	8,33
5.1.05	Belanja Hibah	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,27
5.2	BELANJA MODAL	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,20
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.199.574.000,00	44.498.596.917,00	92,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000,00	693.289.970,00	99,04
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,73
5.4	BELANJA TRANSFER	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,33
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.714.839.000,00	9.559.558.400,00	89,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	397.560.906.000,00	387.845.337.728,00	97,55
	JUMLAH BELANJA	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80
	SURPLUS/DEFISIT	- 54.642.797.000,00	49.121.544.796,42	-89,89

Sumber : Bakeuda Kab. Purbalingga Tahun 2025

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 pada sisi penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu serta Pencairan Dana Cadangan. Sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri atas penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Gambaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Pembiayaan direncanakan Sebelumnya sebesar Rp.15.000.000.000,- dan sesudahnya menjadi Rp.55.705.297.000,- yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebelumnya sebesar Rp.1,062,500,000,- dan sesudahnya menjadi Rp.1,062,500,000,- terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemda.



Tabel 1. 9 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	103.764.341.907,47	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

BAB II

PERUBAHAN

PENJABARAN APBD



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) fungsi yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Pengelolaan APBD yang baik tidak hanya diwujudkan secara normatif dalam bentuk kepatuhan terhadap regulasi di bidang pengelolaan keuangan, akan tetapi lebih dari itu pengelolaan APBD bisa disebut baik dan berhasil ketika mampu memenuhi fungsinya terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Perkembangan lingkungan internal dan eksternal mengharuskan Pemerintah Daerah untuk bersikap adaptif dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan pelayanan publik maupun pembangunan daerah secara optimal dan tepat sasaran. Beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal antara lain adalah perubahan postur dan target pendapatan, alokasi belanja serta struktur kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Secara khusus, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdampak pada pergeseran pemotongan dan pergeseran alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik di tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030 khususnya program **“Alus Dalane Kepenak Ngodene”** juga membutuhkan dukungan pendanaan yang optimal melalui realokasi dan *refocusing* belanja di tingkat SKPD.

Perubahan Penjabaran APBD dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor

101 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu komponen pendapatan daerah adalah PAD yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk lebih optimal dalam mengelola PAD sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Isu kemandirian keuangan daerah menjadi semakin penting jika melihat perkembangan kapasitas fiskal APBN serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan akan semakin menurun seiring dengan perubahan prioritas kebijakan nasional.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada:

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui:
 - i. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan penerapan elektronifikasi/digitalisasi pelayanan;
 - ii. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mulai dari inventarisasi data obyek dan subyek pajak atau retribusi sampai dengan pengawasan berbasis teknologi informasi.
- b. Optimalisasi BMD sebagai salah satu sumber PAD lain yang sah.
- c. Menyesuaikan target pendapatan transfer mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- d. Penyiapan *readiness criteria* sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam rangka penyaluran dana alokasi khusus serta pendapatan lainnya yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2025, target pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebesar Rp2.096.179.854.000,00 dan terealisasi sebesar



Rp2.131.156.997.315,43 atau 101,67% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.930.963.906,08 atau 1,09% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.108.226.033.409,35. Secara rinci anggaran dan realisasi per kelompok pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	436.414.333.000,00	441.527.911.649,43	101,17
4.2	Pendapatan Transfer	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,28
	Jumlah	2.096.179.854.000,00	2.131.230.727.315,43	101,67

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer memiliki capaian yang paling tinggi yaitu sebesar 101,82%, sedikit lebih tinggi dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 101,17%. Sedangkan capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercapai 99,28%.

Jika dilihat dari kontribusinya, Pendapatan Transfer masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 78,65%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,72% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendanai operasional pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Secara rinci penjelasan dari rencana dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp441.527.911.649,43 atau 101,19% dari target sebesar Rp436.414.333.000,00 sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp5.113.578.649,43. Nilai realisasi PAD tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp88.139.576.544,08 atau naik 24,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp353.388.335.105,35. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena terdapat jenis pajak baru yang mulai diberlakukan di tahun 2025 yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) sebagai implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB tahun 2025 total sebesar Rp57.827.807.000,00 atau 13,10% dari total realisasi PAD tahun 2025.

Dilihat dari komposisinya, retribusi daerah masih menjadi kontributor terbesar terhadap PAD dengan realisasi mencapai Rp202.866.721.694,46 atau 45,95% dari total PAD, yang kemudian diikuti dengan Pajak Daerah sebesar Rp154.684.942.472,00 (35,03%), Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp60.874.626.635,97 (13,79%), dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.101.620.847,00 (5,23%). Rincian target dan realisasi PAD tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4.1.01	Pajak Daerah	158.103.000.000,00	154.684.942.472,00	97,84
4.1.02	Retribusi Daerah	195.727.056.000,00	202.866.721.694,46	103,65
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32
4.1.03	Lain-lain PAD yang Sah	60.225.012.000,00	60.874.626.635,97	101,08
	Jumlah	436.414.333.000,00	441.527.911.649,43	101,17

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, salah satu arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas adalah dengan mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut serta dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus melakukan berbagai upaya peningkatan PAD antara lain melalui pemutakhiran data obyek pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan edukasi dan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta menerapkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Diantara upaya penerapan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain dengan memperluas kanal pembayaran melalui QRIS, kerjasama dengan BNI dan Bank Mandiri serta terus melakukan penambahan pemasangan alat rekam *data/tapping device* pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Parkir.

Capaian realisasi PAD yang melebihi target menjadi indikasi bahwa kebijakan peningkatan PAD yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian langkah evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan guna mendorong peningkatan PAD di masa yang akan datang, sehingga kemandirian keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Secara lebih rinci, realisasi PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perda Nomor 15 Tahun 2023, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 jenis pajak yaitu: (1) PBBP2, (2) BPHTB; (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Air Tanah; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Sarang Burung Walet; (8) Opsen PKB; (9) Opsen BBNKB.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan target pajak daerah sebesar Rp158.103.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp154.684.942.472,00 atau 97,84%. Realisasi tersebut jauh di atas realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp86.005.311.246,00, karena di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menerima pendapatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sebagai implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 15 Tahun 2023.

Meskipun realisasi pajak daerah tahun 2025 jauh di atas realisasi tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan target, hanya tercapai 97,8% atau terdapat kekurangan sebesar Rp3.418.057.528,00. Tidak

tercapainya target pajak daerah tahun 2025 disebabkan oleh realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang masing-masing hanya mencapai 79,73% dan 85,65%. Realisasi Opsen PKB yang relatif masih jauh dibawah target disebabkan oleh tingginya PKB yang masih terutang/belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu mencapai sebesar Rp57.937.168.500,00 untuk 132.041 kendaraan. Sedangkan tidak tercapainya target Opsen BBNKB disebabkan oleh rendahnya transaksi pembelian kendaraan baru di Kabupaten Purbalingga.

Jika Opsen PKB dan Opsen BBNKB dikeluarkan dari perhitungan, maka realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai sebesar Rp96.857.135.472,00 atau 111,19% dari target sebesar Rp87.113.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.851.824.226,00 atau naik 12,62% dari realisasi tahun 2024.

Rincian realisasi pajak daerah tahun 2025 per jenis pajak disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.3. Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.635.661.205,00	109,04
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	549.000.000,00	602.225.520,00	109,69
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.000.000.000,00	611.529.087,00	61,15
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	30.351.387.751,00	104,66
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.500.000.000,00	18.004.780.412,00	144,04
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	42.564.000.000,00	45.651.551.497,00	107,25
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.262.000.000,00	40.074.637.000,00	79,73
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20.728.000.000,00	17.753.170.000,00	85,65
	Jumlah	158.103.000.000,00	154.684.942.472,00	97,84

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, 5 (lima) diantaranya melampaui target bahkan realisasi BPHTB mengalami pelampauan sebesar Rp5.504.780.412,00 atau 44,04%. Sedangkan jika dilihat dari kontribusinya terhadap pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu memberikan kontribusi terbesar yaitu 29,51%, diikuti oleh Opsen PKB sebesar 25,91% dan PBB-P2 sebesar 19,62%. Dengan realisasi Pajak MBLB yang hanya mencapai 61,15%, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan langkah-langkah yang progresif sehingga mampu mendongkrak penerimaan Pajak MBLB di tahun yang akan datang.

2) Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan target Retribusi Daerah sebesar Rp195.727.056.000,00 dan terealisasi sebesar Rp202.866.721.694,46 atau 103,65%. Pelampauan target Retribusi Daerah tersebut didorong oleh realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp186.101.675.482,46 atau mengalami pelampauan sebesar Rp5.604.167.482,46.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp184.531.795.418,97, realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.334.926.275,49 atau naik 9,94%. Kenaikan tersebut didorong oleh naiknya penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari semula Rp169.873.741.088,97 di tahun 2024 menjadi Rp186.101.675.482,46 di tahun 2025, naik Rp16.227.934.393,49 atau 9,55%.

Realisasi Retribusi Daerah yang mengalami pelampauan dibandingkan target dan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 memberikan indikasi bahwa tata kelola Retribusi Daerah terus membaik dari tahun ke tahun. Rincian penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.4. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	187.473.608.000,00	193.350.194.197,46	103,13%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.497.508.000,00	186.101.675.482,46	103,10%
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.306.000.000,00	1.460.166.009,00	111,80%
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.836.000.000,00	1.695.565.000,00	92,35%
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.524.100.000,00	3.515.640.706,00	99,76%
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	76.340.000,00	0,00%
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	310.000.000,00	500.807.000,00	161,55%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.682.568.000,00	7.519.634.639,00	112,53%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.797.470.000,00	3.273.807.334,00	117,03%
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	39.456.000,00	39.816.000,00	100,91%
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.943.322.000,00	3.291.887.805,00	111,84%
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	44.553.000,00	45.450.000,00	102,01%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	184.000.000,00	194.044.000,00	105,46%
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	653.767.000,00	654.629.500,00	100,13%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.570.880.000,00	1.996.892.858,00	127,12%
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	975.000,00	0,00%
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan	1.370.880.000,00	1.696.551.458,00	123,76%

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Bangunan Gedung			
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.000,00	299.366.400,00	149,68%
	Jumlah	195.727.056.000,00	202.866.721.694,46	103,65%

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum masih menjadi kontributor terbesar terhadap realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 yaitu 95,31%, diikuti Retribusi Jasa Usaha 3,71%, dan Retribusi Perizinan Tertentu 0,98%. Secara keseluruhan dari 16 (enam belas) jenis retribusi daerah, hanya terdapat 2 (dua) jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar. Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp1.695.565.000,00 atau 92,35% dari target sebesar Rp1.836.000.000,00. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya lokasi parkir yang strategis karena relokasi tempat, penutupan usaha ataupun perubahan kewenangan pengelolaan. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2025 juga turut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat.

Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp3.515.640.706,00 atau 99,76% dari target sebesar Rp3.524.100.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Pasar antara lain disebabkan karena terdapat sewa kios yang masih terutang sampai dengan 31 Desember 2025.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba/dividen atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, baik yang berstatus BUMD milik kabupaten maupun milik Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 adalah sebesar Rp23.101.620.847,00 atau 103,32% dari target sebesar Rp22.359.265.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.449.060.132,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.652.560.715,00 atau naik 7,70%. Secara rinci realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.403.486.000,00	17.022.964.014,00	110,51
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.980.465.000,00	1.103.342.298,00	55,71
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.975.314.000,00	4.975.314.535,00	100,00
	Jumlah	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Pendapatan dividen yang berasal dari BUMD Lembaga Keuangan sebesar Rp17.022.964.014,00 merupakan dividen yang berasal dari:

- a) PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp 10.917.475.561,00
- b) Perumda BPR Artha Perwira sebesar Rp 1.308.849.179,00
- c) PT BPR BKK Jawa Tengah sebesar Rp141.487.382,00
- d) PT BPR BKK Purbalingga sebesar Rp 3.115.074.928
- e) PT BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp1.540.076.964

Pendapatan dividen yang berasal dari BUMD Aneka Usaha sebesar Rp1.103.342.298,00 merupakan dividen yang berasal Perumda Owabong sedangkan dividen yang berasal dari BUMD Air Minum sebesar Rp4.975.314.535,00 merupakan dividen yang berasal dari Perumda Air Minum Tirta Perwira.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Di tahun 2025, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp60.225.012.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.499.406.635,97 atau 100,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp61.402.168.308,38, capaian tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp902.761.672,41 atau turun 1,47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga deposito yang hanya terealisasi sebesar Rp263.013.696,00, jauh menurun dibandingkan

realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.719.681.965,00. Penurunan pendapatan bunga deposito ini terjadi karena di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya untuk mengoptimalkan dana yang ada guna mendukung program prioritas dalam RPJMD 2025-2029.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	306.000.000,00	749.507.060,00	244,94
4.1.04.05	Jasa Giro	900.000.000,00	1.378.686.781,00	153,19
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	1.000.000,00	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	263.013.696,00	52,60
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	13.900.000,00	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	53.017.876,00	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	325.503.645,00	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	18.621.220,00	-
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.254.510.000,00	6.023.747.290,00	114,64
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	53.264.502.000,00	51.672.409.067,97	97,01
	Jumlah	60.225.012.000,00	60.499.406.635,97	100,46

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

b. Pendapatan Transfer

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi

kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Target Pendapatan Transfer dalam APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp1.646.311.021.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.676.271.990.820,00 atau 101,82%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.755.200.677,00 atau turun 4,43%. Penurunan Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh turunnya TKD dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi karena pengalihan skema distribusi PKB dan BBNKB yang semula melalui bagi hasil menjadi Opsen.

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purbalingga tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.544.544.170.000,00	1.570.885.087.381,00	101,71
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.389.350.000,00	34.541.956.900,00	97,61
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	894.757.889.000,00	927.949.143.497,00	103,71
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	372.821.481.000,00	376.534.105.256,00	101,00
4.2.01.05	Dana Desa	241.575.450.000,00	231.859.881.728,00	95,98
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.766.851.000,00	105.386.903.439,00	103,56
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.754.671.000,00	99.411.763.040,00	103,82
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.012.180.000,00	5.975.140.399,00	99,38
	Jumlah	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp13.454.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.357.094.846,00 atau 99,22%. Jika

dibandingkan dengan realiasi tahun 2024, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) sebesar Rp13.349.400.496,00 dan sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp7.694.350,00.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Meskipun target pendapatan daerah tahun 2025 berhasil terlampaui, akan tetapi masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Adanya penurunan tarif pajak daerah dan dihapusnya beberapa jenis retribusi daerah sesuai UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang secara perhitungan mengakibatkan penurunan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terlihat dari terus bertambahnya nilai Piutang PBB-P2 dari tahun ke tahun.
- 3) Kondisi perekonomian yang relatif masih melemah berakibat pada turunnya realisasi pendapatan daerah yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 4) Penurunan kapasitas fiskal APBN yang mengakibatkan turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada kabupaten.
- 5) Belum optimalnya kontribusi dividen BUMD terhadap pendapatan daerah terutama karena masih terdapat BUMD yang mengalami kerugian/akumulasi kerugian.

b. Solusi

Untuk mencapai realisasi pendapatan daerah yang semakin optimal, beberapa alternatif solusi yang bisa dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan kampanye dan edukasi kepada wajib pajak secara masif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Peningkatan kolaborasi antar instansi untuk mendongkrak realisasi PAD, baik dalam proses pendataan maupun penagihan.
- 3) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui perluasan implementasi elektronifikasi/ digitalisasi.
- 4) Pemutakhiran *database* wajib dan obyek pajak serta obyek retribusi.
- 5) Optimalisasi kinerja BUMD melalui restrukturisasi usaha dan manajemen.

2.2 PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Tahun 2025 merupakan periode transisi dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029 seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025 hasil Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 mengusung visi ***“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”*** dengan misi sebagai berikut:

1. **Bangkitkan Ekonomi Rakyat:** Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian.
2. **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
3. **Reformasi Pelayanan Publik:** Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. **Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia:** Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul.

Adanya visi dan misi baru dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan perubahan program prioritas di tahun 2025 mengharuskan dilakukannya perubahan kegiatan di seluruh perangkat daerah untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja di tahun 2025.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah serta visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030, maka fokus arah kebijakan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 yaitu *“Kolaborasi dan Inovasi dalam rangka Penguatan Kapasitas Infrastruktur dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketangguhan Sosial yang Inklusif dengan Tetap Menjaga Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”*.

2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, pendukung urusan, penunjang urusan, pengawasan, pemerintahan umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Pengelolaan belanja tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan visi **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** serta mendukung pencapaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melalui:

- a. Penajaman terhadap pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan melaksanakan prioritas kepala daerah tahun 2025-2029 terutama program **“Alus Dalane Kepenak Ngodene”**.
- c. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka memperluas akses pendidikan untuk semua dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
- d. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
- e. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka mendorong inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.
- f. Pembiayaan program dan kegiatan perlindungan sosial masyarakat.
- g. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
- h. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka mendorong pendidikan keagamaan serta tempat ibadah untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah;
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong gerakan membangun desa;

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Total pagu belanja daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.150.822.651.000,00 dengan realisasi mencapai Rp2.082.035.452.519,01 atau 96,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2024, baik secara nilai maupun persentase. Secara nilai, realisasi belanja daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp82.231.935.785,14 atau turun 3,80%.

Sedangkan secara persentase capaian, realisasi belanja daerah tahun 2025 juga menurun dari semula 97,52% di tahun 2024 menjadi 96,80% di tahun 2025.

Penurunan nilai Belanja Daerah tersebut secara umum lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) baik yang berupa Dana Perimbangan maupun Dana Desa, di tengah tekanan fiskal yang cukup berat terhadap APBN.

Meskipun realisasi belanja daerah tahun 2025 hanya mencapai 96,80%, namun seluruh target kinerja tahun 2025 dapat direalisasikan termasuk program prioritas “**Alus Dalane**” yang menyasar sebanyak 130 ruas jalan kabupaten dengan realisasi anggaran mencapai kurang lebih Rp120 milyar yang terdiri dari APBD Kabupaten Purbalingga sebesar kurang lebih Rp83 Milyar, APBD Provinsi Jawa Tengah kurang lebih sebesar Rp5 Milyar dan APBN kurang lebih sebesar Rp32 Milyar.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	Belanja Operasi	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83
5.2	Belanja Modal	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,74
5.4	Belanja Transfer	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34
	Jumlah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Dilihat dari komposisi realisasi belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025, Belanja Operasi masih menjadi kontributor terbesar terhadap total realisasi Belanja Daerah yaitu mencapai 73,91%, Belanja Modal sebesar 6,99%, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,01%, dan Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 19,09%.

Dibandingkan dengan komposisi Belanja Daerah tahun 2024, komposisi Belanja Daerah tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin membaik dimana proporsi Belanja Modal terus meningkat dari semula 4,82% di tahun 2024 menjadi 6,99% di tahun 2025. Hal ini menjadi indikasi yang baik bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan maupun fasilitas publik secara keseluruhan, di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan.

Secara rinci, penjelasan atas realisasi Belanja Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan Pemerintah Daerah. Belanja Operasi dianggarkan pada semua perangkat daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa; Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.589.195.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.538.860.973.103,01 atau 96,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp98.184.239.477,14 atau turun 6,00%. Penurunan realisasi Belanja Operasi tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp23.716.528.760,00, Belanja Barang dan Jasa menurun sebesar Rp35.157.600.998,14 dan Belanja Hibah menurun sebesar Rp38.393.165.969,00. Penurunan realisasi Belanja Operasi tersebut terjadi karena di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan realokasi belanja daerah untuk mendukung program “**Alus Dalane**”.

Rincian realisasi Belanja Operasi tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.9 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.600.996.000,00	1.007.046.260.576,00	97,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.023.896.000,00	489.294.410.685,01	95,19
5.1.04	Belanja Subsidi	31.875.000,00	2.656.250,00	8,33
5.1.05	Belanja Hibah	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,27
	Jumlah	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Pegawai masih menjadi kontributor terbesar terhadap total Belanja Operasi yaitu mencapai 65,44%, sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Proporsi tersebut sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang mencapai 62,96%. Diantara salah satu faktor penyebab peningkatan proporsi belanja pegawai di tahun 2025 adalah naiknya realisasi belanja

pegawai PPPK yang mayoritas mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala di tahun 2025.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan/atau mendukung pelayanan publik. Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan porsi Belanja Modal infrastruktur pelayanan publik hingga mencapai paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat struktur APBD rata-rata masih didominasi oleh Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp151.351.640.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp145.614.833.288,00 atau 96,21%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding realisasi tahun 2024 yaitu Rp41.268.099.054,00 atau naik 39,55%. Kenaikan ini didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur publik khususnya jalan yang merupakan salah satu program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati melalui Program **“Alus Dalane”**. Peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.10. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.199.574.000,00	44.498.596.917,00	92,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000,00	693.289.970,00	99,04
	Jumlah	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi memberikan kontribusi terbesar terhadap total Belanja Modal tahun 2025 yaitu mencapai 57,49%, jauh meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya 28,20%. Dari sisi nilai, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 juga naik sangat signifikan yaitu Rp54.290.900.256,00 atau naik 184,49% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang hanya sebesar Rp29.428.006.850,00. Hal ini menjadi gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga fokus untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai salah satu pilar bagi tercapainya visi misi Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi Rp154.750.000,00 atau 7,74%. Nilai tersebut lebih rendah dari tahun 2024 sebesar Rp355.255.690,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 terdiri dari bantuan sosial untuk penderes yang terjatuh dari pohon kelapa, santuan kematian bagi masyarakat miskin, serta pengembalian atas kelebihan pendapatan tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah desa. Di tahun 2025, pagu Belanja Transfer Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebesar Rp408.275.745.000,00 dengan realisasi Rp397.404.896.128,00 atau 97,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.115.289.672,00 atau turun 5,94%. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan transfer Dana Desa dari semula Rp413.524.154.000,00 di tahun 2024 menjadi Rp387.845.337.728,00 di tahun 2025 seiring dengan penurunan alokasi TKD di tahun anggaran 2025.

Rincian realisasi Belanja Transfer tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.11. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.714.839.000,00	9.559.558.400,00	89,22
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	397.560.906.000,00	387.845.337.728,00	97,56

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Jumlah	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Bagi Hasil maupun Belanja Bantuan Keuangan sama-sama tidak tercapai 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil yang hanya sebesar Rp9.559.558.400,00 atau 89,2% dari pagu terjadi karena terdapat dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp1.155.279.800,00 pada 61 desa karena tidak memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang tidak mencapai 100% karena terdapat Dana Desa Tahap II pada 32 desa yang tidak bisa dicairkan senilai Rp9.715.568.272,00 sebagai akibat implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2025 khususnya Pasal 29B yang menyatakan bahwa Dana Desa Tahap II yang persyaratannya belum lengkap hingga batas waktu 17 September 2025 akan ditunda dan pada akhirnya tidak disalurkan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Meskipun capaian realisasi Belanja Daerah tahun 2025 sudah sangat optimal, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2025 antara lain:

- 1) Aplikasi SIPD yang belum sepenuhnya handal mengakibatkan proses pencairan anggaran sering mengalami kendala dan kurang optimal.
- 2) Banyak kegiatan yang baru dianggarkan di APBD Perubahan khususnya pekerjaan fisik-mengingat tahun 2025 adalah tahun transisi kepemimpinan-sehingga waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan relatif sedikit.

b. Solusi

Terdapat beberapa solusi yang perlu dilakukan dalam upaya mengurangi/menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri agar permasalahan aplikasi SIPD bisa segera diselesaikan.
- 2) Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sekaligus pertanggungjawaban keuangannya, agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

2.4 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka memperkuat struktur permodalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 pada sisi penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri atas penyertaan modal/investasi kepada BUMD.

2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Total rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga (*netto*) pada tahun 2025 adalah sebesar Rp54.642.797.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.642.797.111,05 atau 100%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp57.103.854.894,80 atau turun 51,10% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Penurunan pembiayaan daerah tersebut disebabkan oleh penurunan SiLPA di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024, SiLPA APBD tercatat sebesar Rp55.705.297.111,05 sedangkan SiLPA APBD TA 2023 mencapai sebesar Rp106.667.059.579,85.

Realisasi Pembiayaan Daerah di atas merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp55.705.297.111,05 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.062.500.000,00. Baik realisasi Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan sama-sama mencapai 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan seluruhnya merupakan penyertaan modal kepada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) untuk mendukung program pengembangan pembiayaan mikro (*microfinance*) kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)*.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan utama terkait pengelolaan pembiayaan daerah antara lain adalah kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang semakin melemah sehingga tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung permodalan BUMD.

b. Solusi

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu mencari sumber dana alternatif lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hibah pemerintah pusat untuk menambah penyertaan modal daerah.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) fungsi yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Pengelolaan APBD yang baik tidak hanya diwujudkan secara normatif dalam bentuk kepatuhan terhadap regulasi di bidang pengelolaan keuangan, akan tetapi lebih dari itu pengelolaan APBD bisa disebut baik dan berhasil ketika mampu memenuhi fungsinya terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Perkembangan lingkungan internal dan eksternal mengharuskan Pemerintah Daerah untuk bersikap adaptif dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan pelayanan publik maupun pembangunan daerah secara optimal dan tepat sasaran. Beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal antara lain adalah perubahan postur dan target pendapatan, alokasi belanja serta struktur kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Secara khusus, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdampak pada pergeseran pemotongan dan pergeseran alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik di tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030 khususnya program **“Alus Dalane Kepenak Ngodene”** juga membutuhkan dukungan pendanaan yang optimal melalui realokasi dan *refocusing* belanja di tingkat SKPD.

Perubahan Penjabaran APBD dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor

101 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu komponen pendapatan daerah adalah PAD yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk lebih optimal dalam mengelola PAD sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Isu kemandirian keuangan daerah menjadi semakin penting jika melihat perkembangan kapasitas fiskal APBN serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan akan semakin menurun seiring dengan perubahan prioritas kebijakan nasional.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada:

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui:
 - i. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan penerapan elektronifikasi/digitalisasi pelayanan;
 - ii. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mulai dari inventarisasi data obyek dan subyek pajak atau retribusi sampai dengan pengawasan berbasis teknologi informasi.
- b. Optimalisasi BMD sebagai salah satu sumber PAD lain yang sah.
- c. Menyesuaikan target pendapatan transfer mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- d. Penyiapan *readiness criteria* sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam rangka penyaluran dana alokasi khusus serta pendapatan lainnya yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2025, target pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebesar Rp2.096.179.854.000,00 dan terealisasi sebesar



Rp2.131.156.997.315,43 atau 101,67% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.930.963.906,08 atau 1,09% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.108.226.033.409,35. Secara rinci anggaran dan realisasi per kelompok pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	436.414.333.000,00	441.527.911.649,43	101,17
4.2	Pendapatan Transfer	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,28
	Jumlah	2.096.179.854.000,00	2.131.230.727.315,43	101,67

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer memiliki capaian yang paling tinggi yaitu sebesar 101,82%, sedikit lebih tinggi dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 101,17%. Sedangkan capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercapai 99,28%.

Jika dilihat dari kontribusinya, Pendapatan Transfer masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 78,65%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,72% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendanai operasional pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Secara rinci penjelasan dari rencana dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp441.527.911.649,43 atau 101,19% dari target sebesar Rp436.414.333.000,00 sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp5.113.578.649,43. Nilai realisasi PAD tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp88.139.576.544,08 atau naik 24,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp353.388.335.105,35. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena terdapat jenis pajak baru yang mulai diberlakukan di tahun 2025 yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) sebagai implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB tahun 2025 total sebesar Rp57.827.807.000,00 atau 13,10% dari total realisasi PAD tahun 2025.

Dilihat dari komposisinya, retribusi daerah masih menjadi kontributor terbesar terhadap PAD dengan realisasi mencapai Rp202.866.721.694,46 atau 45,95% dari total PAD, yang kemudian diikuti dengan Pajak Daerah sebesar Rp154.684.942.472,00 (35,03%), Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp60.874.626.635,97 (13,79%), dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.101.620.847,00 (5,23%). Rincian target dan realisasi PAD tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4.1.01	Pajak Daerah	158.103.000.000,00	154.684.942.472,00	97,84
4.1.02	Retribusi Daerah	195.727.056.000,00	202.866.721.694,46	103,65
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32
4.1.03	Lain-lain PAD yang Sah	60.225.012.000,00	60.874.626.635,97	101,08
	Jumlah	436.414.333.000,00	441.527.911.649,43	101,17

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, salah satu arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas adalah dengan mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut serta dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus melakukan berbagai upaya peningkatan PAD antara lain melalui pemutakhiran data obyek pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan edukasi dan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta menerapkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Diantara upaya penerapan digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain dengan memperluas kanal pembayaran melalui QRIS, kerjasama dengan BNI dan Bank Mandiri serta terus melakukan penambahan pemasangan alat rekam *data/tapping device* pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Parkir.

Capaian realisasi PAD yang melebihi target menjadi indikasi bahwa kebijakan peningkatan PAD yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian langkah evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan guna mendorong peningkatan PAD di masa yang akan datang, sehingga kemandirian keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Secara lebih rinci, realisasi PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perda Nomor 15 Tahun 2023, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 jenis pajak yaitu: (1) PBBP2, (2) BPHTB; (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Air Tanah; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Sarang Burung Walet; (8) Opsen PKB; (9) Opsen BBNKB.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan target pajak daerah sebesar Rp158.103.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp154.684.942.472,00 atau 97,84%. Realisasi tersebut jauh di atas realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp86.005.311.246,00, karena di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menerima pendapatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sebagai implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 15 Tahun 2023.

Meskipun realisasi pajak daerah tahun 2025 jauh di atas realisasi tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan target, hanya tercapai 97,8% atau terdapat kekurangan sebesar Rp3.418.057.528,00. Tidak

tercapainya target pajak daerah tahun 2025 disebabkan oleh realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang masing-masing hanya mencapai 79,73% dan 85,65%. Realisasi Opsen PKB yang relatif masih jauh dibawah target disebabkan oleh tingginya PKB yang masih terutang/belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu mencapai sebesar Rp57.937.168.500,00 untuk 132.041 kendaraan. Sedangkan tidak tercapainya target Opsen BBNKB disebabkan oleh rendahnya transaksi pembelian kendaraan baru di Kabupaten Purbalingga.

Jika Opsen PKB dan Opsen BBNKB dikeluarkan dari perhitungan, maka realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai sebesar Rp96.857.135.472,00 atau 111,19% dari target sebesar Rp87.113.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.851.824.226,00 atau naik 12,62% dari realisasi tahun 2024.

Rincian realisasi pajak daerah tahun 2025 per jenis pajak disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.3. Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.635.661.205,00	109,04
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	549.000.000,00	602.225.520,00	109,69
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	1.000.000.000,00	611.529.087,00	61,15
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	30.351.387.751,00	104,66
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.500.000.000,00	18.004.780.412,00	144,04
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	42.564.000.000,00	45.651.551.497,00	107,25
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.262.000.000,00	40.074.637.000,00	79,73
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20.728.000.000,00	17.753.170.000,00	85,65
	Jumlah	158.103.000.000,00	154.684.942.472,00	97,84

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, 5 (lima) diantaranya melampaui target bahkan realisasi BPHTB mengalami pelampauan sebesar Rp5.504.780.412,00 atau 44,04%. Sedangkan jika dilihat dari kontribusinya terhadap pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu memberikan kontribusi terbesar yaitu 29,51%, diikuti oleh Opsen PKB sebesar 25,91% dan PBB-P2 sebesar 19,62%. Dengan realisasi Pajak MBLB yang hanya mencapai 61,15%, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan langkah-langkah yang progresif sehingga mampu mendongkrak penerimaan Pajak MBLB di tahun yang akan datang.

2) Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan target Retribusi Daerah sebesar Rp195.727.056.000,00 dan terealisasi sebesar Rp202.866.721.694,46 atau 103,65%. Pelampauan target Retribusi Daerah tersebut didorong oleh realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp186.101.675.482,46 atau mengalami pelampauan sebesar Rp5.604.167.482,46.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp184.531.795.418,97, realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.334.926.275,49 atau naik 9,94%. Kenaikan tersebut didorong oleh naiknya penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari semula Rp169.873.741.088,97 di tahun 2024 menjadi Rp186.101.675.482,46 di tahun 2025, naik Rp16.227.934.393,49 atau 9,55%.

Realisasi Retribusi Daerah yang mengalami pelampauan dibandingkan target dan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 memberikan indikasi bahwa tata kelola Retribusi Daerah terus membaik dari tahun ke tahun. Rincian penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.4. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	187.473.608.000,00	193.350.194.197,46	103,13%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.497.508.000,00	186.101.675.482,46	103,10%
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.306.000.000,00	1.460.166.009,00	111,80%
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.836.000.000,00	1.695.565.000,00	92,35%
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.524.100.000,00	3.515.640.706,00	99,76%
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	76.340.000,00	0,00%
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	310.000.000,00	500.807.000,00	161,55%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.682.568.000,00	7.519.634.639,00	112,53%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.797.470.000,00	3.273.807.334,00	117,03%
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	39.456.000,00	39.816.000,00	100,91%
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.943.322.000,00	3.291.887.805,00	111,84%
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	44.553.000,00	45.450.000,00	102,01%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	184.000.000,00	194.044.000,00	105,46%
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	653.767.000,00	654.629.500,00	100,13%
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.570.880.000,00	1.996.892.858,00	127,12%
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	975.000,00	0,00%
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan	1.370.880.000,00	1.696.551.458,00	123,76%

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Bangunan Gedung			
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.000,00	299.366.400,00	149,68%
	Jumlah	195.727.056.000,00	202.866.721.694,46	103,65%

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum masih menjadi kontributor terbesar terhadap realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 yaitu 95,31%, diikuti Retribusi Jasa Usaha 3,71%, dan Retribusi Perizinan Tertentu 0,98%. Secara keseluruhan dari 16 (enam belas) jenis retribusi daerah, hanya terdapat 2 (dua) jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar. Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp1.695.565.000,00 atau 92,35% dari target sebesar Rp1.836.000.000,00. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya lokasi parkir yang strategis karena relokasi tempat, penutupan usaha ataupun perubahan kewenangan pengelolaan. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2025 juga turut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat.

Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp3.515.640.706,00 atau 99,76% dari target sebesar Rp3.524.100.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Pasar antara lain disebabkan karena terdapat sewa kios yang masih terutang sampai dengan 31 Desember 2025.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba/dividen atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, baik yang berstatus BUMD milik kabupaten maupun milik Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 adalah sebesar Rp23.101.620.847,00 atau 103,32% dari target sebesar Rp22.359.265.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.449.060.132,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.652.560.715,00 atau naik 7,70%. Secara rinci realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.403.486.000,00	17.022.964.014,00	110,51
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.980.465.000,00	1.103.342.298,00	55,71
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.975.314.000,00	4.975.314.535,00	100,00
	Jumlah	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Pendapatan dividen yang berasal dari BUMD Lembaga Keuangan sebesar Rp17.022.964.014,00 merupakan dividen yang berasal dari:

- a) PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp 10.917.475.561,00
- b) Perumda BPR Artha Perwira sebesar Rp 1.308.849.179,00
- c) PT BPR BKK Jawa Tengah sebesar Rp141.487.382,00
- d) PT BPR BKK Purbalingga sebesar Rp 3.115.074.928
- e) PT BPRS Buana Mitra Perwira sebesar Rp1.540.076.964

Pendapatan dividen yang berasal dari BUMD Aneka Usaha sebesar Rp1.103.342.298,00 merupakan dividen yang berasal Perumda Owabong sedangkan dividen yang berasal dari BUMD Air Minum sebesar Rp4.975.314.535,00 merupakan dividen yang berasal dari Perumda Air Minum Tirta Perwira.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Di tahun 2025, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp60.225.012.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.499.406.635,97 atau 100,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp61.402.168.308,38, capaian tersebut mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp902.761.672,41 atau turun 1,47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga deposito yang hanya terealisasi sebesar Rp263.013.696,00, jauh menurun dibandingkan

realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.719.681.965,00. Penurunan pendapatan bunga deposito ini terjadi karena di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya untuk mengoptimalkan dana yang ada guna mendukung program prioritas dalam RPJMD 2025-2029.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	306.000.000,00	749.507.060,00	244,94
4.1.04.05	Jasa Giro	900.000.000,00	1.378.686.781,00	153,19
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	1.000.000,00	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	263.013.696,00	52,60
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	13.900.000,00	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	53.017.876,00	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	325.503.645,00	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	18.621.220,00	-
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.254.510.000,00	6.023.747.290,00	114,64
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	53.264.502.000,00	51.672.409.067,97	97,01
	Jumlah	60.225.012.000,00	60.499.406.635,97	100,46

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

b. Pendapatan Transfer

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi

kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Target Pendapatan Transfer dalam APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp1.646.311.021.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.676.271.990.820,00 atau 101,82%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.755.200.677,00 atau turun 4,43%. Penurunan Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh turunnya TKD dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi karena pengalihan skema distribusi PKB dan BBNKB yang semula melalui bagi hasil menjadi Opsen.

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purbalingga tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.544.544.170.000,00	1.570.885.087.381,00	101,71
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.389.350.000,00	34.541.956.900,00	97,61
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	894.757.889.000,00	927.949.143.497,00	103,71
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	372.821.481.000,00	376.534.105.256,00	101,00
4.2.01.05	Dana Desa	241.575.450.000,00	231.859.881.728,00	95,98
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.766.851.000,00	105.386.903.439,00	103,56
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.754.671.000,00	99.411.763.040,00	103,82
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.012.180.000,00	5.975.140.399,00	99,38
	Jumlah	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp13.454.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.357.094.846,00 atau 99,22%. Jika

dibandingkan dengan realiasi tahun 2024, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) sebesar Rp13.349.400.496,00 dan sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp7.694.350,00.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Meskipun target pendapatan daerah tahun 2025 berhasil terlampaui, akan tetapi masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Adanya penurunan tarif pajak daerah dan dihapusnya beberapa jenis retribusi daerah sesuai UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang secara perhitungan mengakibatkan penurunan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terlihat dari terus bertambahnya nilai Piutang PBB-P2 dari tahun ke tahun.
- 3) Kondisi perekonomian yang relatif masih melemah berakibat pada turunnya realisasi pendapatan daerah yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 4) Penurunan kapasitas fiskal APBN yang mengakibatkan turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada kabupaten.
- 5) Belum optimalnya kontribusi dividen BUMD terhadap pendapatan daerah terutama karena masih terdapat BUMD yang mengalami kerugian/akumulasi kerugian.

b. Solusi

Untuk mencapai realisasi pendapatan daerah yang semakin optimal, beberapa alternatif solusi yang bisa dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan kampanye dan edukasi kepada wajib pajak secara masif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Peningkatan kolaborasi antar instansi untuk mendongkrak realisasi PAD, baik dalam proses pendataan maupun penagihan.
- 3) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui perluasan implementasi elektronifikasi/ digitalisasi.
- 4) Pemutakhiran *database* wajib dan obyek pajak serta obyek retribusi.
- 5) Optimalisasi kinerja BUMD melalui restrukturisasi usaha dan manajemen.

2.2 PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Tahun 2025 merupakan periode transisi dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029 seiring dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025 hasil Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 mengusung visi ***“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”*** dengan misi sebagai berikut:

1. **Bangkitkan Ekonomi Rakyat:** Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian.
2. **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
3. **Reformasi Pelayanan Publik:** Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. **Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia:** Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul.

Adanya visi dan misi baru dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan perubahan program prioritas di tahun 2025 mengharuskan dilakukannya perubahan kegiatan di seluruh perangkat daerah untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja di tahun 2025.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah serta visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030, maka fokus arah kebijakan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 yaitu *“Kolaborasi dan Inovasi dalam rangka Penguatan Kapasitas Infrastruktur dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketangguhan Sosial yang Inklusif dengan Tetap Menjaga Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”*.

2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, pendukung urusan, penunjang urusan, pengawasan, pemerintahan umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Pengelolaan belanja tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan visi **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** serta mendukung pencapaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melalui:

- a. Penajaman terhadap pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dan melaksanakan prioritas kepala daerah tahun 2025-2029 terutama program **“Alus Dalane Kepenak Ngodene”**.
- c. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka memperluas akses pendidikan untuk semua dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
- d. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
- e. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka mendorong inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.
- f. Pembiayaan program dan kegiatan perlindungan sosial masyarakat.
- g. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
- h. Pembiayaan program dan kegiatan dalam rangka mendorong pendidikan keagamaan serta tempat ibadah untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah;
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong gerakan membangun desa;

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Total pagu belanja daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.150.822.651.000,00 dengan realisasi mencapai Rp2.082.035.452.519,01 atau 96,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2024, baik secara nilai maupun persentase. Secara nilai, realisasi belanja daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp82.231.935.785,14 atau turun 3,80%.

Sedangkan secara persentase capaian, realisasi belanja daerah tahun 2025 juga menurun dari semula 97,52% di tahun 2024 menjadi 96,80% di tahun 2025.

Penurunan nilai Belanja Daerah tersebut secara umum lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) baik yang berupa Dana Perimbangan maupun Dana Desa, di tengah tekanan fiskal yang cukup berat terhadap APBN.

Meskipun realisasi belanja daerah tahun 2025 hanya mencapai 96,80%, namun seluruh target kinerja tahun 2025 dapat direalisasikan termasuk program prioritas “**Alus Dalane**” yang menysasar sebanyak 130 ruas jalan kabupaten dengan realisasi anggaran mencapai kurang lebih Rp120 milyar yang terdiri dari APBD Kabupaten Purbalingga sebesar kurang lebih Rp83 Milyar, APBD Provinsi Jawa Tengah kurang lebih sebesar Rp5 Milyar dan APBN kurang lebih sebesar Rp32 Milyar.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	Belanja Operasi	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83
5.2	Belanja Modal	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,74
5.4	Belanja Transfer	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34
	Jumlah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Dilihat dari komposisi realisasi belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025, Belanja Operasi masih menjadi kontributor terbesar terhadap total realisasi Belanja Daerah yaitu mencapai 73,91%, Belanja Modal sebesar 6,99%, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,01%, dan Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 19,09%.

Dibandingkan dengan komposisi Belanja Daerah tahun 2024, komposisi Belanja Daerah tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin membaik dimana proporsi Belanja Modal terus meningkat dari semula 4,82% di tahun 2024 menjadi 6,99% di tahun 2025. Hal ini menjadi indikasi yang baik bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan maupun fasilitas publik secara keseluruhan, di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan.

Secara rinci, penjelasan atas realisasi Belanja Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan Pemerintah Daerah. Belanja Operasi dianggarkan pada semua perangkat daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa; Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.589.195.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.538.860.973.103,01 atau 96,83%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp98.184.239.477,14 atau turun 6,00%. Penurunan realisasi Belanja Operasi tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp23.716.528.760,00, Belanja Barang dan Jasa menurun sebesar Rp35.157.600.998,14 dan Belanja Hibah menurun sebesar Rp38.393.165.969,00. Penurunan realisasi Belanja Operasi tersebut terjadi karena di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan realokasi belanja daerah untuk mendukung program “**Alus Dalane**”.

Rincian realisasi Belanja Operasi tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.9 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.600.996.000,00	1.007.046.260.576,00	97,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.023.896.000,00	489.294.410.685,01	95,19
5.1.04	Belanja Subsidi	31.875.000,00	2.656.250,00	8,33
5.1.05	Belanja Hibah	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,27
	Jumlah	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Pegawai masih menjadi kontributor terbesar terhadap total Belanja Operasi yaitu mencapai 65,44%, sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Proporsi tersebut sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang mencapai 62,96%. Diantara salah satu faktor penyebab peningkatan proporsi belanja pegawai di tahun 2025 adalah naiknya realisasi belanja

pegawai PPPK yang mayoritas mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala di tahun 2025.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan/atau mendukung pelayanan publik. Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan porsi Belanja Modal infrastruktur pelayanan publik hingga mencapai paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat struktur APBD rata-rata masih didominasi oleh Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp151.351.640.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp145.614.833.288,00 atau 96,21%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding realisasi tahun 2024 yaitu Rp41.268.099.054,00 atau naik 39,55%. Kenaikan ini didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur publik khususnya jalan yang merupakan salah satu program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati melalui Program **“Alus Dalane”**. Peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.10. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.199.574.000,00	44.498.596.917,00	92,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000,00	693.289.970,00	99,04
	Jumlah	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi memberikan kontribusi terbesar terhadap total Belanja Modal tahun 2025 yaitu mencapai 57,49%, jauh meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya 28,20%. Dari sisi nilai, realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 juga naik sangat signifikan yaitu Rp54.290.900.256,00 atau naik 184,49% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang hanya sebesar Rp29.428.006.850,00. Hal ini menjadi gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga fokus untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai salah satu pilar bagi tercapainya visi misi Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi Rp154.750.000,00 atau 7,74%. Nilai tersebut lebih rendah dari tahun 2024 sebesar Rp355.255.690,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 terdiri dari bantuan sosial untuk penderes yang terjatuh dari pohon kelapa, santuan kematian bagi masyarakat miskin, serta pengembalian atas kelebihan pendapatan tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah desa. Di tahun 2025, pagu Belanja Transfer Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebesar Rp408.275.745.000,00 dengan realisasi Rp397.404.896.128,00 atau 97,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.115.289.672,00 atau turun 5,94%. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan transfer Dana Desa dari semula Rp413.524.154.000,00 di tahun 2024 menjadi Rp387.845.337.728,00 di tahun 2025 seiring dengan penurunan alokasi TKD di tahun anggaran 2025.

Rincian realisasi Belanja Transfer tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.11. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.714.839.000,00	9.559.558.400,00	89,22
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	397.560.906.000,00	387.845.337.728,00	97,56

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Jumlah	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Bagi Hasil maupun Belanja Bantuan Keuangan sama-sama tidak tercapai 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil yang hanya sebesar Rp9.559.558.400,00 atau 89,2% dari pagu terjadi karena terdapat dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp1.155.279.800,00 pada 61 desa karena tidak memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang tidak mencapai 100% karena terdapat Dana Desa Tahap II pada 32 desa yang tidak bisa dicairkan senilai Rp9.715.568.272,00 sebagai akibat implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2025 khususnya Pasal 29B yang menyatakan bahwa Dana Desa Tahap II yang persyaratannya belum lengkap hingga batas waktu 17 September 2025 akan ditunda dan pada akhirnya tidak disalurkan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Meskipun capaian realisasi Belanja Daerah tahun 2025 sudah sangat optimal, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2025 antara lain:

- 1) Aplikasi SIPD yang belum sepenuhnya handal mengakibatkan proses pencairan anggaran sering mengalami kendala dan kurang optimal.
- 2) Banyak kegiatan yang baru dianggarkan di APBD Perubahan khususnya pekerjaan fisik-mengingat tahun 2025 adalah tahun transisi kepemimpinan-sehingga waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan relatif sedikit.

b. Solusi

Terdapat beberapa solusi yang perlu dilakukan dalam upaya mengurangi/menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri agar permasalahan aplikasi SIPD bisa segera diselesaikan.
- 2) Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sekaligus pertanggungjawaban keuangannya, agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

2.4 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka memperkuat struktur permodalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 pada sisi penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu sedangkan pada sisi pengeluaran terdiri atas penyertaan modal/investasi kepada BUMD.

2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Total rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga (*netto*) pada tahun 2025 adalah sebesar Rp54.642.797.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.642.797.111,05 atau 100%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp57.103.854.894,80 atau turun 51,10% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Penurunan pembiayaan daerah tersebut disebabkan oleh penurunan SiLPA di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024, SiLPA APBD tercatat sebesar Rp55.705.297.111,05 sedangkan SiLPA APBD TA 2023 mencapai sebesar Rp106.667.059.579,85.

Realisasi Pembiayaan Daerah di atas merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp55.705.297.111,05 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.062.500.000,00. Baik realisasi Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan sama-sama mencapai 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
(Unaudited)**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan seluruhnya merupakan penyertaan modal kepada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) untuk mendukung program pengembangan pembiayaan mikro (*microfinance*) kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)*.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan utama terkait pengelolaan pembiayaan daerah antara lain adalah kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang semakin melemah sehingga tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung permodalan BUMD.

b. Solusi

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu mencari sumber dana alternatif lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hibah pemerintah pusat untuk menambah penyertaan modal daerah.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAH



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati Purbalingga dari Bupati Purbalingga Masa Jabatan 2020-2025 dan Bupati Purbalingga Masa Jabatan 2025-2030. Konsekuensinya adalah bahwa LKPJ Tahun 2025 disusun guna memberikan gambaran atas kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran Visi Misi Bupati Purbalingga Masa Jabatan 2020-2025. Disamping itu tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran Visi Misi Bupati Purbalingga Masa Jabatan 2025-2030. Sehingga dalam Bab III LKPJ Bupati Purbalingga, berisi informasi terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan detail capaian Kinerja Utama Kabupaten Purbalingga berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, yaitu **Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera**.

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah selama periodisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka perlu diketahui hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah yang merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis indikator tujuan dan sasaran pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Purbalingga. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan menyusun laporan kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut terbagi dalam IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja IKU Daerah tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk mengukur Indikator Kinerja Perangkat Daerah

dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rumus pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja bersifat positif apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator kinerja bersifat negatif apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah kinerja menunjukkan semakin tinggi kinerja, rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah dari Kepala Daerah Masa Jabatan 2020-2025 dan Kepala Daerah Masa Jabatan 2025-2030 yang merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Tahun 2024. Transisi kepemimpinan tersebut membawa konsekuensi adanya penyesuaian terhadap target-target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, LKPJ Bupati Tahun 2025 disusun guna memberikan gambaran atas kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Adanya visi dan misi baru dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan perubahan program prioritas di tahun 2025 mengharuskan dilakukannya perubahan kegiatan di seluruh perangkat daerah. Penyesuaian terhadap kegiatan di seluruh perangkat daerah dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah serta visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030, maka fokus arah kebijakan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 yaitu *“Kolaborasi dan Inovasi dalam rangka Penguatan Kapasitas Infrastruktur dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketangguhan Sosial yang Inklusif dengan Tetap Menjaga Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”*

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan selanjutnya terbreakdown dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,38	12,11	97,82%	Sangat Tinggi	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Dikdas (SD)	Angka	99,85	99,38	99,53%	Sangat Tinggi	
		Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Dikdas (SMP)	Angka	96,77	96,30	99,51%	Sangat Tinggi	
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	95	79,19	83,36%	Tinggi	
		Rata-rata Nilai Literasi pada Rapot Pendidikan SD	Skor	73,58	68,77*	90,74%	Tinggi	Capaian 2025 belum rilis dari Kemen dikdasmen
		Rata-rata Nilai Literasi pada Rapot Pendidikan SMP	Skor	60,34	77,92*	129,13%	Sangat Tinggi	Capaian 2025 belum rilis dari Kemen dikdasmen
		Rata-rata Nilai Numerasi pada Rapot Pendidikan SD	Skor	83,8	57,68*	68,83%	Sedang	Capaian 2025 belum rilis dari Kemen dikdasmen
		Rata-rata Nilai Numerasi pada Rapot Pendidikan SMP	Skor	60,5	67,15*	110,99%	Sangat Tinggi	Capaian 2025 belum rilis dari Kemen dikdasmen

No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (UU No 5 Pasal 5 10 OPK Tahun 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010)	Persen	80	81,82	102,27%	Sangat Tinggi	
		Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup no.430/400 Tahun 2018 yang Dilestarikan atau Dikembangkan	Persen	73,5	80	108,84%	Sangat Tinggi	
		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	20,8	18,83	90,53%	Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	37,5	39	104,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dindikbud	Indeks	74,05	74,06	100,01%	Sangat Tinggi	
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,20	74,48	100,38%	Sangat Tinggi	
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	67,57	76,45	113,14%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	7,50	11,75	156,71%	Sangat Tinggi	
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	8,99	12,71	141,42%	Sangat Tinggi	
		Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,65	0,65	100,00%	Sangat Tinggi	
		Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk	Per 5.000 penduduk	1,67	1,72	102,94%	Sangat Tinggi	
		Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Per 100.000 penduduk	355,9	342,61	96,27%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	41	52	126,83%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinkes	Indeks	74,00	74,21	100,28%	Sangat Tinggi	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Jalan Mantap	Persen	70	72,15	103,08%	Sangat Tinggi	
		Persentase Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Persen	70	72,15	103,08%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	Persen	73,5	73,5	100,00%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani	Persen	73,5	73,5	100,00%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	53,02	53,13	100,20%	Sangat Tinggi	
		Persentase Peningkatan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	0,67	0,78	115,82%	Sangat Tinggi	
		Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	94,5	93,2	98,65%	Sangat Tinggi	
		Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	Persen	94,5	93,2	98,65%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40	40	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DPU-PR	Indeks	73,5	73,11	99,47%	Sangat Tinggi	
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	Cakupan Akses Air Minum Layak	Persen	96,53	96,53	100,00%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Persentase Peningkatan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum	Persen	0,01	0,01	52,45%	Rendah	
		Cakupan Sanitasi Layak	Persen	95,37	95,42	100,05%	Sangat Tinggi	
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga Mengakses Sanitasi	Persen	0,00	0,05	2340,11%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan	Persen	99,40	99,48	100,08%	Sangat Tinggi	
		Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	Persen	0,02	0,10	494,31%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Pemanfaatan Tanah Pemda	Persen	93,55	96,66	103,32%	Sangat Tinggi	
		Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	42	41	97,62%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINRUMKIM	Indeks	73,08	73,08	100,00%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	12,5	19,17	153,33%	Sangat Tinggi	
		Angka Pelanggaran Trantibum	Per 10.000 penduduk	16,50	14,33	86,85%	Tinggi	
		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	75,25	82,28	109,34%	Sangat Tinggi	
		Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100,00	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	38,50	42,00	109,09%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Satpol PP	Indeks	73,08	73,09	100,01%	Sangat Tinggi	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	128	130,21	101,73%	Sangat Tinggi	
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,57	0,58	101,75%	Sangat Tinggi	
		Persentase Peningkatan IKD	Persen	1,58	0,04	2,53%	Sangat Rendah	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	42	46	109,52%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP BPBD	Indeks	72	72,01	100,01%	Sangat Tinggi	
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	93,81	94,25	100,47%	Sangat Tinggi	
		Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	10,00	3,04	30,42%	Sangat Rendah	
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,92	1,05	114,13%	Sangat Tinggi	
		Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,01	2,20	109,45%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	71,00	76,97	108,41%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Point	710	698,40	98,37%	Sangat Tinggi	
		Cakupan OPD yang Melaksanakan Analisis Anggaran Responsif Gender	Persen	62,07	100	161,11%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40	29	72,50%	Sedang	
		Nilai SAKIP Dinsosdaldukbp3a	Indeks	73,5	73,21	99,61%	Sangat Tinggi	
8	Dinas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95	95,17	100,18%	Sangat Tinggi	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Orang	6.995	5616	80,29%	Tinggi	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja	Orang	430	392	91,16%	Sangat Tinggi	
		Persentase Angka Perselisihan yang terselesaikan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Persentase Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjan	Persen	88,45	83,49	94,40%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	46	46	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinnaker	Indeks	73,7	73,71	100,01%	Sangat Tinggi	
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	83,3	75,74	90,92%	Tinggi	
		Skor PPH Konsumsi	Angka	91	95,17	104,58%	Sangat Tinggi	
		PDRB sektor perikanan	Rupiah (Milyar)	585,6	574	98,02%	Sangat Tinggi	
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap, Hias, Budidaya dan Pengolahan	Rupiah	318.124.512.600	365.647.804.332	114,94%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	43	100%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DKPP	Indeks	69,38	71,51	103,07%	Sangat Tinggi	
10	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat Kualitas Air dan Udara	Angka	63,77	58,12	91,13%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara	Persen	0,58	0,57	97,43%	Sangat Tinggi	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	13,27	13,25	99,86%	Sangat Tinggi	
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	4,29	4,296	100,13%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	38,35	51,74	134,93%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Pengurangan Sampah	Persen	15,68	29,71	189,47%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Penanganan Sampah	Persen	22,67	22,03	97,19%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43,00	42	97,67%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DLH	Indeks	73,37	73,37	100,00%	Sangat Tinggi	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	93,43	96,08	102,83%	Sangat Tinggi	
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran	Persen	86,92	88,19	101,46%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Penduduk						
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	99,93	103,96	104,04%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	44	49	111,36%	Sangat Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	90	91,89	102,10%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINDUKCAPIL	Indeks	74	73,36	99,14%	Sangat Tinggi	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan Kategori Desa Mandiri dan Maju	Persen	97,70	97,32	99,61%	Sangat Tinggi	
		Jumlah Desa Naik Statusnya	Angka	29	28	96,55%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40,5	41	101,23%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINPERMASDES	Indeks	74,6	74,31	99,61%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
13	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	70	70	100,00%	Sangat Tinggi	
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	45,41	61,77	136,03%	Sangat Tinggi	
		Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	Persen	73,44	74,05	100,83%	Sangat Tinggi	
		Persentase Angkutan Umum yang Aktif	Persen	52,28	61,77	118,15%	Sangat Tinggi	
		V/C Rasio Jalan Kabupaten	Nilai	0,45	0,49	91,83%	Sangat Tinggi	
		Persentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif	Persen	50	50	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40	49	122,50%	Sangat Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	Angka	88,92	95,67	107,59%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINHUB	Indeks	73,08	73,17	100,12%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Point	3,93	3,93	100,00%	Sangat Tinggi	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	97,5	94,92	97,35%	Sangat Tinggi	
		Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Daerah	Persen	50	100	200,00%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	67	62,42	93,16%	Sangat Tinggi	
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	45	47	104,44%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	72,75	72,76	100,01%	Sangat Tinggi	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	Persen	7,10	7,23	101,82%	Sangat Tinggi	
		Persentase Koperasi Sehat	Persen	65,8	66,27	100,71%	Sangat Tinggi	
		Kontribusi UMKM terhadap Total PDRB	Persen	66,85	65,69*	98,26%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	UKM	37	39	105,41%	Sangat Tinggi	
		Jumlah Wirausaha Baru	UKM	42	48	114,29%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	41	40	97,56%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINKOP UKM	Nilai	73,33	73,26	99,90%	Sangat Tinggi	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	2,37	13,46	567,98%	Sangat Tinggi	
		Nilai Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	1.535,09	1.135,95	74,00%	Sedang	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	46	45	97,83%	Sangat Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	Angka	96,7	97,96	101,30%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DPMP TSP	Nilai	75	74,61	99,48%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	Angka	22	23	104,55%	Sangat Tinggi	
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	74,0	76,92	103,95%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Partisipasi Atlet dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Atlet	350	330	94,29%	Sangat Tinggi	
		Persentase Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	Persen	69	76,92	111,48%	Sangat Tinggi	
		Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Angka	121	125	103,31%	Sangat Tinggi	
		Persentase Partisipasi Atlet dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Persen	31	32,23	103,96%	Sangat Tinggi	
		Persentase Atlet yang Berprestasi/Mendapat Prestasi dalam Kejuaraan Olahraga Tngkat Nasional dan Provinsi	Persen	34	37,88	111,41%	Sangat Tinggi	
		Nilai PDRB Bidang Pariwisata	Rupiah (juta)	731.582,77	705.250	96,40%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Angka Kunjungan Wisata	Orang	2.650.000	3.703.641	139,76%	Sangat Tinggi	
		Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan	Persen	10,91	28,75	263,55%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39	45	115,38%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinporapar	Indeks	73,4	74,67	101,73%	Sangat Tinggi	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Point	85,25	84,74	99,40%	Sangat Tinggi	
		Kenaikan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	70	100	142,86%	Sangat Tinggi	
		Persentase Unit Kearsipan yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	70,8	84,45	119,28%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pembangunan Literasi	Point	15	14,76*	98,40%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Rasio Perpustakaan Aktif per 10.000 Penduduk	Persen	5,1	5,32	104,40%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	42	41	97,62%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINARPUS	Indeks	73,50	73,15	99,52%	Sangat Tinggi	
19	Dinas Pertanian	PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Rupiah	7.436.150.490	8.563,220.000	115,16%	Sangat Tinggi	
		Nilai Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Rupiah	3.494.000.000.000	3.720.972.428.700	106,50%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kenaikan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	Rupiah (000)	3.494.000.000.000	3.720.972.428.700	106,50%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	40	39	97,50%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINPERTAN	Indeks	72,17	72,26	100,12%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	5,80	5,92	102,09%	Sangat Tinggi	
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Rp. (juta)	8.900.000	10.151.130	114,06%	Sangat Tinggi	
		Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen	28,50	28,27	99,00%	Sangat Tinggi	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	Persen	5,8	5,00	86,21%	Tinggi	
		Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rp. (juta)	4.000.000	4.508.870	112,71%	Sangat Tinggi	
		Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	12,80	7,43	58,05%	Sedang	
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	79	80,73	102,19%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	52	120,93%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,08	73,11	100,04%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
21	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP (KABUPATEN)	Indeks	70,01	68,1*	97,27%	Sangat Rendah	*Nilai th 2024. Nilai SAKIP tahun 2025 belum rilis dari KemenPANRB
		Rata-rata nilai SAKIP OPD	Indeks	78	71,00	91,03%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP SETDA	Indeks	75,6	75,25	99,54%	Sangat Tinggi	
		Rata-rata Capaian Kinerja Utama OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesra	Persen	100	102,12	102,12%	Sangat Tinggi	
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Indeks	3,3075	3,3075*	100,00%	Sangat Tinggi	*Nilai LPPD th 2023. Nilai LPPD tahun 2025 belum rilis dari Kemendagri
		Rata-rata Capaian Kinerja Utama OPD Rumpun Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	140	140,00%	Sangat Tinggi	
22	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Point	80,9	82,60	102,10%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,91	99,91%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39	38	97,44%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	72,13	70,46	97,68%	Sangat Tinggi	
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor Komponen Perencanaan	Persen	24	22,91	95,46%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Persen	99	100	101,28%	Sangat Tinggi	
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	47	47	100%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Bappelitbangda	Indeks	80	76,41	95,51%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
24	Badan Keuangan Daerah	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Level	WTP	WTP	WTP		
		Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Persentase kenaikan PAD	Persen	2,5	24,96	998,49%	Sangat Tinggi	
		Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	44	44	100%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP BAKEUDA	Indeks	77	76,97	99,96%	Sangat Tinggi	
25	Badan Kepegawaian dan	Indeks Profesionalitas ASN	Point	80	82,54	103,18%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
	Pendidikan Sumber Daya Manusia	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Point	0,64	0,73	114,06%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	44	46	104,55%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP BKPSDM	Indeks	76,5	76,22	99,63%	Sangat Tinggi	
26	Inspektorat Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Skala	3,08	3,17	103,05%	Sangat Tinggi	
		Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	93,8	94,40	100,64%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,04	3*	98,68	Sangat Tinggi	Nilai K APIP 2024 Tahun 2025 belum rilris dari BPKP
		Nilai IEPK	Persen	2,95	2,91	98,64%	Sangat Tinggi	
		Presentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi	Persen	100,00	100	100,00%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	55	55	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Indeks	77,3	77,01	99,62%	Sangat Tinggi	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Potensi Konflik yang Diredam Tidak Menjadi Konflik	Persen	95,03	100	105,23%	Sangat Tinggi	
		Jumlah Potensi Konflik yang Dilaporkan	Potensi	35	40	114,29%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Pencegahan/Tangkal Dini Konflik	Persen	31,9	32,82	102,88%	Sangat Tinggi	
		Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	Persen	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	0,64	0,65	101,05%	Sangat Tinggi	
		Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	0,4	0,59	147,17%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43	44	102,33%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Indeks	73,1	73,22	100,16%	Sangat Tinggi	
28	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89	99,49	111,79%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	33	33	100%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	68-69,99	70,66	100,95%	Sangat Tinggi	
1	Kecamatan Purbalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94	94,16	100,17%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	44,00	129,41%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	68	69,56	102,29%	Sangat Tinggi	
2	Kecamatan Padamara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89	92,90	104,38%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	42,00	123,53%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	68	68,51	100,75%	Sangat Tinggi	
3	Kecamatan Kalimanah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89	95,67	107,49%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	34	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	63,36	63,36	100,00%	Sangat Tinggi	
4	Kecamatan Kutasari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89	99,53	111,83%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	42	123,53%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	65	66,86	102,86%	Sangat Tinggi	
5	Kecamatan Bojongsari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	91,5	93,61	102,31%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	53	155,88%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	67,26	67,26	100,00%	Sangat Tinggi	
6	Kecamatan Mrebet	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90,6	92,72	102,34%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	39,00	114,71%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	62,21	64,11	103,05%	Sangat Tinggi	
7	Kecamatan Karanganyar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94	95,77	101,88%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	22	64,71%	Rendah	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	66	68,01	103,05%	Sangat Tinggi	
8	Kecamatan Kertanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89	95,02	106,76%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	33	97,06%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	64,25	64,26	100,02%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
9	Kecamatan Rembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	93	93,93	101,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	33	41,00	124,24%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	68,81	68,81	100,00%	Sangat Tinggi	
10	Kecamatan Kejobong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	87	90,89	104,47%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	35	102,94%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	64	67,36	105,25%	Sangat Tinggi	
11	Kecamatan Pengadegan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	95,3	94,02	98,65%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	41,00	120,59%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	64,75	68,76	106,19%	Sangat Tinggi	
12	Kecamatan Kaligondang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,8	96,08	101,34%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	32	94,12%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	61	63,86	104,69%	Sangat Tinggi	
13	Kecamatan Bukateja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	95,4	93,35	97,85%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	47	138,24%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	67	67,51	100,76%	Sangat Tinggi	
14	Kecamatan Kemangkong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	98,05	93,15	95,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	39,00	114,71%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	65,5	66,86	102,08%	Sangat Tinggi	
15	Kecamatan Bobotsari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,6	91,05	96,25%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	38	111,76%	Sangat Tinggi	



No	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	67,76	67,76	100,00%	Sangat Tinggi	
16	Kecamatan Karangmoncol	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	89	99,45	111,74%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	42	123,53%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	68	67,26	98,91%	Sangat Tinggi	
17	Kecamatan Karangreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90	92,63	102,92%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	30	88,24%	Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	64	69,26	108,22%	Sangat Tinggi	
18	Kecamatan Karangjambu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	93	91,18	98,04%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	34,00	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	62	64,41	103,89%	Sangat Tinggi	



Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dan selanjutnya terbreakdown dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025)**

N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
1	Dindikbud	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Persen	86,01	84,31*	98,02%		*Capaian th 2024. Tahun 2025 belum rilis dari Kemendikdasmen
		Presentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari	Persen	78,57	81,82	104,14%	Sangat Tinggi	
		Presentase Satuan Pendidikan SD Sederajat dan SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	Persen	66,67	N/A	NA		Belum rilis dari Kemendikdasmen
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,56	7,37	97,49%	Sangat Tinggi	
		Presentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	70	80	114,29%	Sangat Tinggi	
		Presentase Cagar Budaya Yang	Persen	19,48	18,83	96,66%	Sangat	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Dilestarikan					Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka	74,05	74,06	100,01%	Sangat Tinggi	
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,23	74,48	100,34%	Sangat Tinggi	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	87,31	88,24	101,07%	Sangat Tinggi	
		Persentase penurunan kasus kematian Ibu	Persen	9,09	27,27	300,00%	Sangat Tinggi	
		Angka kematian Balita	Per 1000KH	15,3	12,71	120,38%	Sangat Tinggi	
		Prevalensi Stunting	Persen	22,1	22,3	99,10%	Sangat Tinggi	
		Angka populasi bebas penyakit tidak menular (PTM)	Persen	81,82	100	122,22%	Sangat Tinggi	
		Angka populasi bebas penyakit menular (PM)	Persen	9,09	0	0,00%	Sangat Rendah	Tidak ada Puskesmas yang memenuhi ketiga faktor perhitungan
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk	Per 1000 penduduk	2,43	2,48	102,06%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman yang memenuhi standar	Persen	88,31	86,91	98,41%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	74	74,21	100,28%	Sangat Tinggi	
3	DPUPR	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) PUPR	Angka	55,89	55,45	99,21%	Sangat Tinggi	
		Indeks Mantap Jalan	Persen	72	72,02	100,03%	Sangat Tinggi	
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	73,75	73,5	99,66%	Sangat Tinggi	
		Persentase Bangunan Gedung yang Tertib Administrasi dan Layak	Persen	70,47	66,03	93,70%	Sangat Tinggi	
		Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi Tertib Usaha	Persen	57,14	47,73	83,53%	Tinggi	
		Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	78	79	101,28%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DPUPR	Angka	73,11	73,11	100,00%	Sangat Tinggi	
4	Dinrumkim	Cakupan kawasan permukiman tidak kumuh	Persen	97,69	97,76	100,07%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Cakupan rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	91,49	92,56	101,17%	Sangat Tinggi	
		Presentase rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persen	38,8	43,36	111,75%	Sangat Tinggi	
		Presetase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	1,06	1,04	98,11%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINRUMKIM	Angka	73,08	73,08	100,00%	Sangat Tinggi	
5	Satpol PP	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Angka	67,14	67,13	99,98%	Sangat Tinggi	
		Indeks Satlinmas	Angka	50,05	64,01	127,69%	Sangat Tinggi	
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,86	76	88,52%	Tinggi	
		Indeks Kebakaran	Angka	50,05	60,00	119,88%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Satpol PP	Angka	73,09	73,09	100,00%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
6	BPBD	Indeks Resiko Bencana	Angka	116,73-116,03	130,21	112,22%	Sangat Tinggi	
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,57	0,58	101,75%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP BPBD	Nilai	72,01	72,01	100,00%	Sangat Tinggi	
7	DinsosdaldukKBP3A	Cakupan KPM Garduasi Sejahtera Mandiri	Persen	2,65	3,04	114,72%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65,08-65,11	63,03	96,81%	Sangat Tinggi	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,212-0,202	0,21	103,96%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	732,65	698,4	95,33%	Sangat Tinggi	
		Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	85,7	94,25	109,98%	Sangat Tinggi	
		Rata-rata Angka Kelahiran (TFR)	Angka	2,17-2,1	2,20	104,76%	Sangat Tinggi	
		Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Madya	Madya			
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,3	62,3	100,00%	Sangat	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
							Tinggi	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,5	73,21	99,61%	Sangat Tinggi	
8	Dinnaker	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Penduduk Usia Kerja	Persen	71,27%	71,71%	100,62%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah per Pekerja	62.830,59	61.846,00	98,43%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	Angka	73,7	73,71	100,01%	Sangat Tinggi	
9	DKPP	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80,32	75,74	94,30%	Sangat Tinggi	
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen)	Persen	8	7,72	96,50%	Sangat Tinggi	
		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	4,2-4,7	6,68%	142,13%	Sangat Tinggi	
		PDRB Sub Sektor Perikanan	Milyar Rupiah	585,6	574	98,02%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Angka	71,51	71,51	100,00%	Sangat Tinggi	
10	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	77,05	71,37	92,63%	Sangat Tinggi	
		Indeks kinerja pengelolaan sampah	Angka	35,16	41,23	117,26%	Sangat Tinggi	
		Indeks kualitas air dan udara	Angka	63,77	58,12	91,14%	Sangat Tinggi	
		Indeks kualitas lahan	Angka	13,27	13,25	99,85%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DLH	Angka	73,37	73,37	100,00%	Sangat Tinggi	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persen	93,61	93,84	100,25%	Sangat Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	90	92,18	102,42%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Angka	73,36	73,36	100,00%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa	Angka	0,7891	0,7426	94,11%	Sangat Tinggi	
		Presentase Desa Mandiri	Persen	44,3	43,3	97,74%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinpermasdes	Angka	74,6	74,31	99,61%	Sangat Tinggi	
13	Dinas Perhubungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	Angka	62,87	62,5	70,00%	Sedang	
		Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	70,73	70	98,97%	Sangat Tinggi	
		Rasio Kepadatan Lalu Lintas	SMP/Jam	0,45	0,49	91,84%	Sangat Tinggi	Indikator negatif
		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Angka	73,17	73,17	100,00%	Sangat Tinggi	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,5	N/A			Tahun 2025 maish tahap penyesuaian di kementeraian, dari penilaian SPBE ke Indeks Pemerintah Digital
		Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	Persen	18,27	27,81	152,22%	Sangat Tinggi	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,2	94,92	98,67%	Sangat Tinggi	
		Presentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	58,3	62,42	107,07%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinkominfo	Angka	72,76	72,76	100,00%	Sangat Tinggi	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	1,83	1,04	56,83%	Rendah	
		Rasio Kewirausahaan daerah	Persen	3,31	10,71	323,56%	Sangat Tinggi	
		Presentase Koperasi Sehat	Persen	65,66	66,265	100,92%	Sangat Tinggi	
		Presentase usaha mikro binaan yang menjadi wirausaha	Persen	1,15	1,15	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINKOPUKM	Angka	73,26	73,26	100,00%	Sangat Tinggi	
16	Dinas Penanaman Modal dan	Presentase Capaian Realisasi Investasi	Persen	100	103,93	103,93%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	96,68	97,96	101,32%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	75	74,61	99,48%	Sangat Tinggi	
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata	Milyar Rupiah	3.086,99	3.050,49	98,82%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	54	63,23	117,09%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0,317	0,435	137,22%	Sangat Tinggi	
		Presentase Capaian Kunjungan Wisatawan	Persen	96,67	135,61	140,28%	Sangat Tinggi	
		Presentase Capaian Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	98,73	105,06	106,41%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Daya Saing Kepemudaan	Persen	70,59	71,88	101,83%	Sangat Tinggi	
		Tingkat Daya Saing Keolahragaan	Persen	36,84	37,88	102,82%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinporapar	Angka	74,67	74,67	100,00%	Sangat Tinggi	
18	Dinas Kearsipan	Indeks Kearsipan	Angka	85,25	84,74	99,40%	Sangat	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
	dan Perpustakaan						Tinggi	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	70,4	14,07	19,99%	Sangat Rendah	Terdapat perubahan sistem penialain dari Perpusnas dalam hal unsur pembentuk IPLM
		Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Internal Kearsipan	Persen	88,5	74,34	84,00%	Tinggi	
		Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Angka	66	56,36	85,45%	Tinggi	
		Nilai SAKIP Dinarspus	Angka	73,15	73,15	100,00%	Sangat Tinggi	
19	Dinas Pertanian	PDRB Sub Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	8.105,64	8,563,22	105,65%	Sangat Tinggi	
		Nilai Produksi Pertanian	Milyar Rupiah	7.974,46	8.410,25	105,46%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP DINPERTAN	Angka	72,26	72,26	100,00%	Sangat Tinggi	
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,35	5	93,46%	Sangat Tinggi	
		2. PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	4.429,82	4.508,87	101,78%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		3. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,25	5,92	139,29%	Sangat Tinggi	
		4. PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	9.713,87	10.151,13	104,50%	Sangat Tinggi	
		5. Nilai SAKIP Dinperindag	Indeks	73,11	73,11	100,00%	Sangat Tinggi	
21	Sekretariat Daerah	1. Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	70,01	68,1*	97,27%	Sangat Tinggi	*Nilai SAKIP tahun 2024 karena tahun 2025 belum rilis dari KemenPANRB
		2. Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Angka	3,00	3,307*	102,57%	Sangat Tinggi	Nilai LPPD tahun 2023, karena tahun 2025 belum rilis dari Kemendagri
		3. Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	39,00	41,26	105,79%	Sangat Tinggi	
22	Sekretariat DPRD	1. Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	81	82,6	101,98%	Sangat Tinggi	
		2. Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,87	99,87%	Sangat Tinggi	
		3. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,13	70,46	97,68%	Sangat Tinggi	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	Angka	73,15	83,36	113,96%	Sangat Tinggi	
		Skor Perencanaan dalam SAKIP	Angka	23,34	22,91	98,16%	Sangat Tinggi	
		Kapabilitas Inovasi	Angka	2,4	2,57	107,08%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76,5	76,41	99,88%	Sangat Tinggi	
24	Badan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	66,5	65,7751	98,91%	Sangat Tinggi	
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rp.	436.414.333.000	441.527.991.694,43	101,17%	Sangat Tinggi	
		Status Opini BPK Terhadap LKPD	Level	WTP	WTP			
		Nilai SAKIP Bakeuda	Angka	76,97	76,97	100,00%	Sangat Tinggi	
25	BKPSDM	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81	82,54	101,90%	Sangat Tinggi	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Angka	0,64	0,73	114,06%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP BKPSDM	Angka	76,5	76,22	99,63%	Sangat Tinggi	
26	Inspektorat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,08	3,174	103,05%	Sangat Tinggi	
		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,04	3.00*	98,68%	Sangat Tinggi	Nilai K APIP th 2024 Tahun 2025 Belum rilis dari BPKP
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,95	2,91	98,64%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Angka	77,3	77,01	99,62%	Sangat Tinggi	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Harmoni	Persen	6,75	6,75	100,00%	Sangat Tinggi	
		Presentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	97,5	100	102,56%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Bakesbangpol	Angka	73,22	73,22	100,00%	Sangat Tinggi	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
28	Kecamatan (18 Kecamatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	100	94,57	94,57%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon	Angka	3 – 5	3,30	65,95%	Rendah	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon	Angka	62,0 - 66,5	66,85	100,53%	Sangat Tinggi	
1	Kecamatan Kemangkon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	98,8	98,01	99,20%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon	Angka	3,22	3,667	113,88%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon	Angka	66,86	66,68	99,73%	Sangat Tinggi	
2	Kecamatan Kalimanah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	96	95,67	99,66%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kalimanah	Angka	3	1,288	42,93%	Sangat Rendah	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kalimanah	Angka	63,6	63,36	99,62%	Sangat Tinggi	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
3	Kecamatan Rembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	93	94,35	101,45%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang	Angka	3,52	3,943	112,02%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	Angka	68,81	68,81	100,00%	Sangat Tinggi	
4	Kecamatan Bukateja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92,75	94,005	101,35%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bukateja	Angka	4,53	4,438	97,97%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Bukateja	Angka	67,6	67,61	100,01%	Sangat Tinggi	
5	Kecamatan Pengadegan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	95,3	94,06	94,06%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pengadegan	Angka	3	2,773	92,43%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Pengadegan	Angka	64,75	68,76	106,19%	Sangat Tinggi	



N O	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
6	Kecamatan Kertanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,1	95	100,98%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kertanegara	Angka	3	2,658	88,60%	Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara	Angka	64,25	64,26	100,02%	Sangat Tinggi	
7	Kecamatan Kaligondang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,8	96,01	101,28%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kaligondang	Angka	3	1,715	57,17%	Rendah	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kaligondang	Angka	63,86	63,86	100,00%	Sangat Tinggi	
8	Kecamatan Karangmoncol	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	99,84	99,9	100,06%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Karangmoncol	Angka	3	3,995	133,17%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Karangmoncol	Angka	67,26	67,25	99,99%	Sangat Tinggi	
9	Kecamatan Karangreja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90	94,98	105,53%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	3	2,2	73,33%	Sedang	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Kecamatan Karangreja						
		Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja	Angka	69,26	69,26	100,00%	Sangat Tinggi	
10	Kecamatan Kutasari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	99,46	99,529	100,07%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kutasari	Angka	4,58	4,688	102,36%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari	Angka	66,51	66,51	100,00%	Sangat Tinggi	
11	Kecamatan Bojongsari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	91,5	92,45	101,04%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bojongsari	Angka	4,61	4,384	95,10%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Bojongsari	Angka	67,26	67,26	100,00%	Sangat Tinggi	
12	Kecamatan Purbalingga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94	94,16	100,17%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Purbalingga	Angka	4,22	4,22	100,00%	Sangat Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Purbalingga	Angka	69,56	69,56	100,00%	Sangat Tinggi	
13	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94,7	90,19	95,24%	Sangat	



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN	
	Bobotsari	(IKM) Kecamatan					Tinggi		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	Angka	3	4,513	150,43%	Sangat Tinggi		
		Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari	Angka	67,76	67,76	100,00%	Sangat Tinggi		
14	Kecamatan Padamara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92,02	92,96	101,02%	Sangat Tinggi		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Padamara	Angka	3,72	4,044	108,71%	Sangat Tinggi		
		Nilai SAKIP Kecamatan Padamara	Angka	68,5	68,51	100,01%	Sangat Tinggi		
15	Kecamatan Mrebet	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90,6	92,72	102,34%	Sangat Tinggi		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Mrebet	Angka	3	2,555	85,17%	Tinggi		
		Nilai SAKIP Kecamatan Mrebet	Angka	64,1	64,1	100,00%	Sangat Tinggi		
16	Kecamatan Karangjambu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94	93,05	98,99%	Sangat Tinggi		
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Karangjambu	Angka	3	3,643	121,43%	Sangat Tinggi		
		Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	64,41	64,41	100,00%	Sangat		



N o	OPD	IKU	SATUAN	TARGET PK PERUBAHAN 2025	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
		Karangjambu					Tinggi	
17	Kecamatan Kejobong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90	89,175	99,08%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kejobong	Angka	3	2,515	83,83%	Tinggi	
		Nilai SAKIP Kecamatan Kejobong	Angka	67,4	67,36	99,94%	Sangat Tinggi	
18	Kecamatan Karanganyar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94	96,015	102,14%	Sangat Tinggi	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Karanganyar	Angka	3	2,113	70,43%	Sedang	
		Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar	Angka	68,01	68,01	100,00%	Sangat Tinggi	



Capaian kinerja keluraan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran Tahun 2025, sebagaimana berikut :

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 (enam) urusan diampu oleh 6 (Enam) Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 2) Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan ;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim);
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim);
- 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diampu oleh Satuan Polisi pamong Praja (Satpol) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 6) Sosial diampu oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdadukKBP3A).

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Tahun 2025 sebesar Rp1.339.125.625.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.305.462.724.712,01 atau 97,49%

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran3.1.1.

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 18 (Delapan belas) urusan diampu oleh 14 (Empat belas) Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Tenaga Kerja diampu Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker);
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdadukKBP3A);
- 3) Pangan diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP);
- 4) Pertanahan diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim);
- 5) Lingkungan Hidup diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH);

- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil);
- 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes);
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diampu oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosdadukKBP3A);
- 9) Perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan (Dinhub);
- 10) Komunikasi dan Informatika diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)
- 11) Statistik diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo);
- 12) Persandian diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo);
- 13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM);
- 14) Penanaman Modal diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- 15) Perpustakaan diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus);
- 16) Kearsipan diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus);
- 17) Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar);
- 18) Kebudayaan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Tahun 2025 sebesar Rp114.588.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.973.096.451,00 atau 94,23%

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.2.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan urusan pilihan sebanyak 6 (Enam) urusan diampu oleh 5 (Lima) Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Pertanian diampu oleh Dinas Pertanian (Dinpertan);
- 2) Perdagangan diampu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dinperindag);
- 3) Pariwisata diampu oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar);
- 4) Perindustrian diampu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dinperindag);

- 5) Kelautan dan Perikanan diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP);
- 6) Transmigrasi diampu oleh Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker).

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Tahun 2025 sebesar Rp63.187.037.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.512.234.274,00 atau 94,18%

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.3

3.1.4. Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang

Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang terdiri dari 5 (lima) unsur sebagai berikut :

1) Unsur Pendukung

Pelaksanaan unsur pendukung diampu oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah yaitu :

- (a) Sekretariat Daerah
- (b) Sekretariat DPRD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan unsur pendukung Tahun 2025 sebesar Rp122.132.887.000,00 dan realisasi sebesar Rp118.338.205.555,00 atau 96,83%.

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4

2) Unsur Penunjang

Pelaksanaan unsur penunjang diampu oleh 3 (Tiga) Perangkat Daerah yaitu :

- (a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- (b) Bappelitbangda;
- (c) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan unsur penunjang Tahun 2025 sebesar Rp443.763.770.000,00 dan realisasi sebesar Rp427.160.163.512,00 atau 96,26%

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4.

3) Unsur Pengawas

Pelaksanaan unsur pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp12.440.980.000,00

dan relaisasi sebesar Rp11.229.009.83,00 atau 90,26%, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4.

4) Unsur Kewilayahan

Pelaksanaan unsur kewilayahan diampu oleh 18 (Delapan Belas) kecamatan, yaitu :

- (a) Kecamatan Kemangkon ;
- (b) Kecamatan Bukateja ;
- (c) Kecamatan Kejobong;
- (d) Kecamatan Kaligondang ;
- (e) Kecamatan Purbalingga;
- (f) Kecamatan Kalimanah ;
- (g) Kecamatan Kutasari ;
- (h) Kecamatan Mrebet ;
- (i) Kecamatan Bobtsari ;
- (j) Kecamatan Karangreja ;
- (k) Kecamatan Karanganyar ;
- (l) Kecamatan Karangmoncol ;
- (m) Kecamatan Rembang ;
- (n) Kecamatan Bojongsari ;
- (o) Kecamatan Padamara ;
- (p) Kecamatan Pengadegan
- (q) Kecamatan Karangjambu ;
- (r) Kecamatan Kertanegara.

Pelaksanaan unsur Kewilyahan tahun 2025 sebesar Rp48.925.829.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.059.864.423,00 atau 94,14%, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4.

5) Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.610.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.300.153.756.000,00 atau xxx%, sebagaimana terlampir dalam Lampran 3.1.4.

- 3.1.5. Pengukuran capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 untuk melihat nilai dan predikat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan yang pengelompokkannya menggunakan skala pengukuran ordinal, selengkapya sebagaimana dalam Lampiran 3.1.5.

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang ditetapkan meliputi peraturan Bupati dan keputusan atau tindakan Bupati dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil pada tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2025

A. Peraturan Daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Kebijakan tentang APBD Kabupaten Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab; 2. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
2	Kebijakan tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab; 2. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 3. Guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
3	Kebijakan tentang rencana pembangunan industri di Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga	1. Sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan industri daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan; 2. Bahwa pembangunan industri di

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Purbalingga	Tahun 2025-2045	Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan; 3. Untuk mendorong pemerataan pembangunan industri di Daerah dengan tetap menjaga keseimbangan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
4	Kebijakan tentang arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025- 2029	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam arah dan strategi pembangunan daerah selama 5 tahun dan menetapkan sasaran, indikator kinerja, target pembangunan daerah yang terukur sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah; 2. Menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis PD agar sejalan dengan arah pembangunan daerah dan menjamin kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah, baik antar-tahun maupun dengan dokumen nasional dan provinsi (RPJMN/ RPJMD Provinsi).
5	Kebijakan tentang pembentukan Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta pengembangan sumber daya aparatur yang andal
6	Kebijakan tentang Perseroan Daerah BPR Artha Perwira	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira	1. Untuk mendukung perekonomian daerah yang berdasarkan demokrasi ekonomi, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kelembagaan yang kokoh; 2. Revitalisasi dan perbaikan tata

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			kelola perbankan daerah dengan mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat; 3. Guna meningkatkan kinerja, efektivitas, dan pelayanan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
7	Kebijakan tentang penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli Daerah.
8	Kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu, dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan di bidang perhubungan
9	Kebijakan tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	1. Sebagai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak ; 2. Menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
10	Kebijakan tentang pengelolaan air limbah domestik	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 2. Memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik yang terpadu, profesional, dan berkelanjutan.
11	Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta badan publik lainnya; 2. Untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh Informasi Publik; 3. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
12	Kebijakan tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Sebagai upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas, berbudaya, dan religius.
13	Kebijakan tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	1. Dalam rangka menciptakan Daerah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat; 2. Sebagai upaya dalam meningkatkan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat di Daerah
14	Kebijakan tentang APBD Kabupaten Purbalingga	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	1. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab; 2. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 3. Guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

B. Peraturan Bupati

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian di Kabupaten Purbalingga

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Daerah Kabupaten Purbalingga	
2	Penyediaan rumah layak huni	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Rumah Terdampak Bencana Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin serta kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat terdampak bencana TA 2025.
3	Pedoman bagi Pemda dalam rangka pemberian Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari DBHCHT	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1. Memberikan kepastian perlindungan apabila pekerja mengalami resiko sosial seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia; 2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya; 3. Memenuhi perlindungan jaminan sosial bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan penderes; 4. Optimalisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4	Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola BAKEUDA
5	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	3. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 4. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DLH

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
6	Pedoman dalam menyusun rencana penanggulangan bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	1. Merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; 2. Sebagai dasar dalam perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3. Memudahkan Pemda mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional; 4. Memudahkan Pemda mendapatkan informasi capaian program nasional dan daerah dalam penanggulangan bencana melalui sinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
7	Tata Cara Pemberian Dan Oemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 202	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu; 2. Mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana; 3. Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8	Tata Cara Pemberian Dan Oemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Oemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	5. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 6. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINPORAR
9	Tata cara	Peraturan Bupati Purbalingga	1. Mengatur pembagian



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	pengalokasian, besaran, penyaluran, pembinaan, pengawasan, serta pertanggungjawab n bagi hasil kepada pemerintah desa	Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga	pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; 2. Meningkatkan kemandirian serta memajukan perekonomian masyarakat Desa dalam mengatasi kesenjangan pembangunan
10	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINHUB
11	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINPERINDAG
12	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DPUPR
13	Tata Cara Pemberian Dan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINPERTAN
14	Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD; 2. Sebagai tindak lanjut Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2024 terkait Uji Materiil Perpres Nomor 53 Tahun 2023
15	Pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Agar program kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa dapat berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan
16	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 86 Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
17	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Sebagai dukungan terhadap percepatan pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah
18	Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana Dan Relokasi Program	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana Dan Relokasi Program	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Perda Kab Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemerintah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Pemerintah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	
19	Pedoman bagi Pemda dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak; 2. Menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
20	Penyelenggaraan Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (3) Perda Kab Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; 3. Menciptakan lapangan kerja; 4. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 5. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; 6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; 7. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 8. Mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil.
21	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2024 tentang Pasar Rakyat	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2024 tentang Pasar Rakyat;

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
22	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINNNAKER
23	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik	1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan sisten pemerintahan berbasis informasi elektronik; 2. Sebagai perlindungan informasi terhadap dokumen elektronik; 3. Sebagai tindak lanjut surat Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemberitahuan Penyesuaian terkait Kelembagaan
24	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINRUMKIM
25	Besaran Presentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Paak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Besaran Presentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Paak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Kab. Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak dan Retibusi Daerah
26	Petunjuk Teknis Pelaksanaan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 Tahun 2025	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 11

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	Tahun 2025
27	Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dan Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka mengatur pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada pendidikan dasar yang dapat mengakomodir kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah; 2. Agar pelaksanaan PMB dapat secara obyektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan usia, alamat domisili, afirmatif, prestasi, minat, dan bakat calon murid; 3. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perda Kab. Purbalingga Nomor 12 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar
28	Pengelolaan sampah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Rencana Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah	1. Dalam rangka percepatan penuntasan pengelolaan sampah Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026; 3. Sebagai upaya percepatan pencapaian target pengelolaan sampah terintegrasi; 4. Meningkatkan kinerja dan efektifitas pengelolaan sampah.
29	Penjabaran Anggaran	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2025	Sebagai tindak lanjut penyesuaian adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	dan aturan teknis pelaksanaannya
30	Pedoman Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 huruf h PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Guna mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH.
31	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
32	Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasla 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010; 2. Guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DKPP.
33	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan	3. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Agar penjabaran dan program kegiatan dan pagu indikatif



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2025	Pemerintah Kabupaten Purbalingga Purbalingga Tahun 2025	Perangkat Daerah selaras dengan yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
34	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	1. Sebagai bentuk penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan ASN; 2. Dalam rangka penyesuaian tambahan penghasilan bagi ASN.
35	Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani	1. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada ASN yang terpilih sebagai ASN terbaik dan partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan; 2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Religi.
36	Penghargaan Aparatur Sipil Negara <i>Of The Year</i> Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara <i>Of The Year</i> Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada ASN di Lingkungan Pemkab Pbg; 2. Dalam rangka meningkatkan disiplin dan kualitas kinerja ASN;
37	Pengelolaan arsip	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Perda Kab Purbalingga Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 2. Sebagai pedoman dalam penyimpanan dan penyusutan arsip; 3. Untuk menjamin Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyimpanan dan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			peraturan perundang-undangan
38	Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	Agar penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD TA 2026 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien.
39	Tata cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Dan Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah Dan Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun; 2. Dalam rangka penyaluran bantuan beasiswa anak sekolah tidka sekolah
40	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Purbalingga	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkoataan
41	Pengelolaan sampah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pembagian Tugas Dan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Dan Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Purbalingga	Kejelasan tugas, tanggungjawab dan kewenangan antara Pemda, pemdes dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien
42	Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga	1. Sebagai pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok; 2. Perubahan dilakukan sebagai

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	penyesuaian terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.
43	Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Menyesuaikan RKPD dengan dinamika dan kondisi aktual (perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, bencana, keadaan darurat, dsb) ; 2. Mengakomodasi perubahan asumsi makro dan kapasitas fiskal daerah; 3. Menyesuaikan target kinerja, program, dan kegiatan agar tetap realistis dan dapat dicapai.
44	Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	1. Diarahkan untuk penuntasan program pembangunan daerah, mensinkronisasikan pembangunan, dan mendukung visi-misi Bupati/Wakil Bupati baru; 2. Menjabarkan RPJMD ke dalam rencana pembangunan tahunan yang lebih operasional dengan mengintegrasikan usulan pembangunan dari bawah (Musrenbang) dengan prioritas daerah dan kebijakan nasional; dan 3. Pedoman penyusunan KUA-PPAS dan APBD, sehingga perencanaan dan penganggaran selaras.
45	Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 2. Sebagai penyesuaian terhadap perkembangan perekonomian di Kab. Purbalingga

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Daerah Kabupaten Purbalingga	
46	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 37 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2024
47	Penjabaran Pertanggungjawabannya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
48	Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Perpres Nomor 72 Tahun 2025
49	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 11 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
50	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Perda kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
51	Pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai dengan standar belanja	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	Agar penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026 agar berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien
52	Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Perda Kab. Purbalingga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga
53	Pembinaan kesadaran bela negara	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Bela Negara Tahun 2025-2029	Dalam rangka mendorong pembangunan dan penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan masyarakat
54	Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	1. Menjabarkan Renstra OPD ke dalam rencana kerja tahunan yang operasional; 2. Menjadi pedoman OPD dalam menyusun RKA dan melaksanakan kegiatan tahunan dengan menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan RKPD.
55	Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Kabupaten Purbalingga	3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan korban/pasien pada kejadian gawat darurat; 4. Perubahan sehubungan adanya mutasi pegawai antar Perangkat Daerah dan perubahan lokasi sekretariat dan operasional Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
56	Wajib Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Wajib Laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga	Dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme .
57	Petunjuk Pelaksanaan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 41



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender	Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender	Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender; 2. Untuk membuka wawasan dalam memahami kesenjangan gender; 3. Untuk memberikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai kesenjangan gender; 4. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan kesenjangan gender.
58	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2030	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2030	1. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan. Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang pembangunan secara terpadu, komprehensif; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
59	Pengelolaan sampah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
60	Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi	1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, jasa konstruksi yang tertib, fungsional, andal, efektif dan efisien; 2. Sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi di Lingkungan Pemkab Purbalingga; 3. Untuk menjamin kesesuaian antara kebutuhan teknis dan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			alokasi anggaran serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
61	Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Untuk kelancaran dan ketertibn adminsitasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola BAKEUDA
62	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Untuk kelancaran dan ketertibn adminsitasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DPUPR
63	Pedoman kinerja, tujuan, sasaran, dan program setiap perangkat daerah selama lima tahun	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	1. Menjabarkan RPJMD ke dalam arah, tujuan, sasaran, dan strategi OPD sesuai tugas dan fungsinya; 2. Menjadi pedoman OPD dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun, agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah; 3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan OPD dari tahun ke

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			tahun; dan 4. Menjadi dasar penyusunan Renja OPD dan penganggaran jangka menengah.
64	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Permendagri 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventrisasi dan Pelaporan BMD
65	Penilaian Kinerja Organisasi	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PermenPANRB Nomor 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi
66	Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho	Untuk melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025
67	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat	Penataan ulang organisasi dan tata kerja Puskesmas sehubungan dengan perkembangan jumlah penduduk, beban layanan dan kebutuhan wilayah
68	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Purbalingga	1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
69	Tata Cara Pemungutan Bea	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2025	1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Purbalingga	Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Purbalingga	1. optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
70	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Sebagai tindak lanjut surat Sekda Provinsi Jateng Nomor S/900/124/2025 tentang Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Prov Jateng TA 2025
71	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira Tahun Anggaran 2025	1. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira; 2. Mendukung Program UPLAND
72	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Di Kabupaten Purbalingga	1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
73	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Purbalingga	1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
74	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Purbalingga	1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
75	Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuandi Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuandi Kabupaten Purbalingga	1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat (9) Perda Kab Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
76	Pengaturan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih	Mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam
78	Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DLH
79	Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga Kepada Petani, Peternak, Kelompok	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga Kepada Petani, Peternak,	1. Upaya memfasilitasi penerima hiah Program UPLAND mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan 2. Upaya menjaga agar penerima



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Tani, Kelompok Wanita Tani Dan Koperasi Petani Peserta Program Hibah Upland	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani Dan Koperasi Petani Peserta Program Hibah <i>The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project (Upland)</i> Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	hibah Program UPLAND tetap dapat bertahan dan berkembang
80	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, memastikan kualitas layanan bagi masyarakat, mengurangi risiko dan kesalahan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
81	Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan, serta mendorong efisiensi, efektivitas dan peningkatan kualitas layanan
82	Pedoman Penghargaan <i>OPD Of The Year</i>	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penghargaan <i>OPD Of The Year</i> Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis
83	Pedoman dalam penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 2. Menciptakan dalam pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah sesuai penggolongan dan kodifikasi barang.
84	Tata Cara	Peraturan Bupati Purbalingga	Guna kelancaran dan ketertibn



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Nomor 84 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	adminsitrasi dalam pemberian insntif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINRUMKIM
85	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
86	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
88	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
89	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga	Sebagai pelaksanaan ketentuan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Daerah	Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
90	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
91	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
92	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
93	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
94	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 (Dua)	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
95	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
96	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Dan Irigasi	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
97	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Dan Rumah Potong Hewan	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
98	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
99	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Budi Daya Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
100	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Perda Nomor 5 Tahun 2025.
101	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
102	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
103	SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Industri Logam	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
104	Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
105	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, konsisten, akuntabel serta untuk kelancaran pelaksanaan APBD; 2. Sebagai penyesuaian terhadap dinamika perkembangan hukum dan pengelolaan administrasi keuangan.
106	Pendelegasian Wewenang Dan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2025	1. Dalam rangka pendelegasian wewenang dan mandat dari

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pemerintahan lainnya; 2. Dalam rangka percepatan pelayanan dan tertib administrasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemkab Purbalingga
107	Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026	1. Dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD; 2. Sebagai tindak lanjut ketentuan Perpres Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional
108	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 108 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Guna kelancaran dan ketertibn adminsitasi dalam pemberian insntif pemungutan retribusi daerah yang dikelola DINPORAPAR
109	Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan <i>Universal Health Coverage</i>	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan <i>Universal Health Coverage</i> Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan UHC dalam program Jamkesmas. 2. Sebagai bentuk penyesuaian karena adanya dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dlam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			jaminan kesehatan nasional.
110	Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Guna menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas dan daerah maka diperlukan perencanaan kebutuhan BMD
111	Penggunaan Mobil Operasional Desa Pada Kegiatan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Desa Yang Bersumber Dari APBD	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penggunaan Mobil Operasional Desa Pada Kegiatan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Desa Yang Bersumber Dari APBD	Menjamin ketertiban dan akuntabilitas Mobil Operasional Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
112	Pedoman Dalam Pengelolaan Resiko	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 112 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
113	APBD	Perbup 113 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
114	Tarif retibusi parkir	Perbup 114 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum di Lokasi Parkir isidental	Penyeusaian tarif retribusi parkir
115	Parkir Insidental	Perbup 115 Petunjuk Pelaksanaan Parkir Insidental	Pelaksanaan Parkir Insidental
116	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sehingga mewujudkan kesejahteraan masyakat.
117	Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 117 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga	Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Keuangan Desa dan APBDes

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tahun Anggaran 2026	
118	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Desa	1. Untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat; dan 2. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa
119	Acuan dalam penanganan bencana tanah longsor	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 119 Tahun 2025 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2027	Mewujudkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga
121	Arah kebijakan jangka panjang yang pembangunan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029	1. Menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program pengendalian dan pengelolaan kuantitas penduduk; 2. Meningkatkan kualitas penduduk secara menyeluruh yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian; 3. Membangun keluarga berkualitas yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni; 4. Mendorong keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan 5. Memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data secara tertib, akurat, dan dapat dipercaya

C. Keputusan Bupati

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Bantuan	Keputusan Bupati	Sebagai tindak lanjut setelah



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Keuangan Yang Besifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	Purbalingga Nomor 900/9 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Besifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	ditetapkannya Perbup Nomor 15 Tahun 2024 tentang APBD Tahun 2025
2	Investasi Jangka Pendek Uang Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/21 Tahun 2025 Tentang Penetapan Investasi Jangka Pendek Uang Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Guna melaksanakan ketentuan Permedagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3	Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Purbalingga	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/60 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Purbalingga	1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern; 2. Menunjang terwujudnya <i>good governance</i>, manajemen resiko dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
4	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/64 Tahun 2025 Tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Perbup Nomor 9 tahun 2025 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga.
5	Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 000.3/68 Tahun 2025 Tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga; 2. Sebagai implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemda Tahun 2025; 3. Upaya pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemkab Purbalingga Tahun 2025
6	Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Kabupaten	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.7/71 Tahun 2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan	1. Dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan yang berwawasan kependudukan; 2. Menjamin ketersediaan kualitas dan akses terhadap Data



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Purbalingga Tahun 2025	Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan; 3. Acuan dalam menentukan target sasaran Program Pembangunan Kesehatan ; 4. Sebagai monitoring pencapaian target sasaran program pembangunan kesehatan.
7	Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/97 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib transparan, konsisten dan akuntabel dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga
8	Penetapan Lokasi Dan Alokasi Anggaran Kegiatan TMMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.10/119 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Anggaran Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
9	Bantuan Kesejahteraan Bagi Pengasuh Pondok Pesantren Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 460/142 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Pengasuh Pondok Pesantren Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Dalam rangka optimalisasi, efisiensi, efektivitas dan kelancaran pengelolaan penyaluran bantuan kesejahteraan bagi Pengasuh Pondok Pesantren 2. Bantuan diberikan sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan para Pengasuh Pondok Pesantren
10	Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Madrasah Diniyah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400/144 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Madrasah Diniyah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Dalam rangka optimalisasi, efisiensi, efektivitas dan kelancaran pengelolaan penyaluran bantuan kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah 2. Bantuan diberikan sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta meningkatkan



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			kesejahteraan para Guru Madrasah Diniyah
11	Bantuan Kesejahteraan Bagi Penyuluh Agama Islam Non-PNS Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400/145 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Penyuluh Agama Islam Non-PNS Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025	1. Dalam rangka optimalisasi, efisiensi, efektivitas dan kelancaran pengelolaan penyaluran bantuan kesejahteraan bagi Penyuluh Agama Islam Non-PNS 2. Bantuan diberikan sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan para Penyuluh Agama Islam Non-PNS
12	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Purbalingga	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/172 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga; 2. Penetapan lokasi kumuh berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemda dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13	Komitmen Untuk Mendukung Proyek SPHERES	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.7/183 Tahun 2025 Tentang Komitmen Untuk Mendukung Proyek <i>Scalable Public Health Empowerment, Research, And Education Site (SPHERES)</i>	1. Sebagai komitmen dalam mendukung implementasi program SPHERES; 2. Membantu mengidentifikasi kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
14	Penetapan Rencana Strategis Dalam Implementasi SPHERES	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.7/185 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dalam Implementasi <i>Scalable Public Health Empowerment, Research, And Education Site (SPHERES)</i> Di Kabupaten Purbalingga	Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Purbalingga dalam implementasi program SPHERES

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tahun 2025-2029	
15	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/187 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Guna tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Hektar Kabupaten Purbalingga
16	Penetapan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 200/189 Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ; 2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
17	Penetapan Lokasi Dan Alokasi Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan SPALD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.1.17/200 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Sebagai upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap penanganan air limbah yang berkualitas; 2. Guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten Purbalingga
18	Penetapan Lokasi Dan Alokasi Kegiatan Pembangunan SPAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.1.16/201 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi Dan Alokasi Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Sebagai upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum yang berkualitas; 2. Guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan Kabupaten Purbalingga
19	Penyediaan rumah	Keputusan Bupati	1. Pemenuhan kebutuhan rumah



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	layak huni	Purbalingga Nomor 600.2/210 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin; 2. Dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana Tahun 2025.
20	Penyediaan rumah layak huni	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/211 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin; 2. Dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Korban Bencana Tahun 2025.
21	Penyediaan rumah layak huni	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/258 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin; 2. Dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025.
22	Penetapan Kecamatan Berdaya Sebagai <i>Pilot Project</i> di Kabupaten Purbalingga	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 100/269 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kecamatan Berdaya Sebagai <i>Pilot Project</i> di Kabupaten Purbalingga	Untuk mewujudkan dan mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik, pengembangan potensi lokal melalui pelibatan kelompok <i>zilenial</i> , pemberdayaan kelompok rentan serta pemanfaatan sarana olahraga secara optimal
23	Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800.1.6.2/325 Tahun 2025 tentang Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	1. Dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab Purbalingga; 2. Dalam rangka efektivitas pengaturan pejabat wajib lapor LHKPN
24	Penguatan nilai-	Keputusan Bupati Nomor	1. Memperkuat kerukunan,

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	201 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Sebagai Kampung Pancasila	mengatasi isu sosial seperti kemiskinan dan stunting, serta membina wawasan kebangsaan; 2. Menjadi media pembelajaran ideologi Pancasila, meningkatkan toleransi antarumat beragama, menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
25	Alokasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/89 Tahun 2025 Tentang Alokasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Polituik Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan yang bersifat kemasyarakatan; 2. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

D. Kebijakan Strategis Lainnya

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Larangan Menerima Suap, Gratifikasi dan Pungli	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 100/6479/2025 tentang Larangan Penerimaan Suap, Gratifikasi dan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Khususnya pada Sektor Pendidikan, Perizinan, Kesehatan dan Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi; 2. Sebagai upaya Pencegahan Korupsi
2	Larangan	Surat Edaran Bupati	1. Upaya pencegahan korupsi,



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Menerima Gratifikasi	Purbalingga Nomor 700/5420/2025 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1446H	khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan; 2. Untuk meminimalisir benturan kepentingan
3	Penggunaan Antimikroba secara bijak	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.10.1/16 Tahun 2025 tentang Penggunaan Antimikroba secara bijak, pencegahan penyalahgunaan obat keras dan bebas terbatas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, serta sarana distribusi pakan dan obat hewan di Kabupaten Purbalingga	1. Memastikan penggunaan Antimikroba secara bijak; 2. Pencegahan penyalahgunaan obat keras dan bebas terbatas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, serta sarana distribusi pakan dan obat hewan di Kabupaten Purbalingga;
4	Himbauan Menyikapi Perkembangan Situasi dan Kondisi Terkini di Wilayah Kabupaten Purbalingga	Surat Edaran Nomor 100.2/16353 Tahun 2025 Tentang Himbauan Dalam Menyikapi Perkembangan Situasi dan Kondisi Terkini	Untuk menjaga stabilitas, ketertiban dan kepercayaan publik di wilayah Purbalingga.
5	Imbauan Kesederhanaan, Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Pada Momentum Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Kabupaten Purbalingga	Surat Edaran Nomor 100/24471 Tahun 2025 Tentang Imbauan Kesederhanaan, Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Pada Momentum Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Kabupaten Purbalingga	1. Untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan keselamatan masyarakat; 2. Sebagai wujud empati dan solidaritas atas musibah di wilayah Sumatera.
6	Pemutaran Lagu Indonesia Raya sebagai Bentuk Cinta Tanah Air	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 100/3408 Tahun 2025 Tentang Penguatan Cinta Tanah Air Melalui Pemutaran dan Menyanyikan Lagu Indonesia	Untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalis masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Raya	
7	Pengendalian Penggunaan Barang Impor Dan Atau Tenaga Kerja Asing Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 500.2/4 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor Dan Atau Tenaga Kerja Asing Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	1. Sebagai panduan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Purbalingga yang akan menggunakan barang impor dan/atau tenaga kerja asing pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 2. Untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 500.3/5 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Purbalingga.
9	Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Sekali Pakai Dan Sedotan Plastik	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 600.4.15/6 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Sekali Pakai Dan Sedotan Plastik	Mengatasi dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat meningkatnya timbunan sampah plastik berupa pemakaian kantong plastik/kresek dalam aktivitas perekonomian yang kian hari semakin meningkat.
10	Optimalisasi Penggunaan Dana Desa	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.10.1/7 tentang Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tahun 2025	Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
11	Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.10.1/9 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga	Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.
12	Himbauan Keselamatan Penerbangan Di Wilayah Kabupaten	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 551.2/10 tentang Himbauan Keselamatan Penerbangan Di Wilayah Kabupaten	Sebagai upaya mencegah gangguan dan potensi bahaya yang ditimbulkan layang-layang dan balon udara di area KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan).



NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Purbalingga	Purbalingga	
13	Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.7/11 tentang Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Ulang Tahun Dan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah Di Kabupaten Purbalingga	Sebagai dukungan dalam pelaksanaan program kegiatan kesehatan untuk semua melalui pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis
14	Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.3/11 tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Upaya penertiban dan penataan penggunaan bahasa Indonesia di <i>lanskap</i> dan dokumen resmi.
15	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Ekosistem Pemerintah Desa	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 500.15.14/12 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Ekosistem Pemerintah Desa Di Kabupaten Purbalingga	Meningkatkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada ekosistem Pemerintahan Desa.
16	Pembentukan Kadarkum Desa/Kelurahan Posbankum Desa/Kelurahan	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 100.3/12 tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa/Kelurahan Dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Pada Desa/Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Mendukung pencanangan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara nasional.
17	Peningkatan Peran Satlinmas	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 300.1/13 tentang Peningkatan Peran Satlinmas Terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Tratibumlinmas Di Kab Purbalingga	Menjaga dan memelihara suasana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Purbalingga.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
18	Implementasi <i>E-Purchasing</i> Katalog Elektronik	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.3/14 tentang Implementasi <i>E-Purchasing</i> Katalog Elektronik Dilingkungan Purbalingga	Mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui <i>E-Purchasing</i> yang tertib administrasi, efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel.
19	Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 400.7/15 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode <i>Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid</i> (Hpv Dna) <i>Co-Testing Inspeksi Visual Asam Asetat</i> (Iva) Di Kabupaten Purbalingga	Pencegahan agar tidak berkembang menjadi Kanker Leher Rahim.
20	Penggantian Ucapan Karangn Bunga Menjadi Bibit Tanaman	Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 600.4.15/17 tentang Penggantian Ucapan Karangn Bunga Menjadi Bibit Tanaman Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Purbalingga Ke-195	1. Mendukung pelestarian alam dan penghijauan di wilayah Kabupaten Purbalingga; 2. Mengurangi volume sampah yang berasal dari karangan bunga; 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pengurangan sampah dan pemanfaatan barang ramah lingkungan.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.4
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

A. Rekomendasi Umum

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
1	Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja pendidikan, terutama dalam meningkatkan rata-rata nilai literasi dan numerasi di	1. Bidang Pembinaan SD melakukan Kegiatan Fasilitasi Penguatan Literasi dan Numerasi untuk Guru Jenjang SD di Kabupaten Purbalingga, Sebanyak 95 guru dari perwakilan kecamatan di	1. Menyelesaikan masalah tentang Rendahnya Literasi dan Numerasi jenjang SD di Kabupaten Purbalingga.

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	tingkat Sekolah Dasar serta angka harapan lama sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan analisis lebih lanjut mengenai penyebab tidak tercapainya target pada Rata-rata Nilai Literasi dan Numerasi SD serta Angka Harapan Lama Sekolah, dan merumuskan strategi intervensi yang tepat untuk perbaikan di masa mendatang, seperti peningkatan kualitas pembelajaran literasi dan numerasi di tingkat SD serta upaya mempertahankan siswa untuk bersekolah lebih lama.	Kabupaten Purbalingga mendapatkan fasilitasi untuk mengikuti pelatihan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga 2. Mengatasi Angka Harapan Lama Sekolah yang masih rendah dengan : 1) Membantu Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan; 2) Membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B; 3) Meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan Pendidikan : a. Anak kelompok usia 7-12 tahun masuk ke SD/MI atau Kejar Paket A, b. anak kelompok usia 13-15 tahun ke SMP/MTs atau Kejar Paket B.	2. Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (AUSTS) dan Rentan Putus Sekolah.
2	Perlunya pengkajian secara mendalam terhadap meningkatnya angka kematian ibu, bayi, dan balita yang masih jauh dari target kinerja. Dinas Kesehatan perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program kesehatan ibu dan anak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab	Kematian ibu tahun 2024 belum menunjukkan penurunan berarti, dari jumlah kematian ibu 11 kasus , penyebab nya adalah 4 kasus perdarahan, 3 kasus karena penyakit jantung, 2 kasus karena hipertensi dan 2 kasus karena penyakit lain : TBC dan DBD . Semua kasus kematian maternal sudah dilakukan Audit maternal (100%) sementara kematian bayi baru 10% .	– Pelayanan kesehatan pada ibu hamil dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan Peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Pelatihan ANC PNC INC dan SHK bagi bidan Puskesmas dan RS , ditindak

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	peningkatan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta pengembangan strategi pencegahan yang efektif melalui pendekatan promotif dan preventif. Selain itu, angka realisasi 22 dari target 23 unit SPGDT menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan layanan kegawatdaruratan yang bersifat vital bagi perlindungan hak hidup masyarakat. Mengingat pentingnya layanan ini sebagai bagian dari sistem kesehatan yang responsif, keberadaan dan operasionalisasi SPGDT menjadi krusial. Di sisi lain, minimnya penjabaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut dapat memberikan kesan keterbatasan informasi yang disampaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, agar prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat terus diwujudkan dan diimplementasikan secara konsisten.	Rekomendasi dan rencana program antara lain sbb : – Meningkatkan kualitas pelayanan ANC dan skrining awal pada bumil, – Meningkatkan kompetensi bidan dan dokter dalam pelayanan ANC,PNC,INC. – Melakukan Audit kematian segera setelah terjadi kematian baik di RS atau di puskesmas – Meningkatkan kualitas PONEK dan PONEK (IBS 24 jam)	lanjuti dengan pelaksanaan <i>In House Training</i> di semua Puskesmas dan RS – Ibu hamil diperiksa oleh tenaga medis yang kompeten dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, Pelatihan ANC dan USG dasar terbatas bagi Dokter Umum di Puskesmas sejumlah 22 dokter – Penyebab kematian serta tindak lanjut yang akan dilakukan diketahui dengan dilakukan AMPSR untuk semua kasus maternal – Penggunaan Form APKK APKR secara optimal dengan dilakukan Pendampingan RS PONEK dan Pusk PONEK dengan visitasi dan penilaian dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir – RS PONEK harus siap 24 jam khususnya IBS – Kebutuhan darah terpenuhi dengan Semua RS sedia Bank siap darah 24

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
			jam
3	Pemerintah daerah perlu memprioritaskan program pemeliharaan serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan bangunan pemerintah yang sudah ada. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan indeks jalan mantap dan menjamin keberlanjutan kondisi bangunan. Evaluasi efektivitas program yang ada juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan pemerintah yang telah diperbaiki tetap layak dan fungsional sesuai dengan kebutuhan.	1. Pemerintah Daerah melalui DPU PR terus berupaya melaksanakan perbaikan jalan dengan segenap kemampuan anggaran yang tersedia. Dalam perbaikan jalan rusak tetap mempertimbangkan aspek-aspek optimalisasi kebermanfaatan bagi masyarakat / ruas jalan dengan intensitas traffic yang tinggi, pemerataan wilayah secara proporsional, tingkat kerusakan serta kualitas hasil pekerjaan. Mulai tahun 2025 ini pada APBD Murni dan akan diteruskan pada APBD Perubahan, perbaikan / pengaspalan jalan menggunakan aspal produk dari <i>Asphalt Mixing Plant (AMP)</i> dengan metode penghamparan <i>overlay</i> menggunakan mesin / peralatan yang memadai sehingga kualitasnya terjamin lebih bagus yang berdampak positif pada daya tahan atau masa nilai ekonomis jalan yang lebih lama. Mengingat keterbatasan anggaran, perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas penanganan dan mengupayakan akses pembiayaan perbaikan mendukung Alus Dalane dari Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) maupun Pemerintah Pusat (APBN). 2. Untuk bangunan pemerintah tetap dilakukan monitoring / pemeriksaan keamanan / kelayakan konstruksi dan pemeliharaan dengan kemampuan	1. Perbaikan jalan secara bertahap berdasar skala prioritas mempertimbangkan kemanfaatan / kepadatan traffic dan proporsional pemerataan wilayah di tahun 2025 sekitar 100 ruas jalan. 2. Peningkatan kualitas jalan dengan perbaikan menggunakan AMP yang memiliki daya tahan lebih bagus, kualitas jalan lebih mulus dan umur ekonomis yang lebih panjang 3. Pemeliharaan bangunan pemerintah agar tetap layak dan fungsional sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		anggaran yang tersedia	
4	Pemerintah daerah perlu mempertahankan prestasi yang sangat baik dalam menyediakan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas permukiman. Dinas Perumahan dan Permukiman harus terus berinovasi dalam merancang program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Program-program tersebut perlu disesuaikan agar dapat menciptakan solusi jangka panjang dalam penyediaan perumahan dan perbaikan permukiman di daerah	Mengajukan proposal kegiatan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menyediakan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas permukiman	Kegiatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan dana Bankeupemdes Provinsi Jawa Tengah dan CSR
5	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus mempertahankan kinerja yang konsisten dan tinggi dalam menjaga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah serta dalam pelayanan kebakaran harus lebih dioptimalkan dengan pendekatan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini akan mendukung terciptanya suasana yang lebih aman dan tertib bagi warga di wilayah tersebut	Dalam penegakan peraturan daerah serta pelayanan kebakaran dan non kebakaran secara optimal dengan pendekatan yang humanis dan responsif untuk mendukung terciptanya suasana yang lebih aman dan tertib	Terwujudnya kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib serta perlindungan masyarakat, layanan kebakaran dan non kebakaran.
6	DPRD mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah rawan bencana (Desa	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana, serta penyusunan rencana kontinjensi berbasis risiko untuk menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana dan mencapai target Indeks Ketahanan Daerah	Jingkang, Desa Sanguwatang Kec. Karangjambu, Desa Tunjungmulih Kec. Karangmoncol, Desa Kutabawa Kec Karangreja, dan Desa Cendana Kec. Kutasari.). 2. Peningkatan Kapasitas melalui Simulasi Penanggulangan Bencana (Desa Danasari, Kec. Karangjambu) 3. Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC). 4. Peningkatan kapasitas Pusdalops dalam operasi pertolongan dan pencarian (kerjasama dengan Basarnas). 5. Sosialisasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi/ KIE Rawan Bencana kepada siswa sekolah melalui program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dan kepada masyarakat melalui program TMMD. 6. Simulasi bencana pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2025, tanggal 26 April 2025 (di 34 sarana pendidikan, 2 instansi pemerintah dan 1 pelayanan kesehatan) 7. Penyusunan Renkon (Rencana Kontijensi) Bencana Tanah Longsor.	pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan bencana. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. 3. Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana tanah longsor berguna untuk mengantisipasi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi kerusakan, memfasilitasi respon dan mengkoordinasikan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan organisasi terkait dalam menghadapi bencana longsor.
7	Dinas Sosial harus memperkuat strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencapai keberhasilan program graduasi menuju kemandirian. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pendampingan, memberikan	1. Mendorong Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk lebih intens mengadakan pemetaan wilayah kondisi sosial ekonominya; 2. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, literasi keuangan, dan manajemen usaha kecil kepada KPM PKH; 3. Menjalin kolaborasi dengan OPD lain (Disnaker, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan),	1. Kurangnya ketersediaan data akurat sebagai dasar intervensi program pemberdayaan. 2. Mengatasi rendahnya sinergi program antar lembaga yang menyebabkan intervensi tidak terintegrasi. 3. Kesulitan KPM dalam

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	pelatihan, serta memperkuat integrasi lintas sektor dalam program pemberdayaan tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan taraf hidup KPM sehingga dapat mandiri secara ekonomi	lembaga keuangan, dan dunia usaha. 4. Memberikan pelatihan dan fasilitasi lanjutan dan sertifikasi kepada pendamping PKH terkait metode pemberdayaan, komunikasi efektif, dan pemantauan hasil. 5. Menyediakan insentif atau penghargaan bagi KPM yang berhasil mandiri serta pendamping yang mendampingi secara efektif. 6. Menyediakan akses permodalan (hibah, KUR, koperasi, dll.) bagi KPM pasca-pelatihan. 7. Memberikan insentif bagi KPM yang berhasil mandiri dan pendamping yang menunjukkan kinerja baik.	mengakses modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mandiri. 4. Meningkatkan motivasi bagi KPM untuk keluar dari program bantuan dan bagi pendamping untuk mendampingi secara optimal. 5. Fasilitasi transportasi untuk pendamping.
8	Dinas Tenaga Kerja perlu melanjutkan capaian yang telah diperoleh dalam bidang ketenagakerjaan, dengan memperluas akses pelatihan vokasi dan memfasilitasi wirausaha baru. Selain itu, harus ada peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Ini juga akan membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak serta mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut	1. Tahun 2025, dengan anggaran sebesar Rp.900.000.00,-, Dinnaker melaksanakan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 312 orang terdiri dari pelatihan : a. Kejuruan Garmen dengan Penempatan, sejumlah 140 orang; b. Kejuruan Tata Boga (<i>processing</i>) sejumlah 32 orang; c. Kejuruan Otomotif, sejumlah 16 orang; d. Kejuruan Las, sejumlah 16 orang; e. Kejuruan Garmen, sejumlah 16 orang; f. Potong rambut (<i>barber</i>) , sejumlah 60 orang; g. Kejuruan Alat Pendingin (<i>refrigerator</i>) sejumlah 16 orang; h. Kejuruan Tata Kecantikan sejumlah 16 orang. 2. Upaya peningkatan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas dalam rangka mengurangi	1. Memperluas akses pelatihan vokasi a. Kejuruan Garmen dengan penempatan, sejumlah 140 orang langsung dsalurkan bekerja di PT Sahabat Unggul Internasional. 2. Memfasilitasi wirausaha baru a. Kejuruan Tata Boga (<i>processing</i>) sejumlah 32 orang; b. Kejuruan Otomotif, sejumlah 16 orang; c. Kejuruan Las, sejumlah 16 orang;

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		angka pengangguran ditempuh dengan meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri melalui kegiatan <i>job fair</i> guna memperluas kesempatan kerja bagi para pencari kerja.	d. Kejuruan Garmen, sejumlah 16 orang; e. Potong rambut (barber), sejumlah 60 orang; f. Kejuruan Alat Pendingin (refrigerator) sejumlah 16 orang; g. Kejuruan Tata Kecantikan sejumlah 16 orang
9	Mempertahankan kinerja yang baik dalam ketahanan pangan dan perikanan serta memperluas dukungan terhadap petani dan nelayan melalui akses teknologi, permodalan, serta pasar guna menjaga ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Di sisi lain, nilai produksi perikanan yang terealisasi baru sebesar 61,49%, namun tetap dikategorikan dalam capaian “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesesuaian antara capaian realisasi dan klasifikasi kinerja. Penyesuaian ini penting agar prinsip akuntabilitas kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam PermenPAN-	Terdapat koreksi atas capaian nilai produksi perikanan terealisasi 61,49 % menjadi 113,99% yang diperoleh dari : Target : Rp 311.863.013.400 Capaian : Rp 355.522.255.217 Dalam rangka dukungan terhadap pembudi daya telah dilakukan kegiatan hibah, pelatihan dan bantuan sarpras budidaya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan. Berdasarkan data yang tersedia, PDRB Kabupaten Purbalingga pada sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, PDRB sektor perikanan mencapai Rp.473.000.000.000,-, meningkat menjadi Rp.509.290.000.000,- pada tahun 2023. Data untuk tahun 2024 capaian PDRB telah mencapai angka Rp.532.440.000.000,- atau 117% dari target Renstra sebesar Rp.455.000.000.000,- dan jika dibandingkan dengan capaian PDRB	

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	RB No. 88 Tahun 2021, dapat diterapkan secara lebih tepat dan objektif	Tahun 2023 sebesar Rp.509.290.000.000,- maka kenaikan sebesar Rp.23.150.000.000,- ini menunjukkan bahwa sektor perikanan menunjukkan trend kenaikan PDRB yang cukup baik sehingga secara umum bisa diambil kesimpulan bahwa pendapatan masyarakat disektor perikanan ada pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap pertumbuhan ini antara lain peningkatan produksi perikanan budidaya, perbaikan infrastruktur pendukung, serta program pemerintah daerah yang mendukung pengembangan sektor perikanan. Menurut data dari DKPP Kabupaten Purbalingga, produksi perikanan budidaya menunjukkan tren peningkatan selama periode 2018 hingga 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan PDRB sektor perikanan yang tercatat.	
10	DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan dengan memperluas program penghijauan dan penguatan pengawasan terhadap tata ruang. Perlindungan kawasan lindung juga harus menjadi perhatian utama untuk memastikan pencapaian target Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Program-program ini	1. Melakukan penanaman pohon dan tanaman lainnya pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lokasi-lokasi tertentu atas permohonan kerjasama penanaman pohon. 2. Berkoordinasi dengan Cabang Dinas (CDK) 7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanaman penghijauan pada lahan hutan rakyat. 3. Permohonan bantuan bibit tanaman tahunan dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam di daerah

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam di daerah	Serayu Opak Progo (BPDASSOP). 4. Pemberian persetujuan lingkungan atas usaha/kegiatan harus mematuhi rencana tata ruang. 5. Mengawasi dan memantau penggunaan lahan untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.	
11	Pemerintah Daerah perlu menjaga konsistensi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang sudah berkinerja tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan serta meningkatkan akurasi data kependudukan. Peningkatan pelayanan ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.	Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sudah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan serta meningkatkan akurasi data dengan : 1. Membuat Aplikasi Anak Ceria Jipat yang bekerjasama dengan BPJS dan Instansi Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dengan output berupa KK, Akte Kelahiran, KIA dan BPJS 2. Penggunaan sarana email untuk pembuatan KIA secara kolektif oleh sekolah dibawah Dindikbud dan Kementerian Agama, dimana data anak berupa NIK, No KK, No Akte dan foto anak dikirim ke email dukcapilkia3303@gmail.com secara kolektif persekolah untuk diproses menjadi KIA 3. Membuat Aplikasi Silapor Makam yang bekerjasama dengan Desa/Kelurahan untuk menginput data warga yang meninggal dunia dimana nanti keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan KK, Akte Kematian dan KTP Janda/ Dudanya 4. Penggunaan sarana <i>google form</i> dengan nama Pak Purna yang bekerjasama dengan BKPSDM dimana pegawai yang pensiun dapat langsung proses KK dan KTP status pensiun	1. Mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan langsung ke masyarakat melalui Kecamatan, Desa, Lembaga Kesehatan, dan Jemput Bola sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Dokumen Administrasi Kependudukan 2. Meminimalisir adanya calo atau pungli dalam Kepengurusan Adminduk 3. Mempercepat prosentase kepemilikan Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya <i>update</i> dokumen kependudukan dengan pelayanan

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		5. Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang digunakan untuk memproses dokumen Adminduk dikerjasamakan dengan Desa/Kelurahan dimana Desa/Kelurahan dapat melaksanakan pelayanan Dokumen Adminduk langsung Jadi di Desa/Kelurahan tanpa masyarakat harus datang ke Kecamatan/ Dukcapil dengan nama Linggamas Gratis 6. Menggunakan website, Instagram, Facebook untuk memberikan informasi-informasi update terkait Administrasi kependudukan dan juga memberikan informasi data kependudukan yang di rilis tiap semester 7. Bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal mendistribusikan KTP dan KIA secara COD langsung ke alamat rumah pemohon 8. Memberikan pelayanan Jemput Bola pembuatan Administrasi Kependudukan ke Desa/Kelurahan 9. Memberikan pelayanan Jemput Bola Perekaman kepada Lansia, Difabel, ODGJ, langsung ke rumah-rumah dengan nama Dukcapil Siap 10. Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan ke Desa yang jauh dan medannya berat dengan meninap di desa selama 2 hari 1 malam dengan nama Mendoan Gratis	yang dekat dengan masyarakat 5. Mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi-informasi terupdate tentang Administrasi Kependudukan dengan adanya informasi update di Website maupun Medsos Dinpendukcapil
12	DPRD mendorong pemerintah daerah untuk	Setiap tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan	Peningkatan jumlah desa dengan status Desa

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	terus meningkatkan status desa agar menjadi mandiri dan maju. Ini dapat dicapai dengan penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan program pemberdayaan masyarakat, serta sinergi lintas sektor dalam pembangunan desa. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan desa menuju taraf yang lebih baik dan mandiri.	kegiatan peningkatan kapasitas / Bimtek Aparatur Desa serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan desa.	Mandiri pada Tahun 2025 naik sebanyak 28 desa, yang semula ada 69 desa menjadi 97 desa
13	DPRD mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan efektivitas angkutan jalan dan angkutan umum melalui perbaikan rasio konektivitas angkutan jalan yang masih berada pada status Sedang, serta mengoptimalkan pengoperasian angkutan umum yang juga belum mencapai target. Selain itu, DPRD mendorong pemerintah agar mempercepat pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perhubungan, mengingat persentase sarana prasarana dalam kondisi baik, dan rasio volume terhadap kapasitas jalan yang dapat mengindikasikan potensi kemacetan di jalan kabupaten	Dinas Perhubungan melakukan promosi penggunaan angkutan umum berupa program angkutan wisata yang terintegrasi dengan Trans Jateng dalam upaya meningkatkan IKU konektivitas angkutan umum	1. Peningkatan konektivitas dengan integrasi angkutan pedesaan dengan Trans Jateng. 2. Meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dengan angkutan pedesaan berbasis wisata
14	Pemerintah daerah perlu mempertahankan kinerja yang sangat tinggi dalam layanan komunikasi dan	Untuk mempertahankan kinerja yang sangat tinggi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga melaksanakan program - program yang mendukung kemajuan	1. Mengatasi ketimpangan akses informasi antar wilayah atau

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	informatika dengan terus mengembangkan transformasi digital yang inklusif. Pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas untuk mendorong masyarakat agar lebih melek teknologi. Program-program ini akan mendukung kemajuan daerah menuju era digital yang lebih maju	daerah menuju era digital yang lebih maju, sebagai berikut: 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik. a. Diseminasi Informasi Publik : a) Penerbitan siaran pers, artikel, dan berita di website resmi pemerintah yang dibagikan kepada email wartawan b) Penyiaran informasi dan dialog interaktif melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal / LPPL Radio Gema Soedirman dan <i>Podcast</i> Dinkominfo c) Publikasi media luar ruang (baliho, spanduk, videotron, dan mobil siaran keliling). d) Publikasi melalui media tradisional / Forum Komunikasi Media Tradisional e) Publikasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) b. Penguatan kanal komunikasi digital a) Pengembangan dan pemeliharaan website resmi pemerintah. b) Optimalisasi akun media sosial resmi (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube). c) Pembuatan konten kreatif, seperti video animasi, infografis, podcast, vlog layanan publik c. Kemitraan dengan media dan komunitas a) Kerjasama dengan media	kelompok masyarakat 2. Mengatasi masih rendahnya literasi informasi dan kesadaran warga terhadap kebijakan pemerintah melalui Pembuatan konten kreatif (video animasi, infografis, podcast), penyiaran melalui LPPL Radio Gema Soedirman dan podcast Kominfo. 3. Meminimalisir penyebaran hoaks dan informasi palsu (disinformasi) melalui Optimalisasi akun media sosial resmi, Konten kreatif edukatif dan penjelasan langsung dari pemerintah dan Kemitraan dengan media lokal/nasional untuk kontra-narasi 4. Kelambatan dalam proses / layanan di OPD yang dilakukan secara manual . 5. Mengurangi duplikasi data, ketidaksinkronan, dan input berulang karena aplikasi yang tidak saling

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		lokal dan nasional untuk penyebaran informasi strategis. b) Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) d. Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi masyarakat a) Penyediaan layanan pengaduan publik berbasis aplikasi/web seperti ALPUKAT https://skm.purbalinggakab.go.id/, dan https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/ b) Pengelolaan pengaduan online melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!), https://laporgub.jatengprov.go.id/ dan https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/ 2. Program Aplikasi Informatika Untuk mewujudkan sasaran Program Aplikasi Informatika, berbagai aktivitas strategis dan teknis dilakukan oleh pemerintah (khususnya Dinas Kominfo dan OPD pengelola sistem digital). Berikut aktivitas yang dilakukan oleh DINKOMINFO: a. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik a) Pembuatan aplikasi baru sesuai kebutuhan layanan	terhubung. 6. Meningkatkan pemahaman ASN dan admin OPD dalam memahami cara menggunakan aplikasi secara efektif. 7. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi oleh ASN dan OPD 8. Peningkatan sistem keamanan aplikasi pemerintahan 9. Data rentan hilang saat terjadi gangguan sistem, listrik padam, atau serangan malware.

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		dan tata kelola OPD serta Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga b) Integrasi aplikasi / layanan berbasis elektronik. c) Pengembangan API untuk pertukaran data antar aplikasi. b. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Aplikasi a) Bimtek dan pelatihan penggunaan aplikasi untuk ASN dan admin OPD. b) Pendampingan teknis OPD dalam pemanfaatan aplikasi secara optimal. c) Penyusunan panduan teknis/manual penggunaan aplikasi. c. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi d. Penguatan Keamanan Sistem dan Proteksi Data e. Audit keamanan informasi dan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data. f. Penyediaan Infrastruktur Teknologi dan Data Center g. Kolaborasi / Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
15	Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi melalui pendekatan berbasis kualitas kelembagaan. Masih terbatasnya jumlah koperasi yang tergolong sehat, berkualitas, dan sangat berkualitas	1. Dinas Koperasi dan UKM telah dan sedang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi-koperasi di Kabupaten Purbalingga dalam rangka pengawasan dan pemetaan koperasi berdasarkan kondisi managerial dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip tata kelola sekaligus memberikan asistensi manajerial kepada	1. Managerial dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola mulai diperbaiki melalui workshop perkoperasian dan asistensi oleh Dinas Koperasi dan UKM 2. Dengan adanya pelatihan perkoperasian

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	menunjukkan adanya kebutuhan akan intervensi yang lebih sistematis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan koperasi berdasarkan kondisi manajerial dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip tata kelola. Pemberian asistensi manajerial secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan aktual menjadi penting untuk meningkatkan daya saing koperasi. Insentif khusus bagi koperasi yang mencapai standar kinerja juga dapat dijadikan alat pendorong untuk menciptakan ekosistem koperasi yang sehat. Langkah ini akan membantu mendorong tumbuhnya koperasi yang profesional dan mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional	koperasi disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM; 2. Disamping monitoring dan evaluasi Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan kegiatan berupa pelatihan/workshop perkoperasian yang diikuti oleh gerakan koperasi dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pengelolaan koperasi; 3. Dinas Koperasi dan UKM berusaha untuk mendapatkan anggaran sehingga dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada koperasi yang pada TA 2024 sudah dilaksanakan berupa pemberian nominasi kepada koperasi yang berprestasi 4. Dinas Koperasi dan UKM berusaha untuk mengajukan penambahan SDM aparat (ASN) pembina koperasi yang pada saat ini masih sangat terbatas jumlah dan kapasitasnya, sehingga proses kegiatan pembinaan koperasi berjalan dengan lebih baik	pemahaman pengurus terhadap tata kelola koperasi mulai ada peningkatan, sehingga ada perbaikan terhadap laporan keuangan koperasi
16	Rendahnya realisasi investasi di daerah perlu segera ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang menghambat minat investor. Evaluasi ini mencakup aspek perizinan, kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, serta promosi investasi yang belum optimal. Pemerintah daerah disarankan untuk menyusun	1. FGD mengenai skema pemebrian insentif dan kemudahan penanaman modal dan masih dikaji lebih lanjut mengenai efek terhadap penerimaan daerah; 2. DPMPSTP memiliki program berbasis web bernama SIPINTAS (Sistem Informasi Potensi Investasi) yang memuat profil investasi, peta investas dan peluang investasi di Kabupaten Purbalingga. 3. Akan dilakukan evaluasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	strategi promosi yang lebih proaktif dan berbasis data potensi lokal. Penyederhanaan birokrasi perizinan serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor prioritas harus menjadi bagian dari kebijakan reformasi investasi. Selain itu, penting untuk mengembangkan <i>platform</i> pelayanan digital yang transparan dan ramah pengguna. Pendekatan ini akan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan	terhadap program-program yang tertaung dalam Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025 sehingga akan dapat diketahui keberhasilan dan hambatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengelola ekosistem investasi sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan investasi tahun-tahun berikutnya. 4. Melakukan kajian strategi promosi penanaman modal yang lebih komprehensif.	
17	Potensi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah masih belum sepenuhnya dimaksimalkan. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan strategi pengembangan destinasi, peningkatan kualitas layanan, dan promosi secara konsisten dan terarah. Evaluasi terhadap kualitas infrastruktur pendukung wisata juga perlu dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung. Penguatan kapasitas SDM pelaku wisata serta penyusunan paket wisata berbasis potensi lokal dapat meningkatkan daya tarik wisata. Di sisi lain, promosi digital melalui media sosial dan kolaborasi dengan <i>influencer</i> lokal juga perlu	Dalam rangka peningkatan peran sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah telah dilakukan beberapa upaya secara menyeluruh antara lain : 1. Penguatan Kapasitas SDM Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI telah dilakukan kegiatan Diseminasi kepada para pelaku usaha pariwisata sebanyak 3 kegiatan : a) Pada tgl. 29 Mei 2025, bertempat di D Pari Resto dilaksanakan BinteK Diseminasi Dstrategi dan Komunikasi pemasaran Pariwisata melalui Media Digital dg peserta 115orang terdiri dari pelaku wisata dan ekraf b) Pada tgl 31 Mei 2025, bertempat di D Pari Resto, Babakan dilaksanakan BinteK Diseminasi Strategi dan Komunikasi Pemasaran	Peningkatan jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten sejumlah 345 orang pelaku wisata

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	dikembangkan. Dengan pendekatan menyeluruh, sektor pariwisata berpeluang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.	Pariwisata untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata, peserta 115 orang: c) Pada tgl. 15 Juni 2025, bertempat di Hotel Braling dilaksanakan Bintek Strategi Penyelenggaraan Event Berkualitas dg 115 orang peserta. 2. Penyusunan Paket Wisata a) Pada tanggal 12 Juni 2025, bertempat di RR Ardhi Lawet dilaksanakan Workshop Penyusunan Paket Wisata bekerjasama dengan platform digital yaitu Atourin.com (Mitra Kemenpar) b) Pada tanggal 202 Juni 2025 bertempat di Aula Dinporapar dilaksanakan Sosialisasi Digital Marketing bekerjasama dengan platform digital Djalanin.com (Surabaya) 3. Promosi Digital melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer a) Membuat konten promosi dengan melibatkan 20 orang Duta Wisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2025; b) Mengundang influencer dari Jakarta (artis Jakarta An. Gita Sinaga, Yulimauidia) 4. Pengembangan Destinasi Wisata Berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 500.13/250 tentang Penetapan Desa Tlagayasa, Bobotsari dan Desa Gondang, Karangreja sebagai Desa Wisata. Terdapat 1 destinasi wisata baru di Desa Karangcengis berupa kolam renang. Berada pada tanah kas	Tersusnya 34 Paket Wisata dan Destinasi wisata, ekraf dan desa wisata Promosi melalui medsos berkolaborasi dengan Duta wisata sebanyak 152 konten promosi dan 22 konten promosi dengan influencer dari Jakarta Penambahan 3 destinasi wisata baru

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		desa dan dikelola oleh Bumdes	
18	Kinerja positif dalam pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan perlu dipertahankan dengan memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang masih terbatas aksesnya. Masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan masih menghadapi kendala dalam mengakses literasi, sehingga perlu dikembangkan model layanan literasi keliling atau berbasis digital. Penguatan sinergi dengan sekolah, komunitas lokal, dan organisasi sosial juga menjadi strategi yang relevan. Selain itu, peningkatan kompetensi pustakawan dan arsiparis secara berkelanjutan dapat mendukung pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyediaan konten literasi yang kontekstual dan inklusif menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan modern. Pendekatan ini mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih literat dan sadar informasi	Hal-hal yang akan dilaksanakan pada TA 2025 sebagai berikut : 1. Melaksanakan layanan perpustakaan keliling di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Rembang sesuai dengan anggaran yang ada. Alasan pemilihan lokasi layanan perpustakaan di wilayah tersebut karena jauh dari perpustakaan umum daerah Kab. Purbalingga sehingga tingkat kunjungannya ke perpustakaan daerah sangat rendah, sehingga perlu diperbanyak dengan kegiatan layanan perpustakaan keliling. 2. Mendorong kepada kecamatan, desa dan sekolah di wilayah tersebut untuk mendirikan rumah baca digital atau perpustakaan digital. Dengan berkembangnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan berliterasi melalui membaca buku – buku digital dan berliterasi digital lainnya. 3. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengelola perpustakaan, pustakawan dan tenaga pengelola arsip/ arsiparis melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan bimtek pengelola kearsipan.	Dengan layanan perpustakaan keliling di daerah tersebut maka kegiatan literasi terutama untuk anak-anak sekolah meningkat.
19	Pencapaian tinggi dalam sektor pertanian harus dijaga dengan mendorong inovasi dan modernisasi sistem produksi pangan. Tantangan yang dihadapi petani saat ini berkaitan	1. Memperluas program penyuluhan terutama ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Penyuluhan ini dapat mencakup penggunaan alat pertanian modern, teknik pertanian presisi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memonitor dan mengelola	1. Penyuluhan pertanian 1703 kelompok tani 2. Pembangunan infrastruktur berupa jalan usaha tani sebanyak 11 paket

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, bibit unggul, dan kepastian pasar. Pemerintah daerah perlu memperluas program penyuluhan berbasis teknologi dan menyediakan fasilitas pembiayaan yang ramah petani. Penguatan rantai pasok melalui integrasi dengan sektor logistik dan perdagangan lokal juga menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset juga dapat mempercepat adopsi inovasi dalam pertanian. Pendekatan ini akan mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan daerah secara berkelanjutan	hasil pertanian. 2. Membangun, memperbaiki jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dari daerah produksi ke pasar	
20	Kinerja sektor industri pengolahan yang belum maksimal dalam kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pengembangan industri lokal. Pemerintah daerah harus mengarahkan perhatian pada sektor industri kecil dan menengah (IKM) sebagai basis penguatan nilai tambah ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang memberikan akses lebih besar terhadap pasar,	Berdasarkan data dari BPS (Purbalingga Dalam Angka), dalam tiga tahun terakhir Sektor Industri memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga. Adapun sub sektor industri yang memberikan kontribusi adalah: 1. Industri Makanan dan Minuman; 2. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; 3. Industri Pengolahan Tembakau; 4. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; 5. Industri Pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.	Dengan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan diharapkan beberapa permasalahan IKM di Kabupaten Purbalingga bisa teratasi antara lain: 1. Sektor Industri Pengolahan bisa menjadi sub sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Purbalingga; 2. Pengembangan IKM berbahan baku lokal; 3. Penumbuhan Wirausaha Baru

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	pembiayaan, dan pelatihan teknis. Dukungan terhadap penggunaan produk dalam negeri juga perlu ditingkatkan melalui kampanye belanja lokal yang berkelanjutan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan komponen lokal. Koordinasi antar OPD untuk mendorong rantai nilai industri lokal menjadi hal penting agar kebijakan ini berdampak nyata. Upaya ini sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih tahan terhadap krisis eksternal.	Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah melalui Dinperindag telah melaksanakan pelatihan kepada pelaku IKM yang merupakan Produk Unggulan Daerah dan berbahan baku lokal antara lain: 1. Pelatihan Pengelasan (IKM Knalpot), Pelatihan Pembuatan Sapu Glagah (IKM Sapu Glagah), Pelatihan Olahan Nanas (IKM Olahan Makan dan Minum), Pelatihan Kerajinan Kayu dan Tempurung (IKM Kerajinan), dan Pelatihan Kerajinan Batu Klawing (IKM Kerajinan). 2. Pendampingan dan memberikan bantuan kepada IKM dalam pengurusan Hak Paten, Hak Merk dan Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). 3. Pendataan pelaku industri di Kabupaten Purbalingga, harapannya dengan data yang valid Pemerintah Daerah bisa mengambil kebijakan dan membuat kegiatan yang tepat dan bermanfaat bagi kemajuan IKM. 4. Program Hilirisasi Produk, Penumbuhan Wirausaha Baru, Pengembangan IKM Berbahan baku lokal, Pengembangan Link and Match dengan Industri Besar akan kami programkan dalam rencana kerja ke depan.	dengan adanya pelatihan-pelatihan; 4. Pendampingan Sertifikasi Hak Merk, Hak Paten dan TKDN bisa meningkatkan daya saing produk daerah di pasar Global.
21	Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Sekretariat Daerah perlu mendorong integrasi sistem	1. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sedang melaksanakan pembangunan layanan	1. Dalam melaksanakan pembangunan e-SAKIP, fitur yang diselesaikan telah sampai pada

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	perencanaan, pelaporan, dan pengawasan kinerja secara menyeluruh. Upaya perbaikan nilai SAKIP tidak cukup hanya dengan pemenuhan administratif, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman substantif atas indikator kinerja yang relevan dan terukur. Setiap unit kerja di bawah Sekretariat Daerah perlu memiliki pemetaan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang jelas, serta target yang realistis. Selain itu, mekanisme pelaporan kinerja berbasis hasil (<i>result-based reporting</i>) perlu didorong agar dapat mencerminkan dampak program secara nyata. Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan evaluasi kinerja juga harus menjadi agenda prioritas. Dengan sistem yang terintegrasi, kinerja pemerintahan akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berbasis elektronik melalui aplikasi e-SAKIP yang dapat diunduh melalui https://e-sakip.purbalinggakab.go.id. 2. e-SAKIP memuat komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. 3. Aplikasi e-SAKIP berintegrasi dengan beberapa layanan elektronik lain, diantaranya komponen perencanaan berkolaborasi dengan e-cascading, Perjanjian Kinerja yang terintegrasi dengan e-kin. Komponen pengukuran kinerja nantinya akan berintegrasi dengan aplikasi Siregol dan e-kinerja. 4. Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, Bagian Organisasi pada Tahun 2025 akan melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan implementasi SAKIP kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Perencana dengan narasumber dari KemenPAN RB maupun dari Pemprov Jawa Tengah.	komponen pengukuran kinerja. Aplikasi ini masih terus mengalami penyempurnaan agar bisa dipergunakan dengan maksimal. 2. Bagian Organisasi selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan implementasi SAKIP kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Perencana.
22	Untuk mendukung efektivitas kinerja kelembagaan DPRD, penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian struktur kerja	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melaksanakan tindak lanjut pada Tahun Anggaran 2025, berupa : 1. Perencanaan telah disusun selaras dengan prioritas DPRD. Sebagai contoh, pada Tahun Anggaran 2025 fokus diarahkan pada penguatan fungsi legislasi dengan memprioritaskan kegiatan fasilitasi	Upaya peningkatan efektivitas kinerja kelembagaan Sekretariat DPRD dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda DPRD secara lebih efisien, terarah, dan akuntabel. Dengan adanya tindak lanjut

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	dan indikator kinerja agar lebih relevan dengan fungsi pendukung legislatif. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas sekretariat dapat dicapai dengan menyusun perencanaan kinerja berbasis prioritas strategis DPRD. Selain itu, perlu dibangun sistem pelaporan hasil kerja yang lebih komprehensif dan mengacu pada capaian substantif, bukan sekadar proses administratif. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi staf juga akan memperkuat pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, Sekretariat DPRD dapat berkontribusi lebih maksimal dalam mendukung agenda kelembagaan DPRD secara efisien dan akuntabel	sosialisasi rancangan peraturan daerah. 2. Penyusunan Rencana Strategis dan penyesuaian indikator kinerja agar lebih terukur serta relevan dengan fungsi dukungan kelembagaan DPRD. 3. Melaksanakan evaluasi triwulanan secara rutin untuk memantau capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.	yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD diharapkan mampu memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga menekankan pada pencapaian hasil yang nyata. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan peningkatan kualitas dukungan kelembagaan bagi DPRD, baik dalam aspek legislasi, pengawasan, maupun penganggaran, sehingga seluruh fungsi DPRD dapat difasilitasi secara optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi bagian dari solusi yang akan memastikan tugas Sekretariat DPRD dapat berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
23	Kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat melalui penguatan basis data yang mutakhir dan inklusif. Bappeda Litbang perlu mengembangkan sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi dengan seluruh OPD agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antar	1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD sudah merujuk pada regulasi dan dokumen perencanaan provinsi dan nasional untuk menjaga keselarasan antardokumen serta memperhatikan dokumen Renstra/ Renja perangkat daerah (simultan). 2. Dalam proses penyusunan perencanaan sudah melibatkan	1. Ketersediaan data makro dan sektoral yang relevan dan <i>up to date</i> melalui sistem Satu Data Purbalingga 2. Menyusun Perbup tentang prioritas data, konsep data (Definisi Operasional Data) 3. Pelibatan

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	dokumen. Pelibatan multipihak—termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil—dalam proses perencanaan juga perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan nyata. Konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, dan program tahunan harus dijaga agar alokasi sumber daya lebih efektif. Selain itu, hasil-hasil kajian dan penelitian harus dioptimalkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan ini akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan	para stakeholder melalui kegiatan-kegiatan forum publik diantaranya konsultasi publik dan Musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten dan provinsi. 3. Tahun 2025 telah berproses Perda Riset dan Inovasi yang menjadi pedoman umum dalam menaungi pelaksanaan dan pemanfaatan riset dan inovasi. Harapannya akan tumbuh riset inovasi yang berkualitas yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.	<i>stakeholder</i> yang lebih luas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
24	Kinerja keuangan daerah yang telah menunjukkan hasil positif perlu dijaga dan ditingkatkan melalui strategi efisiensi dan transparansi yang lebih sistematis. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja dan memastikan proses pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan terbuka. Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan, baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah, sangat penting untuk memastikan pemahaman terhadap	Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, telah dibangun sistem pengelolaan keuangan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Sistem ini dibangun untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten melalui pelatihan, bimbingan teknis, asistensi	Jumlah temuan pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024 merupakan yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	regulasi keuangan yang terus berkembang. Selain itu, BKD perlu mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang lebih interaktif dan mudah dipahami publik. Audit internal juga harus ditingkatkan untuk meminimalkan potensi penyimpangan penggunaan anggaran. Dengan demikian, tata kelola keuangan yang baik akan menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah	maupun monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di SKPD telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta sebagai early warning system sebelum pelaksanaan audit oleh pemeriksa eksternal. Tahun 2025, monitoring dan evaluasi keuangan dan aset telah dilaksanakan pada 8-21 Juli 2025 pada 14 SKPD	
25	Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN agar tercipta birokrasi yang profesional dan berintegritas. Pembinaan karier ASN harus berbasis pada kompetensi dan kinerja, bukan sekadar senioritas atau kedekatan personal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai perlu dirancang secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan strategis daerah. Evaluasi kinerja juga harus dilakukan secara objektif dengan menggunakan indikator yang relevan dan terukur. Selain itu, penting bagi BKPSDM untuk mendorong inovasi dalam proses rekrutmen dan	Penguatan Sistem Merit di Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah diimplementasikan dalam Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, mulai dari Perencanaan Kebutuhan sampai dengan Pemberhentian ASN semuanya dilaksanakan dengan prinsip meritokrasi. Implementasi Sistem Merit juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM. Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Purbalingga terakhir adalah 0, 63 atau berada di kategori "Baik". Dalam Pengembangan Karir ASN saat ini sedang dibangun Manajemen Talenta ASN sesuai dengan amanah Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Dalam Manajemen Talenta ini penataan jabatan ke depan akan menilai ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja serta Integritas dan moralitas melalui sistem informasi (sedang dilaksanakan finalisasi	Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	promosi jabatan, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Dengan reformasi manajemen SDM yang tepat, ASN akan menjadi motor utama dalam transformasi pelayanan publik	perumusan komponen sumbu Potensi dan Kinerja). Evaluasi Kinerja ASN dilaksanakan melalui system informasi yaitu ekinerja milik internal Pemkab Purbalingga yang diintegrasikan dengan Ekinerja milik Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dalam ekinerja ini masing-masing individu mengintervensi kinerja atasan langsung secara berjenjang sehingga mendukung capaian kinerja organisasi. Seluruh ASN juga diwajibkan melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP (jam Pelajaran) per tahun yang dapat mendukung tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi dapat menggunakan berbagai metode seperti Diklat, Kursus, Bimtek, Seminar, Workshop, Webinar, Pelatihan Jarak Jauh. ASN juga dapat memanfaatkan platform ASN berpijar yaitu sebuah platform yang menyediakan berbagai pengembangan kompetensi secara gratis untuk ASN. Dalam pemanfaatan teknologi saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah membuat inovasi antara lain <i>ekinerja</i>, <i>epresensi</i> dan <i>efile</i>. Saat ini juga sedang membangun berbagai layanan administrasi kepegawaian antara lain e-cuti, e-KGB dan sehingga dapat mempermudah ASN dalam memperoleh layanan kepegawaian secara mudah.	
26	Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah perlu memperkuat kapasitas pengawasan	1. Bekerjasama dengan Dinkominfo, Inspektorat Daerah mengembangkan Inovasi SINTALANRAMA untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tindak lanjut secara realtime.	1. Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Penyelesaian pengaduan

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	internal secara menyeluruh. Meskipun kinerja pengawasan telah menunjukkan hasil baik, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil audit dilaksanakan secara tepat waktu. Penguatan sistem <i>whistleblowing</i> serta peningkatan kapasitas auditor internal juga akan mempercepat proses deteksi dan mitigasi potensi penyimpangan. Kolaborasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat agar pengawasan dapat bersifat preventif dan bukan sekadar reaktif. Dengan cara ini, Inspektorat dapat menjadi pilar utama dalam memastikan <i>good governance</i> di lingkungan pemerintah daerah	2. Dalam upaya Penguatan sistem <i>whistleblowing</i>, Inspektorat Daerah telah melakukan perbaikan/evaluasi SOP Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan, melakukan sosialisasi kepada ASN dan Masyarakat melalui berbagai kanal media dan menangani pengaduan berkadar pengawasan yang bersumber dari Lapor MasBup sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. 3. Inspektorat Daerah telah menyusun rencana Peningkatan Kapasitas Auditor, diantaranya Bimbingan Teknis, <i>Inhouse Training</i> dan Diklat. Sampai dengan semester 1, telah dilaksanakan beberapa bimtek, diantaranya: - Bimbingan Teknis Audit Investigasi - Bimbingan Teknis Evaluasi RTP dan Reviu RR - Bimbingan Teknis Evaluasi AKIP Internal, Evaluasi RB Internal dan Penilaian Zona Integritas - Bimbingan Teknis Probity Audit - Workshop SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah juga mengirimkan Auditor untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat) terkait pengawasan diantaranya: - Diklat Audit atas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk 5 orang auditor di Pusdiklatwas Bogor - Diklat CGCAE Inspektur Inspektorat - Diklat CFA untuk 1 orang auditor dari Irbansus - Pelatihan kepemimpinan	Masyarakat berkadar pengawasan 3. Kompetensi APIP yang dituntut selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku 4. Deteksi dini potensi permasalahan dalam tata Kelola pemerintahan

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
		administrator bagi Irbansus Selain mengusulkan, Inspektorat Daerah juga mengirimkan peserta Diklat untuk memenuhi permintaan dari Instansi Terkait (BPKP) 4. Inspektorat Daerah telah melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah lain sebagai upaya efektifitas pengawasan internal antara lain: - Kolaborasi pengawasan desa dengan Dinpermasdes - Penyelesaian kerugian daerah bersama dengan Dindikbud dan Bakeuda - Melakukan workshop pengawasan desa dengan peserta kecamatan dan Dinpermasdes - Kolaborasi dengan Dinkominfo terkait pengawasan SPBE	
27	Dalam menghadapi dinamika sosial dan potensi konflik, Kesbangpol harus memperkuat sistem deteksi dini dan respon cepat terhadap gejala konflik di masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi yang mendukung pemetaan wilayah rawan serta mengidentifikasi akar penyebab konflik secara lebih akurat. Pembinaan masyarakat dan penguatan wawasan kebangsaan juga harus digalakkan secara berkelanjutan melalui forum-forum komunikasi lintas agama, etnis, dan kelompok masyarakat. Koordinasi lintas sektor—termasuk	Dalam rangka penanganan konflik sosial: 1. APBD 2025 dianggarkan : a. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat (rencana dilaksanakan 6 kali, namun ditiadakan untuk efisiensi anggaran); b. Diklat Deteksi Dini (rencana dilaksanakan 2 angkatan, namun ditiadakan untuk efisiensi anggaran); c. Sarasehan Ormas (rencana dilaksanakan 1 kali, namun ditiadakan untuk efisiensi anggaran); d. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (dilaksanakan 6 kali); e. Sosialisasi P4GN (dilaksanakan 4 kali);	Untuk menciptakan stabilitas daerah yang lebih kokoh dan berkelanjutan melalui : 1. Pembinaan Mitra Deradikalisasi dengan memberikan bantuan uang dan hewan kurban; 2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ; 3. Sosialisasi P4GN; 4. Sosialisasi Desa Pancasila; 5. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2025 Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat—perlu diintensifkan agar pencegahan konflik dapat dilakukan secara sinergis. Selain itu, Kesbangpol juga perlu memperkuat peran fasilitatifnya dalam mendorong partisipasi politik yang sehat dan inklusif. Strategi ini akan membantu menciptakan stabilitas daerah yang lebih kokoh dan berkelanjutan	f. Sosialisasi Desa Pancasila (dilaksanakan 4 kali). 2. Mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang keanggotannya terdiri dari anggota Forkopimda dan Instansi Terkait; 3. Mengoptimalkan peran FKDM dalam pemberian informasi dan pemetaan potensi konflik sosial, namun honor FKDM pada TA 2025 akan ditiadakan untuk efisiensi anggaran; 4. Mengoptimalkan peran FKUB dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama; 5. Mengoptimalkan Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang keanggotannya terdiri dari anggota Forkopimda dan Instansi Terkait;	
28	Sebagai ujung tombak pelayanan publik, kecamatan harus diperkuat kapasitasnya baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aparatur kecamatan memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, kecamatan juga perlu diberi kewenangan yang cukup dalam mengelola kebutuhan pelayanan dasar agar tidak bergantung sepenuhnya pada dinas teknis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik tingkat kecamatan harus terus didorong guna meningkatkan efisiensi dan	Dalam rangka pembenahan dan peningkatan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan telah dilaksanakan langkah-langkah antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik kecamatan menggunakan indikator penilaian yang sama dengan unit pelayanan lainnya, seperti dinas, rumah sakit dan puskesmas. Hasil dari monitoring dan evaluasi pelayanan publik dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengalokasian anggaran guna peningkatan pelayanan publik di kecamatan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan.

No	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	3	4	5
	kemudahan akses. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap standar pelayanan minimal di setiap kecamatan. Melalui pendekatan ini, pelayanan publik di tingkat terdepan akan menjadi lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga		

B. Rekomendasi Sesuai Bidang

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
1	Kesehatan	Sebagian besar indikator pada status Sangat Tinggi, tetapi masih terdapat tantangan dalam hal kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 70.83 per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan Balita (AKABA) masing-masing tercatat 13,25 dan 15.76 dari target 7,57 dan 9,05 (status Rendah). Keterbatasan akses layanan kesehatan berkualitas, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak, serta gizi buruk dan penanganan persalinan yang belum optimal dapat menjadi penyebab dari kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan ibu	- Melakukan pemeriksaan EKG pada semua ibu hamil pada TM 2 - Rujukan pasien menggunakan panduan Manual rujukan - Mendata semua ibu PUS Unmeet Need - Pengadaan obat-obat emergency yang tidak tersedia di faskes (aspilet, Nifedipin, MgSo4, benzoat pinisilin, As Tranexamat, Kalsium bikarbonat, dll) - Skrining layak hamil pada Catin dan PUS - Pendampingan ibu hamil risti - Refresing kegawat darurat, drill emergency - Rujukan terencana pada penemuan kasus IUGR - Penanganan ibu hamil dan rematri dengan anemia - Pembagian TTD bagi rematri - Melakukan Aksi bergizi ke	- Pelaksanaan penunjang deteksi dini untuk mengetahui risiko pada ibu hamil dengan dilakukan Ibu Hamil dilakukan pemeriksaan EKG pada TM 2, belum semua Pusk melaksanakan terkendala 8 Pusk belum memiliki EKG - Peningkatan kualitas pelayanan dengan Pendampingan dokter Ahli ke Puskesmas dalam rangka refresing penanganan gadar matneo dan drill emergency - Pelayanan KBPP pada semua ibu



No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		dan anak, edukasi kesehatan dan gizi secara intensif, kerja sama lintas sektor untuk mengatasi faktor risiko serta penguatan sistem deteksi dan respon cepat terhadap kasus kematian ibu dan anak. Selain itu, dalam bidang kesehatan kasus penyakit kulit kehilangan pigmen, seperti vitiligo, dilaporkan cukup banyak terjadi di masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian dari sektor kesehatan untuk memperkuat program promotif dan preventif, termasuk edukasi masyarakat, peningkatan layanan spesialisik di fasilitas kesehatan dasar, dan penyediaan akses pengobatan yang lebih terjangkau. Indikator kematian ibu dan bayi yang masih berada pada status “sedang” hingga “rendah” mencerminkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat Pasal 28H UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menjamin hak setiap warga negara	Sekolah SLTP, SLTa sederajat 12. Skrining Bayi Baru Lahir (SHK,HAK,G6PD dan PJB) 13. Pelaksanaan Kalakarya MTBS di puskesmas 14. Orientasi Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT)	bersalin dan Adanya perbup KBPP (KB pasca persalinan) 4. Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu hamil KEK dan Balita kurang gizi 5. Pelatihan kader posyandu dengan 25 ketrampilan kader. 6. Skrining Bayi Baru Lahir 7. Kalakarya MTBS dilaksanakan pada 10 puskesmas

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		atas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam konteks ini, perlu diantisipasi potensi persoalan hukum apabila terdapat persepsi bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin ketersediaan layanan kesehatan dasar. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada kemungkinan tuntutan hukum berbasis <i>state liability</i> (tanggung jawab negara/daerah) apabila masyarakat merasa dirugikan akibat keterbatasan layanan yang tersedia.		
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Secara umum menunjukkan capaian kinerja yang <i>Sangat Tinggi</i> , namun Indeks Jalan Mantap dan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang masih berada di status <i>Tinggi</i> (68,38% dari target 79,33%). Selain itu, Persentase Peningkatan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik hanya mencapai 1,34% dari target 2,00% (status <i>Sedang</i>). Keterbatasan anggaran dan kondisi geografis menjadi faktor utama yang memengaruhi. Untuk mengatasinya, perlu	1. Pada tahun 2025 dilakukan penambahan alokasi anggaran APBD sebesar 5% namun kenaikan persentase di tahun 2025 belum memenuhi target tahun 2024 sebesar 10,95% sehingga kami akan menangani kegiatan secara bertahap di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah direncanakan. 2. Pada tahun 2025 masih ada 46,88 persen atau 119 bangunan yang kondisinya rusak dari jumlah keseluruhan sebanyak 224. Terhadap bangunan yang masih fungsional tersebut,	1. Meningkatkan nilai kondisi kemantapan jalan sesuai dengan jumlah anggaran dan panjang penanganan yang dapat dilaksanakan. 2. Tepantaunya kondisi gedung pemerintah yang masih fungsional

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		peningkatan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan serta perencanaan prioritas berbasis kebutuhan dan kerusakan. Selain itu, perlu disusun rencana pemeliharaan bangunan pemerintah secara berkala dan sistematis serta mengajukan anggaran memadai guna menjaga kualitas infrastruktur pemerintah	dilakukan monitoring / pengecekan / evaluasi untuk menilai apakah bangunan tersebut masih aman dan layak untuk ditempati. Kedepan anggaran pemeliharaan Gedung Kana terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah	
3	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Secara umum menunjukkan capaian <i>Sangat Tinggi</i> secara umum, namun cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhasil graduasi menuju kemandirian hanya sebesar 3,55% dari target 10,00%, sehingga masuk dalam status <i>Rendah</i> . Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan proporsi KPM yang berhasil mencapai status mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan). Ini berarti bahwa KPM telah mengalami peningkatan sosial ekonomi dan tidak lagi memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH. Rendahnya kemandirian KPM dapat diakibatkan oleh minimnya pendampingan	1. Melakukan analisis ulang terhadap KPM yang belum berhasil graduasi untuk mengidentifikasi hambatan secara spesifik. 2. Menyusun ulang strategi pemberdayaan yang lebih adaptif dengan kebutuhan lokal dan profil ekonomi KPM. 3. Mengembangkan modul pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan permintaan pasar. 4. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait (Disnaker, UMKM, koperasi, CSR) untuk membuka peluang kerja dan usaha. 5. Membangun sistem insentif atau penghargaan untuk KPM yang berhasil graduasi sebagai motivasi bagi peserta lainnya	1. Tidak adanya informasi rinci mengenai penyebab kegagalan KPM dalam mencapai kemandirian. 2. Program pemberdayaan kurang relevan dan tidak menyesuaikan dengan kondisi nyata penerima manfaat. 3. Tidak adanya fasilitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau kemampuan KPM. 4. Kurangnya insentif atau motivasi bagi KPM untuk lepas dari ketergantungan bantuan sosial.

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		yang intensif, kondisi ekonomi yang belum membaik, serta kurangnya optimalisasi program pemberdayaan. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi KPM, pendampingan berkelanjutan, serta perbaikan mekanisme program agar lebih adaptif terhadap kebutuhan penerima manfaat		
4	Perhubungan	Secara umum mencatatkan capaian <i>Sangat Tinggi</i> , namun masih terdapat beberapa IKU dengan status <i>Sedang</i> , seperti Rasio Konektivitas Angkutan Jalan (70% dari target 75,61%), Persentase Angkutan Umum Aktif (73,44% dari target 75,1%), dan V/C Rasio Jalan Kabupaten (perbandingan antara volume lalu lintas yang melewati suatu ruas jalan dengan kapasitas jalan tersebut) yang menunjukkan kepadatan lalu lintas (0,45 dari target 0,31). Penyebabnya antara lain rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Solusinya	Dinas Perhubungan melakukan promosi penggunaan angkutan umum berupa program angkutan wisata yang terintegrasi dengan Trans Jateng dalam upaya meningkatkan IKU konektivitas angkutan umum	1. Konektivitas dengan integrasi angkutan pedesaan dengan Trans Jateng. 2. Minat masyarakat menggunakan angkutan umum dengan angkutan pedesaan berbasis wisata.

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		termasuk revitalisasi layanan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, penambahan rute, promosi penggunaan angkutan umum, serta peningkatan infrastruktur jalan agar lebih lancar dan efisien		
5	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan penanaman modal menunjukkan dua IKU dengan status <i>Rendah</i> , yakni Pertumbuhan Nilai Investasi (2,36% dari target 10,38%) dan Realisasi Investasi (Rp 1,001 triliun dari target Rp 1,535 triliun). Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, proses perizinan yang belum optimal, dan kurangnya promosi investasi. Rekomendasi untuk peningkatan mencakup penyusunan kebijakan pengembangan investasi yang menarik, penyederhanaan proses perizinan, promosi aktif potensi daerah, serta penciptaan iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif	Tahun 2025 telah dilaksanakan : 1. FGD mengenai skema pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan masih dilakukan kajian lebih lanjut terhadap penerimaan daerah. 2. Akan dilakukan evaluasi terhadap program-program yang tertaung dalam Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2019-2025 sehingga akan dapat diketahui keberhasilan dan hambatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengelola ekosistem investasi sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan investasi tahun-tahun berikutnya. 3. Melakukan kajian strategi promosi penanaman modal yang lebih komprehensif	1. Program pengembangan iklim penanaman modal 2. Program Promosi Penanaman Modal
6	Peningkatan Inovasi dan Kolaborasi	Untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran,	1. Dengan keterbatasan anggaran untuk pembangunan, kreativitas dan inovasi sangat	Pelibatan multipihak dalam peningkatan riset dan inovasi. Meskipun dalam

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		pemerintah daerah perlu mendorong inovasi sebagai pendekatan strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Inovasi ini harus didukung oleh kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas masyarakat. Skema kemitraan strategis dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi instrumen nyata dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Pemerintah perlu membentuk platform kolaboratif yang memfasilitasi ide, sumber daya, dan partisipasi multipihak secara terstruktur. Selain itu, pemberian insentif dan pengakuan terhadap inisiatif lokal yang inovatif dapat memotivasi aparatur dan masyarakat untuk terus berinovasi. Upaya ini diharapkan menghasilkan solusi kreatif yang aplikatif, hemat anggaran, dan berdampak luas bagi masyarakat	dibutuhkan untuk tercapainya target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Disamping keterbatasan anggaran, SDM kelitbangan juga sangat minim, sehingga solusinya adalah berkolaorasi dengan berbagai pihak, seperti Perguruan Tinggi maupun lembaga riset. 2. Untuk mendorong kreativitas berinovasi, dilaksanakan melalui ajang kompetisi inovasi berjenjang di tingkat kabupaten dan provinsi. 3. Skema kemitraan (CSR) untuk pembiayaan riset dan inovasi menjadi peluang yang strategis dilakukan. Termasuk diantaranya bermitra dengan lembaga kelitbangan dan perguruan tinggi.	pelaksanannya belum terlalu optimal.
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan	Pengelolaan keuangan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan mengacu kepada	Jumlah temuan pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024 merupakan

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		memerlukan penguatan pada seluruh siklusnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program anggaran tersusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta memiliki indikator kinerja yang jelas. Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali potensi ekonomi lokal, memperbaiki sistem pemungutan, serta meminimalisasi kebocoran penerimaan melalui digitalisasi dan pengawasan internal. Reformasi tata kelola pendapatan juga harus memperhatikan keadilan dan partisipasi masyarakat agar kepatuhan dan kesadaran membayar pajak meningkat. Dengan demikian,	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga dan perubahannya. Penguatan proses pengelolaan keuangan daerah yang sudah dilaksanakan antara lain: 1. Pembinaan Pengelola Keuangan secara rutin untuk peningkatan kompetensi SDM; 2. Monitoring, evaluasi, dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ke OPD; 3. Penggunaan aplikasi CMS (Cash Management System) dan implementasi KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) untuk transaksi non tunai 4. Implementasi aplikasi SIPD RI secara penuh dari proses penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan 5. Implementasi penilaian laporan keuangan SKPD menggunakan instrumen WScore untuk mengukut tingkat kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		stabilitas keuangan daerah dapat terjaga dan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik.		
		2. Belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran juga menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Belanja modal, sebagai instrumen utama dalam penyediaan infrastruktur publik dan peningkatan pelayanan dasar, perlu dikelola secara optimal. Ketika realisasi belanja modal jauh di bawah target, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen ini, hal tersebut mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketidaktercapaiannya dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi anggaran, yang bertentangan dengan prinsip efektivitas dalam penggunaan APBD sebagaimana	Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Daerah akan melakukan penguatan dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan memastikan adanya sinkronisasi yang lebih baik antara prioritas pembangunan, kapasitas pendanaan, serta kesiapan pelaksanaan program. Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih realistis dan implementatif. Selain itu, peningkatan kualitas analisis terhadap kebutuhan dan kelayakan program belanja modal juga akan menjadi fokus utama, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah	

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan keuangan daerah harus mencakup perbaikan menyeluruh baik pada sisi pendapatan maupun belanja untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan		
		3. Mengingat tingkat serapan belanja modal yang masih rendah, DPRD mendorong dilakukannya audit tematik oleh Inspektorat Daerah sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam pelaksanaan, termasuk aspek perencanaan teknis maupun kepatuhan terhadap prosedur pengadaan. Langkah ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan	sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah akan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi realisasi belanja modal melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penyusunan indikator kinerja yang terukur. Hasil evaluasi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan periodik yang ringkas, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga perkembangan pembangunan dapat terus dikawal secara transparan, efisien, dan tepat sasaran	

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		anggaran serta peningkatan kualitas belanja ke depan		
8	Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Perlu ditempuh langkah-langkah yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, khususnya dalam pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), diperlukan strategi pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta kerja sama dengan pihak ketiga guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan, seperti perbaikan jalan di sekitar lokasi kegiatan.	Langkah-langkah strategis dan sistematis yang ditempuh diantaranya: 1. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan membentuk Tim Lintas Instansi dalam rangka penataan MBLB; 2. Melakukan pendataan terhadap pelaku usaha MBLB; 3. Pemprov dan Pemkab mengintegrasikan permohonan izin MBLB sesuai RTRW/RDTR; 4. Memungut kewajiban pajak terhadap seluruh aktivitas eksploitasi penambangan MBLB, kecuali jika penambangan dilakukan pada wilayah terlarang; 5. Mewajibkan seluruh kontraktor/rekanan proyek pembangunan agar menggunakan material MBLB berizin dan patuh pajak; 6. Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut penyelesaian dan perbaikan yang konkret, komprehensif dan terukur serta terus melakukan inovasi; 7. Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penertiban dan penegakan aturan tegas dan obyektif sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku;	

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
			8. TNI lebih memperkuat dukungan dalam penataan pertambangan MBLB	
		2. Pada konteks Pajak Tempat Hiburan, perlu dilakukan pembinaan sekaligus penegakan regulasi terhadap pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), guna meningkatkan kepatuhan administrasi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pajak hiburan menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengelolaan sektor ini. Pemerintah daerah disarankan untuk segera menginisiasi penyusunan Perda Pajak Hiburan guna memperluas basis pajak daerah serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha hiburan lokal.	Dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, semua peraturan terkait pajak dan retribusi daerah (PDRD) dijadikan satu Perda. di Kabupaten Purbalingga ketentuan tentang pengelolaan pajak hiburan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembinaan sekaligus penegakan regulasi terhadap pelaku usaha yang belum mempunyai NPWPD adalah melakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan kunjungan untuk pendataan terhadap objek pajak hiburan.	Ekstensifikasi dengan upaya penambahan Wajib Pajak (WP) dan Obyek Pajak (OP) baru pada jenis pajak Hiburan
		3. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak daerah provinsi, hanya saja dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di Tahun 2025 mulai pemberlakuan Opsen pajak PKB bagi daerah	Penghapusan piutang PKB dari tahun2 sebelumnya 2025 yang berdampak peningkatan pembayaran PKB di

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat kebijakan ini berdampak langsung terhadap menurunnya penerimaan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor di daerah. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi kompensasi agar pendapatan asli daerah tetap stabil dan tidak terganggu oleh kebijakan eksternal.	Kabupaten/Kota sebesar 66%. Dan pada Tahun 2025 provinsi Jawa Tengah memberlakukan program pemutihan bagi piutang PKB di Tahun2 sebelumnya 2025 yang berdampak justru meningkatnya pendapatan Opsen karena PKB yang dibayarkan adalah tahun berjalan atau PKB Tahun 2025 dan berdampak adanya tambahan Opsen PKB bagi pemerintah Kab/Kota.	Tahun 2025 dan Opsen PKB bagi Pemerintah Kab./Kota se- Jawa Tengah
		4. Keterlibatan aparatur desa dalam distribusi dan penagihan SPPT dinilai masih kurang optimal dan berpotensi menurunkan efektivitas pemungutan PBB di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah didorong untuk memberdayakan perangkat desa sebagai mitra aktif dalam sistem perpajakan, dengan pelatihan teknis dan dukungan regulatif yang memadai.	Untuk keterlibatan aparatur kecamatan, dan desa/kelurahan dalam distribusi dan penagihan SPPT telah dibentuk SK Bupati No 25 Tahun 2025 tentang Penunjukkan tim pemungut PBB-P2 di tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan yang berisi tugas dan kewajiban tim pemungut. Harapannya dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 dan realisasi pendapatan dari PBB-P2.	Proses pendistribusian, penagihan serta penyetoran PBB-P2 sampai tingkat desa/kelurahan dapat terlaksana dengan baik serta pemberdayaan perangkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah juga terjalin dengan baik
		5. Optimalisasi penerimaan dari sektor retribusi parkir perlu menjadi prioritas	Menjadi masukan yang baik dan untuk OPD yang melaksanakan pengelolaan retribusi parkir agar	Realisasi pendapatan dari retribusi parkir akan lebih optimal serta

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		melalui pendekatan berbasis data dan teknologi. DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian potensi penerimaan retribusi parkir secara akademik bekerja sama dengan perguruan tinggi, sebagai dasar perbaikan kebijakan dan sistem pengelolaan parkir yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel	melakukan kajian potensi penerimaan parkir yang dilakukan bekerjasama dengan Akademisi menggunakan pendekatan berbasis data potensi penggunaan IT dalam pengelolaannya	dengan menggunakan IT akan mempermudah proses pemungutan serta mengurangi kebocoran ² pendapatannya
9	Sinkronisasi Program Pembangunan dengan Visi Daerah	Setiap program dan kegiatan pembangunan daerah perlu diselaraskan secara konsisten dengan visi dan misi kepala daerah. Penyelarasan ini penting guna menjamin kesinambungan arah pembangunan serta pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang secara optimal	Sinkronisasi Program Pembangunan dengan Visi Daerah sudah dilakukan. Guna memastikan bahwa program dan kegiatan selaras dan konsisten dengan visi misi daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi berjenjang dari APIP Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah.	Memastikan konsistensi dan keselarasan
10	Penataan dan Optimalisasi Aset Daerah	Pemerintah daerah perlu memperjelas status kepemilikan seluruh aset yang masih bermasalah, terutama yang berada dalam sengketa atau berstatus quo, guna menghindari potensi kerugian dan konflik hukum di kemudian hari. Inventarisasi aset secara menyeluruh dan	1. Pengamanan terhadap aset terutama tanah secara bertahap melalui sertifikasi tanah, mediasi terkait aset yang bermasalah dengan Kantor Pertanahan dan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri selaku Pengacara Negara untuk penyelesaian aset	1. pengamanan tanah melalui pensertipikatan tanah sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 1.713 KIB dan capaian pensertipiatan tahun 2025 sebanyak 111 sertifikat dari 54

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		pemutakhiran data aset harus menjadi prioritas agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan lebih akurat. Arah kebijakan pemanfaatan aset yang selama ini belum dioptimalkan juga harus ditetapkan secara tegas dan strategis, misalnya dengan skema pemanfaatan bersama atau kerja sama pemanfaatan yang menguntungkan daerah. Selain itu, aset-aset yang tidak produktif perlu direvitalisasi agar dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif. Dengan tata kelola aset yang baik, pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menciptakan nilai tambah dari aset yang dimiliki	yang bermasalah terutama tanah. 2. Pemerintah Daerah telah melaksanakan inventarisasi mandiri oleh semua SKPD setiap tahun dan melakukan rekonsiliasi dan validasi aset secara rutin untuk memutakhirkan data dan pencatatan aset. 3. Optimalisasi Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah melakukan dengan mekanisme retribusi BMD melalui SKPD pengelola pendapatan dan Pinjam Pakai aset dengan Instansi Pemerintah Lainnya. 4. Pemanfaatan aset yang tidak produktif mulai dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, untuk mendukung program strategis pemerintah	bidang KIB. 2. Data aset telah dimutakhirkan dengan melengkapi parameter di semua KIB 3. Pemanfaatan aset telah dilaksanakan secara optimal oleh SKPD pengelola pendapatan dan pinjam pakai dilaksanakan secara tertib administrasi 4. Pemanfaatan aset idle telah dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk pendirian SPPG untuk mendukung program nasional untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah
11	Penguatan Program Keagamaan	Program-program di bidang keagamaan perlu diperkuat dan disinergikan secara lebih optimal. Program yang telah berjalan sebelumnya belum sepenuhnya selaras dengan visi daerah, yaitu <i>"Purbalingga Berakhlakul"</i>		

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		<i>Karimah".</i> Diperlukan penajaman substansi program agar lebih menyentuh pembangunan karakter dan akhlak masyarakat		
12	Pengembangan Sektor Pertanian	1. Perlu disusun perencanaan pembangunan atau <i>road map</i> sektor pertanian yang berbasis pada data dan karakteristik wilayah (misalnya dataran rendah, sedang, dan tinggi), agar pengembangan komoditas pertanian sesuai dengan potensi lokal. 2. Pemberdayaan kelembagaan petani, seperti kelompok tani (Gapoktan), perlu ditingkatkan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Di sisi lain, bagi kelompok tani (Gapoktan) yang telah menerima bantuan dari pemerintah, belum terlihat dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dalam penyaluran bantuan, termasuk penguatan	1. Melakukan pemetaan dan analisis penggunaan lahan untuk mengidentifikasi pertanian sesuai dengan komoditas 2. Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan Gapoktan dengan keterampilan manajerial yang baik, sehingga mereka dapat mengelola organisasi dengan lebih efektif. Pelatihan mencakup manajemen keuangan, perencanaan usaha pertanian, pengelolaan SDM, dan teknik pertanian modern. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan terhadap bantuan yang telah diberikan. 4. Melakukan pendekatan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset agar dapat melakukan kerjasama dalam penggunaan teknologi pertanian yang lebih maju	1. Tersusunnya peta lahan tanaman pangan 2. Penyuluhan rutin terhadap gapoktan 3. Pengawasan terhadap bantuan yang diberikan

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		fungsi pendampingan, monitoring dan evaluasi berkala, serta transparansi dalam pemanfaatannya. 3. Diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk menghadirkan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan dan dapat diterapkan oleh petani secara langsung. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian		
13	Koperasi	Meskipun persentase koperasi sehat yang tercatat oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hampir mencapai target, dengan realisasi sebesar 64,46% dari target 65,75%, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak koperasi yang tidak beroperasi secara optimal, bahkan mendekati kondisi tidak aktif. Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pembinaan dan	1. Dinas Koperasi dan UKM telah dan sedang melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop perkoperasian yang diikuti oleh gerakan koperasi dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pengelolaan koperasi; 2. Mendampingi pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga terbitnya Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan menggunakan instrument Kertas Kerja	1. Kualitas SDM koperasi sudah mengalami perbaikan dan peningkatan melalui pelaksanaan pelatihan dan workshop koperasi 2. Terbentuknya 239 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di desa. 3. Telah terpetakan

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		pengawasan koperasi, khususnya dalam meningkatkan jumlah koperasi yang masuk dalam kategori sangat berkualitas, berkualitas, dan sehat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, asistensi manajerial yang berkelanjutan, serta pemberian insentif bagi koperasi yang mampu memenuhi standar. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola koperasi yang lebih profesional, sehat, dan berdaya saing	Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) dengan tujuan dan maksud untuk mengetahui kondisi koperasi sekaligus untuk memetakan kondisi koperasi di Purbalingga	kondisi koperasi di Purbalingga berdasarkan predikat kesehatan koperasi.
14	Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non-Formal	Program PAUD non-formal perlu mendapat perhatian lebih, mengingat koordinasinya melibatkan dua kementerian (Kemendikbudristek dan Kemendes). Di sisi lain, perlu diberikan perhatian khusus terhadap honorarium bagi tenaga pendidik, mengingat Pemerintah Desa menghadapi keterbatasan dalam memberikan dukungan akibat keterikatan pada regulasi	Alokasi anggaran: Rp 5.087.400.000,- Jumlah penerima: 962 orang SOP: Tutor Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (POS PAUD/ KB/TPA/SPS dengan : - Masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); - Masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	Beberapa tutor PAUD mengalami kenaikan honor APBD dengan bertambahnya masa kerja sesuai kriteria/kategori penerimaan.

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		Standar Satuan Harga (SSH)		
15	Perlindungan dan Kesejahteraan Kader Kesehatan	Mendorong adanya penyesuaian regulasi yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan kader kesehatan. Hal ini penting mengingat peran vital kader kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di tingkat komunitas	Dinpermasdes melibatkan stakeholder terkait seperti: Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bapelitbangda, Bakeuda Wirapraja dan PPDI untuk mereview besaran insentif bagi Kader yang kemudian disetujui untuk dimasukkan dalam Perbup tentang SHS bagi Desa	Insentif kader Pada Tahun 2025 mengalami kenaikan 100% yang sebelumnya indeks Rp. 50.000,00 menjadi Rp. 100.000,00 per bulan
16	Sosial dan Perlindungan Masyarakat	Merekomendasikan pengembangan kebijakan perlindungan sosial berbasis komunitas serta pendidikan karakter yang menasar keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, sebagai respons terhadap tingginya kasus penyimpangan seksual di beberapa wilayah, dengan mengoptimalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat	1. Penyusunan raperda KLA 2. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Perlindungan Anak dan Naskah Akademik Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1. Mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan kekerasan terhadap anak 2. Melarang eksploitasi anak 3. Kewajiban pemerinah daerah untuk memberikan hak nak atas Pendidikan, Kesehatan, identitas, lingkungan yang mana dan kehidupan yang layak 4. Penyediaan layanan yang ramah anak, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum dan pemulihan

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
				sosial 5. Pembangunan dan penataan lingkungan berbasis kepentingan terbaik bagi anak
17	Lingkungan Hidup	Mendorong penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan melalui penerapan sanksi administratif maupun hukum, serta membangun pendekatan kolaboratif dengan pelaku industri untuk secara bertahap menerapkan prinsip <i>green industry</i>	Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan yang diterbitkan melalui OSS (Online Single Sub mision) yang menjadi kewenangan kabupataen telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun secara Lintas Sektoral dengan melibatkan OPD terkait (DPMPSP, DPU-PR, DLH, DINKES, PERTANIAN, DISPERINDAG, PARIWISATA, DINRUMKIM, PERHUBUNGAN). Tahun 2025 dilaksanakan pengawasan terhadap 44 Perusahaan dimulai bulan Pebruari s/d Juni 2023. Hasil pengawasan disampaikan secara langsung kepada penanggungjawab kegiatan secara off line dan online melalui system OSS Pengawasan dan pembinaan secara internal juga Dinas Lingkungan Hidup dilakukan lintas program bidang bersama bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Sampai dengan juni 2025 telah dikeluarkan sanksi dan paksaan pemerintah terhadap 3 usaha dan atau kegiatan	Peningkatan Ketaan dan Kepatuhan Usaha Atau Kegiatan (Perusahaan) Terhadap Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purbalingga Berkoordinasi Dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Kementrian) Terhadap usaha atau kegiatan yang menjandi kewenangannya Usulan untuk peningkatan jumlah tenaga dan peningkatan ketrampilan.

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
18	Kepemudaan dan Olahraga	Merekomendasikan reaktivasi peran Karang Taruna sebagai strategi pemberdayaan pemuda, melalui dukungan program peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, serta integrasi dengan program pembangunan kepemudaan lintas sektor		
19	Komunikasi dan Informatika (Transparansi Pemerintahan)	Mendorong penyusunan sistem pelaporan pelaksanaan program APBD yang lebih transparan dan komunikatif, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta melibatkan partisipasi publik, untuk memudahkan DPRD dan masyarakat dalam memahami capaian dan manfaat program pembangunan		
20	Pemerintahan Umum dan Kerja Sama	1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan instansi vertikal yang beroperasi di wilayah Purbalingga, guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan program strategis lintas sektor. Koordinasi yang rutin dan terstruktur sangat penting agar pemerintah daerah		

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		dan DPRD memiliki informasi yang komprehensif mengenai rencana dan pelaksanaan program dari instansi vertikal. Hal ini memungkinkan integrasi program pusat dan daerah, meminimalisasi tumpang tindih kegiatan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas publik. Selain itu, dengan mengetahui rencana program instansi vertikal, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pelengkap atau pendukung agar hasilnya lebih berdampak pada masyarakat. Ke depan, forum koordinasi lintas sektor secara berkala perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai platform komunikasi dan pemecahan masalah lintas kelembagaan.		
		2. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR),	Sebagai tindak lanjut atas Perda tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 110 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan	Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		DPRD mendorong pemerintah daerah agar membentuk tim pelaksana CSR yang memiliki mandat jelas dan kompetensi memadai. Tim tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat agar proses pelaksanaan CSR berlangsung transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga perlu menyusun mekanisme pelaporan, evaluasi, dan prioritas program CSR agar pelaksanaannya tidak bersifat simbolis, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Dengan adanya struktur yang jelas, pelaksanaan CSR dapat menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dibangun sistem kolaborasi antara tim pelaksana CSR dengan perangkat daerah dan stakeholder lokal, agar program CSR lebih terarah, tepat	Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Saat ini Pemda sedang melakukan persiapan dalam rangka mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSLBU yaitu Pembentukan Forum TJSLBU yang diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan Bupati. Anggota Forum TJSLBU berasal dari unsur Badan Usaha dan Forum ini sesuai ketentuan bertugas mengatur tata cara dan pelaksanaan TJSLBU. Sebelum dilaksanakan Musyawarah Daerah dibentuk <i>Caretaker</i> yang dibentuk oleh Forum CSR Provinsi, untuk Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang belum terbentuk Forum CSR Provinsi, sehingga SK <i>Caretaker</i> dikeluarkan oleh Forum Nasional. Apabila tidak/belum ada Forum CSR Provinsi maka Musda melibatkan Forum CSR Nasional dengan unsur: - Forum Nasional 1 orang; - Provinsi (dari Birokrasi apabila belum ada Forum Provinsi) 1 orang; - Kabupaten (Badan Usaha/Birokrasi) 3 orang. Panitia Pengarah/<i>Steering Committee/SC</i> dari Forum	

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		sasaran, dan memberikan dampak langsung yang nyata bagi masyarakat.	Nasional dan <i>Caretaker</i> sedangkan Panitia Pelaksana/<i>Organizing Committee/OC</i> dari Daerah. Selanjutnya untuk menjamin transparansi, pelaporan pelaksanaan TJSLBU dilakukan melalui sistem daring berbasis pada laman https://tjsl.purbalinggakab.go.id/. Laporan ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Setelah terbentuknya Forum TJSLBU akan kami arahkan dan optimalkan dalam menjalankan fungsinya untuk mengkoordinasikan TJSLBU serta akan kami sampaikan program prioritas pemerintah daerah untuk dapat diintervensi melalui dana TJSLBU dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga	
		3. Pemerintah Daerah diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap metode klasifikasi capaian indikator kinerja guna memastikan keselarasan antara realisasi dan kategori capaian yang ditetapkan. Untuk menjaga objektivitas dan akurasi, pelibatan Inspektorat serta pihak independen dalam proses validasi	Klasifikasi capaian indikator mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam pengukuran kinerja tahun 2025 telah dilaksanakan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya yaitu Inspektorat, Bappelibangda dan Bagian Organisasi	Keselarasan dalam melaksanakan evaluasi terhadap metode klasifikasi capaian indikator kinerja.

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		data kinerja perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem akuntabilitas		
21	LKPj	1. Dalam rangka memperkuat peran DPRD sebagai forum akuntabilitas publik, perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme pengawasan lanjutan yang secara khusus bertugas memantau tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPj. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi <i>checks and balances</i>, sekaligus memastikan bahwa proses evaluasi tidak bersifat simbolik, melainkan memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja pemerintahan daerah. 2. LKPj dan rekomendasi DPRD idealnya dapat dioptimalkan sebagai rujukan dalam penyesuaian kebijakan secara <i>real-time</i>, tidak terbatas pada agenda evaluatif tahunan semata. Oleh karena itu, perlu	Penyusunan dan penyampaian dokumen LKPj Bupati mengacu pada ketentuan dalam PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terhadap rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati telah diteruskan kepada perangkat daerah yang membidangi dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya yang mana pelaporan tindak lanjutnya akan menjadi bagian dalam dokumen LKPj Bupati Tahun N+1.	Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati.

No	BIDANG	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024	TINDAK LANJUT PADA TA 2025	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
		dipertimbangkan pembentukan mekanisme tinjauan kebijakan menengah tahunan (<i>mid-year policy review</i>) yang berbasis pada hasil evaluasi LKPj serta capaian indikator kinerja strategis, guna memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang ada		

BAB IV

PENYELENGGARAAN

TUGAS PEMBANTUAN



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuankan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

A. Urusan Pertanian

1) Dasar Hukum

DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.08.4.039158/2025, tanggal 02 Desember 2024 yang kemudian diperbarui dalam DIPA Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.13.4.691347/2025, tanggal 18 Juli 2025.

2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diperbarui menjadi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan adalah Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND). Kegiatan UPLAND adalah kegiatan integrasi kapulaga dan kambing yang berlokasi di 8 desa di Kecamatan Karangmoncol dan 8 desa di Kecamatan Rembang. Penerima kegiatan ini adalah 29 Kelompok Tani yang terdiri dari 13 Kelompok Tani di Kecamatan Karangmoncol dan 16 Kelompok Tani di Kecamatan Rembang.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada kegiatan ini ditujukan untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan UPLAND di Kabupaten Purbalingga. Komponen yang dibebankan antara lain yaitu :

- Honorarium Koordinator Fasilitator Desa sejumlah 1 orang;
 - Honorarium Fasilitator Desa sejumlah 6 orang;
 - Honorarium Petugas *On-Granting Office* (OGO) sejumlah 2 orang;
 - Bantuan transport Koordinator Fasilitator Desa sejumlah 1 orang;
 - Bantuan transport Fasilitator Desa sejumlah 6 orang;
 - Perjalanan dinas Penyuluh Pertanian Pendamping Kegiatan sejumlah 16 orang;
 - Operasional kendaraan, belanja bahan dan pertemuan.
- 5) Sumber dan Jumlah Anggaran
- Sumber Dana : PHLN IFAD dan IsDB
 Jumlah Anggaran : Rp.821.600.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp.760.412.800,-
 Presentase : 92,55%
- 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
 Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai.
- 7) Permasalahan dan Solusi
 Tidak ada.

B. Urusan Sosial

- 1) Dasar Hukum
 DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/422 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni
- 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan
 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
- 4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 Pendampingan penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Ngopeni (Banjamsos KAJEN).
- 5) Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber Dana : -
- Jumlah Anggaran : Rp.0,-
- Realisasi Anggaran : Rp.,-
- Presentase : %

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai.

7) Permasalahan dan Solusi

- Terbatasnya kuota Banjamsos KAJEN sehingga setiap kecamatan memiliki daftar tunggu calon Penerima Manfaat;
- Bantuan KAJEN tidak boleh beririsan dengan bantuan pusat lainnya sehingga verifikasi benar-benar harus dilakukan secara cermat

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

A. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Dasar Hukum

DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.

3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan target kinerja :

- a) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga ;
- b) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana ;
- c) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Nonformal

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- a) Penyusunan Profil Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana);
 - b) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
 - c) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; dan
 - d) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- 5) Sumber dan Jumlah Anggaran
- Sumber Dana :
 - Jumlah Anggaran : Rp.0,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.0,-
 - Presentase : 0%
- 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana cukup memadai
- 7) Permasalahan dan Solusi
- a) Sosialisasi implementasi pendidikan kependudukan belum dapat dilaksanakan di semua sekolah di Kabupaten Purbalingga;
 - b) Adanya gangguan atau perbaikan pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sehingga input laporan terlambat menunggu aplikasi SIGA dapat digunakan kembali.

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

- a. Sosialisasi implementasi pendidikan kependudukan belum dapat dilaksanakan di semua sekolah di Kabupaten Purbalingga;
- b. Adanya gangguan atau perbaikan pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sehingga input laporan terlambat menunggu aplikasi SIGA dapat digunakan kembali; dan
- c. Terbatasnya kuota Banjamsos KAJEN, sehingga setiap kecamatan memiliki daftar tunggu calon Penerima Manfaat; Bantuan KAJEN tidak boleh beririsan dengan bantuan pusat lainnya sehingga verifikasi benar-benar harus dilakukan secara cermat.

Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi terkait Pendidikan Kependudukan ke sekolah-sekolah secara bertahap;
- b. Melaksanakan koordinasi ke BKKBN perwakilan provinsi terkait gangguan aplikasi SIGA;
- c. Berkoordinasi dengan petugas penginput laporan di Balai KB Kecamatan agar laporan dilaksanakan secara manual terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP



B A B V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purbalingga Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Substansi LKPJ ini merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2025 .

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan berbagai kebijakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dari seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan yang dicapai selama kurun waktu tahun 2025 merupakan partisipasi aktif dari semua komponen pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat serta berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta seluruh *stakeholders* yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keberhasilan serta prestasi yang telah diraih selama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun 2025 baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari pihak lain yang turut mengapresiasi patut disyukuri mengingat keberhasilan dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya untuk dapat berkarya, bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin serta dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat.

Perlu disadari bahwa belum semua aspek pembangunan dapat dilaksanakan secara sempurna dan paripurna. Maka dari itu hubungan yang serasi dan seimbang serta keharmonisan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud dari representasi rakyat Kabupaten Purbalingga, serta dukungan dan kebersamaan seluruh warga masyarakat dalam upaya ikut mewarnai jalannya proses pemerintahan dan turut serta dalam pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan di segala aspek sangat dibutuhkan pada waktu yang akan datang.



Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jalinan komunikasi yang berlangsung selama ini. Mudah-mudahan hasil pembangunan yang telah diraih pada tahun 2025 dapat dirasakan ke seluruh pelosok wilayah serta menyentuh semua lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Tahun 2025 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan evaluasi dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga bagi seluruh masyarakat Purbalingga. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan kedepan yang lebih baik. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

LAMPIRAN 3.1.1

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 01 **Pendidikan**
Dindikbbud
- 11 **Kesehatan**
Dinkes
- 35 **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Dinrumkim
DPUPR
- 46 **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Dinrumkim
- 53 **Trantibunlinmas**
Satpol PP
BPBD
- 64 **Sosial**
DinsosdaldukKBP3A



LAMPIRAN 3.1.2

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

75	Tenaga Kerja Dinnaker
81	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DinsosdaldukKBP3A
89	Pangan DKPP
95	Pertanahan Dinrumkim
97	Lingkungan Hidup DLH
107	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dindukcapil
111	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinpermasdes
120	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DinsosdaldukKBP3A
129	Perhubungan Dinas Perhubungan
135	Komunikasi dan Informatika Dinkominfo
140	Statistik Dinkominfo
140	Persandian Dinkominfo

LAMPIRAN 3.1.1

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 01 **Pendidikan**
Dindikbbud
- 11 **Kesehatan**
Dinkes
- 35 **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Dinrumkim
DPUPR
- 46 **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Dinrumkim
- 53 **Trantibunlinmas**
Satpol PP
BPBD
- 64 **Sosial**
DinsosdaldukKBP3A



- 141 **Usaha Kecil dan Mikro**
DinkopUKM
- 149 **Penanaman Modal**
DPMPTSP
- 156 **Perpustakaan**
Dinarpus
- 161 **Kearsipan**
Dinarpus
- 163 **Kepemudaan dan Olahraga**
Dinporapar
- 171 **Kebudayaan**
Dindikbud



LAMPIRAN 3.1.2

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

75	Tenaga Kerja Dinnaker
81	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DinsosdaldukKBP3A
89	Pangan DKPP
95	Pertanahan Dinrumkim
97	Lingkungan Hidup DLH
107	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dindukcapil
111	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinpermasdes
120	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DinsosdaldukKBP3A
129	Perhubungan Dinas Perhubungan
135	Komunikasi dan Informatika Dinkominfo
140	Statistik Dinkominfo
140	Persandian Dinkominfo

- 141 **Usaha Kecil dan Mikro**
DinkopUKM
- 149 **Penanaman Modal**
DPMPTSP
- 156 **Perpustakaan**
Dinarpus
- 161 **Kearsipan**
Dinarpus
- 163 **Kepemudaan dan Olahraga**
Dinporapar
- 171 **Kebudayaan**
Dindikbud



LAMPIRAN 3.1.3

Pelaksanaan Urusan Pilihan

- 174 **Pertanian**
Dinpertan
- 181 **Perdagangan**
Dinperindag
- 184 **Pariwisata**
Dinporapar
- 186 **Perindustrian**
Dinperindag
- 191 **Kelautan dan Perikanan**
DKPP
- 195 **Transmigrasi**
Dinnaker



LAMPIRAN 3.1.4

Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang

195 **Unsur Pendukung**

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

214 **Unsur Penunjang**

1. BKPSDM
2. Bappelitbangda
3. Bakeuda

235 **Unsur Pengawas**

Inspektorat

243 **Unsur Kewilayahan**

18 Kecamatan

336 **Unsur Pemerintahan Umum**

Bakesbangpol



LAMPIRAN 3.1.5

Pengukuran Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2025



3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendidikan	Dindikbud	Tujuan : Meningkatkan pendidikan yang bermutu dan inklusif serta terwujudnya berkebudayaan maju Sasaran : 1. Meningkatkan intelektualitas anak sekolah 2. Meningkatkan pendidikan yang merata 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			93,99%	113.847.921.000,00	110.904.110.599,00	97,41%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	64 persen	64 persen	100,00%	78.552.799.000,00	77.131.369.163,00	98,19%	Nihil	Nihil
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 unit	8 unit	88,89%	725.000.000,00	674.585.600,00	93,05%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.020 peserta didik	1.458 peserta didik	142,94%	965.184.000,00	930.246.800,00	96,38%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik : dari 5 cabang lomba yaitu tari, menyanyi, pantomin, Kriya, menggambar bertambah 2 lomba yaitu menulis sastra dan mendongeng sehingga peserta lomba yang awalnya 1.020 anak menjadi 1.458 anak
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.143 orang	1.269 orang	111,02%	9.598.764.000,00	8.708.626.141,00	90,73%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml GTT, PTT yg mendapat honor kesra bertambah 126 orang
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95 orang	322 orang	338,95%	24.531.000,00	23.941.000,00	97,59%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml peserta kegiatan bertambah 227 orang
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	461 satuan pendidikan	461 satuan pendidikan	100,00%	593.665.000,00	548.485.101,00	92,39%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	471 satuan pendidikan	471 satuan pendidikan	100,00%	60.633.114.000,00	60.550.314.051,00	99,86%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	461 orang	459 orang	99,57%	1.705.791.000,00	1.693.211.000,00	99,26%	Nihil	Nihil
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	18 konten digital	18 konten digital	100,00%	718.130.000,00	711.069.970,00	99,02%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3 dokumen	4 dokumen	133,33%	25.882.000,00	25.289.800,00	97,71%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Kegiatan bertambah (Desiminasi Interaktif Flat Panel)
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	6.900.000,00	6.781.500,00	98,28%	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 unit	4 unit	133,33%	215.000.000,00	215.000.000,00	100,00%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml sarpras dan utilitas yg direhab bertambah 1 sekolah
				Bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	430 orang	495	115,12%	82.164.000,00	68.306.800,00	83,13%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml peserta Bimtek bertambah 65 orang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 ruang	6 ruang	600,00%	1.055.002.000,00	1.053.652.000,00	99,87%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml ruang kelas yg direhab bertambah 5 unit
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.746 Peserta didik	1.527 peserta didik	87,46%	1.857.964.000,00	1.790.601.400,00	96,37%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4 paket	4 paket	100,00%	345.708.000,00	131.258.000,00	37,97%	Kegiatan yang tidak dilaksanakan: Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) karena juknis awal DAK digunakan untuk pembelian Chromebook sedangkan pengadaan Chromebook di Kementerian sedang bermasalah. Sedangkan realisasi fisik 100% karena dibelanjakan untuk 2 paket pengadaan alat TIK di SDN 2 Jingkang dan SDN 2 Sidanegara dan 2 paket laptop di MI Ma'arif NU Tunjungmuli dan MI Plus Ma'arif NU Makam.	Ada himbauan untuk tidak melaksanakan pembelian Chromebook
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64 persen	64 persen	100,00%	7.801.943.000,00	7.525.201.229,00	96,45%	Nihil	Nihil
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 unit	5 unit	250,00%	445.502.000,00	443.789.500,00	99,62%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Penerima hibah bertambah 3 sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 ruang	3 ruang	300,00%	420.000.000,00	408.246.000,00	97,20%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Rehab sedang/berat R. Kelas bertambah 2 unit
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	18.329 Peserta didik	18.329 Peserta didik	100,00%	40.265.000,00	38.741.300,00	96,22%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.000 Peserta didik	3.000 Peserta didik	100,00%	188.881.000,00	188.601.000,00	99,85%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	540 orang	553 orang	102,41%	2.495.232.000,00	2.357.815.166,00	94,49%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml GTT/PTT yg mendapatkan honor bertambah 13 orang
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23 Satuan pendidikan	24 Satuan pendidikan	104,35%	3.678.168.000,00	3.620.111.863,00	98,42%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Tambah 1 sekolah swasta, SMP TAHFIDZ MUSHAFIYYAH
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	234 orang	234 orang	100,00%	30.988.000,00	30.956.300,00	99,90%	Nihil	Nihil
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	15 konten digital	15 konten digital	100,00%	10.540.000,00	10.025.000,00	95,11%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	5.000.000,00	4.999.800,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 kegiatan	3 kegiatan	150,00%	7.620.000,00	7.619.900,00	100,00%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml kegiatan bertambah 1
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60 Satuan pendidikan	60 Satuan pendidikan	100,00%	165.859.000,00	165.798.800,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	390 orang	597 orang	153,08%	77.664.000,00	76.776.600,00	98,86%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Peserta kegiatan bertambah 207 orang

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2 paket	4 paket	200,00%	236.224.000,00	171.720.000,00	72,69%	Sisa Kontrak dari hasil epurchasing dengan metode Mini Kompetisi	Selisih kontrak tersebut bukan merupakan permasalahan, tetapi bentuk dari sebuah efisiensi belanja, karena kita mendapatkan harga terbaik dengan spesifikasi sama Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jml sekolah yg mendapatkan alat praktik bertambah 2 sekolah
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	51,50 persen	51,50 persen	100,00%	21.746.163.000,00	20.504.425.357,00	94,29%	Nihil	Nihil
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	12 unit	10 unit	83,33%	345.700.000,00	345.000.000,00	99,80%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.543 orang	1.517 orang	98,31%	8.631.928.000,00	7.804.037.600,00	90,41%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100 orang	0 orang	69,00%	120.139.000,00	0,00	0,00%	anggaran tidak mencukupi untuk mengadakan Diklat Kepala Sekolah. Anggaran yang ada hanya cukup untuk 20 orang.	Menganggarkan Kembali di tahun 2026 sesuai kebutuhan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50 Satuan pendidikan	36 satuan pendidikan	72,00%	29.170.000,00	22.646.000,00	77,63%	1. Realisasi Kinerja rendah karena belum semua Lembaga mengikuti pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 2. Realisasi anggaran rendah karena Anggaran Belanja Sewa Gedung dan tempat pertemuan penyelenggaraan kegiatan Bimtek tidak dicairkan, sudah include belanja makan minum kegiatan bimtek. 3. Permasalahan realisasi kinerja fisik = Belum semua Lembaga mengikuti pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1. Penganggaran untuk Lembaga PAUD yang belum mengikuti pembinaan di tahun 2026 2. Mencari tempat pelaksanaan kegiatan yang ada sewa Gedung di tahun 2026
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	643 Satuan pendidikan	643 Satuan pendidikan	100,00%	10.591.200.000,00	10.552.156.664,00	99,63%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	6.000.000,00	5.872.500,00	97,88%	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	10 unit	10 unit	100,00%	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2 paket	20 paket	1000,00%	1.465.438.000,00	1.218.339.293,00	83,14%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja : Sumber anggaran dari Pusat (DAK Fisik), sehingga DINDIKBUD tidak bisa menentukan target di RENJA secara tepat. Lokus dan anggaran yang menentukan pusat, proses DAK dilaksanakan di tahun anggaran berjalan
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1 satuan	1 satuan	100,00%	6.588.000,00	6.373.300,00	96,74%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	51,50 persen	94,44 persen	183,39%	5.747.016.000,00	5.743.114.850,00	99,93%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	25 Peserta didik	25 Peserta didik	100,00%	95.500.000,00	95.476.000,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17 Satuan pendidikan	17 Satuan pendidikan	100,00%	19.204.000,00	17.148.800,00	89,30%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17 Satuan pendidikan	17 Satuan pendidikan	100,00%	5.607.900.000,00	5.606.785.050,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20 Dokumen	17 dokumen	85,00%	3.606.000,00	3.605.000,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	17 Satuan pendidikan	17 Satuan pendidikan	100,00%	20.806.000,00	20.100.000,00	96,61%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	95	94,04	98,99%	90.288.000,00	45.670.000,00	50,58%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	81,2	80	98,52%	90.288.000,00	45.670.000,00	50,58%	Nihil	Nihil
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara aan	2 laporan	2 laporan	150,00%	90.288.000,00	45.670.000,00	50,58%	Realisasi anggaran rendah karena Proses seleksi dan mutasi Kepala Sekolah belum selesai, belum ada kegiatan pengukuhan dan Pembinaan Kepala Sekolah Baru sehingga kegiatan Diklat Kepala Sekolah Baru tidak dilaksanakan	Menyelesaikan proses seleksi dan mutasi Kepala Sekolah, serta melaksanakana pengukuhan dan pembinaan Kepala Sekolah di tahun 2026
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				592.418.820.000,00	588.907.154.713,00	99,41%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penggagggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	8.124.000,00	8.088.800,00	99,57%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	7.128.000,00	7.097.800,00	99,58%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%	996.000,00	991.000,00	99,50%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	591.244.842.000,00	587.761.841.979,00	99,41%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,265 orang	6.370 orang	120,98%	591.054.478.000,00	587.573.047.447,00	99,41%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Penambahan jumlah ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 dokumen	30 dokumen	100,00%	47.809.000,00	47.398.532,00	99,14%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	142.555.000,00	141.396.000,00	99,19%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	224.080.000,00	223.195.000,00	99,61%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00%	224.080.000,00	223.195.000,00	99,61%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	51.932.000,00	46.932.000,00	90,37%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 orang	100 orang	100,00%	51.932.000,00	46.932.000,00	90,37%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	47.279.000,00	44.687.922,00	94,52%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket	100,00%	1.824.000,00	1.778.000,00	97,48%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket	100,00%	23.389.000,00	21.239.922,00	90,81%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	4 laporan	80,00%	3.237.000,00	2.970.000,00	91,75%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	12 laporan	120,00%	10.009.000,00	9.880.000,00	98,71%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	14.238.000,00	14.225.850,00	99,91%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	14.238.000,00	14.225.850,00	99,91%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	589.360.000,00	577.437.262,00	97,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2 laporan	200,00%	340.000,00	62.300,00	18,32%	untuk jasa pengiriman surat lewat kantor pos sebesar Rp.62.300 sebanyak 2 surat tentang pengajuan penambahan anggaran Tambahan Penghasilan Guru (TPG) Sertifikasi Guru yang ditujukan ke KEMENDIKDASMAN dan KEMENKEU RI.	Jasa pengiriman surat menggunakan Pos Indonesia (layanan reguler, ekonomi, nextday, bahkan same day) atau perusahaan swasta seperti JNE, J&T Express, TIKI, SiCepat, Lion Parcel, dan lainnya sesuai dengan anggaran yang ada.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	100,00%	173.004.000,00	167.534.099,00	96,84%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	416.016.000,00	409.840.863,00	98,52%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	238.965.000,00	230.745.900,00	96,56%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 unit	45 unit	100,00%	173.933.000,00	165.739.400,00	95,29%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30 unit	100,00%	14.194.000,00	14.185.000,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	3 gedung	150,00%	50.838.000,00	50.821.500,00	99,97%	Nihil	Nihil
2	Kesehatan	Dinkes	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang sehat dan layanan kesehatan berkualitas baik, adil dan terjangkau	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH				119.914.935.000,00	116.777.175.967,00	97,38%	Nihil	Nihil
			Sasaran :	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2 dokumen	3 dokumen	150,00%	8.660.000,00	8.613.500,00	99,46%	Dokumen yang disusun DPA, Renja dan Renstra. Tahun 2025 menyusun Renstra 2025-2030	
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	1.000.000,00	972.500,00	97,25%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	118.650.718.000,00	115.862.601.366,00	97,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1640 orang	1618 orang	98,66%	118.512.851.000,00	115.736.945.031,00	97,66%	Nihil	Nihil
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	54 dokumen	115 dokumen	212,96%	44.634.000,00	44.513.335,00	99,73%	Terdapat efisiensi pemberian uang harian, sehingga menambah volume jumlah orang yang difasilitasi uang harian	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	93.233.000,00	81.143.000,00	87,03%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100,00%	6.000.000,00	1.987.500,00	33,13%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36 orang	0 orang	0,00%	4.000.000,00	0,00	0,00%	Tidak memberangkatkan pegawai untuk mengikuti pelatihan secara offline.	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	53 orang	176,67%	2.000.000,00	1.987.500,00	99,38%	Jumlah orang yang mengikuti bimtek sebanyak 53 orang	
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	49.306.000,00	41.004.100,00	83,16%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	2.500.000,00	2.459.500,00	98,38%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	14.806.000,00	14.155.600,00	95,61%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 dokumen	12 dokumen	50,00%	2.200.000,00	1.260.000,00	57,27%	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terbaru sudah dalam bentuk softfile sehingga dipublikasikan di media online	Menyesuaikan target di tahun 2026
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 laporan	21 laporan	140,00%	10.000.000,00	7.565.000,00	75,65%	Laporan yang dibuat berdasarkan jumlah kunjungan tamu yang ada	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	23 laporan	46,00%	11.000.000,00	10.764.000,00	97,85%	Laporan kegiatan beberapa dijadikan menjadi satu	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	0 dokumen	0,00%	8.800.000,00	4.800.000,00	54,55%	Sudah di akomodir di subkegiatan sistem informasi kesehatan	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	68.379.000,00	51.175.000,00	74,84%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	68.379.000,00	51.175.000,00	74,84%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	704.087.000,00	539.357.490,00	76,60%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	5 laporan	25,00%	800.000,00	64.000,00	8,00%	Pengiriman surat sudah menggunakan aplikasi Srikandi	Melakukan penyelesaian tatget kinerja dan pagu anggaran untk tahun 2026
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 laporan	60 laporan	100,00%	305.604.000,00	218.926.766,00	71,64%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	9.691.000,00	9.459.856,00	97,61%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	387.992.000,00	310.906.868,00	80,13%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	377.351.000,00	222.077.176,00	58,85%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 unit	39 unit	100,00%	347.351.000,00	204.094.676,00	58,76%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	40 unit	40 unit	100,00%	25.000.000,00	12.982.500,00	51,93%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	100 persen	100,00%	45.338.407.000,00	43.379.590.812,00	95,68%	Terdapat Puskesmas (Puskesmas Kemangkon 2) dan 4 klinik yang belum akreditasi (Klinik Lapas, Klinik Edelweis, Klinik Almeera, Klinik Madeena) dikarenakan baru beroperasi di Tahun 2025	Melakukan pengawasan khususnya bagi klinik baru untuk dapat berproses dan mengajukan survei akreditasi
				Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen		13.255.189.000,00	12.180.517.116,00	91,89%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3 unit	3 unit	100,00%	1.669.710.000,00	1.654.100.000,00	99,07%	Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas dilaksanakan dengan perbaikan Puskesmas Kemangkon , Puskesmas Kutawis, Puskesmas Serayu Larangan, dan Puskesmas Kemangkon 2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sedikitnya tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia sehingga menyebabkan waktu penyelesaian kegiatan sangat berisiko melewati batas waktu kontrak	Penguatan money oleh tim teknis untuk pelaporan hasil pekerjaan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	693.000.000,00	547.526.000,00	79,01%	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya di lakukan di Pustu Karangmalang. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain sedikitnya tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia sehingga menyebabkan waktu penyelesaian kegiatan sangat berisiko melewati batas waktu kontrak.	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	191 unit	58 unit	30,37%	952.000.000,00	665.865.489,00	69,94%	Sebagian alat tidak bisa dibelanjakan dikarenakan adanya perbedaan kode rekening kegiatan, dan waktunya tidak cukup untuk diajukan perubahan	Peningkatan perencanaan dalam menghitung kebutuhan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
				Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	2 unit	2 unit	100,00%	150.000.000,00	145.999.854,00	97,33%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 paket	2 paket	100,00%	9.783.978.000,00	9.160.699.773,00	93,63%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	250000 keluarga	288250 keluarga	115,30%	5.210.000,00	5.035.000,00	96,64%	Nihil	Nihil
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	22 paket	22 paket	100,00%	1.291.000,00	1.291.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	32.030.929.000,00	31.155.529.306,00	97,27%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9714 orang	9714 orang	100,00%	97.217.000,00	73.172.030,00	75,27%	Kurangnya informasi pentingnya pemeriksaan atau layanan ANC pada ibu hamil	Edukasi kepada catin dan PUS, Promosi kesehatan ttg ANC melalui organisasi wanita, media masa, serta koordinasi dengan lintas sektor, Peningkatan kualitas layanan ANC
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10446 orang	10446 orang	100,00%	121.700.000,00	60.350.000,00	49,59%	Deteksi risiko tinggi kehamilan belum optimal sejak ANC	Meningkatkan edukasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) saat hamil, Skrining dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi secara berkelanjutan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10337 orang	10337 orang	100,00%	12.000.000,00	8.210.870,00	68,42%	Deteksi dini komplikasi bayi baru lahir belum optimal (pada usia 0 - 28 hari)	Penguatan deteksi dini dan tata laksana bayi baru lahir risiko tinggi, Edukasi orang tua tentang perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya neonatal
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51082 orang	51082 orang	100,00%	18.215.000,00	16.868.540,00	92,61%	Pelaksanaan pelayanan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) belum optimal	Penguatan pelayanan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	136588 orang	136588 orang	100,00%	43.035.000,00	37.368.520,00	86,83%	Sulitnya menemukan sasaran anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah	Melakukan skrining kesehatan di Posyandu remaja. Meningkatkan koordinasi dengan puskesmas dan lintas program. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	679016 orang	679016 orang	100,00%	18.150.000,00	16.108.500,00	88,75%	1. Belum adanya Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan 2. Jadwal layanan Posbindu/Posyandu ILP bersamaan dengan waktu kerja/waktu sekolah 3. Keterbatasan BMHP terkait pemeriksaan kolesterol dan asam urat sehingga menurunkan daya tarik masyarakat untuk datang ke Posbindu/Posyandu ILP 4. Kurangnya kesadaran	1. Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai standar secara manual 2. Penyesuaian jadwal layanan Posbindu/Posyandu ILP dengan waktu kerja/waktu sekolah (jemput bola) 3. Pelayanan Posbindu/Posyandu ILP untuk BMHP terkait pemeriksaan kolesterol dan asam urat menggunakan Dana Desa atau secara swadaya masyarakat 4. Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat usia 15-59 tahun untuk melakukan skrining kesehatan 5. Skrining kesehatan usia 15-59 tahun terintegrasi dengan CKG Komunitas

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	127953 orang	127953 orang	100,00%	11.240.000,00	10.840.000,00	96,44%	Belum semua lansia yang dilayani di lakukan skrining dan pemeriksaan laborat terutama kolestero; karena keterbatasan petugas dan Reagen	Pelaksanaan Mobile Posyandu Lansia bagi lansia yg belum tersekrining , Koordinasi dengan lintas sektoral untuk peningkatan pelayanan pada usia lanju
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	237140 orang	237140 orang	100,00%	8.200.000,00	8.121.500,00	99,04%	1. Belum ada Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi per by Name secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan ; 2. Target SPM Hipertensi tahun 2025 terlalu tinggi, menggunakan prevalensi hasil survei nasional; 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Hipertensi; 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan hasil skrining menderita Hipertensi di Posbindu/Posyandu ILP/CKG Komunitas untuk datang ke	1. Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi secara manual; 2. Penemuan hasil skrining dengan Hipertensi pada Posbindu, Posyandu ILP, CKG Komunitas dirujuk ke Puskesmas; 3. Penyesuaian Target Sasaran Hipertensi pada tahun 2026 menggunakan Perhitungan Hipertensi Diagnosis berdasarkan hasil SKI 2023; 4. Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan skrining Hipertensi serta kepatuhan minum obat bagi penderita Hipertensi.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14060 orang	14060 orang	100,00%	8.300.000,00	8.281.500,00	99,78%	1. Belum ada Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Diabetes Melitus per by Name secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Diabetes Melitus 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan hasil skrining menderita Diabetes Melitus di Posbindu/Posyandu ILP/CKG Komunitas untuk datang ke Puskesmas/ Faskes lain untuk mendapatkan penegakan diagnosa dan pengobatan	1. Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Diabetes Melitus secara manual; 2. Penemuan hasil skrining dengan Diabetes Melitus pada Posbindu, Posyandu ILP, CKG Komunitas dirujuk ke Puskesmas; 3. Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan skrining Diabetes Melitus serta kepatuhan minum obat bagi penderita Diabetes melitu
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2787 orang	2787 orang	100,00%	5.116.000,00	5.106.196,00	99,81%	1. Masih terdapat stigma negatif tentang pasien ODGJ dan keluarga di masyarakat 2. Kesadaran keluarga pasien ODGJ untuk mencari pengobatan medis bagi pasien gangguan jiwa masih rendah	1. Melakukan Edukasi, Sosialisasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat ; 2. Mengoptimalkan skrining kesehatan jiwa melalui CKGtermasuk Anak Sekolah; 3. Kolaborasi terkait penanganan ODGJ lintas program dan lintas sektor melalui TPKJM

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18770 orang	18770 orang	100,00%	93.800.000,00	84.948.866,00	90,56%	1. Masih adanya missing case di fasyankes terutama difasyankes non pemerintah / swasta seperti klinik dan DPM (Dokter Praktek Mandiri); 2. Ketersediaan cartridge TCM sebagai tool utama penunjang diagnosa sering mengalami gangguan stok sehingga menunda dan bahkan menghambat jalannya penapisan baik penapisan pada orang terduga TBC maupun penapisan melalui Investigasi Kontak	1. Pertemuan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi; 2. Pelaksanaan pengadaan cartridge TCM di awal tahun
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17703 orang	17703 orang	100,00%	182.000.000,00	174.337.426,00	95,79%	1. Masih banyak kelompok berisiko yang enggan melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) karena takut akan hasil positif; 2. Ketakutan akan Pengucilan: Stigma ini membuat penderita cenderung menutup diri (merahasiakan statusnya), yang menghambat proses pelacakan kontak (tracing) dan pendampingan	1. Edukasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan kepada kelompok berisiko tentang manfaat VCT; 2. Kerja sama dengan LSM, organisasi masyarakat, dan komunitas kunci; 3. Melaksanakan workshop Public Private Community Partnership yang bertujuan untuk memperluas jejaring layanan HIV di klinik- klinik swasta difasilitasi oleh Global Fund
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	213.400.000,00	163.506.511,00	76,62%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	36.814.000,00	29.895.000,00	81,21%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	152.000.000,00	148.135.845,00	97,46%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	267.211.000,00	205.581.500,00	76,94%	Nihil	Nihil
				Tahun 2025 banyak rekomendasi terkait SDM yang baru terkait terbitnya PP no.28 Tahun 2024 dan PMK no.13 Tahun 2025 sehingga banyak kegiatan terkait SDM yang harus dikoordinasikan. Permasalahan : Penggunaan sistem informasi yang masih baru, sehingga masih banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum memahami penggunaan aplikasi tersebut	2 dokumen	8 dokumen	400,00%	5.000.000,00	4.875.000,00	97,50%	Capaian kinerja di atas 100% karena berdasarkan jumlah dokumen rekomendasi STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) yang diterbitkan. Dalam 1 tahun terdapat 8 pengajuan rekomendasi penyehat tradisional	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23 dokumen	23 dokumen	100,00%	234.485.000,00	222.192.250,00	94,76%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	138 orang	1696 orang	1228,99%	7.495.000,00	7.436.500,00	99,22%	Capaian kinerja di atas 100% karena : 1. Pencatatan dan Pelaporan ODMK bersumber dari 2 Aplikasi yaitu Aplikasi ASIK dan SIMKESWA dimana keduanya sering mengalami kendala; 2. Target tahun 2025 masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan skrining kesehatan jiwa yang semakin meningkat terintegrasi dengan CKG	1. Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan rekapitulasi manual Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK); 2. Penyesuaian target tahun 2026
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	890 orang	53 orang	5,96%	5.000.000,00	4.812.000,00	96,24%	Capaian kinerja rendah karena : 1. Belum ada Puskesmas/Rumah Sakit sebagai IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) di Kabupaten Purbalingga; 2. Target tahun 2025 terlalu tinggi	1. Pengajuan Puskesmas/Rumah Sakit yang sudah Orientasi NAPZA sebagai IPWL,direncanakan di tahun 2026; 2. Penyesuaian target di tahun 2026
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 dokumen	15 dokumen	100,00%	261.000.000,00	245.992.931,00	94,25%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	28.600.109.000,00	28.289.368.200,00	98,91%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	560 paket	282 paket	50,36%	424.763.000,00	356.717.500,00	83,98%	Capaian kinerja rendah karena : 1. Anggaran pemeriksaan spesimen PD3I KLB mulai berbayar di tahun 2025 dan seterusnya; 2. BMHP untuk spesimen HPV DNA baru ada di triwulan ke IV sehingga program baru bisa berjalan menjelang akhir tahun	Peningkatan perencanaan kebutuhan pengambilan dan pengiriman spesimen
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9 dokumen	9 dokumen	100,00%	4.608.000,00	4.608.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Operasional Pelayanan Puskesmas	23 dokumen	23 dokumen	100,00%	373.347.000,00	190.231.204,00	50,95%	Nihil	Nihil
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26 dokumen	25 dokumen	96,15%	51.485.000,00	47.021.704,00	91,33%	Jumlah Klinik yang beroperasi pada tahun 2025 sebanyak 25 klinik	Nihil
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15 dokumen	15 dokumen	100,00%	5.180.000,00	5.105.000,00	98,55%	Nihil	Nihil
				Penyelesaian dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (PESD)	23 unit	22 unit	95,65%	253.429.000,00	215.355.214,00	84,98%	1 Puskesmas baru beroperasi pada Desember tahun 2025	Nihil
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	516.630.000,00	510.980.999,00	98,91%	Terbatasnya jumlah dokter spesialis sehingga tidak bisa berpartisipasi penuh pada setiap kegiatan dan pengaturan jadwal yang menyulitkan	Peningkatan koordinasi dengan seluruh FKTP dan FKRTL baik swasta maupun pemerintah untuk dapat bekerjasama dalam program pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 persen	100 persen	100,00%	40.364.000,00	31.626.290,00	78,35%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Sistem Infomasi Kesehatan	40 dokumen	40 dokumen	100,00%	40.364.000,00	31.626.290,00	78,35%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	11.925.000,00	11.918.100,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9 unit	9 unit	100,00%	3.750.000,00	3.743.500,00	99,83%	Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan RS yaitu pengajuan izin operasional dari RS dilakukan pada masa yang sudah dekat dengan habisnya masa berlaku izin operasional RS, sehingga persiapan dan pemenuhan syarat dilakukan dengan kurang matang	Berkoordinasi secara rutin dengan RS dalam pengajuan izin operasional

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54 unit	59 unit	109,26%	5.000.000,00	4.999.600,00	99,99%	Terdapat 9 Rumah Sakit, 22 Puskesmas, 24 Klinik, 3 Labkes dan 1 UTD yang dilakukan peningkatan tata kelola. Permasalahan : Dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan PPS dari RS ditemukan kendala dimana masih ada RS yang belum menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga penyelenggara akreditasi	Melakukan movev tindak lanjut rekomendasi dari lembaga penyelenggara akreditasi
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	54 unit	59 unit	109,26%	3.175.000,00	3.175.000,00	100,00%	Kendala yang ditemui pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Komitmen antara Faskes dan Dinkes dalam pelaksanaan pengukuran INM untuk pelaporan secara tepat waktu
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDMK	100 persen	100 persen	100,00%	768.389.000,00	743.820.506,00	96,80%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	92	97,63	106,12%	5.450.000,00	4.487.500,00	82,34%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150 dokumen	282 dokumen	188,00%	3.700.000,00	2.737.500,00	73,99%	Tahun 2025 banyak rekomendasi terkait SDMK yang baru terkait terbitnya PP no.28 Tahun 2024 dan PMK no.13 Tahun 2025 sehingga banyak kegiatan terkait SDMK yang harus dikoordinasikan. Permasalahan : Penggunaan sistem informasi yang masih baru, sehingga masih banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum memahami penggunaan aplikasi tersebut.	Peningkatan sosialisasi
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150 dokumen	282 dokumen	188,00%	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%	Tahun 2025 banyak rekomendasi terkait SDMK yang baru terkait terbitnya PP no.28 Tahun 2024 dan PMK no.13 Tahun 2025 sehingga banyak kegiatan terkait SDMK yang harus dikoordinasikan. Permasalahan : Penggunaan sistem informasi yang masih baru, sehingga masih banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum memahami penggunaan aplikasi tersebut.	Peningkatan sosialisasi

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	82.059.000,00	74.117.000,00	90,32%	Nihil	Nihil
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	50 orang	50 orang	100,00%	7.508.000,00	3.795.500,00	50,55%	Nihil	Nihil
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200 dokumen	270 dokumen	135,00%	74.551.000,00	70.321.500,00	94,33%	Pembinaan OP IBI (SKP 20 orang TW 2), pertemuan zoom Pemutakhiran data SDMK (175 tw 3 awal Juli 2025). Permasalahan : Penggunaan sistem informasi yang masih baru, sehingga masih banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum memahami penggunaan aplikasi tersebut	Peningkatan sosialisasi dan Koordinasi melibatkan OP terkait
				Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93	100	107,53%	680.880.000,00	665.216.006,00	97,70%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189 orang	165 orang	87,30%	680.880.000,00	665.216.006,00	97,70%	Capaian kinerja tidak 100% karena jadwal pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga beberapa calon peserta tidak dapat mengikuti pelatihan	Perencanaan lebih detail waktu, lokasi, dana dan peserta untuk tahun berikutnya
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN, MINUMAN	100 persen	100 persen	100,00%	196.859.000,00	166.114.911,00	84,38%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 persen	100 persen	100,00%	6.183.000,00	6.000.000,00	97,04%	Nihil	Nihil
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	39 dokumen	39 dokumen	100,00%	6.183.000,00	6.000.000,00	97,04%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penerbitan sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 persen	100 persen	100,00%	4.350.000,00	4.312.500,00	99,14%	Nihil	Nihil
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50 dokumen	50 dokumen	100,00%	4.350.000,00	4.312.500,00	99,14%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 persen	85,83 persen	100,00%	186.326.000,00	155.802.411,00	83,62%		

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	154 unit	154 unit	100,00%	186.326.000,00	155.802.411,00	83,62%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41,1	37,7	91,73%	131.818.000,00	122.081.182,00	92,61%	Sebanyak 103 dari 239 desa/kelurahan di Purbalingga dengan strata aktif mandiri. Permasalahan : Belum semua desa/kelurahan memenuhi indikator strata aktif mandiri.	Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat mencapai Indikator strata aktif mandiri.
				Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	100,00%	33.040.000,00	33.035.000,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	13 dokumen	3 dokumen	23,08%	33.040.000,00	33.035.000,00	99,98%	Laporan KTR, Laporan posyandu ILP, Laporan peran serta Ormas dan Dunia Usaha. Permasalahan : Penyusunan laporan kegiatan tidak tepat waktu.	Meningkatkan koordinasi antar program dan Menyusun jadwal pengumpulan pelaporan dengan Puskesmas

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	94, 65 persen	94,65%	30.048.000,00	28.848.000,00	96,01%	Ruman tangga yang didata 311.214; Strata pratama 487 rumah tangga; Strata madya 14.000 rumah tangga. Permasalahan : Tidak semua rumah tangga dilakukan pendataan Dari 16 indikator, masih ada indikator yang capaiannya masih rendah	Semua rumah tangga dilakukan pendataan. Meningkatkan sosialisasi edukasi
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 dokumen	5 dookumen	100	30.048.000,00	28.848.000,00	96,01%	Laporan PHBS, Laporan Germas, Laporan PSN PJB, Laporan Skrining Kesehatan dan Laporan UKS	Nihil
				Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,1 persen	37,7 persen	92%	68.730.000,00	60.198.182,00	87,59%	Nihil	Nihil
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	68.730.000,00	60.198.182,00	87,59%	Laporan SBH, Laporan Poskestren dan Laporan UKBM Lainnya	Nihil
		RSUD dr. Goeteng Taroenadibarat a	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang sehat dan layanan kesehatan berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	127.900.855.000,00	122.364.663.995,01	95,67%	1. Rutang belanja tahun 2024 dari pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengadaan barang dan jasa, serta operasional rumah sakit yang telah	1. Optumansi manajemen piutang BLUD; 2. Pengendalian belanja agar sesuai dengan proyeksi penerimaan; 2. Menerepkan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RSUD Panti Nugroho	baik, adil dan terjangkau Sasaran : Meningkatkan kuantitas dan	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	127.900.855.000,00	122.364.663.995,01	95,67%	Sakit yang telah direalisasikan namun pembayarannya belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023.	3. Menerapkan kebijakan efisiensi dan prioritas belanja pada awal tahun anggaran; 4. Penguatan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran.
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	127.900.855.000,00	122.364.663.995,01	95,67%		
			Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang sehat dan layanan kesehatan berkualitas baik, adil dan terjangkau Sasaran : Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	37.907.765.000,00	36.647.824.390,00	96,68%	Pada tahun 2023, UPTD RSUD Panti Nugroho mengalami defisit anggaran, sehingga berdampak pada belum lancarnya pembayaran belanja operasional, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi pendapatan.	kebijakan efisiensi dan prioritas belanja pada awal tahun anggaran. 2. Pengendalian belanja secara lebih ketat 3. Penguatan pengelolaan keuangan melalui percepatan pengajuan klaim BPJS Kesehatan
				Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	37.907.765.000,00	36.647.824.390,00	96,68%		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	37.907.765.000,00	36.647.824.390,00	96,68%		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53 unit	53 unit	100%	17.365.496.000,00	16.419.501.602,00	94,55%		
				Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	53 unit	53 unit	100%	17.365.496.000,00	16.419.501.602,00	94,55%		
				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53 unit	53 unit	100%	17.365.496.000,00	16.419.501.602,00	94,55%		

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Pekerjaan Umum	DPUPR	Tujuan: Terwujudnya Layanan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya Implementasi SAKIP DPUPR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	12.922.821.000,00	11.666.960.206,00	90,28%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.250.000,00	2.063.000,00	91,69%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	1.250.000,00	1.083.000,00	86,64%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100,00%	1.000.000,00	980.000,00	98,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	9.249.524.000,00	8.818.798.995,00	95,34%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76 ASN	76 ASN	100,00%	9.128.026.000,00	8.709.586.995,00	95,42%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	44.698.000,00	41.187.000,00	92,15%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	76.800.000,00	68.025.000,00	88,57%	Rencana awal akan ada 2 gedung yang di rehabilitasi akan tetapi ternyata yang dianggarkan hanya 1 gedung	Pada tahun berikutnya mengusulkan anggaran sehingga prosentase Gedung pemerintah banyak yang kondisinya baik
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	45.300.000,00	17.100.000,00	37,75%	Nihil	Nihil
				Penataan usaha Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporam	4 laporam	100,00%	45.300.000,00	17.100.000,00	37,75%	Rencana PPKom lebih dari 1 orang pelaksanaan PPKom hanya 1 orang yaitu pengguna anggaran	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.000.000,00		0,00%		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 kegiatan	0 kegiatan	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Nihil	Kegiatan tidak dilaksanakan karena pada perubahan anggaran 2025 anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai dialihkan ke anggaran lainnya
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	42.665.000,00	29.357.500,00	68,81%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	3.600.000,00	3.597.900,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	17.775.000,00	17.648.500,00	99,29%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.650.000,00	2.682.500,00	40,34%	Kunjungan tamu tidak banyak sehingga penyerapan anggaran sedikit	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.040.000,00	2.828.600,00	56,12%	Pelaksanaan rapat kebanyakan internal sehingga anggaran bisa dihemat karena rapat internal tidak pakai snack	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	9.600.000,00	2.600.000,00	27,08%	Rencana awal ada honor koordinator SIPD dan operator SIM aset dalam pelaksanaan tidak ada lagi serta honor rencana 10 bulan pelaksanaan hanya 6 bulan	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	777.961.000,00	672.820.997,00	86,49%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.925.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena sekarang tidak ada pengiriman surat menyurat secara fisik menggunakan perangkat	Pada tahun berikutnya lebih selektif dalam pengadaan barang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	163.736.000,00	107.343.932,00	65,56%	Adanya penghematan listrik dan air	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.500.000,00	752.000,00	50,13%	Tidak banyak cetak bener sehingga ada sisa anggaran	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	610.800.000,00	564.725.065,00	92,46%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.258.064.000,00	1.673.286.945,00	74,10%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100,00%	2.258.064.000,00	1.673.286.945,00	74,10%	Karena ada barang yang tidak ada di e- katalog sehingga tidak bisa dibeli, Barang di e-katalog lebih murah sehingga ada sisa anggaran	Pada tahun berikutnya lebih selektif dalam pengadaan barang

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	547.057.000,00	453.532.769,00	82,90%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68 unit	68 unit	100,00%	537.057.000,00	445.106.769,00	82,88%	Banyak kendaraan yang kondisinya baik sehingga ada sisa anggaran	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	100,00%	5.000.000,00	3.430.000,00	68,60%	Banyak peralatan kantor yang kondisinya baik sehingga ada sisa anggaran	Mengusulkan pada tahun berikutnya sisa anggaran untuk keperluan lain yang mendesak
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17 unit	17 unit	100,00%	5.000.000,00	4.996.000,00	99,92%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	51, 11 persen	51,11 persen	100,00%	2.506.897.000,00	2.368.971.740,00	94,50%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49 persen	49 persen	100,00%	2.506.897.000,00	2.368.971.740,00	94,50%	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,2 KM	1,2 KM	100,00%	623.400.000,00	619.900.000,00	99,44%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi Bendung Irigasi	2 Bendung	2 Bendung	100,00%	965.510.000,00	860.685.000,00	89,14%	Nihil	Nihil
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0,65 KM	0,65 KM	100,00%	878.530.000,00	851.470.740,00	96,92%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	255 DI	255 DI	100,00%	39.457.000,00	36.916.000,00	93,56%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	79	78	98,73%	1.152.805.000,00	969.640.172,00	84,11%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	53,02 persen	53,13 persen	100,21%	1.152.805.000,00	969.640.172,00	84,11%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Banguna Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	180 dokumen	206 dokumen	114,44%	191.178.000,00	187.557.900,00	98,11%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	961.627.000,00	782.082.272,00	81,33%	Adanya sisa anggaran dari nilai kontrak perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan pada pekerjaan Rehab gedung Bina Marga, serta sisa pembayaran tagihan listrik dan Air gedung DPRD baru.	Meningkatkan perencanaan penggunaan anggran untuk kegiatan fisik
				PROGRAM PEMBANGUNAN JASA KONSTRUKSI	70 persen	88,57 persen	126,53%	70.004.000,00	68.923.840,00	98,46%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	30 orang	35 orang	116,67%	44.265.000,00	43.400.600,00	98,05%	Nihil	Nihil
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	30 orang	35 orang	116,67%	44.265.000,00	43.400.600,00	98,05%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 kali	2 kali	100,00%	18.039.000,00	17.887.240,00	99,16%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	18.039.000,00	17.887.240,00	99,16%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengawasan Tertif Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20 paket pekerja	38 paket pekerja	190,00%	7.700.000,00	7.636.000,00	99,17%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	20 paket pekerja	38 paket pekerja	190,00%	7.700.000,00	7.636.000,00	99,17%	Capaian meningkat karena pengawasan bertambah yang disebabkan oleh adanya penambahan anggaran yang signifikan pada Bidang Bina Marga pada perubahan anggaran	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1,62 persen	3,64 persen	224,69%	90.239.513.000,00	88.137.231.533,00	97,67%	Terjadi penambahan anggaran yang cukup signifikan pada Bidang Bina Marga pada perubahan anggaran, dari semula Rp. 48.879.206.000 menjadi Rp. 90293.513.000 dan menyebabkan meningkatnya capaian kinerja yang	Nihil
				Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	666,821 m	686,108 persen	102,89%	88.180.348.000,00	88.137.231.533,00	99,95%	Nihil	Nihil
				Pembangunan Jalan	2,985 KM	2,907 persen	97,39%	1.951.337.000,00	1.944.993.000,00	99,67%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Berkala Jalan	19 KM	70,79 KM	372,58%	73.614.011.000,00	72.729.663.106,00	98,80%	Terjadi penambahan anggaran yang cukup signifikan pada Bidang Bina Marga pada perubahan anggaran dari semula Rp. 11.840.000.000 menjadi Rp. 73.614.365.000, yang mengakibatkan pemelihan berkala jalan menjadi lebih panjang	Nihil
				Survey kondisi jalan/ Jembatan	952.602 KM	952.602 KM	100,00%	535.000.000,00	462.389.000,00	86,43%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Rutin Jalan	220 KM	220 KM	100%	12.080.000.000,00	11.217.809.823,00	92,86%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	372 unit	340 unit	91,40%	2.059.165.000,00	1.782.376.604,00	86,56%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	80 jembatan	80 jembatan	100,00%	879.800.000,00	735.431.604,00	83,59%	1. Dana yang terbatas 2. Hujan dan cuaca tidak mendukung sering menghentikan pekerjaan fisik. 3. Adanya karat pada elemen baja, pelapukan beton yang mempercepat kerusakan. 4. Perbaikan rutin sering menyebabkan penutupan jalan dan kemacetan, terutama pada jembatan dengan lalu lintas padat. 5. Kendaraan yang melebihi kapasitas beban jembatan merusak struktur secara dini	1. Mengusulkan anggaran yang lebih banyak pada tahun berikutnya 2. Pengecatan pada awal tahun 3. Perbaikan ringan permukaan jembatan
				Rehabilitasi Jembatan	2 jembatan	2 jembatan	100,00%	1.179.365.000,00	1.046.945.000,00	88,77%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	459.537.000,00	399.650.280,00	86,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	382.742.000,00	323.906.000,00	84,63%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	1 dokumen	2 dokumen	200,00%	241.785.000,00	235.734.000,00	97,50%	Nihil	Terealisasi 2 dokumen diantaranya yaitu 1. Citra satelit resolusi tinggi rencana detail tata ruang 2. Peta dasar
				Penyebarluasan informasi penataan ruang	1 publikasi	2 publikasi	200,00%	53.630.000,00	1.100.000,00	2,05%	Adanya Perjanjian Swakelola dengan FT UGM sebesar 50 jt untuk pembuatan Sistem Informasi (webgis) yang tidak dapat dilaksanakan	Terealisasi 2 publikasi diantaranya yaitu: 1. Siara radia perwira 2. Podcast Telah bersurat sebanyak dua kali kepada pihak ketiga terkait perjanjian kerja sama pembuatan webgis dan pada tahun anggaran penyebarluasan informasi menggunakan mekanisme konvensional
				Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	87.327.000,00	87.072.000,00	99,71%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	94,49 persen	94,5 persen	100,01%	76.795.000,00	75.744.280,00	98,63%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	3 dokumen	8 dokumen	266,67%	76.795.000,00	75.744.280,00	98,63%	Nihil	Penyelenggaraan penataan ruang yang terencana sebanyak 3 dokumen, karena pada Tahun 2024 hanya terdapat 3 permohonan Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sedangkan pada Tahun 2028 realisasi terdapat 8 permohonan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dinrumkim	Sasaran : 1. Meningkatnya akses air minum perpipaan; 2. Meningkatnya akses sanitasi aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,01 persen	0,05 persen	500,00%	568.605.000,00	467.486.055,00	82,22%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	58 RT	57 RT	98,28%	568.605.000,00	467.486.055,00	82,22%	Nihil	Nihil
				Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	1 liter /detik	1 liter/detik	100,00%	100.000.000,00	99.750.000,00	99,75%	Terjadi kebijakan efisiensi anggaran (refocusing) di tengah tahun berjalan, sehingga semula direncanakan 3 lokasi kegiatan (Banjaran, Pakuncen, Siwarak) menjadi hanya 1 lokasi kegiatan (Desa Pakuncen Kec. Bobotsari)	Penyesuaian target kinerja mengikuti ketersediaan anggaran terbaru
				Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	2 liter/detik	2 liter/ detik	100,00%	428.605.000,00	327.936.055,00	76,51%	- Paket Pekerjaan Desa Pengadegan tidak dapat dilaksanakan karena kendala yang mewajibkan untuk pengurusan perizinan sumur bor yang memerlukan waktu lama sehingga berisiko melampaui tahun anggaran.; - Ketidaksesuaian RAB terhadap spesifikasi teknis (pengeboran) setelah koordinasi dengan calon pelaksana.	Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait dan memutuskan untuk kegiatan dianjurkan dilaksanakan oleh DKK

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	1 SR	1 SR	100,00%	40.000.000,00	39.800.000,00	99,50%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH	0,002 persen	0,05 persen	2500,00%	134.400.000,00	133.768.488,00	99,53%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	134.400.000,00	133.768.488,00	99,53%	Nihil	Nihil
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	7 RT	7 RT	100,00%	134.400.000,00	133.768.488,00	99,53%	1. Kabupaten Purbalingga tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Sanitasi , dimana selama ini menjadi penyumbang kegiatan sanitasi terbanyak, sedangkan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten terbatas hanya untuk membangun 7 unit Tangki Septik Individual. 2. Pelaksanaan fisik di trivulan ke III karena menunggu kepastian anggaran.	1. Mengoptimalkan SDM dan anggaran yang ada, khususnya anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Infrastruktur Sanitasi terbangun yang dibiayai oleh APBN sehingga diperoleh database keberfungsian infrastruktur sanitasi terbangun. 2. Koordinasi dengan OPD terkait perihal pendanaan alternatif lain yang telah diperoleh, seperti dari Banku Provinsi, CSR dan APBD Kabupaten sehingga dapat meningkatkan capaian sanitasi.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Perumahan Rakyat	Dinrumkim	Tujuan : Meningkatnya kawasan permukiman tidak kumuh . Sasaran : 1. Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau; 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinrumkim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	3.950.163.000,00	3.677.925.273,00	93,11%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.214.000,00	4.197.600,00	99,61%	Nihil	Nihil
				Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2.222.000,00	2.205.800,00	99,27%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100,00%	1.992.000,00	1.991.800,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.322.697.000,00	3.061.013.142,00	92,12%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bln	25 orang/bln	89,29%	3.231.168.000,00	2.970.967.154,00	91,95%	Tahun 2025 sebanyak 5 orang pensiun, tetapi tidak diimbangi dengan tambahnya pegawai	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150 dokumne	229 dokumen	152,67%	36.748.000,00	36.747.988,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumne	100,00%	54.781.000,00	53.298.000,00	97,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	14.400.000,00	14.150.000,00	98,26%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	14.400.000,00	14.150.000,00	98,26%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	27.624.000,00	25.236.050,00	91,36%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2 paket	100,00%	2.043.000,00	2.034.000,00	99,56%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	4 paket	133,33%	16.712.000,00	16.270.050,00	97,36%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 dokumne	12 dokumne	100,00%	1.800.000,00	1.319.000,00	73,28%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	6 laporan	200,00%	3.469.000,00	2.013.000,00	58,03%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	440.175.000,00	432.641.831,00	98,29%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 laporan	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	Tidak dibelanja-kan karena sampai akhir tahun tidak ada kebutuhan perangkat	Apabila dalam tahun anggaran berikutnya tidak dipergunakan akan memindahkan anggaran
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	23.366.000,00	17.377.174,00	74,37%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 laporan	5 laporan	500,00%	1.079.000,00	1.043.390,00	96,70%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	415.680.000,00	414.221.267,00	99,65%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	141.053.000,00	140.686.650,00	99,74%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	24 unit	100,00%	130.456.000,00	130.214.750,00	99,82%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	100,00%	5.597.000,00	5.575.000,00	99,61%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	2 unit	200,00%	5.000.000,00	4.896.900,00	97,94%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	272.064.000,00	260.184.303,00	95,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	4.348.000,00	4.348.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Program Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.348.000,00	3.348.000,00	100,00%	Korban bencana tidak memiliki lahan untuk relokasi, sehingga tidak dapat dibantu atau diusulkan relokasi	Koordinasi dengan pemdes, disperakim provinsi, dan bpbd kabupaten untuk mencari solusi dalam penanganan kebencanaan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	Desa lambat dalam mengirimkan data dan bahkan ada desa yang tidak mengirimkan data	Melakukan follow up berkala, mengadakan desk pengisian form identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
				Kegiatan: Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	5.200.000,00	4.680.000,00	90,00%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukar elawan Tanggap Bencana	40 orang	40 orang	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	Peserta masyarakat mayoritas ibu-ibu dikarenakan bapak-bapak masih bertani di sawah atau kebun	Diwakilkan oleh ibu-ibu dalam mengikuti sosialisasi
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25 orang	25 orang	100,00%	3.200.000,00	2.680.000,00	83,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	86.905.000,00	86.905.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3 unit	3 unit	100,00%	36.783.000,00	36.783.000,00	100,00%	Swadaya masyarakat relatif kecil	Pembangunan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan swadaya masyarakat. Disamping itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan pemdes selama proses
				Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	1 unit	1 unit	100,00%	50.122.000,00	50.122.000,00	100,00%	Swadaya masyarakat relatif kecil	Pembangunan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kemampuan swadaya masyarakat. Disamping itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan pemdes selama proses
				Kegiatan: Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	100,00%	3.040.000,00	2.928.000,00	96,32%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	7 laporan	700,00%	3.040.000,00	2.928.000,00	96,32%	Pembangunan perumahan ada beberapa yang tidak sesuai dengan perijinan	Melaksanakan pengawasan secara berkala, melaksanakan sosialisasi dan memberikan pengarahan setiap pertemuan
				Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen	100 persen	100,00%	172.571.000,00	161.323.303,00	93,48%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	172.571.000,00	161.323.303,00	93,48%	1. Ketidaktertiban penghuni dalam melakukan pembayaran sehingga ada keterlambatan pembayaran untuk beberapa orang 2. unit banyak yang rusak setelah ditinggal oleh penghuni lama	tagihan dan peringatan kepada penghuni yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran sewa unit rusuanwa 2. Melakukan perbaikan unit yang rusak dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk perbaikan
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	49,89 persen	51,57 persen	103,37%	835.434.000,00	822.343.101,00	98,43%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	2 ha	7,36 ha	368,00%	835.434.000,00	822.343.101,00	98,43%	Capaian kinerja di atas 100% karena lokasi kegiatan di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari menjadi lokasi intervensi dengan dampak terbesar terhadap penurunan angka kekumuhan karena kegiatan penataan yang lebih komprehensif mencakup persampahan, drainase, dan hunian	Nihil
				Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	835.434.000,00	822.343.101,00	98,43%	Keterbatasan Anggaran sehingga penanganan kumuh tidak tuntas terhadap 7 aspek permasalahan yang ada	1.Mengidentifikasi aspek kumuh yang bisa diintervensi dan menghasilkan skor kumuh yang tinggi supaya bisa menurunkan status kumuh menjadi tidak kumuh. 2.Kolaborasi dengan Desa, Pemprov, CSR dalam penanganan kumu

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	99,27 persen	99,53 persen	100,26%	155.664.000,00	155.073.873,00	99,62%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota	750 unit	934 unit	124,53%	155.664.000,00	155.073.873,00	99,62%	Capaian kinerja di atas 100% karena pelaksanaan kegiatan tidak hanya bersumber dari APBD namun ada intervensi dari sumber lain APBD Prov, Dana Desa, Baznas, dan CSR	Nihil
				Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas din Bawah 10(Sepuluh) Ha	5 unit	5 unit	100,00%	155.664.000,00	155.073.873,00	99,62%	Kondisi rumah yang diusulkan tidak layak untuk menerima bantuan rehab RTLH	Melakukan koordinasi dengan dewan pengusul BNBA untuk dapat dicarikan BNBA pengganti calon penerima bantuan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	70,94 persen	62,79 persen	88,51%	1.448.979.000,00	1.443.218.550,00	99,60%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10 lokasi	10 lokasi	100,00%	1.448.979.000,00	1.443.218.550,00	99,60%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7 laporan	7 laporan	100,00%	1.043.742.000,00	1.040.210.550,00	99,66%	Pagu anggaran yang disediakan tidak mampu menyelesaikan yang di lapangan	Melaksanakan sesuai pagu yang dianggarkan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarna, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	1 laporan	100,00%	5.237.000,00	5.008.000,00	95,63%	Beberapa PSU Perumahan dibangun tidak sesuai spek teknis yang ada di siteplan, sertifikat tanah PSU digadaikan sehingga belum bisa dilaksanakan serah terima	Memberikan pengarahan dan pengawasan
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3 lokasi	3 lokasi	100,00%	400.000.000,00	398.000.000,00	99,50%	Pagu anggaran yang disediakan tidak mampu menyelesaikan yang di lapangan	Melaksanakan sesuai pagu yang dianggarkan
5	Trantibunlinmas	Satpol PP	Tujuan : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Sasaran : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat 2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 3. Meningkatkan layanan kebakaran dan non kebakaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 persen	100 persen	94,09%	7.258.560.000,00	6.829.464.425,00	94,09%	Nihil	Nihil
					100 persen	100 persen	100,00%	3.500.000,00	3.499.600,00	99,99%	Nihil	Nihil
					2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.500.000,00	1.499.600,00	99,97%	Nihil	Nihil
					12 laporan	12 laporan	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
					100 persen	100 persen	100,00%	5.105.562.000,00	4.840.646.887,00	94,81%	Nihil	Nihil
					45 orang	45 orang	100,00%	5.038.032.000,00	4.773.130.907,00	94,74%	Nihil	Nihil
					130 dokumen	130 dokumen	100,00%	38.000.000,00	37.986.080,00	99,96%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	29.530.000,00	29.529.900,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	10.485.000,00	10.430.000,00	99,48%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 orang	9 orang	100,00%	10.485.000,00	10.430.000,00	99,48%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	38.643.000,00	38.221.800,00	98,91%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket	100,00%	2.150.000,00	2.147.000,00	99,86%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	22.453.000,00	22.288.000,00	99,27%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 dokumen	365 dokumen	100,00%	1.440.000,00	1.200.000,00	83,33%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	24 laporan	100,00%	3.600.000,00	3.586.800,00	99,63%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	100,00%	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	100,00%	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.345.030.000,00	1.198.959.684,00	89,14%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	45.045.000,00	28.795.816,00	63,93%	Pembayaran tagihan listrik, Air dan Telepon tergantung dari pemakaian setiap bulannya	Perencanaan dibuat berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan lebih cermat.
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.225.000,00	3.034.191,00	94,08%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61 laporan	61 laporan	100,00%	1.296.760.000,00	1.167.129.677,00	90,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	733.240.000,00	715.606.454,00	97,60%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43 unit	43 unit	100,00%	719.940.000,00	702.321.454,00	97,55%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit	100,00%	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	100,00%	4.500.000,00	4.485.000,00	99,67%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	839.827.000,00	689.908.144,00	82,15%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	831.477.000,00	681.558.144,00	81,97%	Nihil	Nihil
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 laporan	50 laporan	100,00%	172.097.000,00	171.997.785,00	99,94%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80 laporan	80 laporan	100,00%	9.950.000,00	9.945.000,00	99,95%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	4.180.000,00	4.110.000,00	98,33%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	99 orang	99 orang	100,00%	6.250.000,00	5.950.000,00	95,20%	Nihil	Nihil
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	639.000.000,00	489.555.359,00	76,61%	pengadaan barang yang tidak realisasi disebabkan penyedia tidak mengirim barang yang sudah dipesan padahal proses pengadaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Untuk lebih selektif dalam memilih pihak ketiga/penyedia dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian.
				Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 persen	100 persen	100,00%	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60 laporan	60 laporan	100,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60 laporan	60 laporan	100,00%	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100 persen	50 persen	50,00%	350.000,00	350.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2 laporan	1 laporan	50,00%	350.000,00	350.000,00	100,00%	Efisiensi anggaran	Mengoptimalkan anggota PPNS yang ada
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 persen	100 persen	100,00%	172.952.000,00	169.111.997,00	97,78%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.38 persen	82.28 persen	109,34%	172.952.000,00	169.111.997,00	97,78%	Nihil	Nihil
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	84 dokumen	84 dokumen	100,00%	58.979.000,00	58.979.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Api	3 unit	3 unit	100,00%	113.973.000,00	110.132.997,00	96,63%	Nihil	Nihil
		BPBD	Tujuan: Menurunnya kerentanan bencana Sasaran: Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 persen	82,34 persen	82,34%	416.921.000,00	355.049.494,00	85,16%		Penjelasan realisasi program tidak 100% = Indikator perhitungan persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan perhitungannya (jumlah relawan bencana aktif/jumlah relawan bencana terdaftar+jumlah warga yang mendapatkan penanganan bencana/jumlah warga yg menjadi korban+jumlah warga negara yg memperoleh informasi bencana/jumlah warga)/3 Jadi (291/619)+(1470/1470)+(13544/13544))/3 = 82,34%
				Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	100 persen	100 persen	100,00%	34.558.000,00	34.380.000,00	99,48%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	50 orang	50 orang	100,00%	34.558.000,00	34.380.000,00	99,48%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 persen	100 persen	100,00%	206.868.000,00	204.754.264,00	98,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/kota	7 paket	7 paket	100,00%	4.959.000,00	4.959.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25 orang	25 orang	100,00%	17.134.000,00	16.781.450,00	97,94%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	35 orang	35 orang	100,00%	10.011.000,00	9.958.450,00	99,48%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Rencana Kontijensi	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	20.150.000,00	19.980.000,00	99,16%	Nihil	Nihil
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100,00%	31.770.000,00	31.235.000,00	98,32%	Nihil	Nihil
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100,00%	122.844.000,00	121.840.364,00	99,18%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen	100,00%	166.145.000,00	106.658.230,00	64,20%	Nihil	Nihil
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	8.228.000,00	8.145.500,00	99,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100,00%	78.955.000,00	66.391.880,00	84,09%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100,00%	71.612.000,00	24.797.100,00	34,63%	Terjadinya kemarau basah sehingga tidak terdampak pada bencana kekeringan	Melakukan verifikasi dan evaluasi
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Pusat Darurat Bencana	1 laporan	1 laporan	100,00%	7.350.000,00	7.323.750,00	99,64%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 persen	100 persen	100,00%	9.350.000,00	9.257.000,00	99,01%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	9.350.000,00	9.257.000,00	99,01%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	3.056.233.000,00	2.759.503.111,00	90,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.826.000,00	1.719.000,00	94,14%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	996.000,00	937.000,00	94,08%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	830.000,00	782.000,00	94,22%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.166.240.000,00	1.874.713.134,00	86,54%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	15 orang	100,00%	2.084.374.000,00	1.798.084.669,00	86,26%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	45.921.000,00	45.909.465,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	35.945.000,00	30.719.000,00	85,46%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	66,67 persen	66,67%	2.590.000,00	2.400.000,00	92,66%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	2 orang	66,67%	2.590.000,00	2.400.000,00	92,66%	Anggaran yang tersedia setelah perubahan hanya bisa mengakomodir diklat untuk 2 orang	Perjalanan diklat yang tidak bisa diakomodir pada ini dapat tercover pada lain
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	24.663.000,00	24.258.410,00	98,36%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	10 paket	100,00%	2.461.000,00	2.461.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	12.778.000,00	12.375.410,00	96,85%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100,00%	2.324.000,00	2.322.000,00	99,91%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	561.845.000,00	558.477.011,00	99,40%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00%	664.000,00	486.510,00	73,27%	Tidak terlalu banyak berkas/dokumen dan barang yang dikirim atau diterima	Evaluasi kebutuhan riil terhadap biaya surat menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100,00%	38.857.000,00	35.969.223,00	92,57%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100,00%	522.324.000,00	522.021.278,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	295.169.000,00	294.035.556,00	99,62%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 kendaraan	21 kendaraan	100,00%	269.740.000,00	268.944.556,00	99,71%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 paket	15 paket	100,00%	6.538.000,00	6.200.000,00	94,83%	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100,00%	18.891.000,00	18.891.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
6	Sosial	Dinsosdaldukk BP3A	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan anak Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	60,77 persen	60,77 persen	100,00%	845.250.000,00	835.159.000,00	98,81%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	65,48 persen	65,48 persen	100,00%	845.250.000,00	835.159.000,00	98,81%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	17 orang	94,44%	382.630.000,00	373.880.000,00	97,71%	Adanya 1 orang TKS yang meninggal dunia yaitu di TKS di Kecamatan Kemangkon	Untuk wilayah kerja TKS yang meninggal dunia maka untuk sementara digantikan oleh TKS dari Kecamatan terdekat.
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32 keluarga	32 keluarga	100,00%	3.954.000,00	3.952.500,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	1 lembaga	100,00%	456.820.000,00	456.820.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 sertifikat	1 sertifikat	100,00%	1.846.000,00	506.500,00	27,44%	Adanya perubahan anggota di susunan LK3 dalam hal ini ketua, Sehingga membutuhkan SK Baru yang harus di tandatangani Kepala Daerah, namun OPD hanya membuatkan SK Kepala Dinas Sehingga untuk anggaran tersebut tidak dapat terserap secara maksimal.	Membuat SK LK3 terbaru.
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	46,92	46,92	100,00%	7.154.827.000,00	6.557.487.881,00	91,65%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	100 persen	100,00%	6.154.827.000,00	5.578.125.158,00	90,63%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Sandang	30 orang	70 orang	233,33%	7.178.000,00	7.177.600,00	99,99%	Capaian kinerja di atas 100% karena jumlah gender penerima manfaat yang masuk ke Rumah Singgah tidak bisa diprediksi dengan pasti.	Memberi bantuan sandang disesuaikan dengan jenis gender dan usia sandang yang tersedia.
				Penyediaan Alat Bantu	20	33 orang	165,00%	48.787.000,00	48.787.000,00	100,00%	Permohonan berbagai alat bantu dari masyarakat namun anggaran dari APBD terbatas, sehingga menggunakan bantuan alat bantu yang di berikan oleh provinsi dan pusat	Memprioritaskan dari desil yang terendah dan mengirimkan permohonan alat bantu ke Kemensos melalui Sentra Satria Baturaden

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3 orang	10 orang	333,33%	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00%	Capaian kinerja di atas 100% karena adanya penerima manfaat yang tidak diketahui identitasnya hal ini dikarenakan banyaknya aduan dari TKSK dan instansi terkait mengenai penerima manfaat yang harus di layani.	Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui identitas penerima manfaat menggunakan iris mata supaya bisa diantarkan ke pihak keluarga
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.606 orang	1.606 orang	100,00%	6.013.249.000,00	5.415.912.400,00	90,07%	Nihil	Nihil
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	250 orang	500 orang	200,00%	79.953.000,00	79.953.000,00	100,00%	Banyaknya usulan dari desa terkait pemberian paket sembako kepada penerima manfaat Lansia dan Disabilitas sehingga realisasi melebihi target pada sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta glandangan pengemis dan masyarakat	Dapat memberikan manfaat pada penerima manfaat dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta glandangan pengemis dan masyarakat.
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3 orang	10 orang	333,33%	1.000.000,00	999.600,00	99,96%	Banyaknya aduan atau laporan dari TKSK atau instansi terkait tentang penerima manfaat yg harus dilayani sehingga realisasi melebihi target pada sub Pemberian layanan data dan pengaduan	Dapat memberikan manfaat pada penerima manfaat dalam Pemberian layanan Data dan Pengaduan.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberian Layanan Kedaruratan	3 orang	10 orang	333,33%	1.000.000,00	999.600,00	99,96%	Banyaknya penerima manfaat yang harus segera dilayani sehingga realisasi melebihi target pada sub Pemberian layanan kedaruratan	Dapat memberikan manfaat pada pe manfaat dalam Pemberian layanan kedaruratan.
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3 orang	10 orang	333,33%	1.000.000,00	999.600,00	99,96%	Adanya beberapa laporan dari Dinas Sosial baik dari dalam Provinsi maupun luar provinsi sehingga penerima manfaat harus dilakukan penelusuran keluarga dan adanya penerima manfaat yang tidak diketahui identitasnya	Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui identitas penerima manfaat menggunakan iris mata supaya bisa diantarkan ke pihak keluarga
				Pemberian Layanan Rujukan	3 orang	10 orang	333,33%	1.000.000,00	999.600,00	99,96%	Banyaknya permohonan rujukan pm untuk dirujuk ke panti rehabilitasi sosial milik provinsi yang harus dilayani sehingga realisasi melebihi target pada sub Pemberian layanan Rujukan	Dapat memberikan manfaat pada penerima manfaat dalam Pemberian layanan rujukan.
				Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 persen	0	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%		

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 orang	0	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	Pada sub kegiatan tersebut tidak terrealisasi karena pendirian sekolah rakyat tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan ketidaktersediaan alternatif lahan belum mendapat persetujuan dari kepala daerah sehingga untuk sub kegiatan ini yang fungsinya sebagai fasilitasi(Amdal amdalalin dan SLF Sekolah rakyat tidak dapat terseran	Peningkatan koordinasi agar di tahun berikutnya sekolah rakyat dapat di dirikan di kabupaten purbalingga.
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	88,87 persen	96,53 persen	108,61%	2.287.410.000,00	2.127.285.000,00	93,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	2.287.410.000,00	2.127.285.000,00	93,00%	Nihil	Nihil
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	136.700 orang	136.700 orang	100,00%	56.746.000,00	56.380.000,00	99,36%		
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.600 keluarga	1.701 keluarga	106,31%	2.230.664.000,00	2.070.905.000,00	92,84%	Pada tahun sebelumnya KPM hanya 1600 sehingga untuk target 2025 menyesuaikan KPM Pada tahun sebelumnya namun untuk realisasinya terdapat penambahan KPM sebanyak 101 dari usulan yang telah di stujui sehingga untuk realisasinya lebih dari target yang di tetapkan.	Melaksanakan verifikasi dengan detail agar seluruh calon penerima yang layak dapat menerima BLT DBHCHT.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	97,04 persen	100 persen	103,05%	150.171.000,00	103.385.700,00	68,85%	Setiap penanganan korban bencana telah terpenuhi kebutuhan pangannya melalui paket sembako bencana dari APBD Kabupaten Purbalingga dan ada bantuan dari APBD Provinsi dan juga bantuan dari APBN Kementerian Sosial. Termasuk jika ada pendirian dapur umum bencana, suplai bahan makanan terpenuhi dengan baik hingga masa tanggap darurat bencana dinyatakan selesai sehingga menyebabkan capaian anggaran tidak terserap maksimal	Meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan sub kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan lancar dan terselesaikan secara terap waktu
				Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	137.010.000,00	92.276.900,00	67,35%	Secara umum tidak ada permasalahan pada kegiatan tersebut	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan di tahun berikutnya dapat berjalan lancar

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Makanan	250 orang	895	358,00%	99.596.000,00	55.116.900,00	55,34%	Capaian kinerja mencapai 329.6 % dikarenakan adanya bencana alam dan bencana sosial yang tidak terprediksi di wilayah Kabupaten Purbalingga yang berdampak pada 251 KK dengan jumlah Jiwa sebanyak 895 jiwa sehingga terdampak bencana perlu mendapatkan bantuan berupa permakanan.makana n terpenuhi dengan baik hingga masa tanggap darurat bencana dinyatakan selesai.	Setiap penanganan korban bencana telah terpenuhi kebutuhan pangannya melalui paket sembako bencana dari APBD Kabupaten Purbalingga dan ada bantuan dari APBD Provinsi dan juga bantuan dari APBN Kementerian Sosial. Termasuk jika ada pendirian dapur umum bencana, suplai bahan makanan terpenuhi dengan baik hingga masa tanggap darurat bencana dinyatakan selesai sehingga menyebabkan capaian anggaran tidak tercapai maksimal
				Penyediaan sandang	55 orang	58 orang	105,45%	10.062.000,00	10.062.000,00	100,00%	Jumlah, gender dan usia korban bencana tidak bisa diprediksi dengan pasti. Sedangkan stok sandang yang ada terbatas sehingga di bantu dengan bantuan dari APBD Provinsi dan juga bantuan dari APBN Kementerian Sosial.	Memberi bantuan sandang dengan memprioritaskan korban kebakaran dan disesuaikan dengan jenis gender dan usia sandang yang tersedia.
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100 orang	100 orang	100,00%	27.352.000,00	27.098.000,00	99,07%	Sering dijumpai kurang lengkapnya format laporan kejadian bencana dari desa (tidak disertai fotokopi Kartu Keluarga) untuk dapat mengklasifikasikan kelompok rentan beserta bantuan yang dibutuhkan.	Melakukan assessment korban bencana melalui TKSK atau TAGANA untuk memperoleh data kelompok rentan korban bencana, sehingga dapat menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	13.161.000,00	11.108.800,00	84,41%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	37 orang	37 orang	100,00%	13.161.000,00	11.108.000,00	84,40%	Kurangnya personil TAGANA di beberapa wilayah kecamatan sehingga jika terjadi bencana perlu koordinasi lebih intens untuk dapat mengarahkan personil; Kurangnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas anggota TAGANA dalam bidang kebencanaan, sehingga setelah beberapa tahun tidak ada peningkatan kemampuan strategi penanganan bencana	Memperkuat koordinasi dengan TAGANA dan dibantu relawan bencana lainnya agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, mengikuti pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan oleh instansi lain seperti BASARNAS maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan personil yang terbatas.
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 persen	100 persen	100,00%	123.043.000,00	122.743.420,00	99,76%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	123.043.000,00	122.743.420,00	99,76%	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100.000.000,00	99.730.120,00	99,73%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 makam	5 makam	100,00%	23.043.000,00	23.013.300,00	99,87%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	100 persen	100 persen	100,00%	5.169.403.000,00	4.870.251.006,00	94,21%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.904.000,00	4.904.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	66,67%	3.320.000,00	3.320.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja perangkat daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	1.584.000,00	1.584.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.875.060.000,00	3.629.567.503,00	93,66%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	28 orang/bulan	100,00%	3.775.790.000,00	3.530.385.879,00	93,50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 dokumen	16 dokumen	100,00%	44.370.000,00	44.281.524,00	99,80%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	54.900.000,00	54.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	37.295.000,00	35.655.021,00	95,60%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.500.000,00	1.478.500,00	98,57%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan logistik kantor	1 paket	1 paket	100,00%	15.857.000,00	14.303.521,00	90,20%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	800.000,00	800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	6 laporam	100,00%	1.382.000,00	1.373.000,00	99,35%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100,00%	14.156.000,00	14.100.000,00	99,60%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	56.080.000,00	55.486.555,00	98,94%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	24.080.000,00	23.809.240,00	98,88%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	32.000.000,00	31.677.315,00	98,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100,00%	933.064.000,00	881.218.366,00	94,44%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	100,00%	332.000,00	100.500,00	30,27%	tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan, namun kurang maksimal dalam penyerapannya karena kegiatan hanya situasional sesuai dengan kebutuhan	Memaksimalkan dan memanfaatkan anggaran yang ada agar terserap lebih baik dan tepat.
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	187.858.000,00	150.828.718,00	80,29%	Secara umum tidak ada masalah yang berarti hanya saja terkadang terjadi tagihan yang diluar kebiasaan sehingga perlu adanya perubahan rencana kas.	Mempersiapkan cadangan dan rencana kas yang lebih baik lagi dan berkoordinasi dengan pihak penyedia terkait dengan pembayaran dan melakukan efisiensi dan penghematan penggunaan.
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 laporan	5 laporan	100,00%	2.050.000,00	1.631.000,00	79,56%	Secara umum tidak ada masalah berarti hanya saja tidak terserap secara maksimal anggaran banner karena menggunakan anggaran banner yang lainnya	Memaksimalkan semua anggaran yang ada dan mencukupi semua kegiatan yang dibutuhkan dan diperlukan.
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	742.824.000,00	728.558.148,00	98,08%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	315.180.000,00	315.006.116,00	99,94%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 unit	51 unit	100,00%	258.280.000,00	258.218.540,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	100,00%	7.700.000,00	7.680.000,00	99,74%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	150,00%	49.200.000,00	49.107.576,00	99,81%	Nihil	Nihil
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Tdak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Tujuan: Meningkatkan kualitas kelembagaan Sasaran : Meningkatnya implementasi SAKIP dinnaker	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	73,7 persen	73,71 persen	100,01%	4.918.177.000	4.523.353.322	91,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.568.000,00	2.567.500,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	100,00%	1.430.000,00	1.429.500,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	9 laporan	100,00%	1.138.000,00	1.138.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.641.469.000,00	3.377.246.499,00	92,74%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	26 orang/bulan	100,00%	3.584.165.000,00	3.319.951.471,00	92,63%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	9 dokumen	75,00%	16.624.000,00	16.615.028,00	99,95%	Capaian kinerja tidak mencapai 100% karena adanya efisiensi anggaran	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	4 dokumen	80,00%	40.680.000,00	40.680.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	5 laporan	100,00%	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 persen	200 persen	200,00%	660.000,00	660.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	2 orang	200,00%	660.000,00	660.000,00	100,00%	Nihil	Anggaran perubahan lebih kecil dari anggaran awal jadi target dikurangi, tetapi bisa membiayai 2 orang bimtek karena hanya dikasih uang saku saja sebesar Rp.120.000,-
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	38.747.000,00	38.312.450,00	98,88%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 paket	8 paket	100,00%	19.139.000,00	18.728.450,00	97,85%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.400.000,00	2.399.000,00	99,96%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.680.000,00	6.660.000,00	99,70%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	4.528.000,00	4.525.000,00	99,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	50 persen	50,00%	1.000.000,00	380.000,00	38,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	1 unit	50,00%	1.000.000,00	380.000,00	38,00%	Capaian anggaran rendah karena harga barang tidak sesuai anggaran	Melakukan perencanaan lebih baik lagi
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	884.676.000,00	761.371.983,00	86,06%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1 laporan	8,33%	600.000,00	75.500,00	12,58%	Capaian kinerja dan anggaran rendah karena tidak ada lagi permintaan pengiriman surat	Anggaran bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	194.584.000,00	163.026.730,00	83,78%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	688.492.000,00	597.269.753,00	86,75%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	342.117.000,00	335.874.890,00	98,18%	Nihil	Nihil
				Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 unit	29 unit	100,00%	147.777.000,00	141.984.350,00	96,08%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	9.340.000,00	9.340.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	2 unit	200,00%	185.000.000,00	184.550.540,00	99,76%	Nihil	Nihil
			Tujuan: Meningkatkan kesempatan kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	16,67 persen	17,65 persen	105,88%	2.169.000,00	2.169.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 persen	100 persen	100,00%	2.169.000,00	2.169.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17 orang	3 orang	17,65%	2.169.000,00	2.169.000,00	100,00%	Ada efisiensi anggaran jadi perusahaan yang ikut pelatihan hanya 3 orang	Nihil
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3,21 persen	5,75 persen	55,83%	945.339.000,00	933.696.491,00	98,77%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	3,86 persen	5,75 persen	148,96%	943.909.000,00	932.266.491,00	98,77%	Nihil	Capaian realisasi kinerja sebesar 148,96% karena indikator dan cara perhitungan kegiatan dan sub kegiatan berbeda sehingga mempengaruhi persentase capaian pada kinerja.
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	392 orang	392 orang	100,00%	943.409.000,00	931.766.491,00	98,77%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2 kesepakatan	2 kesepakatan	100,00%	500.000,00	500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	100 persen	27,27 persen	27,27%	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22 lembaga	6 lembaga	27,27%	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00%	Belum bisa membina semua LPKS dalam setahun	lebih banyak melakukan pembinaan
			Sasaran: Meningkatkan penempatan kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	95,17 persen	95,17 persen	100,00%	358.024.000,00	327.870.200,00	91,58%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	51,35 persen	76,34 persen	148,67%	58.024.000,00	56.058.900,00	96,61%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan Antar Kerja	6.722 orang	5.224 orang	77,71%	58.024.000,00	56.058.900,00	96,61%	Realisasi kinerja sebesar 77,71% karena menurunnya order dari luar negeri yang berpengaruh pada serapan tenaga kerja (rambut, kayu, dan garmen)	Nihil
				Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 persen	100 persen	100,00%	300.000.000,00	271.811.300,00	90,60%	Nihil	Nihil
				Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	1041 orang	208,20%	300.000.000,00	271.811.300,00	90,60%	Nihil	Sesuai di Renstra dan DPA, target 500 orang, setelah dilakukan perhitungan dan monitoring menjadi 1.041 orang
			Tujuan: Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	93,01 persen	83,5 persen	89,78%	474.638.000,00	432.964.200,00	91,22%	Nihil	Nihil
			Sasaran : Presentase angka perselisihan yang terselesaikan	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota.	93,01 persen	100 persen	107,52%	474.638.000,00	432.964.200,00	91,22%	Nihil	Nihil
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 perkara	7 perkara	140,00%	12.765.000,00	12.325.000,00	96,55%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota	5 perkara	7 perkara	140,00%	10.610.000,00	10.366.000,00	97,70%	Nihil	Ada 7 perkara yang diajukan, sehingga melebihi target
				Penyelesaian Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.164 orang	2.164 orang	100,00%	451.263.000,00	410.273.200,00	90,92%	Nihil	Nihil
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DinsosdaldukK BP3A	Sasaran : Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100 persen	100 persen	100,00%	114.825.000,00	114.769.925,00	99,95%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	8.041.000,00	8.038.000,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	8.041.000,00	8.038.000,00	99,96%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	3,66	3,66	100,00%	94.588.000,00	94.562.125,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2.500.000	2.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 organisasi	2 organisasi	100,00%	92.088.000	92.062.125	99,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	12.196.000	12.196.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100,00%	12.196.000	12.196.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100 persen	100 persen	100,00%	203.774.000	200.651.550	98,47%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	29.590.000	29.590.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	23.700.000	23.700.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 PD	3 PD	100,00%	5.890.000	5.890.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	60.634.000	58.061.550	95,76%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	32 orang	213,33%	13.884.000	13.859.000	99,82%	Capaian kinerja di atas 100% karena meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Memperluas informasi tentang hak korban dengan memperluas jejaring kerjasama
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 layanan	12 layanan	100,00%	46.750.000	44.202.550	94,55%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	113.550.000	113.000.000	99,52%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100,00%	38.550.000	38.450.000	99,74%	Nihil	Nihil
				Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	75.000.000	74.550.000	99,40%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100 persen	100 persen	100,00%	2.158.000	2.142.600	99,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	2.158.000	2.142.600	99,29%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.158.000	2.142.600	99,29%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57,55	57,55	100,00%	176.831.000	175.925.459	99,49%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	91,2	91,2	100,00%	161.399.000	160.496.059	99,44%	Nihil	Nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	1 organisasi	100,00%	155.789.000	154.886.059	99,42%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	67 dokumen	48 dokumen	71,64%	5.610.000	5.610.000	100,00%	Capaian kinerja di bawah 100% karena belum seluruh desa mengupdate SK Desa Kelurahan Layak Anak terbaru.	Sudah berkoordinasi dengan Perangkat Desa untuk segera mengupdate SK terbaru.
				Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	15.432.000	15.429.900	99,99%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	4.044.000	4.042.000	99,95%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300 dokumen	300 dokumen	100,00%	4.247.000	4.246.800	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penguatan Jejarang antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	7.141.000	7.140.600	99,99%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	72,12	72,12	100,00%	353.599.000	350.889.653	99,23%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	135.031.000	134.416.500	99,54%	Nihil	Nihil
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	2.050.000	2.050.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Advokasi dan Pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan/TA	12 orang	12 orang	100,00%	135.031.000	134.416.500	99,54%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	186.048.000	184.023.641	98,91%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53 orang	61 orang	115,09%	2.658.000	2.636.000	99,17%	Capaian kinerja di atas 100% karena meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak	Berkoordinasi dengan lintas sektoral dan perangkat desa untuk menangani aduan
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	20 layanan	20 layanan	100,00%	183.390.000	181.387.641	98,91%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah	100 persen	100 persen%	100,00%	30.470.000	30.399.512	99,77%	Nihil	Nihil
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	52 orang	52 orang	100,00%	30.470.000	30.399.512	99,77%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Pangan	DKPP	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Nelayan dan pembudidaya ikan Sasaran : 1. Meningkatkan nilai tambah sub sektor perikanan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	5.090.466.000	4.850.770.977	95,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	7.285.000	6.266.250	86,02%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 buku	2 buku	100,00%	6.275.000	6.266.250	99,86%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 buku	5 buku	100,00%	1.010.000	1.010.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.471.555.000	4.307.606.906	96,33%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.404.702.000	4.307.606.906	97,80%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100,00%	34.853.000	34.677.926	99,50%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00%	32.000.000	29.024.000	90,70%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 persen	15 persen	100,00%	4.000.000	3.978.500	99,46%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 orang	25 orang	100,00%	4.000.000	3.978.500	99,46%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.900.000	2.900.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.900.000	2.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100,00%	28.608.000	28.604.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.000.000	3.978.500	99,46%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	14.928.000	13.115.000	87,86%	Nihil	Nihil
				Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.520.000	2.500.000	99,21%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.760.000	4.760.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	7.748.000	7.748.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	2 buah	2 buah	100,00%	7.748.000	7.748.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	409.370.000	379.401.236	92,68%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100,00%	400.000	400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%	168.665.000	156.946.913	98,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 kali	3 kali	100,00%	4.000.000	3.969.000	99,23%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	236.305.000	218.085.323	92,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	159.000.000	149.947.650	94,31%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	41 unit	41 unit	100%	150.000.000	149.947.650	99,97%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	4.000.000	4.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	5.000.000	4.411.750	88,24%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90 persen	70 persen	80%	17.852.000	17.767.477	99,53%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	85 persen	67 persen	70%	17.852.000	17.767.477	99,53%	Nihil	Nihil
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Pangan Daerah Kabupaten/Kota	5 kali	5 kali	100%	1.965.000	1.893.000	97,00%	Nihil	Nihil
				Penguatan Kelembagaan pengawasan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 buah	8 buah	800%	7.022.000	7.020.000	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	1 paket	100%	8.865.000	8.854.477	97,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	25,10 persen	25,10 persen	100%	6.000.000	5.916.000	97,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100%	6.000.000	5.916.000	98,60%		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	6 kali	8 kali	120%	1.900.000	1.883.600		Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80 persen	80 persen	100%	6.000.000	5.916.000	98,60%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	53,98 persen	56,3 persen	103%	817.000	815.000	99,76%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	0,0088 persen	0,0088 persen	100%	817.000	815.000	99,76%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/kota	1 unit	0 unit	0%	817.000	815.000	99,76%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	6 kali	8 kali	120%	817.000	815.000	99,76%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN DISVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	93,6 persen	96,43 persen	115%	78.068.000	74.776.597	95,78%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	≤10 angka	≤10 angka	100%	5.563.000	5.471.000	98,35%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	1 data	1 data	100%	2.156.000	2.084.000	96,66%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	52 kali	52 kali	100%	1.642.000	1.642.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	8 kelompok	8 kelompok	100%	1.765.000	1.745.000	98,87%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	100,0 Kg/kap/th	100,0 Kg/kap/th	100%	72.505.000	69.305.597	95,59%	Nihil	Nihil
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 buku	1 buku	100%	1.295.000	1.288.400	99,49%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40 kelompok	50 kelompok	150%	69.310.000	68.017.197	98,13%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.900.000	1.883.600	99,14%	Nihil	Nihil
4	Pertanahan	Dinrumkim	Sasaran : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100 persen	100 persen	100,00%	7.549.000,00	7.546.863,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	7.549.000,00	7.546.863,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	7.549.000	7.546.863	99,97%	Adanya penolakan terhadap kegiatan pengadaan tanah dan penolakan nilai ganti rugi yang dianggap kurang	Memfasilitasi, memediasi kegiatan pengadaan tanah
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,01 persen	0 persen	0,00%	2.700.000,00	2.637.751,02	97,69%	Kinerja tidak tercapai 100% karena ada kegiatan pendataan ulang pemanfaatan tanah	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten / Kota	100 persen	103,67 persen	#VALUE!	2.700.000,00	2.637.751,02	97,69%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.700.000,00	2.637.751,02	97,69%	Iklim ektrim, hama, pupuk, irigasi, akses jalan, tidak ada kenaikan retribusi harga tetap tiap tahun	Membuat jadwal sesuai dengan masa tanam, berkoordinasi dengan OPD terkait dan mengikutsertakan dan melibatkan OPD terkait dan PPL dalam setiap kegiatan pemanfaatan tanah di masing- masing kelurahan dan memfasilitasi pengelolaan retribusi tanah
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100 persen	100 persen	100,00%	2.016.080,00	1.856.514,63	92,09%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	2.016.080,00	1.856.514,63	92,09%	Nihil	Nihil
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 BA	4 BA	200,00%	2.016.080,00	1.856.514,63	92,09%	Pelampauan capaian kinerja disebabkan penggunaan tanah secara ilegal, kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat atas penggunaan dan pemanfaatan tanah	Melakukan sosialisasi dan mediasi penyelesaian sengketa tanah yang dituangkan dalam berita acara

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	9.330.672.000,00	8.871.727.654,00	95,08%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.887.000,00	5.741.800,00	97,53%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	5.120.000,00	5.054.800,00	98,73%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	767.000,00	687.000,00	89,57%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	8.891.958.000,00	8.450.984.820,00	95,04%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100,00%	8.830.930.000,00	8.390.231.720,00	95,01%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen	29 dokumen	87,87%	29.533.000,00	29.533.000,00	100,00%	Dipangkas untuk efisiensi anggaran sehingga belanja SPPD hanya mencukupi untuk 29 kegiatan	Segera memperbaiki target ketika terdapat perubahan anggaran
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	31.495.000,00	31.220.100,00	99,13%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.746.000,00	2.746.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	2.746.000,00	2.746.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	2 orang	100,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	30.120.000,00	30.120.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 paket	12 paket	100,00%	351.000,00	351.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	17.784.000,00	17.784.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 paket	10 paket	83,33%	797.000,00	797.000,00	100,00%	Dipangkas untuk efisiensi anggaran sehingga belanja koran hanya mencukupi untuk pembelian selama 10 bulan	Segera memperbaiki target ketika terdapat perubahan anggaran
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.324.000,00	6.324.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	3.191.000,00	3.191.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.875.000,00	2.875.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	2.875.000,00	2.875.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	235.620.000,00	217.952.834,00	92,50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	283.000,00	283.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%	104.136.000,00	87.510.152,00	84,03%	Efisiensi penggunaan sumber daya air dan listrik.	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	809.000,00	809.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	130.392.000,00	129.350.682,00	99,20%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	158.966.000,00	158.807.200,00	99,90%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	12 unit	100,00%	146.641.000,00	146.482.200,00	99,89%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit	100,00%	7.325.000,00	7.325.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100 persen	100 persen	100,00%	24.087.000,00	24.078.402,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	100 persen	100 persen	100,00%	12.182.000,00	12.174.902,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	694.000,00	690.000,00	99,42%	Nihil	Nihil
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	11.488.000,00	11.484.902,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	11.905.000,00	11.903.500,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	11.905.000,00	11.903.500,00	99,99%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100 persen	100 persen	100,00%	222.135.000,00	220.711.725,00	99,36%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	222.135.000,00	220.711.725,00	99,36%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	211.760.000,00	210.336.725,00	99,33%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	10.375.000,00	10.375.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4,297 persen	4,296 persen	99,97%	1.250.781.000,00	1.231.282.561,00	98,44%	Tidak ada penambahan RTH	Mengusulkan anggaran dan berkoordinasi dengan OPD lain terkait lahan yang bisa digunakan untuk RTH.
				Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	13,85 persen	13,85 persen	100,00%	1.250.781.000,00	1.231.282.561,00	98,44%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13,85 ha	13,85 ha	100,00%	1.246.542.000,00	1.227.065.561,00	98,44%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 orang	2 orang	100,00%	4.239.000,00	4.217.000,00	99,48%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100 persen	100 persen	100,00%	11.095.000,00	11.094.300,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 persen	100 persen	100,00%	11.095.000,00	11.094.300,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 perusahaan	10 perusahaan	100,00%	5.737.000,00	5.736.600,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15 laporan	15 laporan	100,00%	5.358.000,00	5.357.700,00	99,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 persen	3,2 persen	160,00%	12.917.000,00	12.913.100,00	99,97%	Nihil	Nihil
					100 persen	100 persen	100,00%	12.917.000,00	12.913.100,00	99,97%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH	12 dokumen	82 dokumen	683,33%	5.458.000,00	5.457.100,00	99,98%	Realisasi perizinan usaha melebihi target pada 2025 didorong oleh beberapa faktor, antara lain: - Transformasi digital melalui Sistem OSS RBA yang mempercepat proses penerbitan izin - Kebijakan kemudahan berusaha dengan pendekatan risk-based approach - Tingginya minat investasi dan ekspansi usaha - Kewajiban legalitas untuk UMKM - Reformasi peraturan pemerintah dengan PP 28/2025 yang memperkuat kepastian bisnis dan menyederhanakan aturan - Perizinan berusaha harus melalui penapisan sistem	Memperbaiki perencanaan kegiatan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50 kegiatan	62 kegiatan	124,00%	7.459.000,00	7.456.000,00	99,96%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	33,33 persen	33,33 persen	100,00%	7.124.000,00	7.123.500,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	7.124.000,00	7.123.500,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan.	15 lembaga	15 lembaga	100,00%	7.124.000,00	7.123.500,00	99,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	7,18 persen	7,18 persen	100,00%	19.919.000,00	19.911.000,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,18 persen	7,18 persen	100,00%	19.919.000,00	19.911.000,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filant ropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 lembaga	20 lembaga	100,00%	19.919.000,00	19.911.000,00	99,96%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100 persen	100 persen	100,00%	5.579.000,00	5.563.500,00	99,72%	Penentuan target yang terlampau rendah	Memperbaiki perencanaan kegiatan
				Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	5.579.000,00	5.563.500,00	99,72%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	100 persen	100 persen	100,00%	5.579.000,00	5.563.500,00	99,72%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	63,41 persen	51,74 persen	81,59%	6.688.555.000,00	6.557.894.942,00	98,05%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengelolaan Sampah	25,85 persen	29,71 persen	114,93%	6.688.555.000,00	6.557.894.942,00	98,05%	Nihil	Nihil
					37,76 persen	22,03 persen	58,34%				Nihil	Nihil
				Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	39.000 Ton	39.000 Ton	100,00%	6.468.555.000,00	6.339.585.692,00	98,01%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2 kelompok	2 kelompok	100,00%	220.000.000,00	218.309.250,00	99,23%	Nihil	Nihil
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dindikcapil	Tujuan: Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinpendukcapi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	5.047.228.000,00	4.673.808.619,00	92,60%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	500.000,00	500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.392.588.000,00	3.081.393.385,00	90,83%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	25 orang	100,00%	3.351.052.000,00	3.039.860.385,00	90,71%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11.653.000,00	11.650.000,00	99,97%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	29.883.000,00	29.883.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	0,00	0,00	0,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	38.775.000,00	38.756.900,00	99,95%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	20.175.000,00	20.170.100,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.000.000,00	2.999.700,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.000.000,00	3.991.100,00	99,78%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	5.600.000,00	5.596.000,00	99,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	206.548.000,00	204.956.499,00	99,23%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	21 unit	100,00%	206.548.000,00	204.956.499,00	99,23%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.215.742.000,00	1.155.137.535,00	95,02%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	520,00	287.400,00	55,27 %	Adanya penghematan anggaran karena untuk surat menyurat sudah tersedia aplikasi "SRIKANDI" dan juga via, email, whatsapp grup	Pengalihan atau pengurangan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan lain sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	117.300.000,00	106.292.365,00	90,62%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.091.922.000,00	1.043.757.770,00	95,59%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.000.000,00	4.800.000,00	80,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	186.075.000,00	186.064.300,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	24 unit	100,00%	157.375.000,00	157.374.300,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit	100,00%	15.700.000,00	15.690.000,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	6 unit	100,00%	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100 persen	100 persen	100,00%	1.073.580.000,00	1.073.388.952,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 persen	88,77 persen	88,77%	1.073.580.000,00	1.073.388.952,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	191.200 dokumen	169.723 dokumen	88,77%	1.073.580.000,00	1.073.388.952,00	99,98%	Penjelasan realisasi kinerja: Karena terdapat efisiensi anggaran, utamanya pada anggaran perjalanan dinas sehingga tidak dapat melakukan kegiatan jemput bola terutama perekaman KTP-EI	Nihil
				PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	100 persen	103,36 persen	103,36%	65.430.000,00	65.336.506,00	99,86%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 persen	103,36 persen	103,36%	65.430.000,00	65.336.506,00	99,86%	Nihil	Nihil
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	26.020 dokumen	26.893 dokumen	103,36%	65.430.000,00	65.336.506,00	99,86%	Capaian kinerja di atas 100% karena jumlah penduduk yang melakukan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil cukup banyak	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100 persen	100 persen	100,00%	274.114.000,00	274.180.365,00	100,02%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	100 persen	100,00%	274.114.000,00	274.180.365,00	100,02%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 laporan	17 laporan	100,00%	274.114.000,00	274.180.365,00	100,02%	Nihil	Nihil
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sasaran: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinpermasdes	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	3.597.434.000,00	3.412.346.209,00	94,86%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.013.000,00	1.005.000,00	99,21%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	429.000,00	429.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	584.000,00	576.000,00	98,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.167.889.000,00	2.999.128.886,00	94,67%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	22 orang	100,00%	3.114.949.000,00	2.946.612.886,00	94,60%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 dokumen	18 dokumen	90,00%	29.180.000,00	28.956.000,00	99,23%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80 dokumen	78 dokumen	97,50%	23.760.000,00	23.560.000,00	99,16%	Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD berupa dokumen SPM tidak tercapai 100% dikarenakan aturan baru di atas Rp. 10.000.000.00 pengajuan mengajukan SPM LS	Lebih cermat menentukan target kinerja
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.800.000,00	1.000.000,00	55,56%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	1.800.000,00	1.000.000,00	55,56%	Pejabat pengadaan barang merangkap sebagai pembantu PPTK	PPTK agar lebih cermat dalam merencanakan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	-	0,00%	4.000.000,00	0,00	0,00%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	-	0,00%	4.000.000,00	0,00	0,00%	Capaian kinerja dan anggaran tidak tercapai kerana tidak ada ASN yang mengikuti diklat yang dibiayai secara mandiri oleh Dinpermasdes	Aktif mengkoordinir kebutuhan pelatihan ASN dan evaluasi terhadap anggaran yang tersedia

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	22.204.000,00	19.922.000,00	89,72%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 paket	7 paket	100,00%	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket	100,00%	13.224.000,00	12.082.000,00	91,36%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	10 laporan	100,00%	2.670.000,00	1.600.000,00	59,93%	Capaian anggaran tidak 100% karena d disesuaikan dengan kebutuhan / jumlah tamu yang difasilitasi makanan dan minumannya	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	10 laporan	100,00%	2.670.000,00	2.600.000,00	97,38%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	249.436.000,00	240.870.823,00	96,57%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	-	0,00%	300.000,00	0,00	0,00%	Kinerja dan anggaran tidak tercapai karena tidak ada pengiriman dokumen melalui jasa kirim	Mengkoordinir kebutuhan pengiriman dokumen yang melalui jasa kirim dan lebih cermat terhadap pengelolaan anggaran
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	55.320.000,00	50.372.510,00	91,06%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan	100,00%	3.826.000,00	3.746.000,00	97,91%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	189.990.000,00	186.752.313,00	98,30%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	145.092.000,00	144.619.500,00	99,67%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 unit	18 unit	100,00%	138.250.000,00	138.186.100,00	99,95%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit	100,00%	6.842.000,00	6.433.400,00	94,03%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENATAAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	2.208.252.000,00	2.192.709.000,00	99,30%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	2.208.252.000,00	2.192.709.000,00	99,30%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Tata Wilayah Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	886.000,00	878.000,00	99,10%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1 desa	1 desa	100,00%	896.000,00	883.000,00	98,55%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	546 unit	546 unit	100,00%	2.206.470.000,00	2.190.948.000,00	99,30%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	75 persen	75 persen	100,00%	142.063.000,00	141.201.000,00	99,39%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	100 persen	100 persen	100,00%	142.063.000,00	141.201.000,00	99,39%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	103.083.000,00	102.460.000,00	99,40%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	38.980.000,00	38.741.000,00	99,39%	Nihil	Nihil
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	3.269.818.000,00	2.840.364.114,00	86,87%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	3.269.818.000,00	2.840.364.114,00	86,87%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	87.564.000,00	78.946.528,00	90,16%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.567.000,00	1.567.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	224 dokumen	224 dokumen	100,00%	4.159.000,00	4.159.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	224 dokumen	224 dokumen	100,00%	3.085.795.000,00	2.677.013.686,00	86,75%	Terdapat SILPA pada belanja BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan beberapa perangkat desa memasuki usia pensiun	Melakukan verifikasi per periode untuk menentukan / memetakan anggaran
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	224 orang	224 orang	100,00%	31.521.000,00	30.352.000,00	96,29%	Nihil	Nihil
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.052.000,00	1.612.000,00	52,82%	Evaluasi dan Pengawasan Perdes hanya dilaksanakan sekali rapat untuk 3 desa karena dari Kecamatan Kutasari mengajukan permohonan agar pelaksanaannya digabung untuk 1 kali pembahasan (Desa Karangecek, Karanglewas, Candinata)	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan lebih awal agar jika terdapat efisiensi baik anggaran maupun kegiatan dapat dialihkan untuk kegiatan yang lain
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	19.874.000,00	19.794.400,00	99,60%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	-	0,00%	7.850.000,00	0,00	0,00%	Capaian kinerja nihil dikarenakan tidak ada Pelaksanaan Pilkades PAW utk mengisi kekosongan Kades di 12 desa sesuai regulasi UU 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU 6/2014 tentang Desa bhw Pilkades atau Pilkades PAW dilaksanakan menunggu PP	Berkoordinasi aktif dengan desa tentang pelaksanaan Pilkades

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan	100,00%	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	224 dokumen	224 dokumen	100,00%	3.629.000,00	3.629.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	4.569.000,00	4.548.000,00	99,54%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	224 dokumen	224 dokumen	100,00%	3.068.000,00	3.068.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	224 orang	224 orang	100,00%	11.020.000,00	9.624.500,00	87,34%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	224 dokumen	224 dokumen	100,00%	5.142.000,00	5.042.000,00	98,06%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	54,09 persen	54,09 persen	100,00%	470.304.000,00	413.181.500,00	87,85%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	54,09 persen	54,09%	100,00%	470.304.000,00	413.181.500,00	87,85%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4668 lembaga	4668 lembaga	100,00%	67.075.000,00	37.516.000,00	55,93%	Kegiatan Pengadaan Belanja Hibah Barang untuk Kelompok Masyarakat tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan verifikasi faktual kelompok tersebut belum terbentuk secara resmi dan belum ada kegiatan sama sekali	melaksanakan verifikasi lebih dini kepada kelompok masyarakat dan lebih selektif dalam memilih / menentukan pihak penerima bantuan / hibah barang

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 paket	-	0,00%	25.073.000,00	63.000,00	0,25%	Hibah Uang untuk Kelompok Masyarakat tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan, data belum terbentuk secara resmi	Melaksanakan verifikasi lebih dini kepada kelompok masyarakat dan lebih selektif dalam memilih / menentukan pihak penerima bantuan / hibah uang
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	3.273.000,00	3.253.000,00	99,39%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1 laporan	100,00%	8.007.000,00	8.007.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	45.805.000,00	43.515.000,00	95,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	239 dokumen	239 dokumen	100,00%	321.071.000,00	320.827.500,00	99,92%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Disnosdaldukk BP3A	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan anak Sasaran: Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20,9	20,9	100,00%	500.591.000,00	495.635.026,00	99,01%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	1.908.000,00	1.908.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	3.957.000,00	3.957.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	3.563.000,00	3.563.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	491.163.000,00	491.163.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 laporan	3 laporan	200,00%	62.093.000,00	62.093.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18 laporan	18 laporan	100,00%	223.200.000,00	223.200.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	18 dokumen	18 dokumen	100,00%	198.690.000,00	198.690.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Profil program pembangunan keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	7.180.000,00	7.180.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,4	1,4	100,00%	7.407.364.000,00	6.246.195.747,00	84,32%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	19,18	19,8	100,00%	1.178.358.000,00	1.131.747.698,00	96,04%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	18 laporan	18 laporan	100,00%	612.000.000,00	603.967.948,00	98,69%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18 laporan	18 laporan	100,00%	243.000.000,00	240.950.000,00	99,16%	Nihil	Nihil
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	130.240.000,00	129.960.750,00	99,79%	Nihil	Nihil
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	16.088.000,00	14.946.000,00	92,90%	Nihil	Nihil
				Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 organisasi	30 organisasi	100,00%	176.850.000,00	141.650.000,00	80,10%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 persen	100 persen	100,00%	1.340.800.000,00	1.340.800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.813 orang	1.813 orang	100,00%	1.340.800.000,00	1.340.800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	90,01 persen	90,01 persen	100,00%	4.613.368.000,00	3.499.083.049,00	75,85%	Nihil	Nihil
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Pelayanan	49 laporan	49 laporan	100,00%	30.600.000,00	30.580.700,00	99,94%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.387 orang	4.387 orang	100,00%	4.547.818.000,00	3.436.321.026,00	75,56%	Pada tahun 2026 terdapat kenaikan pagu anggaran dana DAK, dan untuk kegiatan yang dapat di SPJkan adalah kegiatan dari Bakti Sosial di Puskesmas, selain itu keterbatasan waktu untuk mengajukan administrasi hanya sampai pada bulan November, sehingga anggaran tidak dapat terserap secara maksimal.	Meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan lancar dan terselesaikan secara tepat waktu
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3 laporan	3 laporan	100,00%	3.320.000,00	1.001.950,00	30,18%	Pada tahun 2026 terdapat kenaikan pagu anggaran dana DAK, dan untuk kegiatan yang dapat di SPJkan adalah kegiatan dari Bakti Sosial di Puskesmas, selain itu keterbatasan waktu untuk mengajukan administrasi hanya sampai pada bulan November, sehingga anggaran tidak dapat terserap secara maksimal.	Meningkatkan koordinasi agar pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan lancar dan terselesaikan secara tepat waktu

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	12 laporan	100,00%	31.630.000,00	31.179.373,00	98,58%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,84 persen	0,78 persen	92,85%	274.838.000,00	274.838.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	5 organisasi	5 organisasi	100,00%	7.538.000,00	7.538.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berencana	6 kampung	6 kampung	100,00%	267.300.000,00	267.300.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	66,93	66,93	100,00%	5.248.557.000,00	5.098.457.900,00	97,14%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	83,68 persen	83,68 persen	100,00%	159.407.000,00	9.307.900,00	5,84%	Pada tahun 2025 yang seharusnya ada pengadaan melalui e-catalog sektoral kementerian BKKBN. Akan tetapi di pertengahan tahun proses pengadaan BKB KIT di tingkat pusat mengalami gagal lelang/tidak ada pemenang. Di bulan oktober tahun 2025 BKKBN Pusat menyerahkan kegiatan pengadaan BKB KIT Stunting di masing-masing OPD KB Kabupaten. Karena proses inden barang 60 hari kerja, maka kami tidak berani menyelenggarakan proses pengadaan karena	Seharusnya proses pengadaan langsung e-catalog sektoral hendaknya dilaksanakan di tingkat pusat. Apabila BKKBN gagal lelang beban tugas agar tidak di limpahkan ke OPD KB Kabupaten.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKAS)	92 laporan	92 laporan	100,00%	4.113.000,00	4.014.000,00	97,59%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor/UPPKA)	12 unit	12 unit	100,00%	150.000.000,00	0,00	0,00%	Seharusnya pengadaan melalui e-catalog sektoral kementerian BKKBN. Akan tetapi di pertengahan tahun proses pengadaan BKB KIT di tingkat pusat mengalami gagal lelang/tidak ada pemenang. Di bulan oktober tahun 2025 BKKBN Pusat menyerahkan kegiatan pengadaan BKB KIT Stunting di masing-masing OPD KB Kabupaten. Karena proses inden barang 60 hari kerja, maka kami tidak berani menyelenggaraan proses pengadaan karena keterbatasan waktu proses pengadaan, proses pembayaran yang dibatasi minggu ke 2 bulan desember	Seharusnya proses pengadaan langsung e-catalog sektoral hendaknya dilaksanakan di tingkat pusat. Apabila BKKBN gagal lelang beban tugas agar tidak di limpahkan ke OPD KB Kabupaten.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga akseptor/UPPKA)	15 laporan	15 laporan	100,00%	5.294.000,00	5.293.900,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	100,00%	5.089.150.000,00	5.089.150.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	1 laporan	100,00%	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2.304 laporan	2.304 laporan	100,00%	2.304.000.000,00	2.304.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	769 laporan	760 laporan	98,82%	2.768.400.000,00	2.768.400.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
9	Perhubungan	DINHUB	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	6.039.338.000	5.782.786.041	95,75	Nihil	Nihil
			Sasaran : - Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.871.000	2.863.800	99,75	Nihil	Nihil
			- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.784.000	1.776.800	99,60	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%	1.087.000	1.087.000	100,00	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.465.195.000	4.294.773.974	96,18	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 org/bln	37 org/bln	100,00%	4.375.928.000	4.205.587.274	96,11	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	38.763.000	38.746.800	99,96	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	50.504.000	50.439.900	99,87	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.011.000	4.995.000	99,68	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan	10 laporan	100,00%	5.011.000	4.995.000	99,68	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	32.035.000	31.195.150	97,38	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	2.041.000	2.038.500	99,88	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	19.751.000	18.940.650	95,90	Nihil	Nihil
				Fasilitas Kunjungan Tamu	12 paket	12 paket	100,00%	1.500.000	1.480.000	98,67	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 paket	12 paket	100,00%	4.500.000	4.500.000	100,00	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 paket	12 paket	100,00%	4.243.000	4.236.000	99,84	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	38.384.000	37.255.720	97,06	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 unit	10 unit	100,00%	38.384.000	37.255.720	97,06	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 persen	16,67%	79,17%	1.292.767.000	1.210.715.097	93,65	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	1 laporan	16,67%	40.000	18.500	46,25	Jasa pengiriman surat/dokumen saat ini lebih banyak menggunakan Sistem Elektronik	Masih tetap dipasang anggaran nya meskipun dalam jumlah terbatas/sedikit untuk mengantisipasi pengiriman surat/dokumen berbentuk fisik
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	136.511.000	120.140.081	88,01	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.660.000	1.659.000	99,94	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.154.556.000	1.088.897.516	94,31	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,000%	203.075.000	200.987.300	98,97	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau	42 unit	42 unit	100,00%	180.675.000	178.594.800	98,85	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit	100,00%	10.560.000	10.555.000	99,95	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	3 unit	100,00%	11.840.000	11.837.500	99,98	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				13.977.124.000	13.536.725.363	96,85	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	98,75 persen	98,75%	13.285.357.000	12.853.518.055	96,75	Nihil	Nihil
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76 unit	76 unit	100,00%	676.000	676.000	100,00	Nihil	Nihil
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	i Unit	i unit	100,00%	243.056.000	242.479.900	99,76	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.645 unit	4.234 unit	75,00%	12.888.010.000	12.456.752.155	96,65	Jumlah material listrik yang ada belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah permintaan perbaikan dan pemeliharaan LPJU	Dalam perbaikan dan pemeliharaan LPJU dengan menggunakan skala prioritas
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	25 unit	25 unit	100,00%	153.615.000	153.610.000	100,00	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 persen	100 persen	100,00%	7.600.000	7.589.000	99,86	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	4 unit	4 unit	100,00%	7.600.000	7.589.000	99,86	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	385 Izin	385 Izin	100,00%	17.459.000	17.449.500	99,95	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	389 Izin	389 Izin	100,00%	17.459.000	17.449.500	99,95	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.464 Kend	3.464 Kend	100,00%	288.171.000	281.569.400	97,71	Nihil	Nihil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 unit	9 unit	100,00%	288.171.000	281.569.400	97,71	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	95.500.000	95.453.000	99,95	Nihil	Nihil
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	4 laporan	4 laporan	100,00%	95.500.000	95.453.000	99,95	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten?Kota	100 persen	40 persen	40,00%	5.806.000	5.802.000	99,93	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian hasil Andalalin	10 laporan	4 laporan	40,00%	5.806.000	5.802.000	99,93	Capaian kinerja di bawah 100% karena pengajuan persetujuan Andalalin tergantung dari kebutuhan masyarakat	Sosialisasi akan pentingnya pengajuan persetujuan Andalalin
				Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 persen	100 persen	100,00%	2.061.000	1.895.000	91,95	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik Terhadap Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor, Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.061.000	1.895.000	91,95	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100,00%	174.900.000	174.483.266	99,76	Nihil	Nihil
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit	100,00%	174.900.000	174.483.266	99,76	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	220 unit	220 unit	100,00%	100.270.000	98.966.142	98,70	Nihil	Nihil
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	100,00%	100.270.000	98.966.142	98,70	Nihil	Nihil
10	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	Tujuan : Mewujudkan transformasi digital pemerintah Sasaran : Meningkatkan implementasi SAKIP DINKOMINFO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	5.987.822.000	5.695.823.994	95,12%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.599.000	2.598.100	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 dokumen	21 dokumen	100,00%	1.355.000	1.354.800	99,99%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	15 laporan	100,00%	1.244.000	1.243.300	99,94%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.209.294.000	4.939.697.345	94,82%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	40 orang	100,00%	5.146.720.000	4.877.182.627	94,76%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70 dokumen	70 dokumen	100,00%	28.452.000	28.393.718	99,80%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	34.122.000	34.121.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	90.000.000	90.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	100,00%	90.000.000	90.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	23.599.000	22.803.000	96,63%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	10.654.000	9.858.000	92,53%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.380.000	6.380.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.680.000	2.680.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1.885.000	1.885.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.970.000	1.970.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.970.000	1.970.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	473.677.000	452.363.049	95,50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00%	323.000	0	0,00%	Realisasi anggaran Rp0,- karena karena tidak ada surat yang dikirim	Perencanaan anggaran surat menyurat lebih diefisienkan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	55.374.000	40.337.975	72,85%	Adanya efisiensi anggaran earmark	Perencanaan anggaran earmark lebih diefisienkan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	416.980.000	411.025.074	98,57%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	55.000.000	54.723.000	99,50%	Nihil	Nihil
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	55.000.000	54.723.000	99,50%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	131.683.000	131.669.500	99,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	100,00%	126.192.000	126.178.500	99,99%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	100,00%	3.491.000	3.491.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung	1 gedung	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	868.497.000	801.037.558	92,23%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	868.497.000	801.037.558	92,23%	Nihil	Nihil
				Media Komunikasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	467.244.000	467.184.333	99,99%	Nihil	Nihil
				Pelayanan Informasi Publik	19 permohonan	19 permohonan	100,00%	366.985.000	299.593.425	81,64%	Nihil	Nihil
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	11 orang	11 orang	100,00%	12.155.000	12.146.800	99,93%	Nihil	Nihil
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	14 komunitas	14 komunitas	100,00%	22.113.000	22.113.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran : Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100 persen	100 persen	100,00%	1.167.225.000	1.061.820.515	90,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,93 indeks	3,93 indeks	100,00%	1.148.125.000	1.042.720.515	90,82%	Nihil	Nihil
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	12 aplikasi	12 aplikasi	100,00%	111.702.000	11.520.000	10,31%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	30 unit	30 unit	100,00%	1.036.423.000	1.031.200.515	99,50%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	366 domain	366 domain	100	19.100.000	19.100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	487 domain	487 domain	100	19.100.000	19.100.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Statistik	DINKOMINFO	Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100 persen	100 persen	100,00%	47.223.000	47.123.000	99,79%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100%	47.223.000	47.123.000	99,79%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	27 unit	27 unit	100%	31.934.000	31.934.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	27 dokumen	27 dokumen	100%	15.289.000	15.189.000	99,35%	Nihil	Nihil
12	Persandian	DINKOMINFO	Sasaran : Meningkatnya keamanan informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	376	376	100,00%	31.459.000	31.344.700	99,64%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	20.739.000	20.631.700	99,48%	Nihil	Nihil
				Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	10.402.000	10.295.000	98,97%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100,00%	10.337.000	10.336.700	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	10.720.000	10.713.000	99,93%	Nihil	Nihil
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 perangkat	1 perangkat	100,00%	10.720.000	10.713.000	99,93%	Nihil	Nihil
13	Usaha Kecil dan Mikro	DINKOPUKM	Tujuan : Meningkatkan peran koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran : 1. Meningkatkan koperasi sehat 2. Meningkatkan pelaku wirausaha 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DINKOPUKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 dokumen	100 dokumen	100%	5.929.000	5.928.400	99,99%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	2.500.000	2.499.400	99,98%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%	3.429.000	3.429.000	100%	Nihil	Nihil
					150 dokumen	150 dokumen	100%	2.285.389.000	2.168.973.953	94,90%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	15 dokumen	15 dokumen	100%	2.215.090.000	2.098.775.953	94,75%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	64 dokumen	64 dokumen	100%	43.000.000	42.899.000	99,77%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71 dokumen	71 dokumen	100%	27.299.000	27.299.000	100%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 orang	12 orang	100%	1.200.000	1.200.000	100%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	12 orang	12 orang	100%	1.200.000	1.200.000	100%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	12 orang	12 orang	100%	4.075.000	4.055.000	99,51%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 orang	12 orang	100%	4.075.000	4.055.000	99,51%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	34.057.000	34.008.860	99,86	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	75 unit	75 unit	100%	1.600.000	1.599.160	99,95%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 unit	12 unit	100%	13.257.000	13.210.700	99,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 unit	1 unit	100%	1.000.000	1.000.000	100%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 dokumen	12 dokumen	100%	9.000.000	8.999.000	99,98%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	6.400.000	6.400.000	100%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%	2.800.000	2.800.000	100%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	3 unit	100%	910.000	835.000	91,76%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100%	18.160.000	18.085.000	99,59%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	449.989.000	422.887.574	93,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 dokumen	12 dokumen	100%	500.000	33.000	6,60%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 dokumen	36 dokumen	100%	61.075.000	52.050.429	85,22%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%	1.664.000	1.573.000	94,53%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%	386.750.000	369.231.145	95,47%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 unit	12 unit	100%	166.610.000	164.325.837	98,63%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By Pemeliharaan, Paja k, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pemeliharaa Mebel	20 unit	20 unit	100%	149.610.000	147.358.237	98,59%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	100%	7.000.000	6.967.600	99,54%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh a bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100%	10.000.000	10.000.000	100%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	188 unit	188 unit	100%	77.400.000	77.397.000	99,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kab/kota	75,60%	75,60%	100%	77.400.000	77.397.000	99,99%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	190 unit	190 unit	100%	10.230.000	10.227.800	99,98%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	140 unit	140 unit	100%	10.230.000	10.227.800	99,98%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	7 unit	100%	521.842.000	322.821.000	61,86%	Capaian anggaran di bawah 80% karena hibah uang kepada KUD Utama di Kecamatan Kalimanah tidak dapat direlisasikan karena terdapat syarat yang tidak dapat dicukupi yaitu melaksanakan RAT dalam 2 tahun terakhir	Pembinaan kepada KUD agar melaksanakan RAT secara rutin
				Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	478 unit	478 unit	100%	64.200.000	64.199.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 unit	45 unit	112%	457.642.000	258.622.000	56,51%	Capaian anggaran di bawah 80% karena hibah uang kepada KUD Utama di Kecamatan Kalimanah tidak dapat direlisasikan karena terdapat syarat yang tidak dapat dicukupi yaitu melaksanakan RAT dalam 2 tahun terakhir	Pembinaan kepada KUD agar melaksanakan RAT secara rutin
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 unit	125 unit	125%	1.220.444.000	1.157.768.122	94,86%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25 unit	35 unit	140%	13.360.000	13.360.000	100%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 140% karena penerapan sistem OSS, pelayanan terpadu satu pintu di PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), serta pendampingan langsung membuat proses perizinan lebih cepat dan mudah, sehingga minat pelaku usaha meningkat signifikan.
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	26 unit	28 unit	108%	707.084.000	653.092.122	92,36%	Nihil	Capain kinerja sebesar 108% karena Sinergi & Kolaborasi Lintas Program dan Lintas OPD, Perusahaan Swasta, BUMD & BUMN dengan DINKOPUKM berhasil menambah kelompok/kelembagaan yang difasilitasi tanpa penambahan anggaran signifikan.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	160 orang	190 orang	119%	500.000.000	491.316.000	98,26%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 119% karena tingginya minat pelaku UMKM terhadap pelatihan terutama materi pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, packaging, akses pembiayaan, karena sangat relevan dengan kebutuhan pasar.
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMUM							Nihil	Nihil
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5 unit	5 unit	100%	1.559.557.000	1.537.520.987	98,59%	Nihil	
				Pengembangan Usaha Mikro	50 unit	54 unit	108%	1.559.557.000	1.537.520.987	98,59%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 108% karena tingginya Respons dan Kesiapan Pelaku Usaha Pada saat pelaksanaan kegiatan, jumlah usaha mikro yang telah memenuhi kriteria pengembangan (legalitas, kelayakan usaha, komitmen mengikuti pembinaan) lebih banyak dari target awal. Hal ini menunjukkan: - Basis data UMKM semakin akurat - Usaha mikro telah naik kelas dan siap difasilitasi pengembangan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Penanaman Modal	DPMPTSP	Tujuan: Meningkatnya Realisasi Investasi Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	3.733.071.000,00	3.468.735.795,00	92,92%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	488.000,00	488.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	200.000,00	200.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	288.000,00	288.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.857.849.000,00	2.628.723.436,00	91,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 orang	20 orang	100,00%	2.800.450.000,00	2.575.277.539,00	91,96%	Nihil	Nihil
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	25.669.000,00	25.622.897,00	99,82%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	31.730.000,00	27.823.000,00	87,69%	Adanya efesiensi anggaran	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.700.000,00	3.048.000,00	82,38%	Adanya efesiensi anggaran	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.700.000,00	3.048.000,00	82,38%	Adanya efesiensi anggaran	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.000.000,00	3.998.000,00	99,95%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 orang	4 orang	100,00%	4.000.000,00	3.998.000,00	99,95%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	35.023.000,00	34.896.346,00	99,64%	Nihil	Nihil
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 paket	12 paket	100,00%	2.022.000,00	2.017.000,00	99,75%	Nihil	Nihil
				Penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	12 paket	100,00%	18.676.000,00	18.618.346,00	99,69%	Nihil	Nihil
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.505.000,00	3.490.000,00	99,57%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.720.000,00	6.695.000,00	99,63%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.000.000,00	2.976.000,00	99,20%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	26.192.000,00	26.059.800,00	99,50%	Nihil	Nihil
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	26.192.000,00	26.059.800,00	99,50%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	651.795.000,00	617.761.063,00	94,78%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	360.000,00	200.000,00	55,56%	Efisiensi anggaran	Akan dilakukan pergeseran anggaran ke sub lain yang lebih prioritas
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	181.435.000,00	154.452.011,00	85,13%	Efisiensi anggaran	Akan dilakukan pergeseran anggaran ke sub lain yang lebih prioritas
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.600.000,00	3.290.000,00	91,39%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	466.400.000,00	459.819.052,00	98,59%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	154.024.000,00	153.761.150,00	99,83%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lainnya	17 unit	17 unit	100,00%	106.372.000,00	106.300.220,00	99,93%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	12 unit	100,00%	8.652.000,00	8.526.430,00	98,55%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan / Rehab gedung kantor	2 unit	2 unit	100,00%	39.000.000,00	38.934.500,00	99,83%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran: Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif	PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	100 persen	100 persen	100,00%	114.220.000,00	14.149.500,00	12,39%	Adanya silpa anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 pada sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota yang terjadi karena anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kajian dan tidak terlaksana. Namun capaian kinerja terlaksana 100% karena indikator LOI yang telah ditindaklanjuti oleh DPMPSTP	Akan dilakukan pergeseran anggaran ke sub lain yang lebih prioritas
				Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28,57	30	105,01%	8.550.000,00	8.530.000,00	99,77%	Nihil	Nihil
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2.250.000,00	2.230.000,00	99,11%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 bidang usaha	1 bidang usaha	100,00%	105.670.000,00	5.619.500,00	5,32%	Adanya silpa anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 karena dialokasikan untuk pelaksanaan kajian dan tidak terlaksana. Namun capaian kinerja terlaksana 100% karena indikator LOI yang telah ditindaklanjuti oleh DPMPTSP	Akan dilakukan pergeseran anggaran ke sub lain yang lebih prioritas
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.650.000,00	3.619.500,00	99,16%	Nihil	Nihil
				Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	102.020.000,00	2.000.000,00	1,96%	Adanya silpa anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 karena dialokasikan untuk pelaksanaan kajian dan tidak terlaksana. Namun capaian kinerja terlaksana 100% karena indikator LOI yang telah ditindaklanjuti oleh DPMPTSP	Akan dilakukan pergeseran anggaran ke sub lain yang lebih prioritas
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100 persen	100 persen	100,00%	268.320.000,00	167.143.060,00	62,29%	adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Akan dilakukan pergerakan anggaran ke sub lain yang lebih prioritas

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	268.320.000,00	167.143.060,00	62,29%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	101.550.000,00	1.524.000,00	1,50%	Kegiatan tersebut pernah di refocusing kemudian muncul kembali pada perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan	Akan dilakukan pergeseran anggaran ke sub lain yang lebih prioritas
				Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	166.770.000,00	165.619.060,00	99,31%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100 persen	100 persen	100,00%	61.376.000,00	61.323.760,00	99,91%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99 persen	99,9 persen	#VALUE!	61.376.000,00	61.323.760,00	99,91%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	12.116 pelaku usaha	17.129 pelaku usaha	141,37%	55.353.000,00	55.302.760,00	99,91%	Nihil	Pada kegiatan ini jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha lebih banyak dari target dikarenakan kemudahan pelaksanaan permohonan perizinan
				Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan pelaporan di Bidang perizinan berusaha berbasis resiko	13 kegiatan usaha	13 kegiatan usaha	100,00%	6.023.000,00	6.021.000,00	99,97%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100 persen	100 persen	100,00%	71.380.000,00	71.318.000,00	99,91%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	138 persen	138,00%	71.380.000,00	71.318.000,00	99,91%	Nihil	Nihil
				Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 kegiatan usaha	11 kegiatan usaha	137,50%	5.280.000,00	5.279.000,00	99,98%	Nihil	Pada kegiatan ini jumlah pelaku usaha yang dibantu lebih banyak dari yang direncanakan
				Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	200 pelaku usaha	204 pelaku usaha	102,00%	41.800.000	41.740.000	99,86%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Penanaman Modal	45 kegiatan usaha	45 kegiatan usaha	100,00%	24.300.000,00	24.299.000,00	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100 persen	131 persen	131,00%	6.815.000,00	6.797.157,00	99,74%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	6.815.000,00	6.797.157,00	99,74%	Nihil	Nihil
				Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	16.264 dokumen	21.242 dokumen	130,60%	6.815.000,00	6.797.157,00	99,74%	Nihil	Nihil
15	Perpustakaan	Dinarpus	Tujuan : Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan daerah Sasaran : Meningkatnya budaya gemar membaca dalam masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7,73 persen	7,92 persen	#VALUE!	855.920.000,00	754.603.536,00	88,16%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	363.111.000,00	318.353.502,00	87,67%	Nihil	Nihil
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 perpustakaan	15 perpustakaan	100,00%	97.163.000,00	96.796.688,00	99,62%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	170 perpustakaan	170 perpustakaan	100,00%	230.173.000,00	185.960.871,00	80,79%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 orang	120 orang	120,00%	10.275.000,00	10.133.740,00	98,63%	Nihil	Nihil
				Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak / Digital) oleh Masyarakat	500 eksemplar	227 eksemplar	45,40%	20.000.000,00	19.975.000,00	99,88%	Karena keterbatasan anggaran tahun 2025 untuk belanja buku	1. Mengajukan penambahan anggaran untuk belanja buku; 2. Menerima sumbangan buku dari masyarakat
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	500 eksemplar	500 eksemplar	100,00%	5.500.000,00	5.487.203,00	99,77%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	133 persen	133,00%	492.809.000,00	436.250.034,00	88,52%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	250 lokus	188 lokus	75,20%	55.110.000,00	55.099.000,00	99,98%	Letak geografs sasaran relatif sulit dan beresiko sehingga apabila cuaca kurang mendukung tingkat kesulitan menjadi lebih tinggi karena terkait dengan keselamatan	Akses jalan ke beberapa lokus sulit yang awalnya menggunakan mobil perpustakaan keliling digantikan dengan motor perpustakaan keliling
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 kegiatan	8 kegiatan	133,33%	139.860.000,00	136.652.233,00	97,71%	Jumlah Kegiatan expo/lomba lomba melebihi target yang semula direncanakan 6 terealisasi 8 dikarenakan ada tambahan kegiatan lomba yang disponsori oleh komunitas penerbit buku jogjakarta	Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memeriahkan kegiatan festival literasi tahun 2025
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100,00%	297.839.000,00	244.498.801,00	82,09%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100 persen	100 persen	100 %	27.876.000,00	27.570.671,00	98,90%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 %	27.876.000,00	27.570.671,00	98,90%	Nihil	Nihil
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 eksemplar	1 eksemplar	100,00%	27.876.000,00	27.570.671,00	98,90%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen	100 %	3.089.494.000,00	2.869.891.314,00	92,89%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 %	4.100.000,00	4.097.214,00	99,93%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	2.100.000,00	2.099.145,00	99,96%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	2.000.000,00	1.998.069,00	99,90%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen			2.219.267.000,00	2.019.261.026,00	90,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	100,00%	2.168.007.000,00	1.968.808.298,00	90,81%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	26.000.000,00	25.702.728,00	98,86%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	25.260.000,00	24.750.000,00	97,98%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.190.000,00	2.184.448,00	99,75%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00%	2.190.000,00	2.184.448,00	99,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.925.000,00	1.920.000,00	99,74%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	1 orang	33,33%	1.925.000,00	1.920.000,00	99,74%	Hanya 1 orang ASN yang mengikuti peatihan dengan anggaran yang tersedia atas nama Wuri Wuryani, Laili Nurjanah, dengan jenis pelatihan Bimtek tenaga perpustakaan mendongeng history telling pangeran diponegoro yang diadakan oleh Pusdiklat Perpusnas dan pelatihan pengenalan pengelolaan perpustakaan berbasis MOOC	Mengikutkan ASN dalam Bimtek /pelatihan secara daring (Zoom Metteing
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	25.650.000,00	24.425.074,00	95,22%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 paket	5 paket	100,00%	15.930.000,00	15.655.074,00	98,27%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.920.000,00	1.120.000,00	58,33%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	100,00%	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	755.632.000,00	737.464.452,00	97,60%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	0 laporan	0,00%	432.000,00	0,00	0,00%	Surat menyurat sudah menggunakan surat elektronika sehingga tidak membutuhkan prangko/jasa pengiriman	Mengefektifkan penggunaan surat elektronik/SRIKANDI
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	100,00%	164.395.000,00	156.928.569,00	95,46%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	2 orang	100,00%	590.805.000,00	580.535.883,00	98,26%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	80.730.000,00	80.539.100,00	99,76%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit	19 unit	100,00%	77.650.000,00	77.460.600,00	99,76%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100,00%	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	100,00%	2.000.000,00	1.998.500,00	99,93%	Nihil	Nihil
16	Kearsipan	Dinarpus	Tujuan : Meningkatkan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	25,89 persen	48 persen	185,40%	32.124.000,00	32.105.890,00	99,94%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	100 persen	121 persen	105,00%	23.324.000,00	23.319.400,00	99,98%	Nihil	Nihil
			Sasaran : Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan tata kelola arsip daerah	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	2000 berkas	2410 berkas	120,50%	23.324.000,00	23.319.400,00	99,98%	Keterbatasan personil yang mengelola arsip (arsiparis) di setiap OPD	- Meminta semua Perangkat Daerah untuk membuat SK Penunjukan Pengelola Kearsipan.; - Mengajukan permohonan kepada Tim Anggaran agar mengalokasikan anggaran sarana prasana kearsipan pada saat penyusunan RKA setiap OPD
				Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis daerah	100 persen	105 persen	105,00%	4.800.000,00	4.793.000,00	99,85%	Nihil	Nihil
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	2000 berkas	2097 berkas	104,85%	4.800.000,00	4.793.000,00	99,85%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 persen	150 persen	150,00%	4.000.000,00	3.993.490,00	99,84%	Nihil	Nihil
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	26 unit	39 unit	150,00%	4.000.000,00	3.993.490,00	99,84%	Pembinaan dan Pendampingan Kearsipan belum bisa dilakukan secara menyeluruh sampai ke semua desa dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada	Melakukan pembinaan kearsipan secara daring melalui zoom meeting
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100 persen	100 persen	100,00%	21.050.000,00	21.048.037,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	100 persen	117 persen	117,00%	10.850.000,00	10.849.416,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	150 arsip	176 arsip	117,33%	5.425.000,00	5.424.706,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	150 arsip	176 arsip	117,33%	5.425.000,00	5.424.710,00	99,99%	Pemulihan terhadap arsip yang rusak membutuhkan peralatan dan bahan khusus dengan harga yang cukup tinggi, sementara anggaran yang ada tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan peralatan dan bahan tersebut	Untuk saat ini perlindungan terhadap arsip sudah dilakukan dengan mengalihmediakan arsip sebagai antisipasi jika terjadi kerusakan terhadap arsip yang ada

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2.000 arsip	19.571 arsip	978,55%	10.200.000,00	10.198.621,00	99,99%	Perangkat Daerah yang terdampak penggabungan dan pembubaran organisasi rata-rata belum mengelola arsipnya sesuai dengan ketentuan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses identifikasi, pendataan dan penilaian arsip yang harus diselamatkan	Melaksanakan pendampingan pengelolaan dan penyelamatan arsip secara langsung ke OPD terdampak
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50 dfatar	25 daftar	50,00%	10.200.000,00	10.198.621,00	99,99%	Nihil	Nihil
17	Kepemudaan dan Olahraga	Dinporapar	Tujuan : Meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	3.614.240.000,00	3.348.176.538,00	92,64%	Nihil	Nihil
			Sasaran 1 : Meningkatkan Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	1.920.000,00	1.794.130,00	93,44%	Nihil	Nihil
			Sasaran 2 : Meningkatkan Prestasi Pemuda dalam Berbagai Sektor	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	960.000,00	846.350,00	88,16%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%	960.000,00	847.780,00	88,31%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran 3 : Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi olahraga	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	2.546.760.000,00	2.365.646.180,00	92,89%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	19 orang/bulan	100%	2.474.796.000,00	2.294.192.680,00	92,70%	Nihil	Nihil
			Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Atlet dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	39.594.000,00	39.083.500,00	98,71%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	32.370.000,00	32.370.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
			Sasaran 5 : Meningkatnya Prestasi Kejuaraan Olahraga	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	5 laporan	100%	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500 orang	500 orang	100%	52.100.000,00	50.308.500,00	96,56%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	5 orang	100%	2.100.000,00	2.013.500,00	95,88%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang	500 orang	100%	50.000.000,00	48.295.000,00	96,59%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	18.972.000,00	17.953.824,00	94,63%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi	2 paket	2 paket	100%	800.000,00	800.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Listrik/Penerangan								
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100%	10.432.000,00	9.458.024,00	90,66%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 dokumen	12 dokumen	100%	960.000,00	960.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	1.450.000,00	1.440.800,00	99,37%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	2.330.000,00	2.295.000,00	98,50%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100%	4.800.000,00	4.552.000,00	94,83%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100%	4.800.000,00	4.552.000,00	94,83%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100%	867.023.000,00	792.303.844,00	91,38%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	6 laporan	100%	154.000,00	140.605,00	91,30%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	47.753.000,00	44.700.222,00	93,61%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	819.116.000,00	747.463.017,00	91,25%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100%	118.765.000,00	111.718.060,00	94,07%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	17 unit	100%	111.860.000,00	104.841.560,00	93,73%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 unit	16 unit	100%	1.910.000,00	1.890.000,00	98,95%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	4.995.000,00	4.986.500,00	99,83%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	37,5 persen	37,5 persen	100%	549.729.000,00	535.525.459,00	97,42%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	37,5 persen	37,5 persen	100%	449.729.000,00	435.525.459,00	96,84%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	795.000,00	652.000,00	82,01%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	16 orang	16 orang	100%	10.000.000,00	9.650.000,00	96,50%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	63.254.000,00	62.540.400,00	98,87%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	38 orang	38 orang	100%	319.940.000,00	319.410.559,00	99,83%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	25 orang	25 orang	100%	55.740.000,00	43.272.500,00	77,63%	Realisasi anggaran sebesar 77,63% dikarenakan terdapat beberapa bidang lomba Jambore Pemuda yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada pengurangan dan penghapusan bidang lomba jambore pemuda dari Provinsi Jawa Tengah.	Nihil
				Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42 persen	42 persen	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	1 orang	1 orang	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	45,45 persen	45,45 persen	100%	5.347.627.000,00	5.040.765.145,00	94,26%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 cabor	15 cabor	100%	1.097.004.000,00	940.222.431,00	85,71%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	3 unit	3 unit	100%	1.097.004.000,00	940.222.431,00	85,71%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 cabor	5 cabor	100%	1.288.579.000,00	1.163.070.514,00	90,26%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	493.125.000,00	400.000.000,00	81,12%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan pertandingan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.500 orang	1.500 orang	100%	795.454.000,00	763.070.514,00	95,93%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	45,45 persen	45,45 persen	100%	82.000.000,00	79.380.000,00	96,80%	Nihil	Nihil
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	30 orang	30 orang	100%	75.000.000,00	72.630.000,00	96,84%	Nihil	Nihil
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	50 orang	50 orang	100%	7.000.000,00	6.750.000,00	96,43%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	14 organisasi	14 organisasi	100%	2.700.000.000,00	2.699.800.000,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	5 dokumen	5 dokumen	100%	2.700.000.000,00	2.699.800.000,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2 dokumen	2 dokumen	100%	180.044.000,00	158.292.200,00	87,92%	Nihil	Nihil
				Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	15 lembaga	15 lembaga	100%	180.044.000,00	158.292.200,00	87,92%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100 persen	100 persen	100%	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 persen	100 persen	100%	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100%	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
18	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan : Meningkatnya pendidikan yang bermutu dan inklusif serta terwujudnya berkebudayaan maju	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8 objek	8 objek	100,00%	1.113.213.000,00	1.113.037.786,00	99,98%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 objek	7 objek	100,00%	169.518.000,00	169.431.786,00	99,95%	Nihil	Nihil
			1. Meningkatkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 orang	20 orang	100,00%	169.518.000,00	169.431.786,00	99,95%	Nihil	Nihil
			2. Meningkatkan pelestarian cagar budaya	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 objek	2 objek	100,00%	935.395.000,00	935.306.000,00	99,99%	Nihil	Nihil
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 objek	2 objek	100,00%	935.395.000,00	935.306.000,00	99,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 objek	1 objek	100,00%	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100 persen	100 persen	100,00%	12.326.000,00	5.530.000,00	44,86%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	12.326.000,00	5.530.000,00	44,86%	Nihil	Nihil
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100,00%	12.326.000,00	5.530.000,00	44,86%	Kegiatan Saka Widya Budaya Bakti (SWBB) / Pramuka Budaya, dengan keanggotaan 100 orang. Kegiatan SWBB belum dapat maksimal karena keterbatasan jumlah Pamong Saka dan Terbatasnya Jenis Kegiatan.	Merekrut Pamong Budaya dan upaya peningkatan Jenis Kegiatan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	15 persen	19, 14 persen	127,60%	124.241.000,00	116.697.000,00	93,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	7 objek	7 objek	100,00%	30.129.000,00	29.590.000,00	98,21%	Nihil	Nihil
				Penetapan Cagar Budaya	1 objek	1 objek	100,00%	30.129.000,00	29.590.000,00	98,21%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	45 cagar	45 cagar	100,00%	94.112.000,00	87.107.000,00	92,56%	Nihil	Nihil
				Pelindungan Cagar Budaya	45 cagar	45 cagar	100,00%	88.191.000,00	81.201.000,00	92,07%	Nihil	Nihil
				Pemanfaatan Cagar Budaya	2 objek	2 objek	100,00%	5.921.000,00	5.906.000,00	99,75%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100 persen	100 persen	100,00%	628.923.000,00	622.878.346,00	99,04%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	4.492 orang	5.755 orang	128.12%	628.923.000,00	622.878.346,00	99,04%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Jumlah kunjungan museum melebihi target dari 4.492 orang, karena adanya kegiatan : 1. Pameran Temporer Museum 2. Arkeolog Cilik 3. Belajar di Museum
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.182 unit	1.302 unit	110.15%	178.324.000,00	178.268.000,00	99,97%	Nihil	Penjelasan realisasi kinerja fisik = Benda koleksi museum yg dipelihara bertambah 120 koleksi
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 unit	1 unit	100,00%	388.358.000,00	387.021.000,00	99,66%	Nihil	Nihil
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	7 unit	7 unit	100,00%	62.241.000,00	57.589.346,00	92,53%	Nihil	Nihil
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan												
No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	800,00%	9	10	1100,00%	12	13

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertanian	Dinas Pertanian	Tujuan : Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah Sasaran : 1. Meningkatkan produksi pertanian 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	25.749.642.000	23.481.351.982	91,19%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.600.000	2.593.000	99,73%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	1.250.000	1.249.000	99,92%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.350.000	1.344.000	99,56%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	24.800.958.000	22.614.067.639	91,18%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bln	179 orang/bln	100,00%	24.722.135.000	22.535.445.639	91,15%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	30.000.000	29.839.000	99,46%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	48.823.000	48.783.000	99,92%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,3 persen	3,2 persen	96,97%	2.500.000	1.760.000	70,40%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	8 orang	80,00%	2.500.000	1.760.000	70,40%	Capaian kinerja dan anggaran di bawah 100% karena sedikitnya undangan pelatihan.	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.500.000	1.760.000	70,40%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	8.400.000	8.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	21.783.000	21.014.640	96,47%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.135.000	6.135.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	14.000.000	14.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	600.820.000	529.661.603	88,16%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	1.000.000	991.000	99,10%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	600.000	580.572	96,76%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	126.000.000	117.217.052	93,03%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	473.220.000	410.872.979	86,82%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	280.046.000	271.320.100	96,88%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 unit	51 unit	100,00%	255.546.000	246.820.100	96,59%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51 unit	51 unit	100,00%	19.500.000	19.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	42 persen	44,37 persen	105,64%	848.056.000	833.703.469	98,31%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	77 persen	67 persen	87,01%	160.104.000	159.915.000	99,88%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Serdipinologi	2 laporan	2 laporan	100,00%	137.022.000	137.021.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	100,00%	23.082.000	22.894.000	99,19%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten dan Kota	100 persen	100 persen	100,00%	279.170.000	269.403.895	96,50%	Nihil	Nihil
				Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	1 laporan	1 laporan	100,00%	279.170.000	269.403.895	96,50%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00%	408.782.000	404.384.574	98,92%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	1 laporan	1 laporan	100,00%	408.782.000	404.384.574	98,92%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	100 persen	100 persen	100,00%	15.678.435.000	15.529.341.285	99,05%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	12 kali	12 kali	100,00%	746.774.000	738.383.539	98,88%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	2 laporan	100,00%	746.774.000	738.383.539	98,88%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian				2.347.166.000	2.342.073.000	99,78%	Nihil	Nihil
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3 unit	3 unit	100,00%	176.565.000	176.269.000	99,83%	Nihil	Nihil
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani	13 unit	13 unit	100,00%	518.831.000	516.709.000	99,59%	Nihil	Nihil
				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan	1 unit	1 unit	100,00%	62.685.000	62.674.000	99,98%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	29 kelompok	29 kelompok	100,00%	12.584.495.000	12.448.884.746	98,92%	Nihil	Nihil
				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2 laporan	2 laporan	100,00%	12.584.495.000	12.448.884.746	98,92%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	18,8 persen	16,85 persen	89,63%	141.381.000	140.361.556	99,28%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	4723 ekor	3841 ekor	81,33%	94.190.000	94.123.556	99,93%	Nihil	Nihil
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 laporan	1 laporan	100,00%	94.190.000	94.123.556	99,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,14 persen	20,61 persen	102,33%	26.703.0/00	26.700.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 laporan	4 laporan	100,00%	26.703.000	26.700.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 bulan	12 bulan	100,00%	20.488.000	19.538.000	95,36%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	1 laporan	100,00%	20.488.000	19.538.000	95,36%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	66 persen	63,98 persen	96,94%	211.851.000	175.595.867	82,89%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1913 Ha	1224 Ha	63,98%	211.851.000	175.595.867	82,89%	Anggaran untuk penanggulangan bencana pertanian di rekofusing sehingga target kinerja tidak tercapai	Mengajukan permohonan bantuan obat ke provinsi
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1842 Ha	1182 Ha	64,17%	88.341.000	86.842.539	98,30%	Anggaran untuk pembelian pestisida di rekofusing sehingga target kinerja tidak tercapai	Mengajukan permohonan bantuan obat ke provinsi
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.600 Ha	1.224 Ha	34,00%	123.510.000	88.753.328	71,86%	Anggaran untuk AUTP dihilangkan sehingga target kinerja tidak tercapai	Mengusulkan kembali anggaran AUTP
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	14,04 persen	21,03 persen	149,79%	3.393.227.000	3.374.847.441	99,46%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1864 kelompok	1864 kelompok	100,00%	3.393.227.000	3.374.847.441	99,46%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	30 unit	4 unit	13,33%	7.594.000	7.555.900	99,50%	Anggaran peningkatan kelembagaan penyuluh mengalami refocusing sehingga target kinerja tidak tercapai	Mengefisienkan kegiatan peningkatan kelembagaan penyuluhan dengan menggabungkan penyuluhan dalam satu waktu
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	80 unit	39 unit	48,75%	2.324.379.000	2.314.200.930	99,56%	Anggaran hibah untuk penguatan kelembagaan kelompok menurun sehingga target kinerja tidak tercapai	Usulan penambahan anggaran yang menjadi pokir dewan
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18 unit	18 unit	100,00%	363.574.000	363.010.611	99,85%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	153 orang	149 orang	97,39%	697.680.000	690.080.000	98,91%	Nihil	Nihil
2	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tujuan : Meningkatnya daya saing sektor industri dan perdagangan dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	90 %	100 %	111,00%	7.247.000	7.226.400	99,72%	Nihil	Nihil
				Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 unit	5 unit	125,00%	3.631.000	3.620.900	99,72%	Nihil	Nihil
				Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	5 dokumen	500,00%	3.631.000	3.620.900	99,72%	Nihil	Sepanjang tahun 2025 ternyata ada 5 orang yang mengajukan izin
				Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1 unit	3 unit	300,00%	3.616.000	3.605.500	99,71%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	3 dokumen	300,00%	3.616.000	3.605.500	99,71%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	47,62 %	47,60%	100,00%	2.637.435.000	2.309.702.411	87,57%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	1 pasar	100,00%	2.499.433.000	2.309.702.411	92,41%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1 Unit	100,00%	1.156.167.000	904.677.849	86,94%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 unit	21 unit	100,00%	1.343.266.000	1.268.374.562	94,42%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3 unit	3 unit	100,00%	138.002.000	136.650.000	99,02%	Nihil	Nihil
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	138.002.000	136.650.000	99,02%	Nihil	Nihil
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	94,44 %	94,44 %	100,00%	872.330.000	861.836.850	98,80%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan	12 laporan	100,00%	856.183.000	845.961.550	98,81%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1 laporan	100,00%	7.367.000	7.321.050	99,38%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	1 laporan	100,00%	848.816.000	838.640.500	98,80%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100,00%	12.165.000	12.165.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100,00%	12.165.000	12.165.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/kota	3 kali	3 kali	100,00%	3.982.000	3.710.300	93,18%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	1	100,00%	3.982.000	3.710.300	93,18%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2414 miliar rupiah	2.435 miliar rupiah	100,87%	1.519.000	1.511.000	99,47%	Nihil	Realisasi kinerja melebihi 100% dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan ekspor.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Derah Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	100,00%	1.519.000	1.511.000	99,47%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	30 produk	30 produk	100,00%	1.519.000	1.511.000	99,47%	Nihil	Nihil
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	77,34 %	133,30%	172,00%	147.557.000	147.388.000	99,89%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	25.000 unit	25056 unit	100,00%	147.557.000	147.388.148	99,89%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	25.000 unit	25056 unit	100,00%	147.557.000	147.388.148	99,89%	Nihil	Nihil
3	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Tujuan : Meningkatnya daya saing dan kontribusi sektor pariwisata Sasaran : Meningkatnya angka kunjungan wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	20,59%	20,59%	100,00%	446.723.000	439.882.922	98,47%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20,59%	20,59%	100,00%	158.200.000	157.744.272	99,71%	Nihil	Nihil
				Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	102.760.000	102.676.000	99,92%	Nihil	Nihil
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10 laporan	10 laporan	100,00%	55.440.000	55.068.272	99,33%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 obyek	2 obyek	100,00%	267.935.000	261.555.650	97,62%	Nihil	Nihil
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 unit	4 unit	100,00%	69.199.000	68.868.650	99,52%	Nihil	Nihil
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 laporan	6 laporan	100,00%	198.736.000	192.687.000	96,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	25 dokumen	25 dokumen	100,00%	20.588.000	20.583.000	99,98%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	2 usaha	2 usaha	100,00%	20.588.000	20.583.000	99,98%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	73,53%	73,53%	100,00%	91.810.000	91.585.000	99,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	73,53%	73,53%	100,00%	91.810.000	91.585.000	99,75%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	6 kegiatan	6 kegiatan	100,00%	42.500.000	42.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 promosi	5 promosi	100,00%	49.310.000	49.085.000	99,54%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	135 orang	135 orang	100,00%	60.410.000	59.925.500	99,20%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	135 orang	135 orang	100,00%	60.410.000	59.925.500	99,20%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	128 orang	128 orang	100,00%	60.410.000	59.925.500	99,20%	Nihil	Nihil
4	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor industri dan perdagangan dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	300 unit	372 unit	124,00%	1.273.537.000	1.249.606.392	98,12%	Nihil	Nihil
			Sasaran :	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.273.537.000	1.249.606.392	98,12%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian 2. Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	305.072.000	283.252.385	92,85%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	274.242.000	273.791.172	99,84%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	694.223.000	692.562.835	99,76%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	90 %	100	111,00%	2.860.000	2.766.000	96,71%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	3 buah	3 buah	100,00%	2.860.000	2.766.000	96,71%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.860.000	2.766.000	96,71%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300 industri	252 industri	84,00%	2.826.000	2.815.430	99,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	300 industri	252 industri	84,00%	2.826.000	2.815.430	99,63%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.826.000	2.815.430	99,63%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	100 %	100 %	100,00%	10.952.775.000	10.164.892.777	92,81%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1.650.000	1.547.700	93,80%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.355.000	1.270.400	93,76%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	295.000	277.300	94,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	7.718.271.000	7.101.226.991	92,01%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bln	64 orang/bln	100,00%	7.662.240.000	7.046.026.465	91,96%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	20.680.000	19.850.526	95,99%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	35.351.000	35.350.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.315.000	1.500.000	64,79%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	2.315.000	1.500.000	64,79%	Honorarium PBJ tidak terserap, karena merangkap	Dipilih honor yang paling tinggi
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.000.000	1.292.000	64,60%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	2 orang	100,00%	2.000.000	1.292.000	64,60%	Biaya diklat tidak terserap, tidak ada undangan diklat	Nihil
				Kegiatan : Aministrasi umum perangkat	12 bulan	12 bulan	100,00%	25.816.000	25.448.000	98,57%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.332.000	1.332.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	16.392.000	16.131.000	98,41%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 dokumen	2 dokumen	200,00%	800.000	760.000	95,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	2 laporan	200,00%	4.660.000	4.625.000	99,25%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.632.000	2.600.000	98,78%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100,00%	4.353.000	4.350.000	99,93%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	4.353.000	4.350.000	99,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	3.075.942.000	2.912.295.084	94,68%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 laporan	0,00%	1.165.000	0	0,00%	Capaian kinerja dan anggaran 0% karena tidak ada kegiatan pengiriman surat/ paket ke luar daerah	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	300,00%	242.564.000	163.075.707	67,23%	Efisiensi belanja listrik, PDAM, telepon	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	300,00%	2.832.213.000	2.749.219.377	97,07%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	122.428.000	117.233.002	95,76%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41 unit	41 unit	100,00%	110.768.000	107.333.002	96,90%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	25 unit	100,00%	6.660.000	6.660.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.000.000	3.240.000	64,80%	Efisiensi belanja perbaikan gedung	Nihil
5	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah sektor Perikanan Sasaran : Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	270 ton	286 ton	105,93%	25.350.000	20.751.700	93,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 buku	1 buku	100,00%	1.600.000	1.531.000	95,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten /Kota	40%	40%	100,00%	23.750.000	19.220.700	92,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20 orang	21 orang	105,00%	23.750.000	19.220.700	92,00%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 105% karena target nelayan terfasilitasi sebanyak 21 orang dari 20 orang target, yakni dengan agenda penebaran ikan di wilayah Sungai purbalingga dan sosialisasi di 15 lokasi terhadap nelayan Sungai.
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6,504 ton	6,373 ton	97,99%	531.011.000	511.121.000	96,25%		
				Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	60%	60%	100,00%	70.000.000	67.890.000	96,00%	Nihil	Nihil
				Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	60 orang	120,00%	70.000.000	67.890.000	96,00%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 120% karena rencana awal diadakan pelatihan untuk budi daya ikan untuk 50 orang tapi realisasi bisa dilaksanakan pelatihan 3 kali dengan peserta 20 orang per pelatihan yakni pelatihan budidaya lele, budidaya gurami dan budidaya nila
				Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	8 %	8 %	100,00%	461.011.000	443.231.000	95,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 buku	1 buku	100,00%	3.000.000	2.996.000	95,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000 ekor	1.350.000 ekor	112,50%	342.262.000	324.975.100	99,00%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 112,5% karena saat ini indukan di produksi nila sedang tinggi dan permintaan benih dari pembudidaya dan kelompok sangat tinggi, efek adanya ketahanan pangan di level desa menggerakkan Masyarakat membudidayakan ikan dan pembelian benih dilakukan di UPTD BIAT sehingga saat permintaan tinggi pemijahan produksi ikan nila dan gurami juga lebih diperbanyak intensitasnya, serta perbaikan saluran irigasi Waduk Mrican untuk jalur Bukateja juga sudah selesai sehingga pembudidaya yang kemarin pada saat Pembangunan irigasi terhenti pasokan airnya sudah mulai
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Pokdakan	39 Pokdakan	216,67%	117.749.000	117.729.000	94,00%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 216,67% karena target direnstra sebanyak 18 kelompok tetapi terealisasi sebanyak 39 kelompok karena bertambahnya jumlah penerima hibah perikanan tahun 2025.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	100 orang	1000,00%	111.055.000	103.268.576	92,99%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 1.000% karena dari target 10 orang pembudidaya bisa dilakukan di beberapa kelompok sehingga jumlah orang terfasilitasi sebanyak 100 orang.
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.154 ton	2398 ton	111,33%	1.372.000	1.338.000	98,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10 persen	15 persen	150,00%	1.372.000	1.338.000	92,00%	Untuk perijinan TDUP sekarang sudah tidak ada tetapi engan masuk Di KUSUKA	Nihil
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 buku	1 buku	100,00%	109.683.000	101.930.576	92,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	40 persen	60 persen	150,00%	109.683.000	101.930.576	92,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	20 orang	60 orang	300,00%	109.683.000	101.930.576	92,00%	Nihil	Capaian kinerja sebesar 300% karena rencana awal diadakan pelatihan untuk budi daya ikan untuk 20 orang tapi realisasi bisa dilaksanakan pelatihan 3 kali dengan peserta 20 orang per pelatihan pengolahan bahan pangan berbasis ikan di 3 lokasi berbeda dari dana DBHCT.
6	Transmigrasi											
3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang												
No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8%	9	10	11%	12	13
1	Unsur Pendukung Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah										
		Bagian Pemerintahan	Tujuan: Mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 persen	100 persen	100,00%	224.766.000	218.714.800	97,31%	Nihil	Nihil
			Sasaran 1: Tersusunnya kebijakan bidang pemerintahan	Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan	100 persen	100 persen	100,00%	191.871.000	185.918.200	96,90%	Nihil	Nihil
				Penataan Administrasi Pemerintahan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	65.061.000	62.720.600	96,40%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	26.115.000	26.038.500	99,71%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	100.695.000	97.159.100	96,49%	Nihil	Nihil
			Sasaran 2: Tercapainya kerjasama yang terimplementasi secara efektif	Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	32.895.000	32.796.600	99,70%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50 dokumen	50 dokumen	100,00%	32.895.000	32.796.600	99,70%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bagian Hukum	Sasaran : Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 persen	100 persen	100,00%	281.134.000	280.662.676	99,83 %	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	73,68 persen	73,60%	281.134.000	280.662.676	99,83 %	14 perda dari 19 raperda di propempera adanya raperda dari komisi DPRD yang diserahkan pada TW keempat sehingga sampai akhir tahun baru sampai pada tahap pembahsan ditingkat Pansus	Membuat timeline penyusunan perda, dan untuk penyerahan raperda paling lambat pada TW III Tahun berjalan-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	464 dokumen	604 dokumen	130,00%	40.155.000	40.152.958	99,45 %	Capaian kinerja melebihi 100 % terjadi karena adanya pelampauan fasilitasi produk hukum daerah yang harus ditindaklanjuti dalam tahun berjalan melebihi rerata target yang telah ditetapkan	Nihil
				Fasilitasi Bantuan Hukum	7 kasus	9 kasus	128,57%	164.520.000	164.518.410	100,00%	Capaian kinerja di atas 100% karena danta pengalihan anggaran dari honor saksi ahli dan honor Panlak ke bantuan hukum masy miskin	Nihil
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	464 dokumen	604 dokumen	130,17%	76.459.000	75.991.308	99,40%	Nihil	Realisasi kinerja sebesar 130,17% karena adanya pelampauan fasilitasi produk hukum daerah (perda, SK Bupati, SK Sekda, Perbup, Instruksi dan surat edaran) yang harus ditindak lanjuti dalam tahun berjalan melebihi rencana target yang telah ditetapkan.

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bagian Kesra	Sasaran : Tersusunnya kebijakan bidang kesejahteraan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 persen	100 persen	100%	11.935.674.000	10.897.683.079	91,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesra	100 persen	100 persen	100%	11.935.674.000	10.897.683.079	91,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	55 dokumen	59 persen	107,27%	11.915.320.000	10.878.170.879	91,00%	Capaian kinerja melebihi 100 % terjadi karena adanya pelampauan kegiatan/ petunjuk pimpinan yang harus ditindaklanjuti dalam tahun berjalan melebihi rerata target yang telah ditetapkan	Nihil
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15 dokumen	46 dokumen	306,67%	11.312.000	11.148.800	99,00%	Capaian kinerja melebihi 100 % terjadi karena adanya pelampauan kegiatan/ petunjuk pimpinan yang harus ditindaklanjuti dalam tahun berjalan melebihi rerata target yang telah ditetapkan	Nihil
		Bagian Perekonomian dan SDA	Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7,09 persen	7,70 persen	108,67 %	912.958.000	746.952.607	81,82%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	101,11 persen	101,11 %	443.070.000	430.347.557	97,13%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	10 dokumen	14 dokumen	140,00%	9.042.000	8.363.400	92,00%	Capaian kinerja melebihi 100 % terjadi karena adanya pelampauan kegiatan/ petunjuk pimpinan yang harus ditindaklanjuti dalam tahun berjalan melebihi rerata target yang telah ditetapkan	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran : 1. Tercapainya target deviden perusda 2. Tercapainya rekomendasi terkait sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	16 dokumen	16 dokumen	100 %	226.685.000	219.295.049	96,74%	Nihil	Nihil
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	14 laporan	14 laporan	100 %	6.656.000	6.143.500	92,30%	Nihil	Nihil
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14 dokumen	18 dokumen	128 %	209.729.000	204.909.008	97,70%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	100 %	469.888.000	316.605.050	67,38%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	15 dokumen	125 %	467.606.000	314.330.050	67,22%	Capaian anggaran di bawah 100% karena tidak dilaksanannya kegiatan belanja jasa konsultasi untuk Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau (ISHT). Hal ini berdasarkan pada arahan Sekretariat DBHCHT Prov Jateng karena adanya konsekuensi yang harus dipenuhi	Pelaksanaan kegiatan kajian SIHT di Purbalingga ke depannya akan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah serta kebijakan lebih lanjut dari pusat/provinsi
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3 dokumen	4 dokumen	133,33 %	816.000	810.000	99,26%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3 dokumen	6 dokumen	200 %	1.466.000	1.465.000	99,93%	Capaian kinerja melebihi 100 % terjadi karena adanya pelampauan kegiatan/ petunjuk pimpinan yang harus ditindaklanjuti dalam tahun berjalan melebihi rerata target yang telah ditetapkan	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bagian Adm. Pembangunan	Sasaran : 1. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Administrasi Pembangunan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 persen	(belum dapat terukur)	(belum dapat terukur)	76.320.000	76.150.061	99,78	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	92 persen	100 persen	108,7 persen	76.320.000	76.150.061	99,78	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20 dokumen	35 dokumen	175 persen	1.897.000	1.886.500	99,45%	Capaian kinerja di atas 100% karena banyak proposal yang diajukan ke Pemerintah Pusat guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Purbalingga	Penyesuaian target untuk tahun 2026
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 laporan	40 laporan	200 persen	25.219.000	25.208.995	99,96%	Laporan yang disusun adalah hasil rapat dalam rangka pemanataan pelaksanaan proyek-proyek fisik yang dievaluasi	Penyesuaian target untuk tahun 2026
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	12 laporan	100 persen	49.204.000	49.054.566	99,70%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100 persen	2.800.000	2.648.000	94,57%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	2.800.000	2.648.000	94,57%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	1.200.000	1.199.000	99,92%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bag. PBJ	Sasaran : Terlaksananya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100 persen	1.600.000	1.449.000	90,56%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9 kriteria	9 kriteria	100%	377.481.000	376.204.060	99,66%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	100 persen	100%	377.481.000	376.204.060	99,66%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	12 dokumen	100%	170.256.000	169.980.660	99,84%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 dokumen	250 dokumen	500%	15.575.000	15.575.000	100%	Masih diperlukan beberapa fasilitas peralatan dan tambahan SDM untuk peningkatan pengelolaan sistem informasi pengadaan agar sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi	Usulan pengadaan fasilitas peralatan dan tambahan SDM untuk peningkatan pengelolaan sistem informasi pengadaan agar sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi kepada Bupati.
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan jasa	100 orang	254 orang	254%	191.650.000	190.648.400	99,48%	Masih kurangnya pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa (JF PPBJ).	Usulan kepada Bupati terkait penambahan Personil JF PPBJ melalui mekanisme pengangkatan pertama (Pengadaan Formasi CPNS baru) dan/atau melalui meknisme perpindahan dari jabatan lain.
		Bagian Organisasi	Sasaran : Tercapainya nilai kematangan organisasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70 persen	70,99 persen	102,88%	211.471.000	210.004.262	99,31%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penataan Organisasi	40 persen	41,26 persen	103,15%	211.471.000	210.004.262	99,31%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	29.373.000	29.237.013	99.54%	Nihil	Nihil
				Sub Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	26.683.000	26.367.941	98.82%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	155.415.000	154.399.308	99.35%	Nihil	Nihil
		Bagian Prokompim	Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100 %	526.288.000	507.086.991	96,35 %	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	100 persen	100 %	526.288.000	507.086.991	96,35 %	Nihil	Nihil
				Facilitasi Keprotokolan	12 dokumen	12 dokumen	100 %	212.560.000	212.553.621	99,99 %	Nihil	Nihil
				Facilitasi Komunikasi	12 dokumen	12 dokumen	100 %	75.427.000	74.781.799	99,14 %	Nihil	Nihil
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 dokumen	12 dokumen	100 %	238.301.000	219.751.571	92,22 %	Nihil	Nihil
		Bagian Umum	Sasaran : 1. Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan 2. Terpenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100%	20.420.703.000	19.121.704.767	93.64%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	20.420.703.000	19.121.704.767	93.64%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	142 orang	142 orang	100%	19.742.950.000	18.447.962.858	93.44%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300 dokumen	300 dokumen	100%	554.513.000	551.011.909	99.37%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4. Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 laporan	2 laporan	100%	123.240.000	122.730.000	99.59%	Nihil	Nihil
			5. Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	5.910.087.000	5.701.535.099	96.47%	Nihil	Nihil
			6. Terpenuhi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang	100%	17.637.000	17.600.000	99.79%	Nihil	Nihil
			7. Terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.683.500.000	2.674.899.050	99.67%	Nihil	Nihil
			8. Terpenuhi administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50 paket	50 paket	100%	65.212.000	65.209.000	99.99%	Nihil	Nihil
			9. Terpenuhi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	480 paket	480 paket	100%	475.323.000	473.964.550	99.71%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 dokumen	15 dokumen	100%	4.800.000	4.765.000	99.27%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 laporan	360 laporan	100%	2.060.065.000	2.060.065.000	100%	Nihil	Nihil
					80 laporan	80 laporan	100%	56.500.000	56.495.500	99.99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%	21.600.000	14.400.000	66.67%	Terdapat operator SIPD dan operator SIM Aset yang merangkap jabatan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Pengurus Barang. Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran honorarium tidak dapat direalisasikan secara penuh, mengingat adanya pembatasan pemberian honorarium bagi ASN yang merangkap jabatan pengelola keuangan dan barang	Penataan kembali penugasan operator SPBE, dengan mempertimbangkan pemisahan peran antara operator sistem dan pengelola keuangan/barang agar pembayaran honorarium dapat direalisasikan sesuai ketentuan
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	3.208.950.000	3.009.036.049	93.77%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	2.781.000	16.500	0.59%	Perubahan pola kerja administrasi persuratan, dari sistem konvensional berbasis fisik menuju pemanfaatan aplikasi berbasis digital	Penyesuaian perencanaan anggaran pada tahun berikutnya, dengan memperhitungkan tren digitalisasi administrasi persuratan sehingga pagu anggaran lebih realistis dan sesuai kebutuhan aktual
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	36 laporan	100%	1.211.200.000	1.068.989.903	88.26%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 laporan	24 laporan	100%	881.053.000	856.742.935	97.24%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	1.113.916.000	1.083.286.711	97.25%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100%	12.400.000	11.600.000	93.55%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12.400.000	11.600.000	93.55%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100%	12.400.000	11.600.000	93.55%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100%	3.314.400.000	3.311.385.550	99.91%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	3.314.400.000	3.311.385.550	99.91%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	100%	1.398.000.000	1.398.000.000	100%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit	100%	1.762.400.000	1.762.400.000	100%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	36 unit	36 unit	100%	154.000.000	150.985.550	98.04%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100%	2.484.910.000	2.473.809.925	99.55%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	2.484.910.000	2.473.809.925	99.55%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	11 unit	100%	460.900.000	460.766.443	99.97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73 unit	73 unit	100%	1.075.000.000	1.064.345.153	99.01%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	100 unit	100%	166.010.000	165.869.000	99.92%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 unit	8 unit	100%	783.000.000	782.829.329	99.98%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100%	822.800.000	820.774.421	99.75%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	822.800.000	820.774.421	99.75%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	100%	222.800.000	220.774.421	99.09%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	100%	600.000.000	600.000.000	100%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100%	7.836.132.000	7.454.403.327	95.13%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Fasilitasi Kerumahtangaa n Sekretariat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	7.836.132.000	7.454.403.327	95.13%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100 paket	100 paket	100%	4.981.511.000	4.606.481.405	92.47%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100 paket	100 paket	100%	2.854.621.000	2.847.921.922	99.77%	Nihil	Nihil
		Sekretariat DPRD	Tujuan: Optimalnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 persen	99,86 persen	99,86%	27.813.415.000	27.675.552.406	99,50%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraa n kesekretariatan DPRD	Kegiatan: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 persen	100 persen	100,00%	5.216.719.000	5.178.882.067	99,27%	Nihil	Nihil
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	258.083.000	245.751.690	95,22%	Nihil	Nihil
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.933.866.000	1.908.360.921	98,68%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	696.403.000	696.402.612	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera ngan dan/atau Naskah Akademik	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	198.467.000	198.466.844	100,00%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan DPRD bersama Pemerintah Daerah	7.500 orang	7.500 orang	100,00%	2.129.900.000	2.129.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD	100 persen	100 persen	100,00%	4.255.796.000	4.220.729.898	99,18%	Nihil	Nihil
				Pendalaman Tugas DPRD	300 dokumen	300 dokumen	100,00%	2.590.355.000	2.558.148.000	98,76%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang	16 orang	100,00%	52.000.000	52.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	72 orang/tahun	72 orang/tahun	100,00%	180.000.000	180.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 dokumen	60 dokumen	100,00%	804.319.000	804.263.800	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Program Kerja DPRD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	629.122.000	626.381.098	99,56%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 persen	99,47 persen	99,47%	13.415.270.000	13.391.753.600	99,82%	Nihil	Nihil
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	30 laporan	30 laporan	100,00%	52.500.000	52.325.000	99,67%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	4.100.000	4.100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Reses	150 dokumen	150 dokumen	100,00%	6.332.900.000	6.332.898.600	100,00%	Nihil	Nihil
				Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	54.450 orang	54.150 orang	99,45%	7.025.770.000	7.002.430.000	99,67%	Tidak tercapainya target ini disebabkan salah satu anggota DPRD meninggal dunia pada bulan Oktober 2025, sehingga pelaksanaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah pada bulan November hanya diikuti oleh 40	Sekretariat DPRD menyesuaikan pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2026 memperhatikan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW)
				Kegiatan: Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	484.269.000	480.961.500	99,32%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Bahan komunikasi dan Publikasi	72 dokumen	72 dokumen	100,00%	484.269.000	480.961.500	99,32%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Fasilitasi Tugas DPRD	100 persen	100 persen	100,00%	719.624.000	716.136.261	99,52%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	719.624.000	716.136.261	99,52%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 persen	100 persen	100,00%	422.370.000	414.563.701	98,15%	Nihil	Nihil
				Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	15.204.000	15.186.700	99,89%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	20.804.000	20.621.700	99,12%	Nihil	Nihil
				Pembahasan APBD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	312.904.000	305.299.851	97,57%	Nihil	Nihil
				Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	40.054.000	40.053.750	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembahasan Laporan Semester	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	0	0	#DIV/0!	Kegiatan tetap dilaksanakan meskipun anggaran tidak tersedia	Nihil
				Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	33.404.000	33.401.700	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 persen	113,89 persen	113,89%	3.207.636.000	3.180.723.479	99,16%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	9 laporan	9 laporan	100,00%	617.405.000	611.817.937	99,10%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9 laporan	9 laporan	100,00%	639.263.000	637.375.895	99,70%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	9 laporan	9 laporan	100,00%	747.278.000	741.304.680	99,20%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9 laporan	9 laporan	100,00%	688.430.000	687.477.002	99,86%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	515.260.000	502.747.965	97,57%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 persen	100 persen	100,00%	91.732.000	91.708.900	99,97%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Kode Etik DPRD	2 laporan	2 laporan	100,00%	91.731.000	91.708.900	99,98%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	99,9 persen	99,90%	38.969.148.000	38.472.539.812	98,73%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	0	0	#DIV/0!	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	0	0	#DIV/0!	Kegiatan tetap dilaksanakan meskipun anggaran tidak tersedia	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	0	0	#DIV/0!	Kegiatan tetap dilaksanakan meskipun anggaran tidak tersedia	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.924.121.000	4.572.019.850	92,85%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	100,00%	2.752.895.000	2.405.294.260	87,37%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.101.746.000	2.101.745.590	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	69.480.000	64.980.000	93,52%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.500.000	1.500.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.500.000	1.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	16.500.000	16.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	3 orang	3 orang	100,00%	16.500.000	16.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.097.907.000	1.095.602.758	99,79%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	21.850.000	21.849.357	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	357.097.000	354.911.223	99,39%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	960 dokumen	960 dokumen	100,00%	4.680.000	4.680.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	705.680.000	705.562.178	99,98%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.671.347.000	1.624.302.142	97,19%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	42.000	41.500	98,81%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	253.070.000	229.624.305	90,74%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	21.837.000	21.830.922	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.396.398.000	1.372.805.415	98,31%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	142 unit	100 persen	100,00%	818.600.000	818.496.506	99,99%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142 unit	142 unit	100,00%	818.600.000	818.496.506	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	874.781.000	851.116.655	97,29%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	5 unit	100,00%	211.692.000	201.214.805	95,05%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	17 unit	100,00%	218.158.000	206.825.450	94,81%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	785 unit	785 unit	100,00%	201.461.000	199.735.000	99,14%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	243.470.000	243.341.400	99,95%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD	100 persen	100 persen	100,00%	28.419.160.000	28.353.461.084	99,77%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	49 orang	98,00%	28.019.160.000	27.953.461.084	99,77%	Pada triwulan ke IV capaian jumlah anggota DPRD yang menerima hak berkurang 1 karena meninggal dunia	Penghentian pemberian gaji bulanan dengan dasar surat kematian dan akan memproses hak anggota DPRD baru berdasarkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	3 paket	3 paket	100,00%	400.000.000	400.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Layanan Administrasi DPRD	100 persen	100 persen	100,00%	1.145.232.000	1.139.540.817	99,50%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Fraksi DPRD	72 laporan	72 laporan	100,00%	71.715.000	71.700.000	99,98%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	12 laporan	100,00%	173.517.000	170.760.000	98,41%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 paket	12 paket	100,00%	900.000.000	897.080.817	99,68%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	Tujuan : Meningkatkan Profesionalitas ASN Sasaran : 1. Penerapan Merit Sistem 2. Meningkatnya Implementasi SAKIP BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	5.754.217.000	5.399.626.744	93,84%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.750.000	1.731.000	98,91%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	490.000	480.000	97,96%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	1.260.000	1.251.000	99,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100,00%	5.389.933.000	5.051.325.150	93,72%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 ASN	37 ASN	105,00%	5.330.673.000	4.992.581.650	93,66%	Pelampauan capaian dikarenakan adanya penambahan 3 orang CPNS dan 1 orang Pensiun	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 dokumen	20 dokumen	60,00%	22.500.000	21.983.500	97,70%	Capaian kinerja tidak 100% dikarenakan berkurangnya rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh instansi vertikal secara luring	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	36.760.000	36.760.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan	36 laporan	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	10.000.000	7.296.000	72,96%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Kepengawai berdasarkan tugas dan fungsi	2 orang	3 orang	150,00%	10.000.000	7.296.000	72,96%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya kebutuhan akan pengembangan kompetensi penyusunan Renstra	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	27.108.000	26.581.950	98,06%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.627.000	1.616.500	99,35%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 paket	7 paket	100,00%	14.182.000	13.755.450	96,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.140.000	1.080.000	94,74%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	7 laporan	70,00%	3.250.000	3.225.000	99,23%	Capaian kinerja tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran sehingga jumlah tamu yang datang berkurang	Untuk lebih dicermati kegiatan atau kunjungan pada BKPSDM sesuai dengan prioritas atau urgensi kegiatannya
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	15 laporan	250,00%	3.309.000	3.305.000	99,88%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya penyesuaian jumlah peserta rapat dengan ferkuensi rapat	Lebih mencermati dan memprioritaskan rapat yang akan dilaksanakan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	6.850.000	6.850.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 laporan	1 laporan	100,00%	6.850.000	6.850.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	172.291.000	164.423.444	95,43%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	1 laporan	5,00%	415.000	8.000	1,93%	Capaian kinerja dan anggaran tidak mencapai target dikarenakan persuratan lebih banyak menggunakan media elektronik	Akan dilakukan penyesuaian kebutuhan untuk keperluan surat menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	100,00%	101.820.000	94.758.106	93,06%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	3 laporan	100,00%	70.056.000	69.666.338	99,44%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	142.385.000	137.510.200	96,58%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	21 unit	21 unit	100,00%	131.020.000	126.411.200	96,48%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	40 unit	40 unit	100,00%	5.730.000	5.475.000	95,55%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.635.000	5.624.000	99,80%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.037.794.604	1.037.794.604	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	67 persen	92 persen	123,00%	283.153.000	194.433.764	68,67%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	5 dokumen	2 dokumen	40,00%	194.513.000	106.202.541	54,60%	Capaian kinerja di bawah target dikarenakan semula menganggarkan beasiswa Pembibitan PKN STAN berupa biaya pendidikan dan biaya asrama untuk 4 orang calon mahasiswa, dalam realisasinya hanya 2 orang calon mahasiswa yang lolos seleksi, sehingga anggaran beasiswa hanya diberikan untuk 2 orang calon mahasiswa	Mengusulkan formasi calon mahasiswa sesuai dengan usulan kebutuhan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	50 dokumen	2836 dokumen	5672,00%	80.341.000	80.049.723	99,64%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya pengangkatan tenaga Non ASN menjadi PPPK Paruh waktu	Nihil
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 dokumen	359 dokumen	89,00%	4.709.000	4.655.500	98,86%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 dokumen	100 dokumen	100,00%	3.590.000	3.526.000	98,22%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN	26	33	12600,00%	375.974.000	368.975.306	98,14%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Mutasi ASN	50 dokumen	65 dokumen	130,00%	146.974.000	142.480.056	96,94%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya mutasi Antar OPD hasil analisis kebutuhan organisasi	Nihil
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 dokumen	1005 dokumen	125,63%	12.500.000	12.392.400	99,14%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan semakin mudahnya layanan administrasi kepegawaian dan kebijakan dari BKN tentang kenaikan pangkat	Nihil
				Pengelolaan Promosi ASN	50 dokumen	425 dokumen	850,00%	216.500.000	214.102.850	98,89%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya kuota Profiling BKN untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Nihil
				Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN	77	78	101,00%	403.638.000	388.086.134	96,15%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100 orang	100 orang	100,00%	12.630.000	12.599.600	99,76%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Assesment Center	30 dokumen	30 dokumen	100,00%	59.025.000	58.811.234	99,64%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	6 orang	0 orang	0,00%	1.000.000	386.000	38,60%	Capaian kinerja tidak sesuai target dikarenakan adanya kebijakan untuk pengalihan bantuan pendidikan	Penerapan Manajemen Talenta agar ASN termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidika
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	18 peserta	11 peserta	61,00%	328.901.000	314.234.500	95,54%	Adanya peserta diklat yang mundur dari pelaksanaan diklat	Perencanaan yang lebih cermat dan analisis mendalam terhadap calon peserta diklat
				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	20 laporan	20 laporan	100,00%	487.000	460.800	94,62%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50 orang	97 orang	194,00%	1.595.000	1.594.000	99,94%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya pengangkatan, pemberhentian, perpindahan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional	Lebih cermat lagi dalam penentuan target dengan Analisa lebih mendalam
				Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	87	95	109,00%	92.327.000	86.299.400	93,47%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 dokumen	100 dokumen	100,00%	9.020.000	8.265.050	91,63%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	6 orang	6 orang	100,00%	69.865.000	64.632.850	92,51%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Disiplin ASN	10 orang	7 orang	70,00%	10.582.000	10.570.500	99,89%	Capaian kinerja di bawah target dikarenakan penyusunan pakta integritas ASN dan sosialisasi massif terkait kedisiplinan	Akan lebih intens lagi untuk internalisasi dan sosialisasi kedisiplinan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20 dokumen	28 dokumen	140,00%	2.860.000	2.831.000	98,99%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan terjadi permasalahan ekonomi mengakibatkan banyaknya perceraian	Sosialisasi kepada para pegawai baru hasil pengangkatan PPPK maupun CPNS akan kode etik pegawai
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	80 persen	100 persen	125,00%	38.430.000	38.404.700	99,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	100%	100,00%	38.430.000	38.404.700	99,93%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 laporan	100 laporan	100,00%	38.430.000	38.404.700	99,93%	Nihil	Nihil
3	Unsur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Sasaran : 1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	94,53 persen	91,89 persen	97,20%	526.805.000	412.794.301	78,36%	Terjadi ketidaktepatan waktu penetapan dok RKPD dan Terjadi efisiensi pada kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi	1. optimalisasi peran pimpinan dan koordinasi lintas perangkat daerah 2. Penguatan kapasitas perencanaan OPD dan komitmen pelaksanaan timeline penyusunan dok
				Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 persen	100 persen	100,00%	297.830.000	282.402.258	94,82%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Terukur dan Relevan; 2.Meningkatnya Kapabilitas Riset dan Inovasi Daerah; 3. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	45 dokumen	45 dokumen	100,00%	12.860.000	12.411.000	96,51%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5 BA	5 BA	100,00%	86.600.000	86.340.932	99,70%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	198.370.000	183.650.326	92,58%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	53.317.000	49.812.243	93,43%	Nihil	Nihil
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumne	1 dokumne	100,00%	53.317.000	49.812.243	93,43%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	175.658.000	80.579.800	45,87%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	100,00%	151.953.000	57.521.800	37,85%	Efisiensi karena kegiatan difokuskan pada movev pencapaian prioritas daerah	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	23.705.000	23.058.000	97,27%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	319.007.000	310.360.490	97,29%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	34 dokumen	34 dokumen	100,00%	148.901.000	147.863.857	99,30%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28 dokumen	28 dokumen	100,00%	49.191.000	48.923.713	99,46%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	54.281.000	54.049.144	99,57%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	6 laporan	6 laporan	100,00%	45.429.000	44.891.000	98,82%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	87.748.000	81.792.600	93,21%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	35.774.000	35.081.600	98,06%	Nihil	Nihil
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4 laporan	4 laporan	100,00%	24.889.000	22.790.000	91,57%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	27.085.000	23.921.000	88,32%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	82.358.000	80.704.033	97,99%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	41.155.000	40.548.267	98,53%	Nihil	Nihil
				Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	2 laporan	2 laporan	100,00%	12.673.000	12.522.012	98,81%	Nihil	Nihil
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	28.530.000	27.633.754	96,86%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	132.660.000	126.778.324	95,57%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	80 inovasi	75 inovasi	93,75%	132.660.000	126.778.324	95,57%	Nihil	Nihil
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	315 dokumen	364 dokumen	115,56%	35.964.000	35.440.750	98,55%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	2 laporan	2 laporan	100,00%	96.696.000	91.337.574	94,46%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	5.400.486.000	5.049.768.173	93,51%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	104.050.000	101.473.500	97,52%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	2.500.000	2.494.500	99,78%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	20 dokumen	100,00%	101.550.000	98.979.000	97,47%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.448.400.000	4.165.900.425	93,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	30 orang	103,45%	4.285.349.000	4.005.559.104	93,47%	Penambahan ASN dari formasi CPNS	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 dokumen	71 dokumen	94,67%	110.125.000	110.124.521	100,00%	Adanya efisiensi angggaran	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1200 dokumen	1125 dokumen	93,75%	52.926.000	50.216.800	94,88%	Adanya efisiensi angggaran	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.550.000	4.476.800	98,39%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	4.550.000	4.476.800	98,39%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43 orang	50 orang	116,28%	60.880.000	55.625.000	91,37%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11 orang	12 orang	109,09%	10.000.000	4.910.000	49,10%	Kebutuhan jam pelatihan bagi ASN menjadi peningkatan minat diklat bagi ASN dan Penawaran diklat berbayar belum sesuai kebutuhan	1. Kolaborasi bimtek bersama beberapa opd terkait 2. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi, 3. penyusunan daftar prioritas kompetensi dan 4. Pemantauan aktif penyedia diklat (BPSDM, Kemendagri, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lainnya)
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 orang	50 orang	116,28%	50.880.000	50.715.000	99,68%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	71.118.000	67.021.700	94,24%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket	100,00%	8.800.000	8.279.000	94,08%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 paket	8 paket	100,00%	20.431.000	17.424.700	85,29%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	950.000	950.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	8.271.000	8.168.000	98,75%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	18.266.000	17.800.000	97,45%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	24 dokumen	24 dokumen	100,00%	14.400.000	14.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	1 unit	100,00%	13.000.000	12.432.000	95,63%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	13.000.000	12.432.000	95,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	406.318.000	360.204.176	88,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	3 laporan	50,00%	630.000	279.000	44,29%	Pemanfaatan digitalisasi sebagai bentuk efisiensi dalam pengiriman surat	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	70.640.000	68.091.860	96,39%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	100,00%	10.622.000	10.300.000	96,97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	324.426.000	281.533.316	86,78%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	292.170.000	282.634.572	96,74%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	29 unit	96,67%	259.170.000	249.674.572	96,34%	1 kendaraan konversi menjadi listrik yang belum dalam dilakukan pemeliharaan	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 unit	28 unit	100,00%	13.000.000	12.980.000	99,85%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	20.000.000	19.980.000	99,90%	Nihil	Nihil
3	Unsur Keuangan	Bakendua	Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, Transparan dan Akuntabel Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatnya Implementasi SAKIP BAKEUDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.806.535.000	13.344.038.669	84,42%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	996.000	972.750	97,67%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	20 laporan	100,00%	830.000	803.000	96,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	15.369.324.000	12.833.701.664	83,50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang/bulan	77 orang/bulan	100,00%	15.223.759.000	12.688.643.064	83,35%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	41 dokumen	102,50%	61.385.000	60.883.600	99,18%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	84.180.000	84.175.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	14.820.000	14.812.000	99,95%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	14.820.000	14.812.000	99,95%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.000.000	3.238.250	80,96%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	1 orang	100,00%	4.000.000	3.238.250	80,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	146.305.000	236.556.603	161,69%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.660.000	1.650.000	99,40%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	116.355.000	98.874.203	84,98%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	6.640.000	6.237.400	93,94%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	21.650.000	21.560.000	99,58%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	130.100.000	108.235.000	99,58%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	980.000	980.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	980.000	980.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	564.490.000	529.841.403	93,86%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	572.000	130.400	22,80%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	260.462.000	239.268.542	91,86%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	303.456.000	290.442.461	95,71%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	269.280.000	252.974.402	93,94%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 unit	52 unit	100,00%	243.704.000	227.589.402	93,39%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	11 unit	100,00%	25.576.000	25.385.000	99,25%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	174.401.000	172.871.000	93,39%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				410.879.959.000	398.139.718.274	96,90%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	463.763.000	445.596.200		Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	63.310.000	62.981.500	95,41%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	59.381.000	58.068.200	95,41%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	197.367.000	188.315.900	95,41%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	143.705.000	136.230.600	94,80%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	67.594.000	67.097.534	106,36%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17 dokumen	16 dokumen	94,12%	7.200.000	7.092.600	98,51%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	35978 dokumen	18392 dokumen	51,12%	17.872.000	17.819.750	99,71%	Capaian kinerja di atas 100% karena adanya perubahan Renstra, dimana pada Renstra 2021–2026 target ditetapkan sebanyak 35.978 dokumen yang mencakup dokumen SPP, SPM, dan SP2D. Selanjutnya, pada perubahan Renstra 2025–2029, target disesuaikan menjadi 10.000 dokumen dengan perhitungan hanya pada dokumen SP2D.	Nihil
				Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tumai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27 dokumen	32 dokumne	118,52%	8.460.000	8.389.584	99,17%	Capaian kinerja di atas 100% , hal ini sejalan dengan usulan SKPD terkait penggantian PPK, Bendahara, dan PA, serta pengelolaan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Nihil
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	4.510.000	4.463.000	95,41%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	151 orang	151 orang	100,00%	29.552.000	29.332.600	99,26%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	56.856.000	53.652.912	94,37%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	56.856.000	53.652.912	94,37%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	410.291.746.000	397.573.371.628	96,90%	Nihil	Nihil
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100,00%	397.576.907.000	387.859.063.228	97,56%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.000.000.000	154.750.000	7,74%	Nihil	Nihil
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	100,00%	10.714.839.000	9.559.558.400	89,22%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	1.081.170.000	989.549.058	91,53%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.081.170.000	989.549.058	91,53%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Standar Harga	3 dokumen	6 dokumen	200,00%	156.730.000	156.374.600	99,77%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	181 laporan	185 laporan	102,00%	27.522.000	24.874.201	90,38%	Perampauan capaian kinerja karena adanya penambahan dokumen RKBMD perubahan, dokumen status penggunaan BMD, dokumen standar kebutuhan barang serta dokumen penggolongan dan kodifikasi BMD	Nihil
				Pengamanan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	852.884.000	764.824.757	89,68%	Nihil	Nihil
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	28.028.000	27.470.500	98,01%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175 orang	175 orang	100,00%	16.006.000	16.005.000	99,99%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.800.418.000	1.608.618.272	95,33%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.800.418.000	1.608.618.272	95,33%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	134.861.000	77.435.500	95,41%	Nihil	Nihil
				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	614500 laporan	651204 laporan	106,00%	295.143.000	240.729.500	81,56%	Pelampauan capaian kinerja karena adanya penambahan jenis pajak official assesment sejumlah 4.861 Obyek pajak dan jenis pajak self assesment sejumlah 646.343 Objek pajak.	Nihil
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	614.000 dokumen	647.395 dokumen	105,00%	153.650.000	129.108.256	84,03%	Pelampauan capaian kinerja karena adanya 'penetapan PBBP2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta ketetapan kurang baya	Nihil
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 layanan	100 layanan	100,00%	28.997.000	16.650.750	57,42%	Nihil	Nihil
				Penagihan Pajak Daerah	14 dokumen	14 dokumen	100,00%	1.073.745.000	1.048.276.516	97,63%	Nihil	Nihil
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	36 dokumen	36 dokumen	100,00%	64.058.000	51.991.750	81,16%	Nihil	Nihil
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	26 laporan	26 laporan	100,00%	36.783.000	33.353.100	81,16%	Nihil	Nihil
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	2 laporan	2 laporan	100,00%	13.181.000	11.072.900	84,01%	Nihil	Nihil
3	Unsur Pengawasan	Inspektorat	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	73,2 persen	72,65 persen	99,26%	1.249.540.000	1.008.604.280	80,72%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	154 obrik	190 obrik	123,38%	984.180.000	792.086.780	80,48%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ; 2. Meningkatkan kualitas implementasi penguatan pencegahan dan penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	66 dokumen	66 dokumen	100,00%	366.537.000	313.289.480	85,47%	Nihil	Nihil
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 laporan	36 laporan	69,23%	143.000.000	141.969.000	99,28%	Capaian kinerja tidak sesuai target diakrenakan laporan hasil pengawasan kinerja belum diterbitkan karena masih dalam proses penyusunan dan finalisasi laporan	Percepatan penyusunan dan finalisasi laporan hasil pengawasan kinerja melalui penguatan pengendalian mutu dan penjadwalan penyelesaian laporan
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	42 laporan	38 laporan	90,48%	101.026.000	92.620.000	91,68%	Nihil	Nihil
				Reviu Laporan Kinerja	133 laporan	164 laporan	123,31%	263.300.000	234.332.300	89,00%	Pelampauan capaian kinerja dikarenakan adanya tambahan reviu atas laporan kinerja di luar target awal	Penajaman perencanaan pengawasan desa dan pengaturan jadwal pemeriksaan lapangan secara lebih efektif
				Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	100%	16.774.000	9.876.000	58,88%	Pada belanja makan dan minum tidak terealisasi karena kegiatan pada bulan Ramadhan dan efisiensi dalam perjalanan dinas dalam kota	Penyesuaian perencanaan belanja makan dan minum serta perjalanan dinas dengan kalender kegiatan, termasuk periode bulan Ramadhan, guna meningkatkan optimalisasi penyerapan anggaran
				Pengawasan Desa	23 laporan	17 laporan	73,91%	93.543.000	90.741.000	97,00%	Sebagian laporan pengawasan desa belum terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan penyesuaian jadwal pengawasan lapangan	Penajaman perencanaan pengawasan desa dan pengaturan jadwal pemeriksaan lapangan secara lebih efektif

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 persen	100 persen	100%	265.360.000	216.517.500	81,59%	Nihil	Nihil
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 laporan	1 laporan	50%	36.978.000	6.750.000	18,25%	Tidak terdapat permasalahan namun memang hanya menyesuaikan dengan permintaan dari APH. Secara keuangan tidak terserap maksimal Tidak terrealisasinya belanja jasa tenaga ahli atas materi yang ditangani untuk perhitungan kerugian keuangan negara	Evaluasi kebutuhan penggunaan tenaga ahli dan penyesuaian perencanaan anggaran berdasarkan kompleksitas kasus kerugian keuangan negara/daerah yang ditangani
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 laporan	29 laporan	152,63%	228.382.000	209.767.500	91,85%	Peningkatan jumlah laporan disebabkan oleh adanya penugasan pengawasan tambahan berdasarkan pengaduan dan penugasan khusus pimpinan	Nihil
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	93,1	85,1	91,41%	485.973.000	409.836.627	84,33%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 persen	66,67 persen	#VALUE!	73.106.000	71.117.764	97,28%	Nihil	Nihil
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	73.106.000	71.117.764	97,28%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	5 laporan	5 laporan	100%	412.867.000	338.718.863	82,04%	Nihil	Nihil
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8 OPD	8 OPD	100%	105.098.000	102.357.803	97,39%	Nihil	Nihil
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 OPD	21 OPD	100%	42.768.000	38.196.923	89,31%	Nihil	Nihil
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 keg	4 keg	100%	141.607.000	102.216.137	72,18%	Adanya efisiensi	Nihil
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 OPD	6 OPD	75,00%	123.394.000	95.948.000	77,76%	Anggaran honorarium yang telah disediakan untuk aktivitas sosialisasi penegakan integritas dilakukan efisiensi dikarenakan anggaran disiapkan untuk Kajari dan Kapolres tetapi pada pelaksanaan, narasumber mendisposisi sehingga besaran honorariumnya disesuaikan tingkat jabatan	Penyesuaian perencanaan honorarium narasumber berdasarkan tingkat jabatan dan penugasan aktual serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan integritas
			Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	100 persen	100 persen	100%	10.702.846.000	9.709.827.929	90,72%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Daerah Sasaran : Meningkatnya implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	8.749.000	10.735.178	122,70%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	8.749.000	8.723.575	99,71%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan	100%	2.011.603	2.011.603	100,00%	Penyerapan anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja disesuaikan dengan kebutuhan aktual serta dilakukan pengendalian belanja agar lebih efektif dan efisien
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	7.470.154.000	6.999.759.103	93,70%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	48 orang/bulan	100%	7.293.646.000	6.825.333.789	93,58%	Terdapat 2 orang ASN yang purna tugas dan kekosongan 3 jabatan struktural eselon III	Bersurat ke BKPSDM Perihal Usulan Kebutuhan Pegawai
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	150.000.000	147.918.314	98,61%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	26.508.000	26.507.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	3.900.000	3.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100%	3.900.000	3.900.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	556.500.000	525.554.365	94,44%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 orang	42 orang	87,50%	556.500.000	525.554.365	94,44%	Terdapat 6 orang yang tidak melaksanakan diklat karena jadwal diklat yang berbenturan dengan penugasan internal	Penyesuaian penjadwalan diklat dengan kalender penugasan internal serta optimalisasi perencanaan pengembangan kompetensi pegawai
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	128.532.000	120.692.470	93,90%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100%	3.500.000	3.455.400	98,73%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100%	91.032.000	90.129.700	99,01%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12Laporan	12 laporan	100%	24.000.000	18.132.370	75,55%	Tidak terserap maksimal karena menyesuaikan jumlah tamu yang hadir di Inspektorat dan adanya efisiensi pada makan minum rapat	Penyesuaian perencanaan anggaran berbasis estimasi kebutuhan riil dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	6.000.000	5.975.000	99,58%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	4.000.000	3.000.000	75,00%	Tidak tersepa maksimal karena Pengurus barang merangkap operator Simaset jadi honor yang diberi hanya separuh dari jumlah honor yang ditetapkan	Penyesuaian perencanaan honorarium dan penguatan pengaturan tugas sesuai beban kerja

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100%	1.480.943.000	1.301.030.506	87,85%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	3 unit	100%	930.000.000	806.526.000	86,72%	Penyerapan anggaran direalisasikan dengan efisiensi melalui mini kompetensi	Optimalisasi perencanaan spesifikasi dan metode pengadaan guna memperoleh nilai manfaat maksimal
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144 unit	144 unit	100%	550.943.000	494.504.506	89,76%	Penyerapan direalisasikan secara efisien baik melalui pengadaan langsung maupun melalui e-katalog	Pemanfaatan e-katalog dan pengadaan langsung secara tepat guna untuk mendukung efektivitas belanja
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100%	339.592.000	153.093.548	45,08%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	500.000	416.020	83,20%	Penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan dan pada saat ini mulai menggunakan aplikasi srikandi	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Srikandi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan persuratan

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	275.600.000	128.049.186	46,46%	Tidak terserap maksimal karena: · Adanya efisiensi pada rekening tambah daya listrik. · Belanja tagihan listrik sudah dianggarkan untuk 40.000 watt tetapi penambahan baru bisa dilaksanakan ketika perubahan sehingga sisa anggaran tagihan listrik masih banyak -Adanya efisiensi anggaran pada rekening tagihan air karena dengan dipasangnya tandon air penggunaan air menjadi lebih efisien.	Pengendalian dan monitoring penggunaan utilitas secara rutin guna menjaga efisiensi belanja
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	50.992.000	24.580.342	48,20%	Tidak terserap maksimal karena sudah dianggarkan rekening untuk honor THL penataan arsip tetapi sesuai kebijakan tidak boleh mengangkat THL	Akan dianggarkan di tahun 2026 untuk jasa penataan arsip melalui pihak ketiga
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 laporan	6 laporan	100%	12.500.000	10.048.000	80,38%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100%	714.476.000	595.062.759	83,29%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	23 unit	23 unit	100%	475.856.000	364.402.759	76,58%	Tidak terserap maksimal karena anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan	Penyusunan anggaran berdasarkan histori pemeliharaan dan monitoring berkala terhadap kondisi kendaraan dinas
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 unit	58 unit	100%	38.620.000	32.660.000	84,57%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	200.000.000	198.000.000	99,00%	Nihil	Nihil
	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Kemangkon	Tujuan : Meningkatkan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.378.216.000	1.302.767.397	94,53%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	6.358.000	6.358.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.118.000	3.118.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	3.240.000	3.240.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.127.999.000	1.056.367.693	93,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 orang	7 orang	100,00%	1.107.019.000	1.035.497.693	93,54%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 orang	8 orang	100,00%	6.580.000	6.580.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	14.400.000	14.290.000	99,24%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.150.000	1.150.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.150.000	1.150.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	20.735.000	20.735.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	1.600.000	1.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	6.665.000	6.665.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,00%	1.020.000	1.020.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 orang	480 orang	100,00%	9.900.000	9.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 orang	2 orang	100,00%	1.550.000	1.550.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	25.000.000	24.900.000	99,60%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100,00%	25.000.000	24.900.000	99,60%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	93.158.000	89.453.104	96,02%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100,00%	50.000	50.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%	29.712.000	29.607.104	99,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	600.000	600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	62.796.000	59.196.000	94,27%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	103.816.000	103.803.600	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	13 unit	13 unit	100,00%	85.816.000	85.803.600	99,99%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100,00%	3.000.000	3.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	15.000.000	15.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	25.040.000	25.040.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 kasus	2 kasus	100,00%	24.210.000	24.210.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	24.210.000	24.210.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100,00%	830.000	830.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	5 jenis	5 jenis	100,00%	830.000	830.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	29.701.000	29.628.000	99,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 lembaga	5 lembaga	100,00%	29.701.000	29.628.000	99,75%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 desa	19 desa	100,00%	12.094.000	12.094.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	19 kegiatan	19 kegiatan	100,00%	17.607.000	17.534.000	99,59%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	32.000.000	32.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kasus	2 kasus	100,00%	32.000.000	32.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	22.200.000	22.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	9.800.000	9.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	13.211.000	13.211.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	13.211.000	13.211.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	13.211.000	13.211.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	7.107.000	7.107.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	7.107.000	7.107.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 desa	19 desa	100,00%	7.107.000	7.107.000	100,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Bukateja	Tujuan : Meningkatnya Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	100 persen	100 persen	100%	1.852.337.000	1.721.690.758	92,95%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukateja	Kegiatan : Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	5.000.000	4.984.500	99,69%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp2.500.000,-	Rp2.500.000,-	100%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	6 laporan	6 laporan	100%	Rp2.500.000,-	Rp2.484.500,-	99,38%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	1.535.194.000	1.412.326.799	92,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	12 orang	100%	1.520.254.000	1.389.311.799	91,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	17 dokumen	100%	Rp2.915.000,-	Rp2.820.000,-	96,74%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	Rp12.025.000,-	Rp11.195.000,-	93,10%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	100%	1.950.000	1.949.900	99,99%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Rp1.950.000,-	Rp1.949.900,-	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%	34.333.000	33.842.500	98,57%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100%	Rp6.000.000,-	Rp5.996.300,-	99,94%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Rp18.684.000,-	Rp18.204.200,-	97,43%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	2.000.000	1.996.000	99,80%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	3.500.000	3.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12,00	100%	4.149.000	4.146.000	99,93%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3,00	100%	33.350.000	32.478.466	97,39%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 paket	3 paket	100%	Rp33.350.000,-	Rp32.478.466,-	97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 persen	12 persen	100%	107.664.000	103.297.993	95,94%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	Rp23.136.000,-	Rp20.926.015,-	90,45%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	Rp84.528.000,-	Rp82.371.978,-	97,45%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100%	134.846.000	132.810.600	98,49%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	9 kendaraan	9 kendaraan	100%	Rp83.346.000,-	Rp81.460.700,-	97,74%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 mesin	11 mesin	100%	Rp6.500.000,-	Rp6.460.000,-	99,38%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2 gedung	2 gedung	100%	Rp45.000.000,-	Rp44.889.900,-	99,76%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,9 persen	3,9 persen	100%	47.442.000	47.142.724	99,37%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 persen	14 persen	100%	45.742.000	45.473.724	99,41%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	100%	Rp45.742.000,-	Rp45.473.724,-	99,41%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 layanan	5 layanan	100%	1.700.000	1.669.000	98,18%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	5 dokumen	5 dokumen	100%	Rp1.700.000,-	Rp1.669.000,-	98,18%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100%	37.152.000	37.113.400	99,90%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	100%	37.152.000	37.113.400	99,90%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 lembaga	14 lembaga	100%	Rp9.275.000,-	Rp9.275.000,-	100%	Nihil	Nihil
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	Rp27.877.000,-	Rp27.838.400,-	99,86%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 laporan	12 laporan	100%	25.120.000	25.095.000	99,90%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100%	25.120.000	25.095.000	99,90%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	Rp18.920.000,-	Rp18.900.000,-	99,89%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	12 laporan	100%	Rp6.200.000,-	Rp6.195.000,-	100%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12	12,00	100%	29.717.000	29.712.000	99,98%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100%	29.717.000	29.712.000	99,98%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100%	Rp29.717.000,-	Rp29.712.000,-	99,98%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 desa	100 desa	100%	500.000	500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 desa	100 desa	100%	500.000	500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	2 dokumen	100%	Rp250.000,-	Rp250.000,-	100%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 dokumen	2 dokumen	100%	Rp250.000,-	Rp250.000,-	100%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Kejobong	Tujuan : Meningkatnya Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	100 persen	100 persen	100,00%	1.514.359.000	1.430.139.192	94,44%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukateja	Kegiatan : Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.840.000	5.760.500	98,64%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.400.000	3.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	2.440.000	2.360.500	96,74%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.235.801.000	1.158.839.084	93,77%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112 orang	112 orang	100,00%	1.221.461.000	1.144.539.084	93,70%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	13.340.000	13.300.000	99,70%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	17.648.000	17.506.000	99,20%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	2.500.000	2.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	8.308.000	8.166.000	98,29%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.590.000	2.590.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	4.250.000	4.250.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	60.000.000	60.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100,00%	60.000.000	60.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	118.260.000	111.252.608	94,07%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	9.600.000	9.252.608	96,38%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	108.660.000	102.000.000	93,87%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen	100 persen	100,00%	75.410.000	75.381.000	99,96%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	13 unit	13 unit	100,00%	70.306.000	70.277.000	99,96%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	3.104.000	3.104.000	100,00%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	99.267.000	21.225.000	21,38%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	21.225.000	19.383.000	91,32%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	19.383.000	19.383.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100,00%	19.383.000	1.842.000	9,50%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.842.000	1.842.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	1.842.000	33.950.000	1843,11%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	33.957.000	33.950.000	99,98%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	6 lembaga	100,00%	8.800.000	8.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	25.157.000	25.150.000	99,97%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	23.960.000	23.860.000	99,58%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	100,00%	23.960.000	23.860.000	99,58%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	22.000.000	21.900.000	99,55%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.960.000	1.960.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	20.125.000	20.015.000	99,45%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	20.125.000	20.015.000	99,45%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang	50 orang	100,00%	20.125.000	20.015.000	99,45%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Kaligondang	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatkan implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.608.761.000	1.447.834.436	90,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.546.000	4.541.000	99,89%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	3.304.000	3.304.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	1.242.000	1.237.000	99,60%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.382.744.000	1.225.795.850	88,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang	9 orang	100,00%	1.367.094.000	1.210.145.850	88,52%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.170.000	3.170.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12.480.000	12.480.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	720.000	720.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	720.000	720.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	22.529.000	22.529.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.188.000	1.188.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	15.621.000	15.621.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	800.000	800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	840.000	840.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	4.080.000	4.080.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	29.000.000	28.175.000	97,16%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100,00%	22.000.000	21.875.000	99,43%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	7.000.000	6.300.000	90,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	84.606.000	81.482.386	96,31%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	17.632.000	16.269.967	92,28%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	66.974.000	65.212.419	97,37%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	84.616.000	84.591.200	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	11 unit	100,00%	67.216.000	67.201.200	99,98%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	2.800.000	2.790.000	99,64%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	2 gedung	100,00%	14.600.000	14.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	22.625.000	22.625.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,00	3,00	100,00%	21.665.000	21.665.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	21.665.000	21.665.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.5	3,00	85.71%	960.000	960.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	960.000	960.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	50.980.000	50.978.400	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	50.980.000	50.978.400	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 lembaga	12 lembaga	100,00%	9.923.000	9.921.900	99,99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	41.057.000	41.056.500	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	24.630.000	24.630.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100,00%	24.630.000	24.630.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	19.630.000	19.630.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	30.268.000	30.268.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	30.268.000	30.268.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100,00%	30.268.000	30.268.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	9.493.000	9.486.000	99,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	9.493.000	9.486.000	99,93%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	9.243.000	9.236.000	99,92%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pelaksana Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	250.000	250.000	100,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Purbalingga	Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66 persen	69,56 persen	105,39%	10.854.470.000	10.161.303.049	93,61%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelayanan Publik di Kecamatan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.662.000	4.652.000	99,79%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	2.872.000	2.872.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	16 laporan	100,00%	1.790.000	1.780.000	99,44%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	10.586.057.000	9.917.845.691	93,69%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang	84 orang	100,00%	10.558.486.000	9.890.274.691	93,67%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	671.000	671.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	26.900.000	26.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	15.601.000	15.574.600	99,83%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	966.000	966.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	7.000.000	6.998.600	99,98%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	4 laporan	4 laporan	100,00%	3.700.000	3.675.000	99,32%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.935.000	2.935.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	155.770.000	144.398.468	92,70%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	46.110.000	40.738.468	88,35%	Nihil	Nihil
				Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	108.660.000	102.660.000	94,48%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	87.480.000	73.932.290	84,51%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	71.480.000	58.227.290	81,46%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	6.000.000	6.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 laporan	1 laporan	100,00%	10.000.000	9.705.000	97,05%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 laporan	1 laporan	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94	94,16	100,17%	29.530.000	27.525.200	93,21%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	28.600.000	26.595.200	92,99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	28.600.000	26.595.200	92,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16 dokumen	16 dokumen	100,00%	930.000	930.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non- perizinan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	930.000	930.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	35.640.000	35.585.000	99,85%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 kegiatan	9 kegiatan	100,00%	35.640.000	35.585.000	99,85%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 lembaga	9 lembaga	100,00%	13.181.000	13.131.000	99,62%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	22.459.000	22.454.000	99,98%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 laporan	12 laporan	100,00%	36.410.000	35.410.000	97,25%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100,00%	36.410.000	35.410.000	97,25%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	23.500.000	23.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	12.910.000	11.910.000	92,25%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	23.294.000	23.235.500	99,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	23.294.000	23.235.500	99,75%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 laporan	12 laporan	100,00%	23.294.000	23.235.500	99,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Kalimanah	Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	3.797.262.000	3.531.010.095	92,99%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan kalimanah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	6.030.000	6.025.000	99,92%	Nihil	Nihil
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan kalimanah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	5.030.000	5.025.000	99,90%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.526.819.000	3.264.355.434	92,56%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	34 orang	100,00%	3.515.619.000	3.253.155.434	92,53%	Nihil	Nihil
				Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	20 dokumen	20 dokumen	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	20 dokumen	20 dokumen	100,00%	10.000.000	9.685.000	96,85%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	750.000	750.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	5 laporan	100,00%	750.000	750.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	27.574.000	27.049.800	98,10%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	6 paket	6 paket	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 paket	10 paket	100,00%	16.312.000	16.289.800	99,86%	Nihil	Nihil
				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	12 dokumen	0,00	0,00%	500.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	2 laporan	100,00%	6.262.000	6.260.000	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	2.100.000	2.100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	14.000.000	14.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	14.000.000	14.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	135.828.000	132.594.861	97,62%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	24.448.000	22.355.489	91,44%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	109.980.000	108.839.372	98,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	100.261.000	100.235.000	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	11 unit	100,00%	91.000.000	90.999.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	2.100.000	2.075.000	98,81%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	7.161.000	7.161.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	27.620.000	27.620.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	27.620.000	27.620.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatatan Efektefitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	27.620.000	27.620.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	55.988.000	55.983.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des	100 persen	100 persen	100,00%	55.988.000	55.983.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Pertisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 lembaga	17 lembaga	100,00%	20.732.000	20.732.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	35.256.000	35.251.000	99,99%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	34.450.000	33.930.000	98,49%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100,00%	34.450.000	33.930.000	98,49%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	30.220.000	30.220.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.230.000	3.710.000	87,71%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	19.179.000	19.179.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	19.179.000	19.179.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang	50 orang	100,00%	19.179.000	19.179.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	100.000	100.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kecamatan Kutasari	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Sasaran: Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	100.000	100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	100.000	100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	1.613.618.000	1.510.509.598	93,61%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.055.000	3.984.000	98,25%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.912.000	1.898.000	99,27%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	2.143.000	2.086.000	97,34%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.317.502.000	1.220.130.162	92,61%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100,00%	1.289.262.000	1.192.040.162	92,46%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	6.340.000	6.340.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	21.900.000	21.750.000	99,32%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 laporan	12 dokumen	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	19.352.000	19.335.900	99,92%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Kmpnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.000.000	992.000	99,20%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	12.702.000	12.693.900	99,94%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintah an Berbasisi Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.650.000	1.650.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik DaerahnPenunjan g Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	2 unit	100,00%	2.100.000	1.999.000	95,19%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	2.100.000	1.999.000	95,19%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	165.229.000	161.020.536	97,45%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	30.591.000	27.613.851	90,27%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	500.000	500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 laporan	5 laporan	100,00%	134.138.000	132.906.685	99,08%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 unit	37 unit	100,00%	104.480.000	103.140.000	98,72%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100,00%	96.180.000	94.840.000	98,61%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan mesin dan Lainnya	27 unit	27 unit	100,00%	3.000.000	3.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.300.000	5.300.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	8.280.000	8.234.000	99,44%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,3	3,30	100,00%	7.800.000	7.780.000	99,74%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	7.800.000	7.780.000	99,74%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100,00%	480.000	454.000	94,58%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Tekait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	480.000	454.000	94,58%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	40.331.000	39.974.900	99,12%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	40.331.000	39.974.900	99,12%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	13.330.000	13.283.900	99,65%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	27.001.000	26.691.000	98,85%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	33.593.000	33.590.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	33.593.000	33.590.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	25.793.000	25.790.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	7.800.000	7.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	24.561.000	24.551.000	99,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	24.561.000	24.551.000	99,96%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25 orang	25 orang	100,00%	24.561.000	24.551.000	99,96%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	7.350.000	7.250.000	98,64%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	7.350.000	7.250.000	98,64%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi Tata PemerintahannDe sa	14 dokumen	14 dokumen	100,00%	7.350.000	7.250.000	98,64%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Mrebet	Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	1.925.039.000	1.839.307.281	95,55%	Nihil	Nihil
			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.999.000	4.720.850	94,44%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2.999.000	2.773.900	92,49%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Peangkat Daera	4 laporan	4 laporan	100,00%	2.000.000	1.946.950	97,35%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.617.934.000	1.556.923.805	96,23%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100,00%	1.601.764.000	1.541.443.805	96,23%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	500.000	500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	15.670.000	14.980.000	95,60%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	600.000	600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	600.000	600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	12.750.000	12.118.050	95,04%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Kmpnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.000.000	965.000	96,50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	7.894.000	7.753.050	98,21%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.406.000	1.400.000	99,57%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	350.000	350.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.100.000	1.650.000	78,57%	Pengurus barang dan operator Asset 1 orang .jadi honor pengurus barang hanya di realisasikan separohnya saja	
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	2 unit	100,00%	10.760.000	10.760.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.600.000	5.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.160.000	5.160.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	162.218.000	141.220.732	87,06%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	49.338.000	30.212.080	61,23%	Tidak ada, karena di rekening listrik tidak mengisi token setiap bulan dikarenakan paatahun 2024 ada pengisian dari Panwas dan PPK sewaktu ada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.420.000	5.420.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 laporan	5 laporan	100,00%	107.460.000	105.588.652	98,26%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 unit	37 unit	100,00%	115.778.000	112.963.844	97,57%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100,00%	103.000.000	100.346.844	97,42%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan mesin dan Lainnya	27unit	27unit	100,00%	5.018.000	4.890.000	97,45%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	7.760.000	7.727.000	99,57%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	5.688.000	5.687.700	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,3	3,30	100,00%	4.880.000	4.880.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	4.880.000	4.880.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100,00%	808.000	807.700	99,96%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Tekait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	808.000	807.700	99,96%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	41.507.000	41.494.620	99,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	41.507.000	41.494.620	99,97%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	9.801.000	9.800.900	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	31.706.000	31.693.720	99,96%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	34.870.000	34.790.000	99,77%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	34.870.000	34.790.000	99,77%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	24.370.000	24.290.000	99,67%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	10.500.000	10.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	18.467.000	18.206.000	98,59%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	18.467.000	18.206.000	98,59%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25 orang	25 orang	100,00%	18.467.000	18.206.000	98,59%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	5.700.000	4.687.500	82,24%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	5.700.000	4.687.500	82,24%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi Tata PemerintahannDesa	19 dokumen	19 dokumen	100,00%	5.700.000	4.687.500	82,24%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kecamatan Bobotsari	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Sasaran: 1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bobotsari 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan bobotsari	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 persen	100 persen	100,00%	1.452.463.000	1.345.745.702	92,65%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.300.000	1.100.000	84,62%	Harga Pasar Lebih Rendah dari harga RAB/Perencanaan	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	800.000	650.000	81,25%	Harga Pasar Lebih Rendah dari harga RAB/Perencanaan	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	500.000	450.000	90,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.168.482.000	1.082.608.682	92,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8 orang/bulan	8 orang/bulan	100,00%	1.149.122.000	1.065.288.682	92,70%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150 kegiatan	150 dokumen	100,00%	6.014.000	5.980.000	99,43%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	13.346.000	11.340.000	84,97%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	821.000	500.600	60,97%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 orang	1 orang	100,00%	821.000	500.600	60,97%	Honor pengurus barang terealisasi 3 bulan dari perencanaan 4 bulan	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	15.321.000	10.894.850	71,11%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	500.000	480.000	96,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	7.045.000	3.808.850	54,06%	Harga Pasar Lebih Rendah dari harga RAB/Perencanaan	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.950.000	2.400.000	81,36%	Harga Pasar Lebih Rendah dari harga RAB/Perencanaan	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.000.000	1.950.000	97,50%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.826.000	2.256.000	79,83%	Harga Pasar Lebih Rendah dari harga RAB/Perencanaan	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 unit	18 unit	100,00%	1.800.000	1.771.000	98,39%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 buah	18 buah	100,00%	1.800.000	1.771.000	98,39%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	159.267.000	151.697.570	95,25%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100,00%	300.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	9 bulan	75,00%	20.475.000	19.419.970	94,85%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	9 bulan	75,00%	138.492.000	132.277.600	95,51%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 bulan	11 bulan	100,00%	105.472.000	97.173.000	92,13%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 bulan	11 bulan	100,00%	82.000.000	75.543.000	92,13%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan mesin dan Lainnya	14 unit	14 unit	100,00%	3.472.000	3.460.000	99,65%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	20.000.000	18.170.000	90,85%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3	3,00	100,00%	65.558.000	54.164.500	82,62%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	65.558.000	54.044.500	82,44%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	12 dokumen	100,00%	65.219.000	54.044.500	82,87%	Anggaran Sewa alat Musik dan sewa mobil tidak bisa terealisasi secara maksimal	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 jenis	12 jenis	100,00%	339.000	120.000	35,40%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Tekait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	9 dokumen	75,00%	339.000	120.000	35,40%	Harga Pasar Lebih Rendah dari harga RAB/Perencanaan	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	40.230.000	39.530.000	98,26%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 kegiatan	16 kegiatan	100,00%	40.230.000	39.530.000	98,26%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	16 desa	16 desa	100,00%	5.550.000	5.160.000	92,97%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 kegiatan	16 kegiatan	100,00%	34.680.000	34.370.000	99,11%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	26.200.000	26.170.000	99,89%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	6 kegiatan	50,00%	26.200.000	26.170.000	99,89%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	9 dokumen	75,00%	22.200.000	22.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 dokumen	9 dokumen	75,00%	4.000.000	3.970.000	99,25%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12 dokumen	9 dokumen	75,00%	13.140.000	12.934.000	98,43%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	13.140.000	12.934.000	98,43%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	16 orang	16 orang	100,00%	13.140.000	12.934.000	98,43%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16 kegiatan	16 kegiatan	100,00%	3.720.000	2.600.000	69,89%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	3.720.000	2.600.000	69,89%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 kegiatan	16 kegiatan	100,00%	3.720.000	2.600.000	69,89%	Honor Narsum tidak terrealisasi	Nihil
		Kecamatan Karangreja	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Sasaran: 1. Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Karangreja 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Karangreja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.614.098.000	1.456.078.306	90,21%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	7.124.000	7.123.800	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	5.310.000	5.309.800	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	1.814.000	1.814.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.359.710.000	1.217.920.760	89,57%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang	10 orang	100,00%	1.344.860.000	1.204.825.760	89,59%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 dokumen	22 dokumen	100,00%	900.000	895.000	99,44%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	13.950.000	12.200.000	87,46%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.140.000	1.140.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.140.000	1.140.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	22.598.000	22.462.700	99,40%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket	100,00%	1.056.000	1.054.000	99,81%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	13.382.000	13.378.700	99,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	500.000	500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.160.000	3.160.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	3.300.000	3.170.000	96,06%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	72.990.000	59.722.646	81,82%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	16.800.000	15.540.648	92,50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	56.190.000	44.181.998	78,63%	Menggunakan pagu tahun sebelumnya tetapi tahun 2025 ada THL yang resign sehingga anggaran tidak digunakan	Tahun berikutnya anggaran di alihkan ke lain yang penggunaannya lebih banyak
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	125.536.000	122.708.400	97,75%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100,00%	79.000.000	76.172.400	96,42%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	100,00%	7.000.000	7.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	39.536.000	39.536.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	7.340.000	7.340.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	7.020.000	7.020.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26 dokumen	26 dokumen	100,00%	7.020.000	7.020.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16 layanan	16 layanan	100,00%	320.000	320.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 laporan	12 laporan	100,00%	320.000	320.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	18.141.000	18.140.600	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	18.141.000	18.140.600	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	4.191.000	4.190.600	99,99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	13.950.000	13.950.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	32.200.000	32.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	12,00	100,00%	32.200.000	32.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	22.200.000	22.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4 laporan	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	26.000.000	26.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12	12,00	100,00%	26.000.000	26.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 orang	4 orang	100,00%	26.000.000	26.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	50 persen	57 persen	114,00%	3.960.000	3.910.000	98,74%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 desa	7 desa	100,00%	3.960.000	3.910.000	98,74%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.910.000	3.910.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				50.000			Nihil	Nihil
		Kecamatan Karanganyar	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Sasaran: 1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100 persen	91 persen	92%	1.350.275..00	1.235.082.715.	91.47%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	7.302.000	7.302.000	99.99%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	4.712.000	4.711.000	99.98%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100%	2.590.000	2.590.000	100%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 persen	100 persen	100%	1.105.277.000	992.986.386	89.84%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 org/bln	8 org/bln	80%	1.076.632.000	964.431.386	89.58%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	36 dokumen	100%	725.000	725.000	100%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	27.920.000	27.830.000	99.68%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	900.000	900.000	100%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6 laporan	6 laporan	100%	900.000	900.000	100%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	23.916.000	22.696.000	94.90%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bagunan Kantor	12 paket	12 paket	100%	1.400.000	1.393.000	99.50%	Nihil	Nihil
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100%	8.416.000	8.403.000	99.85%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100%	4.800.000	4.800.000	100%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	6.000.000	6.000.000	100%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	3.300.000	2.100.000	63.63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	4 buah	4 buah	100%	2.500.000	2.500.000	100%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 unit	1 unit	100%	2.500.000	2.500.000	100%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	138.880.000	137.239.329	98.82%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	5 laporan	100%	50.000	50.000	100%	Nihil	Nihil
				Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	100%	24.500.000	24.109.800	98.41%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	6.750.000	6.614.000	97.99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	107.580.000	106.465.529	98.96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	100%	71.500.000	71.460.000	99.94%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	11 unit	11 unit	100%	67.000.000	66.965.000	94.95%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 unit	4 unit	100%	2.000.000	1.995.000	99.75%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100%	2.500.000	2.500.000	100%	Nihil	Nihil
				PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 dokumen	12 dokumen	100%	25.505.000	25.502.000	99.99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%	25.505.000	25.502.000	99.99%	Nihil	Nihil
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100%	25.505.000	25.502.000	99.99%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES DAN KELURAHAN	13 lembaga kemasyarakatan	13 lembaga kemasyarakatan	100%	41.600.000	41.578.000	99.95%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	13 lembaga kemasyarakatan	13 lembaga kemasyarakatan	100%	41.600.000	41.578.000	99.95%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	13 Lembaga kemasyarakata n	13 Lembaga kemasyarakata n	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	36.600.000	36.578.000	99.94%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 laporan	12 laporan	100%	41.600.000	41.578.000	99.72%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	12 laporan	100%	41.600.000	41.578.000	99.72%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	5.000.000	5.000.000	100%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100%	36.600.000	36.578.000	97.33%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12 laporan	12 laporan	100 persen	24.975.000	24.916.650	99.77%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 laporan	12 laporan	100 persen	24.975.000	24.916.650	99.77%	Nihil	Nihil
				Pembinaan persatuan dan Kesatuan bangsa	30 orang-	30 Orang	100 persen	24.975.000	24.916.650	99.77%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13 dokumen	13 dokumen	100 persen	375.000	375.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitas rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	13 dokumen	13 dokumen	100 persen	375.000	375.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	13 dokumen	13 dokumen	100 persen	250.000	250.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 dokumen	13 dokumen	100 persen	125.000	125.000	100,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Karangmoncol	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100 persen	93 persen	93,00%	1.520.275.000	1.421.729.019	93,52%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	2.954.000	2.954.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2.154.000	2.154.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	800.000	800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.303.542.000	1.219.945.994	93,59%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang	9 orang	100,00%	1.279.832.000	1.196.977.994	93,53%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11.440.000	10.733.000	93,82%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12.270.000	12.235.000	99,71%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.800.000	1.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.800.000	1.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	98 persen	98,00%	11.407.000	10.505.850	92,10%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.056.000	1.040.000	98,48%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	4.451.000	3.575.850	80,34%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.500.000	3.490.000	99,71%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	27.112.000	26.801.000	98,85%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	100,00%	27.112.000	26.801.000	98,85%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	94.960.000	82.697.357	87,09%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 laporan	9 laporan	100,00%	27.292.000	19.097.357	69,97%	Terdapat Rekening Anggaran kegiatan yg realisasi hanya sesuai dg pemakaian saja,tdk disesuaikan dg indeks rutin bulanan yg terantum dlm DPA/DPPA	Makukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan rencana dan indeks rutin bulanan.
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 laporan	9 laporan	100,00%	67.668.000	63.600.000	93,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	78.500.000	77.024.818	98,12%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	11 unit	100,00%	73.370.000	73.034.818	99,54%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	5.130.000	3.990.000	77,78%	Kurangnya pengetahuan teknis dalam memahami kerusakan peralatan, seperti AC, sehingga berakibat tidak bisa diperbaiki lagi, karena sudah rusak berat	Melakukan pengecekan berkala terhadap peralatan yg mengalami kerusakan, sehingga bisa diketahui jenis kerusakannya, berat atau ringan
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3	3,00	100,00%	61.688.000	61.012.750	98,91%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	61.688.000	61.012.750	98,91%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	61.688.000	61.012.750	98,91%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	32.540.000	28.980.000	89,06%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 lembaga	11 lembaga	100,00%	32.540.000	28.980.000	89,06%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 lembaga	11 lembaga	100,00%	7.640.000	5.340.000	69,90%	realisasi anggaran sewa tenda nihil akibat perubahan asumsi tempat pelaksanaan. Kegiatan yang semula dijadwalkan di tempat sendiri dipindahkan ke lokasi lain, sehingga biaya sewa tidak dapat dibebankan pada pos tersebut	melakukan koordinasi lintas instansi yang lebih intensif dalam tahap perencanaan lokasi kegiatan guna memastikan asumsi anggaran yang disusun selaras dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga meminimalisir adanya anggaran yang tidak terealisasi
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 laporan	10 laporan	100,00%	24.900.000	23.640.000	94,94%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	20.300.000	20.100.000	99,01%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100,00%	20.300.000	20.100.000	99,01%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	17.500.000	17.300.000	98,86%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12	12,00	100,00%	20.440.000	20.440.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	20.440.000	20.440.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40 orang	40 orang	100,00%	20.440.000	20.440.000	100,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Rembang	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Sasaran: 1. Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.778.760.000	1.673.425.014	94,08%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.050.000	5.050.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	3.050.000	3.050.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.479.992.000	1.390.476.784	93,95%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang	11 orang	100,00%	1.462.045.000	1.373.109.784	93,92%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	6.757.000	6.757.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11.190.000	10.610.000	94,82%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.320.000	1.320.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.320.000	1.320.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	30.374.000	30.259.800	99,62%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	13.234.000	13.230.000	99,97%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.190.000	1.080.000	90,76%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	20 laporan	100,00%	13.650.000	13.650.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1.400.000	1.399.800	99,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	10.630.000	10.630.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	10.630.000	10.630.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	134.154.000	118.455.430	88,30%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	20.737.000	20.470.480	98,71%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.617.000	4.570.000	98,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	108.800.000	93.414.950	85,86%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	117.240.000	117.233.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100,00%	92.190.000	92.183.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	4.250.000	4.250.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	20.800.000	20.800.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.120.000	22.364.000	74,25%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 kali	4 kali	100,00%	26.998.000	19.250.000	71,30%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	26.998.000	19.250.000	71,30%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 jenis	2 jenis	100,00%	3.122.000	3.114.000	99,74%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	3.122.000	3.114.000	99,74%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	85,71 persen	85,71%	35.827.000	35.347.000	98,66%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 lembaga	6 lembaga	85,71%	35.827.000	35.347.000	98,66%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	6 lembaga	85,71%	10.101.000	10.091.000	99,90%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	25.726.000	25.256.000	98,17%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	35.556.000	35.510.000	99,87%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	35.556.000	35.510.000	99,87%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	24.300.000	24.300.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	11.256.000	11.210.000	99,59%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	14.000.000	14.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kecamatan Bojongsari	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publi k di kecamatan Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	14.000.000	14.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%	14.000.000	14.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	95,51 persen	95,51%	1.642.093.000	1.549.273.581	94,35%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	98,57 persen	98,57%	3.590.000	3.567.000	99,36%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.590.000	1.582.000	99,50%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2.000.000	1.985.000	99,25%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	100 persen	95,26 persen	95,26%	1.293.556.000	1.219.053.643	94,24%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang	9 orang	100,00%	1.271.206.000	1.198.373.643	94,27%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.910.000	3.900.000	99,74%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	18.440.000	16.780.000	91,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	660.000	660.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	660.000	660.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	17.862.000	18.009.500	100,83%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	10.616.000	10.563.500	99,51%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100,00%	1.000.000	1.216.000	121,60%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.896.000	2.880.000	99,45%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	2.350.000	2.350.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	217.880.000	205.161.093	94,16%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	36.840.000	25.867.205	70,21%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	181.040.000	179.293.888	99,04%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	108.545.000	102.822.345	94,73%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	7 unit	7 unit	100,00%	86.545.000	80.834.345	93,40%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100,00%	10.000.000	9.995.000	99,95%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	100,00%	12.000.000	11.993.000	99,94%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	12.600.000	12.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	11.600.000	11.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	11.600.000	11.600.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	34.360.000	34.313.000	99,86%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 kegiatan	5 kegiatan	100,00%	34.360.000	34.313.000	99,86%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	5 lembaga	100,00%	13.280.000	13.269.000	99,92%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporam	100,00%	21.080.000	21.044.000	99,83%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	32.750.000	32.734.000	99,95%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 laporan	100,00%	32.750.000	32.734.000	99,95%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 laporan	12 laporam	100,00%	18.500.000	18.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	14.250.000	14.234.000	99,89%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	99,90 persen	99,90%	30.442.000	30.402.000	99,87%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	30.442.000	30.402.000	99,87%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%	30.442.000	30.402.000	99,87%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	7.190.000	7.190.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	7.190.000	7.190.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	7.190.000	7.190.000	100,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Padamara	Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	2.305.376.000	2.159.322.495	93,66%	Nihil	Nihil
			Sasaran 1. Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	23,67 persen	23,67%	9.380.000	2.220.000	23,67%	Nihil	Nihil
			2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0,6 dokumen	25,96%	5.700.000	1.480.000	25,96%	Kurangnya pemahaman secara utuh dan menyeluruh tentang mekanisme penggunaan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	1,20 dokumen	20,11%	3.680.000	740.000	20,11%	Kurangnya pemahaman secara utuh dan menyeluruh tentang mekanisme penggunaan	
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.998.377.000	1.867.374.940	93,44%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	14 orang	100,00%	1.979.632.000	1.849.574.940	93,43%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	0	0	#DIV/0!	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	18.745.000	17.800.000	94,96%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.140.000	1.140.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.140.000	1.140.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	21.902.000	21.734.700	99,24%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.500.000	1.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	12.768.000	12.672.800	99,25%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0	0	#DIV/0!	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.634.000	2.561.900	97,26%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	165.477.000	163.463.655	98,78%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	0	0	#DIV/0!	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	25.550.000	23.873.655	93,44%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	0	0	#DIV/0!	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	139.927.000	139.590.000	99,76%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	107.700.000	101.989.200	94,70%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100,00%	95.500.000	89.921.200	94,16%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100,00%	7.200.000	7.068.000	98,17%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	57.729.000	55.729.000	96,54%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	57.729.000	55.729.000	96,54%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	57.729.000	55.729.000	96,54%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	41.549.000	41.172.000	99,09%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	41.549.000	41.172.000	99,09%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	19.024.000	18.849.000	99,08%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	22.525.000	22.323.000	99,10%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	24.200.000	24.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100,00%	24.200.000	24.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	23.200.000	23.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	25.000.000	24.700.000	98,80%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	25.000.000	24.700.000	98,80%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80 orang	80 orang	100,00%	25.000.000	24.700.000	98,80%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kecamatan Pengadegan	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publi k di kecamatan Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 desa	13 desa	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.918.783.000	1.798.479.066	93,73%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	6.533.000	6.491.000	99,36%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	3.698.000	3.661.000	99,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	2.835.000	2.830.000	99,82%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.648.476.000	1.534.835.338	93,11%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100,00%	1.634.544.000	1.520.935.338	93,05%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.907.000	1.875.000	98,32%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12.025.000	12.025.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.350.000	1.350.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00%	1.350.000	1.350.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	17.447.000	17.387.000	99,66%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	2.284.000	2.283.500	99,98%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket	100,00%	7.218.000	7.194.500	99,67%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket	100,00%	430.000	400.000	93,02%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.715.000	3.709.000	99,84%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	20.700.000	20.700.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100,00%	20.700.000	20.700.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	130.092.000	123.535.728	94,96%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	19.032.000	18.601.658	97,74%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	111.060.000	104.934.070	94,48%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	94.185.000	94.180.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	100,00%	76.648.000	76.643.000	99,99%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100,00%	2.500.000	2.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	15.037.000	15.037.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.5	2.77	79.14%	49.454.000	49.365.000	99,82%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.5	2.77	79.14%	48.639.000	48.550.000	99,82%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	48.639.000	48.550.000	99,82%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.5			815.000	815.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	815.000	815.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	29.329.000	29.328.800	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	100,00%	29.329.000	29.328.800	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	13.494.000	13.493.800	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	15.835.000	15.835.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 laporan	12 laporan	100,00%	26.934.000	26.933.500	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100,00%	26.934.000	26.933.500	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	22.048.000	22.047.500	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.886.000	4.886.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	4.550.000	4.550.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	4.550.000	4.550.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 persen	100 persen	100,00%	4.550.000	4.550.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45 persen	45 persen	100,00%	6.150.000	5.900.000	95,93%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 persen	45 persen	100,00%	6.150.000	5.900.000	95,93%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	6.150.000	5.900.000	95,93%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Karangjambu	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayananpubli k di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.721.832.000	1.664.801.028	96,69%	Nihil	Nihil
			Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	5.324.000	3.940.600	74,02%	Nihil	Nihil
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	3.030.000	2.065.100	68,16%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	2.294.000	1.875.500	81,76%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.493.586	1.442.379.802	96571,59%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang	11 orang	100,00%	1.476.206	1.425.229.802	96546,81%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	600.000	600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	16.780.000	16.550.000	98,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	22.965.000	22.086.150	96,17%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	1.500.000	1.499.800	99,99%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	100,00%	15.765.000	15.586.350	98,87%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	200.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	3.000.000	2.900.000	96,67%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.500.000	2.100.000	84,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	500.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	500.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	123.760.000	121.915.676	98,51%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%	11.500.000	10.540.135	91,65%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	112.260.000	111.375.541	99,21%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	74.797.000	73.578.800	98,37%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	8 unit	100,00%	67.429.000	66.508.800	98,64%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100,00%	2.100.000	1.970.000	93,81%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100,00%	5.268.000	5.100.000	96,81%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.9			45.679.000	45.475.200	99,55%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	45.034.000	44.867.600	99,63%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	45.034.000	44.867.600	99,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16 jenis	16 jenis	100,00%	645.000	607.600	94,20%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	645.000	607.600	94,20%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	32.919.000	32.710.600	99,37%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	32.919.000	32.710.600	99,37%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 desa	6 desa	100,00%	8.185.000	8.000.000	97,74%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	24.734.000	24.710.600	99,91%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	24.600.000	24.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	24.600.000	24.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	22.000.000	22.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 laporan	6 laporan	100,00%	2.600.000	2.600.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	31.571.000	31.391.000	99,43%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	31.571.000	31.391.000	99,43%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 orang	500 orang	100,00%	31.571.000	31.391.000	99,43%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50 persen	50 persen	100,00%	300.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	75 persen	75,00%	300.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	0	0	0,00%	300.000	0	0,00%	Nihil	Nihil
		Kecamatan Kertanegara	Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publi k di kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 persen	100 persen	100,00%	1.334.038.000	1.221.199.087	91,54%	Nihil	Nihil
			Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan publik di	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	3.050.000	3.039.700	99,66%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2.030.000	2.030.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1.020.000	1.009.700	98,99%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	1.118.395.000	1.016.650.127	90,90%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 orang	7 orang	100,00%	1.092.335.000	995.410.127	91,13%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51 dokumen	51 dokumen	100,00%	3.710.000	3.635.000	97,98%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70 dokumen	99 dokumen	141,43%	22.350.000	17.605.000	78,77%	Berkurangnya Jumlah PPK	Anggaran disesuaikan
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	900.000	900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	100.000	100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 orang	7 orang	100,00%	100.000	100.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	22.288.000	20.752.800	93,11%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	10.188.000	9.852.800	96,71%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00%	1.600.000	1.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	3.300.000	2.100.000	63,64%	Berkurangnya Operator	Anggaran disesuaikan
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	10.508.000	10.478.000	99,71%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100,00%	10.508.000	10.478.000	99,71%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	88.717.000	83.656.160	94,30%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%	19.321.000	14.813.809	76,67%	Dibelanjakan sesuai kebutuhan	Anggaran disesuaikan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	69.396.000	68.842.351	99,20%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	90.000.000	85.622.300	95,14%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	9 unit	100,00%	80.000.000	75.631.300	94,54%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	25 unit	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.000.000	4.991.000	99,82%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen	100,00%	12.494.000	12.493.800	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00%	12.050.000	12.050.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	12.050.000	12.050.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100,00%	444.000	443.800	99,95%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 laporan	12 laporan	100,00%	444.000	443.800	99,95%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	100 persen	100,00%	45.400.000	45.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 desa	11 desa	100,00%	45.400.000	45.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 lembaga	77 lembaga	100,00%	5.400.000	5.400.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	40.000.000	40.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	26.200.000	26.200.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	26.200.000	26.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	22.200.000	22.200.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 persen	100 persen	100,00%	26.733.000	25.933.000	97,01%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	26.733.000	25.933.000	97,01%	Nihil	Nihil
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 orang	200 orang	100,00%	26.733.000	25.933.000	97,01%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	100,00%	3.500.000	3.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 desa	11 desa	100,00%	3.500.000	3.500.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	11 dokumen	100,00%	3.500.000	3.500.000	100,00%	Nihil	Nihil
5	Unsur Pemerintahan Umum	Bakesbangpol	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Sasaran : 1. Menurunnya potensi konflik 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen	100 %	2.484.971.000	2.244.288.771	90,31%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 %	3.245.000	3.153.000	97,16%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	1.417.000	1.402.000	98,94%	Nihil	Nihil
				Evalulasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100,00%	1.828.000	1.751.000	95,79%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen		1.911.838.000	1.715.365.094	89,72%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100,00%	1.822.238.000	1.634.126.491	89,68%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	24 dokumen	100,00%	53.000.000	52.738.603	99,51%	Nihil	Nihil
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	36.600.000	28.500.000	77,87%	Kurangnya jumlah ASN yang telah memenuhi syarat administratif sebagai PPTK dikarenakan memasuki masa pension	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 %	3.900.000	3.900.000	100,00%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 %	5.887.000	2.218.000	37,68%	Nihil	Nihil
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	4 orang	100,00%	5.887.000	2.218.000	37,68%	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang telah direncanakan untuk diikuti yaitu Diklat Intelijen yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025 Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga tidak mendapatkan kuota, sehingga hanya terealisasi untuk satu diklat yaitu Diklatpim IV	Pemenuhan kewajiban diklat 20JP bagi ASN dipenuhi dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara daring melalui laman ASN Berpijar
				Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 %	59.903.000	50.522.574	84,34%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00%	1.200.000	1.196.300	99,69%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	35.803.000	29.382.174	82,07%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.200.000	1.080.000	90,00%	Nihil	Nihil
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	10.000.000	9.938.800	99,39%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00%	8.100.000	5.325.300	65,74%	Nihil	Nihil
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100 %	45.330.000	45.215.000	99,75%	Nihil	Nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	7 unit	100,00%	45.330.000	45.215.000	99,75%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 %	271.868.000	247.692.803	91,11%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00%	200.000	0	0,00%	Kegiatan surat menyusurat dilaksanakan secara elektronik	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100,00%	51.120.000	32.933.234	64,42%	Realisasi belanja jasa komunikasi, air, dan listrik berdasarkan besaran jumlah tagihan yang disampaikan oleh penyedia jasa	Nihil
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	12.000.000	9.300.000	77,50%	Realisasi belanja jasa komunikasi, air, dan listrik berdasarkan besaran jumlah tagihan yang disampaikan oleh penyedia jasa	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%	208.548.000	205.459.569	98,52%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 %	183.000.000	176.222.300	96,30%	Nihil	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	15 unit	100,00%	170.000.000	163.492.300	96,17%	Nihil	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit	100,00%	8.000.000	7.900.000	98,75%	Nihil	Nihil
				Pemerlihaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00%	5.000.000	4.830.000	96,60%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,4 persen	0,59 persen	147,50%	527.641.000	508.596.581	96,39%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	527.641.000	508.596.581	96,39%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	1.080.000	0	0,00%	Adanya efisensi karena Program dan kegiatan FPK bersinggungan dengan program dan kegiatan forum lainnya seperti FKDM, FKUB, dan Timdu Penanganan Konflik Sosial	pPnyelenggaraan rapat dengan pihak terkait digabungkan dengan kegiatan rapat koordinasi lainnya, sehingga terdapat efisiensi anggaran
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 orang	4231 orang	617,29%	76.900.000	75.500.000	98,18%	Pelampauan capaian kinerja karena ketersediaan anggaran sosialisasi wawasan kebangsaan terbatas hanya dapat memenuhi 60% dari target yang ditentukan, sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga peserta melebihi target.	Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan menengah, antusiasme Lembaga Pendidikan dalam mendukung Pendidikan wawasan kebangsaan sangat tinggi, sejalan dengan project P5 yang merupakan kurikulum sekolah, maka kegiatan dilaksanakan secara hybrid (darig dan luring)
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.480.000	2.400.000	96,77%	Nihil	Nihil
				Pembentukan PASKIBRAKA	31 orang	31 orang	100,00%	447.181.000	430.696.581	96,31%	Nihil	Penyelenggaraan sosialisasi wawasan kebangsaan diadakan secara hybrid (luring dan daring)

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,64 persen	0,65 persen	101,56%	2.137.336.000	2.129.735.104	99,64%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.137.336.000	2.129.735.104	99,64%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 orang	27 orang	100,00%	2.085.286.000	2.085.285.104	100,00%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	204 orang	205 orang	100,49%	40.700.000	33.100.000	81,33%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	11.350.000	11.350.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	26,95 persen	27,03 persen	100,30%	680.642.000	657.732.800	96,63%	Nihil	Nihil
				Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	680.642.000	657.732.800	96,63%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	183.600.000	175.582.800	95,63%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 orang	1050 orang	105,00%	494.792.000	482.150.000	97,44%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	2.250.000	0	0,00%	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan ini, tidak terserapnya anggaran merupakan efisiensi perjalanan dinas dalam daerah	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	900 orang	3200 orang	355,56%	164.040.000	160.770.000	98,01%	Ketersediaan anggaran sosialisasi P4GN terbatas hanya dapat memenuhi 30% dari target yang ditentukan	Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di SMPN 1 Rembang Kecamatan Rembang, MTs Maarif 2 Karangklesem Kecamatan Kutasari, MTs NU Maarif Panicam Kecamatan Kemangkong, dan SMPN 2 Karangreja Kecamatan Karangreja, dengan SMP dan MTs lainnya se-Kabupaten Purbalingga mengikuti secara daring
				Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	164.040.000	160.770.000	98,01%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	7.690.000	6.970.000	90,64%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	3200 orang	355,56%	151.600.000	151.400.000	99,87%	Ketersediaan anggaran sosialisasi P4GN terbatas hanya dapat memenuhi 30% dari target yang ditentukan	Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di SMPN 1 Rembang Kecamatan Rembang, MTs Maarif 2 Karangklesem Kecamatan Kutasari, MTs NU Maarif Panicam Kecamatan Kemangkon, dan SMPN 2 Karangreja Kecamatan Karangreja, dengan SMP dan MTs lainnya se-Kabupaten Purbalingga mengikuti secara daring
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 orang	20 orang	100,00%	3.750.000	1.400.000	37,33%	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan ini, tidak terserapnya anggaran merupakan efisiensi makan minum rapat	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	Nihil	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	35 potensi	40 potensi	114,29%	662.720.000	610.949.000	92,19%	Informssi terkait potensi konflik di wilayah Kabupaten Purbalingga seringkali tidak tersampaikan ke pihak berwenang, dan peran serta masyarakat untuk tanggap terhadap potensi konflik masih rendah, sehingga potensi konflik tidak dapat ditangani sejak dini, dan dapat berkembang menjadi konflik	Bakesbangpol berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait dari aparat intel TNI/Polri, BIN, Pemerintahan Kecamatan dan Desa, organisasi kemasyarakatan, FKDM, FPK, FKUB, serta mengembangkan inovasi AWASDINDA, Agen Kewaspadaan Dini untuk mendeteksi potensi konflik dan cegah dini konflik sosial di Masyarakat dan melaksanakan sosialisasi penanganan dan cegah dini konflik

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 laporan	12 laporan	100,00%	662.720.000	610.949.000	92,19%	Nihil	Nihil
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	359.400.000	329.374.000	91,65%	Nihil	Nihil

No	Urusan	Unit Kerja/ SKPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Keterangan (Upaya Mengatasi/ Penjelasan)
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 orang	12 orang	100,00%	229.670.000	212.765.000	92,64%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	9 laporan	75,00%	58.650.000	54.360.000	92,69%	Nihil	Nihil
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	15.000.000	14.450.000	96,33%	Nihil	Nihil



LAMPIRAN 3.1.5

Pengukuran Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2025



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	4	325,96%	81,49%	Tinggi
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	99,04%	99,04%	Sangat Tinggi
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	700%	100%	Sangat Tinggi
1.01.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	394%	98,46%	Sangat Tinggi
1.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
1.01.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	2	203,92%	101,96%	Sangat Tinggi
1.01.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	104,86%	104,86%	Sangat Tinggi
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	209,01%	104,50%	Sangat Tinggi
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	500,00%	500,00%	Sangat Tinggi
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	114,9%	114,9%	Sangat Tinggi
1.03.5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	250,00%	250,00%	Sangat Tinggi
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	1	150,63%	150,63%	Sangat Tinggi
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	98,73%	98,73%	Sangat Tinggi
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	1	81,60%	81,60%	Tinggi
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	1	116,71%	116,71%	Sangat Tinggi



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	500%	83,33%	Tinggi
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	1	103%	103,36%	Sangat Tinggi
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	100%	100,12%	Sangat Tinggi
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	95,41%	95,41%	Sangat Tinggi
1.05	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	184%	92,08%	Sangat Tinggi
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1	102%	102,22%	Sangat Tinggi
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	1	124%	124,19%	Sangat Tinggi
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	98,73%	98,73%	Sangat Tinggi
1.06.06	Program Penanganan Bencana	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	51%	50,62%	Sangat Rendah
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	139%	138,78%	Sangat Tinggi
2.07.05	Program Hubungan Industrial	1	100%	100,32%	Sangat Tinggi
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2	151,59%	75,80%	Sedang
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	59%	59,26%	Tinggi
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1	99%	99,41%	Sangat Tinggi
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	105%	104,72%	Sangat Tinggi
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	220%	220,22%	Sangat Tinggi
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	74%	74,31%	Sedang
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	1	11000%	11000,00%	Sangat Tinggi
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	0%	0,00%	Sangat Rendah
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	124%	124,00%	Sangat Tinggi
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	94%	93,61%	Sangat Tinggi
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	116%	115,57%	Sangat Tinggi
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	1	100%	99,99%	Sangat Tinggi
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	3	294%	97,99%	Sangat Tinggi
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	2	201%	100,34%	Sangat Tinggi
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	103%	103,06%	Sangat Tinggi
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
2.13.03	Program Penataan Desa	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	93%	93,33%	Sangat Tinggi
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	85%	85,36%	Tinggi
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2	170%	84,95%	Tinggi
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	175%	87,72%	Tinggi
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	488%	81,37%	Tinggi
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2	179%	89,59%	Tinggi
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	592%	98,61%	Sangat Tinggi
2.06.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	104%	103,97%	Sangat Tinggi
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	100%	100,22%	Sangat Tinggi



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	103%	103,23%	Sangat Tinggi
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	102%	101,97%	Sangat Tinggi
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1	84%	84,00%	Tinggi
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	1	147%	146,95%	Sangat Tinggi
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	33%	33,30%	Sangat Rendah
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	81%	80,93%	Tinggi
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	100%	100,26%	Sangat Tinggi
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	63%	63,15%	Rendah
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1	84%	84,04%	Tinggi
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	126%	125,54%	Sangat Tinggi
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1	103%	102,52%	Sangat Tinggi
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1	121%	121,43%	Sangat Tinggi
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	1	76%	75,90%	Sedang
2.24.02	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	100%	99,77%	Sangat Tinggi
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	92%	92,34%	Sangat Tinggi
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	101%	101,47%	Sangat Tinggi



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	1	102%	101,99%	Sangat Tinggi
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	134%	134,48%	Sangat Tinggi
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	106%	105,64%	Sangat Tinggi
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	200%	200,08%	Sangat Tinggi
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	97%	96,94%	Sangat Tinggi
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1	97%	97,05%	Sangat Tinggi
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.20.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	1	101%	100,87%	Sangat Tinggi



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1	172%	172,41%	Sangat Tinggi
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	124%	124,00%	Sangat Tinggi
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3.32	URUSAN TRANSMIGRASI				
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	0%	0,00%	Sangat Rendah
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	Sekretariat Daerah				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10	1005%	100,54%	Sangat Tinggi
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	282%	94,01%	Sangat Tinggi
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	3	512%	170,70%	Sangat Tinggi
4.02	SEKRETARIAT DPRD				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	757%	108,17%	Sangat Tinggi
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2	200%	100,00%	Sangat Tinggi
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01	PERENCANAAN				



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	293%	97,67%	Sangat Tinggi
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	305%	101,64%	Sangat Tinggi
5.02	KEUANGAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4	400%	100,01%	Sangat Tinggi
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2	1140%	569,89%	Sangat Tinggi
5.03	KEPEGAWAIAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	4	467%	116,70%	Sangat Tinggi
5.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.05.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi
8. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				



No	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUMLAH CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	99%	99,40%	Sangat Tinggi
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	191%	95,65%	Sangat Tinggi
9. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	600%	100,00%	Sangat Tinggi
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	146%	146,08%	Sangat Tinggi
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1	18%	18,16%	Sangat Rendah
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	100%	100,31%	Sangat Tinggi
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	103%	102,87%	Sangat Tinggi
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	53%	52,63%	Rendah
10. UNSUR KEWILAYAHAN (REKAP KECAMATAN)					

